

ISSN 1978-5003
Terakreditasi LIPI
No. 734/AU4/P2MI-LIPI/04/2016

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA



Vol. 22 No. 2 (Desember 2018)

Pengaruh Industri Media Nasional Terhadap *Media Warfare*

Bima Septiantoro, Rudy Agus Gemilang Gultom, dan Amarulla Octavian

Pola Komunikasi Siswa Tunarungu di Sekolah

Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura

Bambang Mudjiyanto

Ancaman Privasi dan *Data Mining* di Era Digital: Analisis

Meta-Sintesis pada *Social Networking Sites* (SNS)

Vannyora Okditazeini dan Irwansyah

**Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk
Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme**

Djoko Waluyo

Persepsi Aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap Kegunaan dan

Kemudahan Penggunaan Media Pengaduan Berbasis Aplikasi

Dede Mahmudah

**Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah
Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada**

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal,

Provinsi Sumatera Utara)

Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih

Komodifikasi “Popularitas Selebritis” untuk Mendulang Suara

Pemilu Legislatif 2019

Rieka Mustika dan S. Arifianto

DITERBITKAN OLEH :

BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA

ISSN : 1978-5003 e-ISSN: 2407-6015
Terakreditasi LIPI No. 734/AU4/P2MI-LIPI/04/2016

Penanggung Jawab :

Drs. Parulian Sitompul, M.A.
(Kepala BPSDMP Kominfo Jakarta)

Ketua Dewan Penyunting :

Marudur P. Damanik, S.T., M.Eng. (Teknologi Informasi – BPSDMP Kominfo Jakarta)

Anggota Dewan Penyunting :

Drs. Baso Saleh, M.Ikom. (Komunikasi – Puslitbang APTIKA & IKP Kemkominfo)

Dede Mahmudah, S.Pd., M.Si. (Komunikasi – BPSDMP Kominfo Jakarta)

Kautsarina, M.T.I. (Teknologi Informasi – Puslitbang SDP3I Kemkominfo)

Karman, M.Si. (Komunikasi – Puslitbang APTIKA & IKP Kemkominfo)

Ari Cahyo Nugroho, S.Sos. (Komunikasi – BPSDMP Kominfo Jakarta)

Penyunting Pelaksana/Staf Dewan Penyunting :

Drs. H. Abdul Ghofar, M.Pd.
Bambang Sunarwan, S.H.

Desain Grafis/Setting

Priska Apnitami, S.T.

Sekretariat/Administrasi :

Felix Tawaang, S.H.

Mitra Bestari:

Prof. (Ris) Dr. Gati Gayatri, M.A., APU (Ilmu Komunikasi, Badan Litbang SDM Kemkominfo)

Prof. Dr. Ing. Kalamullah Ramli, M. Eng. (Ilmu Komputer, Universitas Indonesia)

Dr. Udi Rusadi, MS (Ilmu Komunikasi, IISIP Jakarta)

Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom (Teknologi Informasi, Badan Litbang SDM Kemkominfo)

Dr. Yuhefizar, M.Kom, IPM. (Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang)

Ir. Dana Indra Sensuse, MLIS, Ph.D. (Ilmu Komputer, Universitas Indonesia)

Dr. Halomoan Harahap, M.Si (Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul Jakarta)

Drs. M. Jamiluddin Ritonga, MS (Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul Jakarta)

Eko Nugroho, S.Sos, M.Si (Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Jakarta)

Alamat Redaksi :

Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Jakarta
Jalan Pegangsaan Timur No. 19-B, Jakarta 10320
Telp/Fax : (021) 31922337 - Email: jurnal.bppki.jkt@mail.kominfo.go.id

Terbit secara online dengan e-ISSN 2407-6015
Website: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jksm>

Terindeks oleh:



Google Scholar 

JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA

Vol. 22 No. 2 (Desember 2018)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	iii
Lembar Abstrak	v
Pengaruh Industri Media Nasional Terhadap <i>Media Warfare</i> Bima Septiantoro, Rudy Agus Gemilang Gultom, dan Amarulla Octavian	89 - 108
Ancaman Privasi dan <i>Data Mining</i> di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis pada <i>Social Networking Sites</i> (SNS) Vannyora Okditazeini dan Irwansyah	109 - 122
Persepsi Aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan Media Pengaduan Berbasis Aplikasi Dede Mahmudah	123 - 138
Komodifikasi Popularitas Selebritis untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019 Rieka Mustika dan S. Arifianto	139 - 150
Pola Komunikasi Siswa Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura Bambang Mudjiyanto	151 - 166
Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme Djoko Waluyo	167 - 184

**Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju
Pengembangan *Smart Province* (Studi pada Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)**

Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih 185 - 196

DARI REDAKSI

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Jurnal Studi Komunikasi dan Media (JSKM) kembali terbit dengan Volume 22 Nomor 2 Periode Desember 2018. Terbitnya Jurnal ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menuangkan hasil karya tulis dari berbagai pihak yang terkait dengan topik komunikasi serta teknologi informasi. Dalam edisi Volume 22 Nomor 2 periode Desember 2018 ini berisi 7 tulisan yang disajikan oleh penulis dari berbagai instansi. Tulisan yang mengawali JSKM edisi kali ini berjudul “Pengaruh Industri Media Nasional Terhadap *Media Warfare*” yang ditulis oleh Bima Septiantoro, Rudy Agus Gemilang Gultom, dan Amarulla Octavian dari Universitas Pertahanan. Tulisan berikutnya disusun oleh Vannyora Okditazeini dan Irwansyah dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tulisannya diberi judul “Ancaman Privasi dan *Data Mining* di Era Digital: Analisis Meta-Sintesis pada *Social Networking Sites* (SNS)”. Tulisan ketiga yang terbit dalam edisi ini berjudul “Persepsi Aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan Media Pengaduan Berbasis Aplikasi”, yang disusun oleh Dede Mahmudah, Peneliti Muda dari BPSDMP Kominfo Jakarta.

Pada terbitan kali ini, tulisan dari Rieka Mustika dan S. Arifianto dari Puslitbang APTIKA dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi tulisan keempat yang dimuat dalam JSKM. Tulisannya berjudul “Komodifikasi Popularitas Selebritis untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019”. Tulisan Bambang Mudjiyanto, Peneliti Utama dari Puslitbang Aptika IKP Kementerian Kominfo, menjadi tulisan kelima yang terbit dalam JSKM edisi ini. Tulisannya diberikan judul “Pola Komunikasi Siswa Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura”. Djoko Waluyo dari Puslitbang Aptika IKP Kementerian Kominfo menjadi penulis keenam dengan judul tulisan “Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme”. Terakhir, Marudur Pandapotan Damanik dan Erisva Hakiki Purwaningsih menjadi penutup dalam JSKM edisi volume 22 No.2 periode Desember 2018 dengan judul tulisan “Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan *Smart Province* (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)”.

Melalui kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan hingga terbitnya Jurnal Studi Komunikasi dan Media (JSKM) Volume 22 Nomor 2 Periode Desember 2018 ini. Besar harapan kami, tulisan-tulisan yang diterbitkan dapat menambah wawasan pada bidang komunikasi dan teknologi informasi serta memberikan manfaat bagi para pembaca.

Tim Redaksi

**Bima Septiantoro, Rudy Agus Gemilang Gultom,
Amarulla Octavian**

**THE INFLUENCE OF NATIONAL MEDIA
INDUSTRY TOWARD MEDIA WARFARE**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 89-108

ABSTRACT

The difficulty of obtaining valid information that supported by high number of fake news cases impact on the potential threats of media warfare. Currently, the form of media warfare has been evident by Indonesian society and government. The research aims to analyze perspective about the influence of national media industry in media warfare. This research used qualitative phenomenology that used to see perspective about media warfare or resource experience which is stakeholders of media industry. Then, framework analysis that called hierarchy of influences used to analyse the data. The results of this study show the perspective of stakeholders which view that social system is being influenced by the arrival of new media industry and foreign media industry, while the lateness of extramedia to structure the regulation will affect negatively on the environment. This environment causes internal media organizations, the needs of media routines, and individual media quality to be affected as well. In media warfare phenomenon, the national media industry must be aware of the interests of internal and external stakeholders and meanwhile the internal and external stakeholders must also be able to coordinate to develop regulations so that the media business can be stable and improve public knowledge.

Keywords: Media Industry, Media Warfare, Hierarchy of Influences

studies were conducted to find data relevant to the issue of privacy threats and data mining on the SNS. The conceptual elaboration results found that the threat of privacy and data mining on SNS can be categorized into three things: threats of multimedia content, traditional threats, and social threats. Each category is clustered into several types of threats. The authors identify in addition to utilizing the privacy features that have been provided by the SNS site, the user must also as early as possible literated theirselves to distinguish information and secrets. Users should be aware in selecting what content should be disseminated in the SNS and which are not.

Keywords: Privacy, Data Mining, SNS, Big Data

Dede Mahmudah

**THE PERCEPTION OF STAFF MEMBERS OF
LOCAL GOVERNMENT OF JAMBI ON THE USE
AND THE EASE OF APPLICATION-BASED
COMPLAINT MEDIA**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 123-138

ABSTRACT

The research is about how the staff members of Local District government of Jambi perception on the usage and the ease of application-based complain media. Therefore, it is necessary to really observe the usage of this application from the staff's side because they receive inputs from the society. This research is to get the most accurate picture of the staff's perception on the usage and the ease of application-based complain media using Technology Acceptance Model (TAM) analysis. With quantitative approach and questionnaire instrument, the descriptive analysis in this research will present data in tables in averages. The respondents of this research are administration staff or users of SiKesal application in each work unit. The questionnaire completion is done in March 2018 and data verification is done until April 2018. From the statistic descriptive counting to 102 respondents, it is known that 100 respondents have used SiKesal application. The Mean value and the Deviation Standard for respondents' perception on the use of the application (perceived usefulness) are each 3,89 and 0,620. We can conclude that generally the respondents receive the SiKesal application and reap the benefits of using the application. The Mean value and the Deviation Standard for the users perception on the ease of using new information (perceived ease of use) are each 3,88 and 0,65. We can conclude that the respondents generally

Vannyora Okditazeini, Irwansyah

**THREAT ON PRIVACY AND DATA MINING IN
DIGITAL ERA: A META-SYNTHESIS ANALYSIS ON
SOCIAL NETWORKING SITES (SNS)**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 109-122

ABSTRACT

This paper will elaborate how the threats to privacy and data mining on SNS (Social Networking Sites / Online Social Networking). By first exposing the concept of privacy and data mining itself in the big data industry nowadays, the authors offer a meta-synthesis analysis to conduct the research. Various references and literature

receive the application and have the perception that the application is easy to use.

Keywords: Application, Complain, TAM

Rieka Mustika, S. Arifianto

"SELEBRITY POPULARITY" COMMODIFICATION TO COLLECT 2019 LEGISLATIVE ELECTION VOICE

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 139-150

ABSTRACT

This article highlights the recruitment model of celebrity professions, becoming legislative candidates in the Legislative Election, 2019. Where the emphasis is not on the professionalism of the militant political ideology, but on the choice of the celebrity's popularity. Secondary data is taken from literature study, media, and other related documents. The discussion uses the concept of commodification of media (Mosco, 2009) (Mosco, 1996). The results of the discussion and analysis show that when the transformation of celebrity popularity is exchanged with political values it does not run linearly. The phenomenon of the entry of celebrity professions into politics indicates that, in addition to the weak regeneration process in every political organization, the commodification of the value of celebrity fame into practical political values has taken place theoretically, but substantially it had not a positive impact on the constituent communities it represents.

Keywords: Celebrity Popularity, Political Commodification, Impact on Constituents

Bambang Mudjiyanto

COMMUNICATION PATTERNS FOR DEAF STUDENTS IN THE STATE EXTRA SCHOOL PART B, JAYAPURA CITY

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 151-166

ABSTRACT

The deafability students related to individual hearing conditions, namely the inability of students to capture verbal communication or other sounds that are adjusted to a certain frequency and intensity. These individuals are classified according to the category of deafness. Certain requirements in communication and extraordinary education are very important for every deaf student. This research use qualitative methods with descriptive types. The type of descriptive research is used as a procedure to present problem solving by explaining the state of the object under study. Individual research subjects, with key informants then the following informants are drawn through snowball sampling. Field data collection takes place from 30 July 2018 to 3 August 2018, at the State Special School Part B Jayapura City, Abepura Raya Street, Wai Mhorock Village, Abepura District, Jayapura City, Papua Province. The communication process of deaf students requires special services and education. The pattern of total communication and symbolic interaction

that is combined that occurs supports the effectiveness of communication between the deaf, the teacher and the environment. The use of cellphones or computers connected to the internet makes interaction and communication easier. The quality empowerment of learning for deaf students is necessary for facilities and infrastructures that are specific to each student B, such as spaces for communication construction and perceptions of rhythm sounds, spaces for sound perception and skill of talk. Hard skill debriefing such as mastery of communication and information technology, technical skills in accordance with interests and talents related to the field of knowledge and soft skills of communication skills with others, including with themselves.

Keywords: Communication Patterns, Deafability

Djoko Waluyo

THE REVIEW OF JOURNALIST COMPETENCY STANDARDS IN ORDER TO INCREASE MEDIA CAPACITY AND PROFESSIONALISM

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Page 167-184

ABSTRACT

This article examines the review of journalist competency standards for increasing media capacity and journalist professionalism. Journalists who are in journalism activities are required to constantly improve their knowledge, skills and quality of work. The Press Council has compiled journalist certification levels that are useful to improve media capacity and the quality of journalist journalism. All journalists are expected to be able to undergo a journalist certification process in stages, thus obtaining certification of young journalists, middle journalists and key journalists. The benefits gained, the quality of journalists guarantees more credibility, media capacity and media reputation. Qualitative research approach with case study methods, data collection with interviews, observation, and documentation sources. The analysis technique is carried out qualitatively-descriptive. In conclusion, the certification process through journalist competency standards is still stagnant, with the dominant factor there is still no commitment of media managers to require journalists to take a journalist certification test. Another factor, the standard salary of journalists is still low and different for media companies, making journalistic work not optimal, and still must be driven in the fulfillment of media capacity and achieve journalist professionalism.

Keywords: Journalism, Journalist Professionalism, Press Council.

Marudur Pandapotan Damanik, Erisva Hakiki Purwaningsih

E-GOVERNMENT READINESS ON LOCAL GOVERNMENT TOWARDS DEVELOPMENT OF SMART PROVINCE (STUDY ON MANDAILING NATAL REGENCY, NORTH SUMATERA)

ABSTRACT

This study aims to describe the readiness of Local Government of Mandailing Natal District in implementing e-government to support the North Sumatra Smart Province initiative. The research method was carried out quantitatively and qualitatively. Quantitative data was carried out by conducting a survey to 30 employees in the Mandailing Natal Government, while qualitative data was carried out by open interviews with informants who came from the Office for Communication and Informatics Services. The results found that the Mandailing Natal Government had used ICTs in the work process but had not been fully implemented. On the infrastructure aspect, internet networks in most Regional Work Unit still use telephone cables with fairly slow access speeds. On the human resource aspect, the most respondents have had the operational capabilities of ICT devices but do not understand technical matters. Whereas in the aspect of governance, the Mandailing Natal District Government does not yet have a legal framework as an operational basis and future ICT development planning. The study also presents a number of obstacles to the implementation of e-government and propose several recommendations as a step towards improvement.

Keywords: *Smart city, Smart Province, E-government, ICT readiness*

**Bima Septiantoro, Rudy Agus Gemilang Gultom,
Amarulla Octavian**

**PENGARUH INDUSTRI MEDIA NASIONAL
TERHADAP MEDIA WARFARE**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 89-108

ABSTRAK

Kesulitan mendapat informasi valid yang terdukung dengan banyaknya kasus *fake news* (berita bohong) berdampak pada meningkatnya potensi ancaman *media warfare*. Bentuk *media warfare* di Indonesia saat ini sudah nyata dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sudut pandang *stakeholder* tentang pengaruh industri media nasional dalam ancaman *media warfare*. Penelitian ini menggunakan kualitatif fenomenologi yang digunakan untuk melihat sudut pandang tentang *media warfare* atau pengalaman narasumber yang merupakan *stakeholder* industri media. Kemudian proses analisis pada penelitian ini menggunakan *framework analysis* yang disebut *hierarchy of influences*. Hasil penelitian ini didapatkan sudut pandang *stakeholder* bahwa *social system* terpengaruh akibat kehadiran industri *new media* dan industri media asing, sementara keterlambatan *extramedia* menyusun regulasi berdampak negatif pada lingkungan. Lingkungan ini menyebabkan *organization* internal media, kebutuhan *media routines*, dan kualitas *individuals media* ikut terpengaruh. Pada fenomena *media warfare* ini, Industri media nasional yang harus menyadari kepentingan *stakeholder* internal maupun eksternal sementara para *stakeholders* internal dan eksternal juga harus mampu berkoordinasi untuk menyusun regulasi sehingga bisnis dapat stabil dan meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Kata Kunci: Industri Media, Media Warfare, Hierarchy of Influences

Vannyora Okditazeini, Irwansyah

**ANCAMAN PRIVASI DAN DATA MINING DI ERA
DIGITAL: ANALISIS META-SINTESIS PADA
SOCIAL NETWORKING SITES (SNS)**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 109-122

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana ancaman terhadap privasi dan *data mining* di SNS (*Social*

Networking Sites/Jejaring Sosial Online). Dengan lebih dahulu memaparkan konsep atas privasi dan *data mining* itu sendiri dalam industri *big data* saat ini, penulis menawarkan analisis meta-sintesis. Berbagai referensi dan studi literatur dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan isu ancaman privasi dan *data mining* pada SNS. Hasil elaborasi konseptual peneliti menemukan bahwa ancaman privasi dan *data mining* pada SNS dapat dikategorikan dalam tiga hal: ancaman konten multimedia, ancaman tradisional, dan ancaman sosial. Setiap kategori diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe ancaman. Penulis mengidentifikasi selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah disediakan oleh situs SNS, pengguna sendiri juga harus sedini mungkin meliterasi dirinya untuk membedakan informasi dan rahasia. Pengguna harus sadar dalam menyeleksi konten apa yang harus disebarkan di SNS dan mana yang tidak.

Kata Kunci: Privasi, Data Mining, SNS, Big Data

Dede Mahmudah

**PERSEPSI APARAT PEMERINTAH KOTA JAMBI
TERHADAP KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN
PENGUNAAN MEDIA PENGADUAN BERBASIS
APLIKASI**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 123-138

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi. Sehingga penelitian ini difokuskan kepada pemanfaatan aplikasi SiKesal oleh aparat pemerintah yang bertugas untuk menerima berbagai aduan dari masyarakat melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi dengan analisis yang menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Melalui pendekatan kuantitatif dan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis deskriptif pada penelitian ini menyajikan data dalam tabel berupa hasil penentuan rata-rata. Responden merupakan admin/pelaksana dari aplikasi SiKesal di masing-masing unit kerja. Pengisian kuesioner dilakukan pada Maret 2018 dan verifikasi data hingga April 2018. Perhitungan secara statistik deskriptif terhadap 102 responden, diketahui 100 responden telah menggunakan aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk Konstruksi persepsi

responden terhadap kegunaan aplikasi SiKesal (*perceived usefulness*) sebesar 3,89 dan 0,620. Dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi dan merasakan kegunaan dari aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk Konstruksi persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem informasi baru (*perceived ease of use*) sebesar 3,88 dan 0,65. Dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi SiKesal dan mempunyai persepsi bahwa aplikasi SiKesal mudah untuk digunakan.

Kata Kunci: Aplikasi, Pengaduan, TAM

Rieka Mustika, S. Arifianto

**KOMODIFIKASI “POPULARITAS SELEBRITIS”
UNTUK MENDULANG SUARA PEMILU
LEGISLATIF 2019**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 139-150

ABSTRAK

Artikel ini menyoroti model perekrutan profesi selebritis, menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif, 2019. Dimana titik tekannya bukan pada profesionalitas bidang ideologi politik militansinya, tetapi bertumpu pada pilihan popularitas selebritis. Data sekunder diambil dari studi pustaka, media, dan dokumen lainnya yang terkait. Pembahasan menggunakan konsep komodifikasi media (Mosco, 2009). Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa ketika transformasi popularitas selebritis dipertukarkan dengan nilai politik tidak berjalan secara linier. Fenomena masuknya profesi selebritis ke dunia politik mengindikasikan bahwa, disamping lemahnya proses kaderisasi di setiap organisasi politik, komodifikasi nilai ketenaran selebritis ke nilai politik praktis secara teoritis telah terjadi, tetapi secara substansial tidak berdampak positif bagi masyarakat konstituen yang diwakilinya.

Kata Kunci: Popularitas Selebritis, Komodifikasi Politik, Dampak Terhadap Konstituen

Bambang Mudjiyanto

**POLA KOMUNIKASI SISWA TUNARUNGU DI
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BAGIAN B
KOTA JAYAPURA**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 151-166

ABSTRAK

Ketunarunguan siswa berkenaan kondisi pendengaran individu, yaitu ketidakmampuan siswa dalam menangkap komunikasi verbal atau suara lainnya yang disesuaikan dengan frekuensi dan intensitas tertentu. Individu-individu tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori ketuliannya. Persyaratan tertentu didalam komunikasi dan pendidikan luar biasa sangat penting bagi setiap anak didik tunarungu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif

digunakan sebagai prosedur untuk mengemukakan pemecahan masalah dengan mengetengahkan keadaan obyek yang diteliti. Subyek penelitian individu, dengan *key informan* kemudian informan berikut ditarik melalui *snowball sampling*. Pengumpulan data lapangan berlangsung dari tanggal 30 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018, di Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura, Jl. Raya Abepura, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Proses komunikasi siswa tunarungu memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus. Pola komunikasi total dan interaksi simbolik yang dikombinasikan yang terjadi mendukung efektivitas komunikasi antara tunarungu, guru dan lingkungannya. Penggunaan ponsel atau komputer yang terhubung internet mempermudah interaksi dan komunikasi. Pemberdayaan kualitas pembelajaran siswa tunarungu diperlukannya sarana dan prasarana yang khusus bagi masing-masing siswa B, seperti ruang bina komunikasi dan persepsi bunyi irama, ruang bina persepsi bunyi dan bicara ruang keterampilan. Pembekalan *hardskill* seperti penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, kemampuan teknis sesuai dengan minat dan bakat berhubungan dengan bidang ilmunya serta *softskill* keterampilan berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan dirinya sendiri.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Tunarungu

Djoko Waluyo

**TINJAUAN STANDAR KOMPETENSI
WARTAWAN UNTUK MENINGKATKAN
KAPASITAS MEDIA DAN PROFESIONALISME**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 167-184

ABSTRAK

Artikel ini penelitian tentang tinjauan standar kompetensi wartawan untuk peningkatan kapasitas media dan profesionalisme wartawan. Wartawan yang dalam kegiatan jurnalisme dituntut senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hasil kerjanya. Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas media dan kualitas jurnalisme wartawan. Seluruh wartawan diharapkan dapat menjalani proses sertifikasi wartawan dengan berjenjang, sehingga memperoleh sertifikasi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Manfaat yang diperoleh, kualitas wartawan makin menjamin terhadap kredibilitas, kapasitas media, dan reputasi media. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan sumber dokumentasi. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Kesimpulannya, proses dominan masih belum ada komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawan menempuh uji sertifikasi wartawan. Faktor lainnya, standar gaji wartawan yang masih rendah dan berbeda-beda pada perusahaan media, menjadikan karya jurnalistik belum optimal dan masih harus dipacu dalam pemenuhan kapasitas media serta mencapai profesionalisme wartawan.

Kata Kunci: Dewan Pers, Jurnalisme, Profesionalisme Wartawan

**Marudur Pandapotan Damanik, Erisva Hakiki
Purwaningsih**

**KESIAPAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH
DAERAH MENUJU PENGEMBANGAN *SMART
PROVINCE* (STUDI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 22 (2)

Halaman 185-196

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan Pemerintah kabupaten mandailing natal dalam pelaksanaan e-government untuk mendukung inisiatif Smart Province Sumatera Utara. Metode penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan metode survei kepada 30 orang pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten mandailing natal, sedangkan data kualitatif dilakukan dengan wawancara terbuka kepada informan yang berasal dari dinas komunikasi dan informatika. Hasil penelitian menemukan bahwa pemkab mandailing natal telah memanfaatkan TIK dalam proses kerja di pemerintahan namun belum maksimal. Pada sisi infrastruktur, jaringan internet di sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah masih menggunakan kabel telepon dengan kecepatan akses yang cukup lambat. Pada sisi SDM, para responden umum memiliki kemampuan operasional perangkat TIK namun tidak memahami tentang hal-hal teknis. Sedangkan pada aspek tata kelola, pemkab mandailing natal belum memiliki kerangka hukum sebagai landasan operasional dan perencanaan pengembangan TIK kedepan. Studi ini juga mengemukakan sejumlah hambatan pelaksanaan e-government dan merumuskan beberapa rekomendasi sebagai langkah perbaikan.

Kata Kunci: Kota cerdas, Provinsi cerdas, E-government, Kesiapan TIK

PENGARUH INDUSTRI MEDIA NASIONAL TERHADAP MEDIA WARFARE
THE INFLUENCE OF NATIONAL MEDIA INDUSTRY TOWARD MEDIA WARFARE

Bima Septiantoro¹, Rudy Agus Gemilang Gultom², Amarulla Octavian³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan

Universitas Pertahanan, Komplek *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)*, Bogor, Indonesia

¹bima.septiantoro@idu.ac.id; ²rudygultom@idu.ac.id; ³amarulla.octavian@idu.ac.id

Diterima tgl. 21/05/2018; Direvisi tgl. 01/10/2018; Disetujui tgl. 15/10/2018

ABSTRACT

The difficulty of obtaining valid information that supported by high number of fake news cases impact on the potential threats of media warfare. Currently, the form of media warfare has been evident by Indonesian society and government. The research aims to analyze perspective about the influence of national media industry in media warfare. This research used qualitative phenomenology that used to see perspective about media warfare or resource experience which is stakeholders of media industry. Then, framework analysis that called hierarchy of influences used to analyse the data. The results of this study show the perspective of stakeholders which view that social system is being influenced by the arrival of new media industry and foreign media industry, while the lateness of extramedia to structure the regulation will affect negatively on the environment. This environment causes internal media organizations, the needs of media routines, and individual media quality to be affected as well. In media warfare phenomenon, the national media industry must be aware of the interests of internal and external stakeholders and meanwhile the internal and external stakeholders must also be able to coordinate to develop regulations so that the media business can be stable and improve public knowledge.

Keywords: *Media Industry, Media Warfare, Hierarchy of Influences*

ABSTRAK

Kesulitan mendapat informasi valid yang terdukung dengan banyaknya kasus *fake news* (berita bohong) berdampak pada meningkatnya potensi ancaman *media warfare*. Bentuk *media warfare* di Indonesia saat ini sudah nyata dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sudut pandang *stakeholder* tentang pengaruh industri media nasional dalam ancaman *media warfare*. Penelitian ini menggunakan kualitatif fenomenologi yang digunakan untuk melihat sudut pandang tentang *media warfare* atau pengalaman narasumber yang merupakan *stakeholder* industri media. Kemudian proses analisis pada penelitian ini menggunakan *framework analysis* yang disebut *hierarchy of influences*. Hasil penelitian ini didapatkan sudut pandang *stakeholder* bahwa *social system* terpengaruh akibat kehadiran industri *new media* dan industri media asing, sementara keterlambatan *extramedia* menyusun regulasi berdampak negatif pada lingkungan. Lingkungan ini menyebabkan *organization* internal media, kebutuhan *media routines*, dan kualitas *individuals media* ikut terpengaruh. Pada fenomena *media warfare* ini, Industri media nasional yang harus menyadari kepentingan *stakeholder* internal maupun eksternal sementara para *stakeholders* internal dan eksternal juga harus mampu berkoordinasi untuk menyusun regulasi sehingga bisnis dapat stabil dan meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Kata Kunci: *Industri Media, Media Warfare, Hierarchy of Influences*

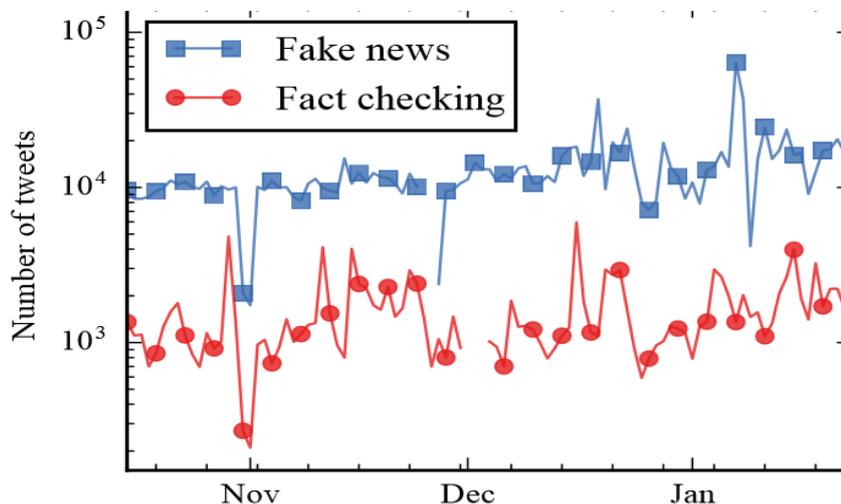
1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini komunikasi informasi sangat mudah didapat. Namun, kemudahan bertukar informasi menyebabkan sulitnya mendapat informasi yang valid. Kasus *information*

*warfare*¹ terdapat pada tingkat nasional maupun internasional. Puspitasari (2016) mengatakan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, hampir diturunkan akibat isu korupsi yang menimpanya. Bahkan pada kampanye *global war on terror*², Weimann (2014) mengatakan teroris telah menggunakan media internet untuk melawan kampanye tersebut.

Kesulitan masyarakat dalam mendapat informasi yang valid semakin terdukung dengan banyaknya kasus *fake news* (berita bohong). Shao, Ciampaglia, Flammini, & Menczer (2016) dalam penelitiannya menunjukkan jumlah *fake news* hampir 10 kali lipat berbanding dengan berita yang telah diklarifikasi dari Oktober 2015 hingga Januari 2016 seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Dengan begitu *media warfare* semakin terdukung dengan tingginya *fake news* yang dijadikan alat propaganda untuk merusak opini masyarakat. Hal ini menyebabkan ancaman *media warfare* tentu berpengaruh terhadap pertahanan negara terlebih Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet tinggi. Menurut Miniwatts Marketing Group (2016) yang ditampilkan dalam *Internet World Stat*, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 20 negara pengguna internet teratas di dunia. Pada tingkat Asia, Miniwatts Marketing Group (2017) menampilkan Indonesia peringkat 3 dari 10 negara pengguna internet teratas di Asia.



Sumber : Shao, et al. (2016)

Gambar 1. Data Perbandingan *Fake News* dan *Fact Checking*

Kementerian Pertahanan (2015) memaparkan bahwa hakikat ancaman pertahanan nyata maupun belum nyata yang berbentuk militer, nonmiliter, dan bahkan gabungan atau disebut hibrida sehingga disusunlah sistem pertahanan negara yang melibatkan berbagai komponen bangsa seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. Program Bela Negara³ juga disusun dengan tujuan memperkuat sistem pertahanan negara melalui penanaman nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban

¹ *Information warfare* merupakan peperangan dalam ranah informasi dan/atau menggunakan senjata berupa teknologi informasi.

² *Global war on terror* adalah peristiwa bom di Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 yang dikenal tragedi 9/11.

³ Program Bela Negara merupakan program yang dicanangkan dan menjadi program prioritas Kementerian Pertahanan dengan salah satu sasaran dan tujuannya untuk membentuk identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

dalam bela negara akan meningkatkan peran masyarakat dalam pertahanan negara pada bidang kemampuannya masing-masing.



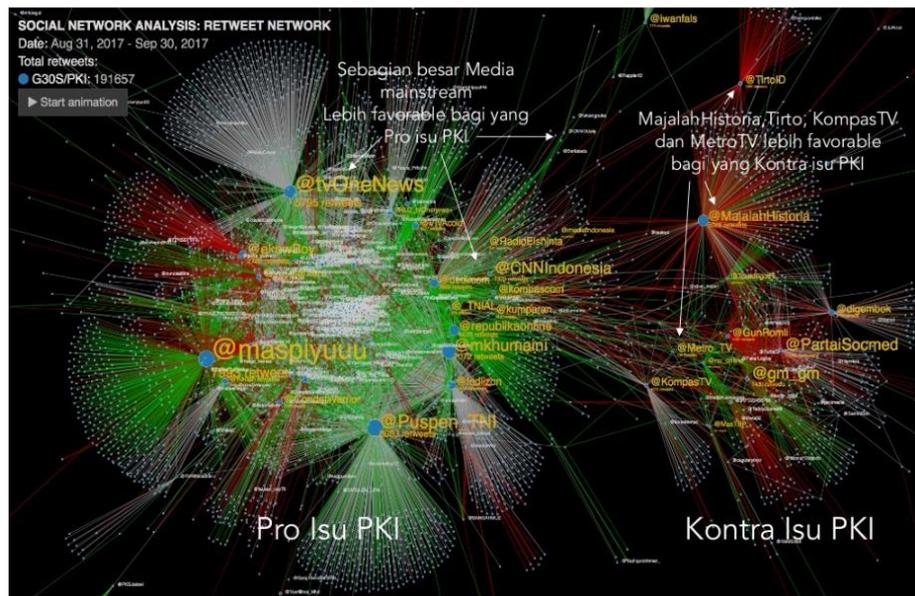
Sumber : Kementerian Pertahanan (2015)

Gambar 2. Sistem Pertahanan Negara

Sebuah hal yang menarik apabila media informasi dipandang menjadi salah satu dari industri. Dalam hal industri media, industri ini memiliki produk informasi yang dipasarkan memiliki pengaruh dalam membentuk opini masyarakat atau mampu membuat pasarnya sendiri. Namun, perhatian terhadap industri media ini cenderung masih kurang dianggap relevan dengan pertahanan negara. Padahal Yavuz & Koç, (2016) memaparkan ketika usaha kudeta Turki pada 15 Juli 2016, perwira militer pemberontak berusaha melumpuhkan akses transportasi, markas besar polisi, dan stasiun televisi. Bahkan Hamad (2004) menceritakan sejarah Indonesia mengenai industri media pun tidak bisa dilepaskan dengan negara maupun rezim penguasa sejak perjuangan kemerdekaan hingga reformasi. Setelah tahun 1999 di era reformasi, media memainkan peran supremasi rakyat yang dikenal dengan kemerdekaan pers.

Bentuk *media warfare* di Indonesia saat ini sudah nyata dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah mulai fokus menanggapi industri media dalam kaitannya dengan ancaman *media warfare*. Terlihat pada kasus pemblokiran akses aplikasi *chatting* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 14 Juli 2017. Menurut Siaran Pers No. 86/HM/KEMENKOMINFO/07/2017 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2016), telah ditemukan konten-konten yang digunakan untuk propaganda terorisme dan radikalisme pada salah satu media informasi *chatting* itu. Kemenkominfo memberi laporan kepada pihak industri media tersebut sejumlah 6 kali sejak Maret 2016 hingga Juli 2017, namun tidak ada respon. Seorang pakar *Social Network Analysis* (SNA)⁴, Fahmi (2017a) juga memaparkan bentuk polarisasi opini pada isu Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. Pada gambaran polarisasi SNA, terlihat kelompok kiri mendukung diangkatnya isu PKI sedangkan kelompok kanan cenderung tidak menyukai isu PKI dibahas ulang di Indonesia. Pada setiap kelompok terdapat industri media nasional maupun industri media asing yang disukai oleh masing-masing kelompok.

⁴ *Social Network Analysis* (SNA) merupakan sebuah metodologi untuk melakukan pemetaan dan pengukuran alur interaksi yang dilengkapi dengan analisis pola alur interaksi.



Sumber: Fahmi (2017a)

Gambar 3. Peta Polarisasi Opini terhadap Isu PKI

Namun model penanganan kasus *fake news* masih banyak berfokus mengejar pelaku dan pemberantasan *account* palsu yang dinilai masih kurang efektif. Fahmi (2017b) mengatakan masyarakat tentu sulit melakukan pencarian fakta dari sebuah berita sehingga pentingnya peran industri media dalam memerangi *fake news*, melakukan *cross-checking*, dan memberikan pemberitaan yang jujur dan berimbang. Pada *information warfare* yang salah satunya adalah *media warfare*, Penelitian ini bertujuan menganalisis sudut pandang *stakeholder* tentang pengaruh industri media nasional terhadap ancaman *media warfare*.

1.2. Landasan Teori

a) Konsep Pertahanan

Pertahanan merupakan bagian cakupan dari lingkup yang lebih luas yaitu keamanan nasional. Konflik tidak hanya bersifat fisik (militer) namun juga bersifat tujuan nonfisik (nirmiliter) atau yang dulu dikenal sebagai *Gold, Glory, and Gospel*. Menurut Suryohadiprojo (2005), konsep pertahanan harus mampu melindungi negara dari serangan fisik maupun non fisik. Pada keamanan non tradisional, Praditya (2016) memaparkan ancaman nirmiliter harus ditanggapi dengan pendekatan nirmiliter melalui hukum, ekonomi, sosial, dan diplomasi. Kementerian Pertahanan (2017) juga menyusun kewenangan terhadap kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan untuk menyusun doktrin pertahanan nirmiliter yang dipaparkan dalam buku pedoman strategis pertahanan nirmiliter.

b) Media Warfare

Salah satu peperangan yang saat ini cenderung tinggi adalah *information warfare*. Terdapat 7 bentuk *information warfare* yang dipaparkan Libicki (1995), salah satunya adalah *Psychological Warfare* yang merupakan peperangan dengan mengarahkan penyerangan untuk mempengaruhi lawan dan sekaligus kawan agar berpihak kepada pelaku biasa disebut sebagai *Psychological Operations* (PSYOPS). Macdonald (2007) mengatakan PSYOPS pada abad 21 ini menggunakan ilmu komunikasi media untuk melakukan tipuan atau propaganda dalam perang atau disebut *media warfare*. Konsep senjata memang telah berkembang seperti yang dijelaskan Suryokusumo (2016)

bahwa saat ini terdapat serangan seperti invasi virus komputer dan isu skandal pimpinan negara yang disebut konsep senjata nonmiliter.

Dalam kasus informasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat menyatakan larangan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Pada kebijakan terbaru UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pasal 27 ayat 1 dengan menambahkan istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Peran pemerintah juga diperkuat dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik melalui perubahan UU ini.

c) *Industri Media*

Industri secara umum dijelaskan oleh Gaspersz (2011) yaitu produk dapat berupa *tangible* (dapat disentuh) dan *intangible* (tidak dapat disentuh) dan perkembangannya produk bisa berupa barang, perangkat lunak, maupun jasa. Media sebagai sebuah industri dijelaskan Croteau dan Hoynes (2013), bahwa media memiliki *input* berupa informasi yang diproses menjadi informasi yang lebih bernilai bagi konsumen. Doyle (2002) juga menyatakan proses produksi media yaitu kegiatan memproduksi konten, mengemas konten, hingga mendistribusikan konten pada konsumen. Secara perkembangan, Industri media terbagi menjadi 2 yaitu media massa konvensional dan *new media*. McQuail (2010) menjelaskan bahwa *new media* tidak hanya berhubungan dengan produksi dan distribusi pesan seperti media massa konvensional, melainkan fokus pada proses, pertukaran, dan penyimpanan pesan informasi.

Industri penyiaran dianggap penting dalam urusan kenegaraan sehingga berbagai hukum mengaturnya. Pada UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal 13 menyebutkan “jasa penyiaran terdiri atas: jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi”. Pemerintah Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai media dalam negeri maupun asing yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. dalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” dan mengenai pers asing dijelaskan pada 16 yaitu “Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

d) *Teori Stakeholders*

Manajemen dan strategi sebuah organisasi dalam berkomunikasi dengan *stakeholder* merupakan kajian yang penting. Freeman (2010) juga menjelaskan bahwa perubahan pada industri disebabkan oleh berbagai entitas *internal* maupun *eksternal* yang berkaitan dengan perusahaan atau disebut sebagai *stakeholder*. Lund (2016) menjelaskan bahwa industri media di negara-negara Eropa harus mempertimbangkan sudut pandang *stakeholder* dari sudut publik dan pemerintah.

Pada industri media, produk yang dipasarkan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi dan menambah pengetahuan mengenai informasi yang dipasarkan. Bahkan menurut Aitken (2007) suatu industri media internasional berkembang dengan kepercayaan publik atas kualitasnya, kemampuan pekerjanya, distribusi pesannya, dan kepentingan geopolitik sehingga media tersebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, peperangan, hukum dan keteraturan, pendidikan, politik, agama, dan ideologi. Penelitian ini menggunakan *framework analysis* yang dipaparkan oleh Reese dan Shoemaker (2013) yaitu *Hierarchy of Influences* seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini.. Pada *hierarchy of influences* terdapat 5 level yang akan menjadi pokok pembahasan terhadap pengaruh industri media nasional pada *media warfare*, antara lain:

- *Individuals Media Level*

Pada tahap individu ini, pengaruh dari SDM jurnalis memiliki peran yang penting dalam memproduksi setiap isi konten yang dihasilkan media. Latar belakang dari jurnalis dianggap mampu mempengaruhi media melalui perbedaan kepentingan dan sikap. Tiga hal mendasar yang berpengaruh terhadap isi media yaitu, karakteristik dan latar belakang, kebiasaan serta nilai atau kepercayaan (agama), dan orientasi atau profesionalisme para pekerja media.

- *Media Routines Level*

Pengaruh dari tahap rutinitas yang dimaksud adalah berkaitan dengan rutinitas proses produksi, seperti kemudahan dipahami oleh pembaca, kapabilitas bidang produksi dalam membuat konten, serta variasi jenis konten yang tersedia. Rutinitas media berkaitan dengan naskah, pemilihan narasumber, gambar, analisa, dan lain-lain sehingga berkaitan dengan kualitas pesan yang mengedepankan fakta atau hanya berorientasi pada keuntungan.

- *Organizations Level*

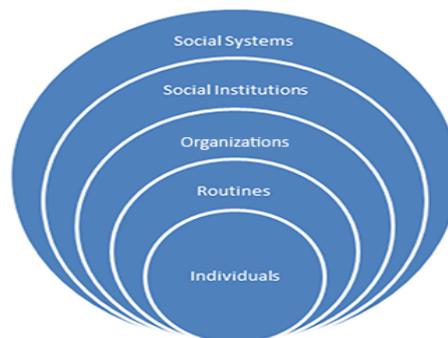
Organisasi media yang termasuk di dalamnya manajemen tingkat atas, pemilik, hingga pemegang saham memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan. Pada tahap organisasi ini tentu berpengaruh melalui identitas yang biasanya identik dengan kepentingan pemilik dari industri media. Semakin banyak pemegang saham tentu kepentingan tersebut akan semakin banyak yang akan menghasilkan konten untuk memenuhi kebutuhan kepentingan tersebut.

- *Extramedia Level (Social Institutions)*

Keberadaan institusi di luar dari industri media tentu juga mempengaruhi isi media melalui kekuatan dan kebijakan seperti mengenai pers, penyiaran, dan lain-lain. Terdapat tanggung jawab institusi pemerintah seperti kementerian maupun instansi yang mempengaruhi kontrol terhadap isi konten media. Pengaruh seperti kepentingan politik, pemerintah, negara, hingga internasional dipercaya mampu mempengaruhi media.

- *Ideological Level (Social Systems)*

Pada tahap Ideologi ini menyatakan bahwa nilai, kepercayaan, maupun agama dari lingkungan sosial sebagai landasan dalam mempengaruhi isi konten dari media. Media massa merupakan wujud dari realitas sosial yang berdasarkan ideologi dan cara pandang masyarakat yang terbentuk menjadi suatu sistem sosial.



Sumber: Reese dan Shoemaker, 2013

Gambar 4. *Media Hierarchy of Influences*

1.3. Penelitian Terdahulu

Dampak perkembangan teknologi informasi yang kemungkinan digunakan sebagai alat propaganda dalam kaitannya dengan telah ditanggapi lewat beberapa penelitian. Salah satu penelitian yang disusun Alguliev, Aliguliyev, & Alekperova (2014) menawarkan sebuah model dengan pendekatan *cluster* untuk produk informasi pada wikimedia yang merupakan industri

multimedia resources. Penelitian tersebut menggunakan algoritma *Particle Swarm Optimization* (PSO) untuk optimasi proses penyaringan *input* yang akan ditampilkan menjadi *output* produk.

Penelitian mengenai media informasi sebagai industri pertahanan memang masih belum ada. Namun, Zingarelli (2010) memaparkan efek dari media yang pengaruhnya meningkat hingga mempengaruhi geopolitik dalam ranah sosial, aksi militer, hingga pernyataan pemimpin negara tentang krisis kemanusiaan. Penelitian tersebut membandingkan antara efek dua media yang disebut sebagai “*The CNN Effect*” dan “*The Al Jazeera Effect*” mampu berpengaruh di dunia dari segi kemampuan ekonomi yang berpengaruh pada teknologi hingga kemampuan SDM dalam pengemasan yang berbeda satu dengan lainnya dengan sudut pandang barat dan sudut pandang timur tengah. Dengan dua sudut pandang ini menyebabkan pandangan yang saling berimbang yang pada akhir kesimpulan bahwa media informasi itu bisa memberi kontribusi untuk menciptakan dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman.

Lund (2016) melakukan penelitian dengan mengeksplorasi model pengelolaan media di Eropa dalam pengaruh *stakeholder*. Media dianggap berpengaruh dan terpengaruh dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepentingan nasional, transnasional, hingga internasional sehingga mempertimbangkan aspek kebebasan pers dan pembatasan untuk kepentingan keamanan nasional. Penelitian tersebut mengusulkan untuk mewujudkan dua sistem sebagai industri media komersial dan lembaga penyiaran publik yang termasuk industri media konvensional maupun modern.

Pada Industri media pengaruh *stakeholder* internal terdiri dari berbagai level tingkatan dan begitu juga dengan *stakeholder* eksternalnya. Green (2017) menyusun penelitian yang mengambil studi kasus agenda dan pembentukan *framing* pada saat isu Inggris ingin melakukan referendum terhadap Uni Eropa. Penelitian itu dibangun dengan melakukan pengujian analisa *Hierarchy of Influences* terhadap isi konten media dalam ancaman *media warfare*. Penelitian tersebut dibangun dalam 2 hipotesa, hipotesa 1 yaitu menguji bahwa isi konten media terpengaruh oleh kepentingan dari organisasi internal media yang menjadi variabel dependen sedangkan hipotesa kedua yaitu variabel dependen ditambahkan dengan variabel independen yaitu pengaruh dari institusi eksternal terhadap isi konten media. Hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan agenda konten media memang terpengaruh oleh organisasi internal media namun dengan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat berkomunikasi serta keadaan *media warfare* menyebabkan konten media lebih banyak dipengaruhi oleh institusi eksternal.

Dalam ancaman *media warfare* ini, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaruh dari industri media nasional. Penelitian ini bertujuan melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan sudut pandang *stakeholder* terkait *media warfare* berdasarkan 5 *hierarchy of influences*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dibangun dengan menggunakan kualitatif agar dapat mengeksplorasi secara luas sudut pandang *stakeholder* industri terhadap ancaman *media warfare*. Strategi kualitatif fenomenologi digunakan untuk melihat sudut pandang atau pengalaman narasumber seperti yang telah dipaparkan Creswell (2013). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi seperti yang dijelaskan oleh Sugiono (2008).

Proses analisis pada penelitian ini menggunakan *framework analysis* yang disebut *hierarchy of influences* yang dipaparkan oleh Reese dan Shoemaker (2013). 5 level *stakeholder* yang dijelaskan pada *hierarchy of influences* dijadikan subjek penelitian yang akan menjelaskan sudut pandangnya tentang *media warfare* sehingga akan memperlihatkan pengaruh industri media nasional. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang mewakili *stakeholder* industri media, antara lain:

a. *Masyarakat (Ahli Media Informasi)*

Pada penelitian ini, masyarakat yang mewakili konsumen industri media merupakan ahli di bidang media ataupun bidang yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Dengan begitu pendapat konsumen dapat memiliki informasi yang mendukung penelitian.

Narasumber yang merupakan ahli bidang teknologi Informasi adalah Ismail Fahmi. Ismail memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mendapatkan gelar Magister dan Doktor pada bidang Teknologi Informasi di Universitas Groningen Belanda. Ismail merupakan seorang tokoh pengembang perpustakaan digital dan seorang pakar *Social Network Analysis* (SNA). Ismail juga beberapa kali bekerja sama dengan jurnalis, kepolisian, serta menulis artikel mengenai konflik-konflik sosial dengan menganalisis polarisasi opini masyarakat serta pengaruh antara media *online* dan media sosial.

Narasumber Puspitasari merupakan pakar pada bidang komunikasi yang pada penelitian ini mewakili masyarakat. Latar belakang pendidikan Puspitasari S1 pada bidang sosiologi dan S2 hingga S3 pada bidang komunikasi di Universitas Indonesia (UI). Saat ini Puspitasari berprofesi sebagai dosen pengajar pascasarjana Ilmu komunikasi dan pascasarjana Ketahanan Nasional di UI, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), hingga Universitas Pertahanan (Unhan). Puspitasari aktif menjadi narasumber dan mengajar dalam topik komunikasi krisis dalam sudut pandang perusahaan, pemerintah, maupun negara yang telah beliau susun menjadi buku dengan judul *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*.

b. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*

Setelah perubahan departemen penerangan hingga saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), lingkup kemerdekaan pers bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun Kemenkominfo merupakan *stakeholder* pemerintah yang berhubungan dengan ancaman *media warfare*. Pada penelitian ini narasumber dari Kemenkominfo merupakan Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa dan unsur dan unit kerja pada Direktorat Keamanan Informasi.

Narasumber dari Direktorat Keamanan Informasi memberikan sudut pandang ancaman *media warfare* dari aspek keamanan. Pada Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penata kelolaan keamanan informasi. Narasumber bernama Helmi Yudhasetia yang menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil UU ITE. Latar belakang pendidikan Helmi adalah S1 dan S2 Hukum di Universitas Trisakti.

Staf ahli komunikasi dan media massa Kemenkominfo dijabat oleh Gun Gun Siswadi. Sudut pandang Kemenkominfo dapat diwakili oleh pejabat staf ahli yang membidangi komunikasi dan media massa. Gun juga pernah menjabat sebagai Direktur Diseminasi Informasi di Badan Narkotika Nasional (BNN). Latar belakang pendidikan Gun adalah komunikasi yang Gun selesaikan S1 di Universitas Padjajaran dan S2 di UI.

c. *Kementerian Pertahanan*

Penelitian ini berkaitan dengan ancaman *media warfare* yang merupakan salah satu dari ancaman nonmiliter. Dalam hal ancaman nonmiliter, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menempatkan fungsi dan tugas pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan).

Narasumber dari Direktur Komponen Pendukung (Dirkomduk) adalah Tristan Soemardjono. Direktorat Komponen Pendukung sebagai salah satu dari 5 direktorat yang berada di bawah Ditjen Potan juga menganalisis kebijakan potensi dari sumber daya manusia melalui Subdirektorat Sumber Daya Manusia. Latar belakang pendidikan S2 Manajemen membuat Tristan memiliki kapabilitas dalam analisis potensi dari sumber daya pertahanan.

d. *Dewan Pers*

Fungsi Dewan Pers adalah sebagai lembaga negara independen yang pada masa reformasi diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa Dewan Pers yang independen dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Narasumber yang mewakili Dewan Pers pada penelitian ini bernama Yosep Adi Prasetyo. Narasumber Dewan Pers ini saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers pada periode 2016 hingga 2019.

Pada periode sebelumnya 2013 hingga 2016, Yosep juga merupakan Dewan Pers yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Yosep juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada periode 2007 hingga 2012. Yosep juga adalah salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Etik di AJI pada tahun 2003 hingga 2005.

e. Persatuan Wartawan Indonesia

Pada tanggal 9 Februari 1946 dengan dibentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Wartawan dan pers Indonesia mendapatkan wadah skala nasional untuk menyalurkan aspirasi perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya kolonialisme. Pada UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur bahwa Dewan Pers sebagai lembaga negara independen memiliki anggota dewan yang salah satunya diangkat dari organisasi pers.

Narasumber yang merupakan perwakilan dari PWI ini adalah Agus Sudibyo yang saat ini menjabat sebagai Direktur Riset dan Komunikasi Publik di PWI. Agus memiliki latar belakang pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 pada Magister Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakarya Jakarta. Agus juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika di Dewan Pers pada tahun 2013 hingga 2016.

f. Industri Media Nasional

PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) merupakan bisnis yang terkait dengan perdagangan umum, perindustrian, agrikultur, jasa, investasi, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat lainnya. MNC saat ini memiliki bisnis utama 4 stasiun televisi *free-to-air* (TV FTA) dari 11 stasiun televisi yang ada di Indonesia. MNC juga memiliki bisnis utama dalam memproduksi dan mendistribusikan konten-konten televisi. Konten media yang diproduksi oleh MNC adalah *MNC Picture*, *MNC Animation*, *Pustaka Konten* yang didistribusikan melalui stasiun TV FTA maupun 22 *MNC channels* yang disiarkan pada TV berbayar.

MNC juga memiliki bisnis pendukung seperti radio, media cetak, *talent management* yang mendukung penuh fokus inti bisnis dari MNC. Pada media cetak, MNC memiliki koran *Sindo*, majalah *Sindo Weekly*, majalah *Just For Kids*, majalah *Highend*, majalah *Highend Teen*, majalah *Network*. Terdapat 4 media elektronik radio yang dimiliki MNC antara lain, MNC Trijaya FM, Global Radio, Radio Dangdut Indonesia, dan V-Radio. MNC saat ini sudah memiliki bisnis media *online* seperti *Sindonews.com* dan *Okezone.com*. Unit Bisnis dengan berbasis internet atau *new media* juga dimiliki MNC seperti *e-commerce MNC Shop* dan masuknya WeChat ke Indonesia melalui kerja sama dengan Tencent (Perusahaan asal Cina).

Narasumber Fetra Malona Hariandja merupakan narasumber yang kompeten dalam bidang jurnalistik. Fetra memulai karier sebagai jurnalis di MNC media dan saat ini menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi pada *okezone.com*. Latar belakang pendidikan Fetra adalah S1 Jurnalistik yang ditempuh pada Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) di Jakarta.

Narasumber Rizal memulai karier di dunia jurnalistik sejak media masih menggunakan teknologi analog hingga saat ini media digital. Rizal saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi di MNC TV. Rizal memiliki latar belakang pendidikan S2 Komunikasi di UI. Berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pekerjaan Rizal memiliki kompetensi dalam bidang jurnalistik.

Narasumber Lia Marlina merupakan seorang Direktur *Sales and Marketing* pada Koran *Sindo*. Lia memiliki pengalaman kerja 15 tahun di MNC menjadikannya memiliki kompetensi dalam mewakili sudut pandang bisnis media di Indonesia. Lia memiliki latar belakang pendidikan S1 Ekonomi.

2.2. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai *stakeholder*, analisis data dilakukan dengan menganalisis dan merefleksikan informasi yang diperoleh secara keseluruhan. triangulasi data seperti dipaparkan oleh Creswell (2013) pada sudut pandang *stakeholder* industri media. Kemudian data dikodifikasi dan dijelaskan secara induktif pada setiap level *hierarchy of influences* yang merupakan *framework analysis*. dengan *hierarchy of influences* seperti yang dijelaskan oleh Reese dan Shoemaker (2013). *Hierarchy of influences* menganalisis data berdasar pada 5 level yang berpengaruh terhadap media, yaitu *individuals media level*, *media routines level*, *organizations level*, *extramedia level*, dan *ideological (social system) level*. *Framework analysis* tersebut mempermudah dalam pengambilan kesimpulan mengenai *media warfare* dengan melakukan perbandingan data dengan informasi yang didapat dari literatur teori yang ada. Hasil data yang fokus dapat menghasilkan data simpulan dampak dari kegiatan praktik industri media dan solusi yang diharapkan dari setiap level.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kondisi saat ini media berhadapan dengan berbagai berbagai kepentingan internal maupun eksternal dalam menjalankan proses bisnisnya. Pengaruh pada konteks ancaman *media warfare* merujuk pada penelitian Zingarelli (2010), media juga terpengaruh dari kondisi internal seperti kualitas jurnalis, proses produksi yang memiliki kepentingan keuntungan, hingga kebijakan organisasi dan pemilik media. Berdasarkan pengaruh dari berbagai level *stakeholder* seperti pada penelitian Green (2017) dan pengaruh ancaman *media warfare* seperti pada penelitian Alguliev, Aliguliyev, & Alekperova (2014), maka pada penelitian menganalisis pengaruh kepentingan *stakeholders* internal maupun eksternal terhadap industri media dikembangkan dengan adanya ancaman *media warfare* kemudian dijelaskan berdasarkan *framework analysis* yang dipaparkan oleh Reese dan Shoemaker (2013) yaitu 5 level *hierarchy of influences*, sebagai berikut:

3.1. Pengaruh pada *Individuals Media Level*

Pada kondisi saat ini, jurnalis cenderung lebih mementingkan kecepatan daripada akurasi. Sudut pandang Agus menyatakan bahwa kondisi kehadiran *new media* membuat masyarakat mampu mendapatkan informasi tanpa melalui peran jurnalis. Menurut Ismail dan Helmi, kecenderungan kebutuhan judul bombastis yang disukai oleh suatu kelompok kemudian digunakan untuk menghina kelompok lainnya menyebabkan demokratisasi menjadi buruk. Namun pandangan Yosep dan Gun justru menyatakan bahwa masih terdapat media massa yang memiliki kredibilitas dan menjaga kaidah jurnalistik, sementara Puspitasari juga menyatakan ancaman *media warfare* meningkat akibat kehadiran *new media* yang terdapat propaganda, *fake news*, dan *hoax*. Dalam kondisi *media warfare*, Konten informasi berita yang dihasilkan industri media nasional harus diusahakan untuk mencakup berbagai sudut pandang sehingga mampu mengklarifikasi isu-isu konflik.

Ancaman *media warfare* juga terdukung akibat banyaknya jurnalis yang cenderung tidak memiliki kompetensi yang baik. Menurut Yosep, kualitas jurnalis secara umum di Indonesia banyak yang tidak memiliki kompetensi sebagai jurnalis profesional sehingga Dewan Pers mendorong bahwa jurnalis terdaftar pada organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers seperti PWI, AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi-organisasi ini akan melakukan uji kompetensi terhadap anggotanya sehingga kompetensi jurnalis di Indonesia dapat memenuhi standar profesional. Namun Fetra menyatakan tidak terdapat syarat kompetensi wartawan dalam peliputan pada lokasi penting seperti istana negara. Dalam upaya pencegahan ancaman *media warfare*, jurnalis yang meliput informasi terkait dengan isu sensitif diharapkan memiliki kompetensi di atas jurnalis pada umumnya.

Kontra ancaman *media warfare* terhadap Negara terlihat melalui pernyataan Tristan, bahwa pada ancaman opini mendukung teroris melalui media sosial, media nasional memiliki peran dalam kontra narasi. Pada sisi lain menurut Puspitasari dan Lia, saat ini kemampuan mempengaruhi opini masyarakat juga dimiliki oleh *Key Opinion Leader* (KOL) individu melalui media sosial. Menurut Agus kontra narasi menggunakan media massa memang kurang efektif, namun peran media massa tidak dapat tergantikan oleh media sosial. Industri media nasional sendiri juga menyadari bahwa peran jurnalis dalam kontra ancaman *media warfare* memang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa jurnalis dibutuhkan dalam kontra narasi pada ancaman *media warfare*.

Teori industri yang dipaparkan Croteau dan Hoynes (2013) menyatakan kegiatan media berkaitan dengan *input* informasi yang diproses menjadi informasi yang lebih bernilai. Secara sederhana peran sangat penting dari jurnalis berkaitan langsung dengan pemasok *input* informasi. Rizal menyatakan industri media nasional pada era demokrasi harus menjaga kemerdekaan pers, namun jurnalis juga harus memiliki kesadaran terhadap ancaman terhadap negara. Kesadaran jurnalis dalam peran dan pengaruhnya pada negara dalam menjaga demokratisasi yang baik sangat dibutuhkan. Dengan begitu dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Jurnalis dapat berkontribusi pada kontrol sosial dengan ikut menjaga etika, moral, dan hukum yang ada di Indonesia.

Kondisi kualitas dari jurnalis di Indonesia saat ini justru meningkatkan potensi ancaman *media warfare*. Kecenderungan jurnalis dalam memprioritaskan kecepatan dari pada akurasi dan rendahnya kompetensi jurnalistik menghasilkan produk konten yang menimbulkan perpecahan pada masyarakat. Berdasarkan sudut pandang *stakeholder*, *individual media level* yaitu jurnalis diharapkan memiliki dua sisi peran. Selain jurnalis harus mampu menyadari peran dalam menjaga kemerdekaan pers, jurnalis juga harus memiliki kesadaran bela negara. Jurnalis memiliki kemampuan dalam mencari sumber dan mengklarifikasi isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Ketika jurnalis memiliki kesadaran bela negara, maka kegiatan kontra narasi yang dibutuhkan dalam *media warfare* dapat dijalankan dengan baik.

3.2. Pengaruh pada Media Routines Level

Teori industri media yang dipaparkan oleh Doyle (2002) bahwa kegiatan rutinitas media berkaitan dengan kegiatan produksi konten, pengemasan konten, hingga pendistribusian konten. Rutinitas media dalam proses produksi konten informasi saat ini semakin efisien dengan kemajuan teknologi. Rizal menyatakan bahwa saat ini liputan siaran langsung mampu dilakukan oleh 1 orang yang pada era analog membutuhkan 15 orang. Menurut Lia, Pemanfaatan media sosial juga saat ini dibutuhkan oleh media untuk mendistribusikan konten karena saat ini media sosial telah menjadi *lifestyle* untuk masyarakat Indonesia.

Kehadiran *new media* ikut mempengaruhi kegiatan rutinitas produksi konten pada media massa. Perbedaan antara *new media* dan media massa menurut pandangan Agus yaitu, informasi pada *new media* disebarkan tanpa melalui mekanisme produksi informasi sedangkan informasi pada media massa telah melalui proses mekanisme produksi informasi menjadi berita. Kecepatan arus informasi menurut Puspitasari menyebabkan, produksi konten cenderung hanya berkepentingan profit. Bahkan Ismail menyatakan industri media massa seakan mendahulukan distribusi konten dan ketika terdapat keluhan atau aduan baru selanjutnya melakukan klarifikasi yang berdampak buruk pada masyarakat dan pemerintah. Media seharusnya tetap memainkan perannya dengan memberikan informasi yang akurat atau seperti yang dikatakan Lia bahwa media harus mempertahankan identitas melalui analisa dan validitas konten. Industri media pada ancaman kesulitan validasi informasi ini memiliki kelebihan pada konten yang telah melalui proses validasi.

Proses mekanisme produksi melalui *gatekeeper* seharusnya adalah proses standar yang dilakukan pada rutinitas media. Yosep menyatakan bahwa pada proses kontrol *gatekeeper*, Dewan Pers memberikan syarat bagi pemimpin redaksi agar memiliki kompetensi jurnalistik tingkat atas

atau tingkat utama. Puspitasari menyatakan bahwa industri media massa perlu menyadari bahwa selain membutuhkan pendapatan, media harus menyadari kehadiran kepentingan *stakeholder* seperti Dewan Pers yang melakukan kontrol pada etika jurnalistik dan keberadaan hukum yang juga berpengaruh pada keberlangsungan bisnis. Lia dan Rizal juga menambahkan bahwa kredibilitas media akan meningkat karena pengiklan tidak hanya memperhatikan *rating* dan *share* akan tetapi juga kualitas konten. Industri media harus menyadari bahwa kontennya berpengaruh pada perpecahan masyarakat. Yosep dan Helmi menyatakan media harus menjaga netralitas dengan memperhatikan kode etik jurnalistik dan berupaya memberikan konten dengan berbagai sudut pandang.

Pada konflik yang menjadi isu perdebatan, Yosep menyatakan bahwa media perlu melihat polarisasi opini pada masyarakat. Senada dengan itu Ismail menyatakan bahwa industri media saat ini membutuhkan kerja sama dengan peneliti *big data* atau kedepannya butuh memiliki *software* SNA dan *fact checking*. Menurut Rizal, industri media tentu memiliki tim analis untuk memahami kondisi kecenderungan arus informasi yang ada pada masyarakat. Namun Lia berpendapat keberagaman sudut pandang justru menciptakan demokrasi yang mencerdaskan masyarakat selama media berupaya *cover all side*⁵. Teori industri media dari Doyle (2002) juga menekankan bahwa produk konten akan bernilai ketika mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan memahami polarisasi opini masyarakat, media dapat menjalankan fungsi menjaga demokratisasi sekaligus mendapatkan bahan isu baru sebagai sumber dalam memproduksi konten informasi.

Industri media harus menyadari bahwa konten yang dihasilkan akan mempengaruhi opini masyarakat. Pada kondisi ancaman *media warfare*, industri media perlu memahami polarisasi opini sehingga media dapat menjaga demokratisasi dengan baik sekaligus mendapatkan isu pada masyarakat untuk menjadi bahan produksi. Pada *media routines level*, penyaringan informasi melalui *gate keeper* merupakan mekanisme produksi konten informasi untuk mengontrol kualitas dari hasil produk konten informasi industri media. Mekanisme proses produksi pada industri media massa ini tidak dimiliki oleh industri media sosial sehingga merupakan kelebihan industri media massa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Industri media harus mampu berkontribusi untuk mengurangi perpecahan pada masyarakat akibat dari banyaknya informasi yang tidak valid di internet.

3.3. Pengaruh pada Organizations Level

Organisasi di dalam media walaupun tidak terkait langsung dengan proses produksi tentu tetap berpengaruh melalui identitas. Menurut Lia, pengaruh internal tentu identik dengan kepentingan pemilik dari industri media dan proses mendukung berjalannya bisnis industri media. Helmi bahkan menyatakan keterlibatan pemilik media dengan partai politik tentu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap netralitas media. Sedangkan Yosep menyatakan SDM media tidak boleh terikat dengan partai politik untuk menjaga independensi media. Namun menurut Rizal, media tetap harus menjalankan kemerdekaan pers yang berupaya *cover all side* walaupun terdapat pengaruh internal dan pemilik industri media.

Kehadiran *new media* menurut Agus dan Puspitasari menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak berimbang, industri media massa harus fokus dalam kepentingan pendapatan dan *sustainable*. Jika merujuk pada definisi produk yang dijelaskan oleh Gaspersz (2011), produk konten informasi pada industri media konvensional maupun industri *new media* merupakan produk *intangible*. Teori industri media dari Doyle (2002) juga menyatakan proses distribusi konten merupakan bagian dari kegiatan industri media. Menurut Agus dan Ismail kesamaan pada kegiatan industri media dan *new*

⁵ *Cover all side* merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan produk konten yang dihasilkan industri media telah mampu memberi kepuasan kepada setiap sudut pandang konsumen.

media menyebabkan terjadinya persaingan dalam mendapatkan iklan, sementara industri *new media* tidak terkena pajak seperti industri media massa. Rizal menyatakan bahwa media sudah memberi masukan kepada pemerintah mengenai tidak seimbang lingkungan bisnis media. Namun media sendiri menurut Lia saat ini juga menjalankan bisnis pendukung dengan membuat *event*, pengelolaan konten media sosial, dan lain-lain karena media harus terus melakukan inovasi untuk bertahan.

Menurut Tristan, bisnis media di Indonesia juga terdapat media asing ataupun keberadaan Wikileaks yang menyebarkan informasi tidak valid yang berpotensi berhadapan dengan kepentingan nasional. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebenarnya sudah mengatur peredaran maupun pendirian kantor perwakilan media asing yang akan terikat dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Helmi menambahkan bahwa media nasional diharapkan mendukung sudut pandang kepentingan nasional pada isu nasional yang menjadi perhatian internasional walaupun tetap harus tetap menjaga kemerdekaan pers. Lia dan Rizal menjelaskan bahwa justru keberadaan media asing akan menambahkan sudut pandang yang akan mencerdaskan masyarakat, namun media nasional tetap berupaya memberikan analisis yang berdasarkan latar belakang pengetahuan kondisi Indonesia.

Permasalahan lain terjadi ketika pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pada konten informasi. Menurut Ismail, kesulitan dalam berhubungan langsung dengan media menyebabkan masyarakat melakukan kontra narasi melalui media sosial. Lia memandang media tidak boleh ikut membalas keluhan masyarakat melalui narasi negatif, justru media harus memandang kontra narasi masyarakat tersebut merupakan kontrol kualitas media. Dalam kasus keluhan masyarakat, Yosep menyatakan Dewan Pers selalu menganjurkan agar setiap keluhan langsung ditujukan kepada media dengan menyertakan pemberitahuan kepada Dewan Pers. Industri media massa harus memiliki kesadaran untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat serta menyadari kesalahan dan melakukan klarifikasi apabila terbukti melakukan kesalahan.

Ismail mengatakan teknologi informasi saat ini mempermudah berhubungan dengan antar SDM internal media. Lia menambahkan telepon genggam dan internet sangat membantu dalam berkomunikasi internal media, melakukan *monitoring* terhadap inovasi dari pesaing, serta menjalin relasi dengan berbagai *stakeholder* media. Tristan menjelaskan bahwa media nasional diharapkan mampu mengembangkan bisnis dan pengaruhnya kepada masyarakat internasional dengan membuka siarannya di luar negeri. Namun hingga saat ini Rizal dan Lia menyatakan industri media nasional mendistribusikan konten melalui *new media* untuk memenuhi kebutuhan konsumen di luar negeri.

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu menyebabkan pemerintah tidak boleh menghalangi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Namun, Industri media harus menyadari bahwa konten yang kebijakan internal industri sendiri juga tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers. Industri media harus menyadari bahwa industri media bukan merupakan media humus untuk suatu partai politik atau suatu kelompok tertentu. Industri media harus berperan sebagai perantara opini pro dan kontra yang mencakup berbagai sudut pandang pada masyarakat sehingga harus bersikap netral dan objektif.

3.4. Pengaruh pada *Extramedia Level*

Keberadaan institusi di luar dari industri media tentu juga mempengaruhi isi media melalui kekuatan dan kebijakan seperti mengenai pers, penyiaran, dan lain-lain. Puspitasari menyatakan bahwa sudut pandang *stakeholder* memiliki ekspektasi yang beragam sehingga menjadi tantangan untuk media dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan pemerintah cenderung terlambat dalam mengantisipasi kebijakan terhadap industri *new media*. Namun Yosep dan Helmi menjelaskan kebijakan ketika berhubungan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran maka berhubungan dengan KPI yang menangani program penyiaran di televisi dan radio, ketika berkaitan dengan

produk jurnalistik maka berhubungan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi tanggung jawab Dewan Pers, dan apabila berhubungan dengan informasi di internet maka Kemenkominfo mampu memblokir berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru yang sudah mengamanatkan wewenang kontrol kepada penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah saat ini sudah memiliki perhatian terhadap ancaman *media warfare* sehingga pengontrolan dan penindakan terdapat UU yang cukup menjadi dasar.

Menurut Tristan, saat ini banyak media yang mengutip berita dari media luar negeri dan terdapat ancaman perekrutan teroris melalui internet. Bahkan menurut Helmi, BSSN yang merupakan lembaga baru, perlu untuk terlibat dalam koordinasi penanganan ancaman isi konten informasi pada ruang siber. Tristan juga menambahkan bahwa Kemhan menyadari ancaman telah timbul akibat teknologi informasi sehingga Kemhan terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait dan mendorong disahkannya RUU SDN untuk mendukung sistem pertahanan negara.

Konsep pertahanan juga harus mampu melindungi negara dari serangan non fisik seperti ancaman teknologi informasi yang dipaparkan oleh Suryohadiprojo (2005). Agus menyatakan pemerintah cenderung terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi yang terlihat dari lambatnya pengesahan RUU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatur penyiaran digital, sedangkan saat ini penyiaran media sudah melalui internet. Padahal dalam penelitian Praditya (2016) telah dinyatakan bahwa hukum merupakan salah satu pendekatan dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Yosep juga menyatakan DPR komisi 1 yang juga bertindak sebagai koordinasi kerja dan penyusun kebijakan yang berkaitan dengan keamanan informasi harus terus melakukan evaluasi kebijakan. Pada kondisi ancaman *media warfare*, kesadaran dari berbagai *stakeholder* lain juga dibutuhkan.

Dampak lain pada keadaan lingkungan bisnis akibat kehadiran industri *new media* yang merupakan industri baru berbasis internet ini menurut Agus dan Puspitasari perlu segera ditanggapi oleh pemerintah. Menurut Ismail, kehadiran industri *new media* seperti aplikasi transportasi, media sosial, *search engine*, dan lain-lain sudah memiliki dampak positif maupun negatif yang besar pada masyarakat. Namun menurut Helmi, Kemenkominfo saat ini hanya mampu melakukan pendekatan bisnis agar perusahaan *new media* memiliki kantor perwakilan dan server di Indonesia sehingga kontrol dan proses digital forensik akan semakin mudah ketika terjadi berbagai ancaman dan pelanggaran. Agus dan Rizal menyatakan bahwa industri *new media* juga perlu mendapatkan kewajiban pajak sebagai bentuk kedaulatan fiskal negara pada ruang siber. Namun menurut Helmi, industri *new media* terkendala pada kesiapan dari lokasi untuk pembangunan *data center* sehingga pemerintah harus mendukung industri-industri nasional pembangun *data center*.

Agus, Ismal, dan Puspitasari menyatakan pemerintah juga harus menyadari peran industri media massa yang dibutuhkan sehingga keberadaannya harus dilindungi dan dijaga melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Yosep menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) juga sedang membuat naskah komunikasi dan keamanan terkait media dan meminta Dewan Pers untuk memberikan sudut pandang. Tristan juga menambahkan bahwa terkait *media warfare* saat ini Kemhan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah membuat koordinasi dengan Dewan Pers. Dengan begitu Dewan Pers juga telah memberikan sudut pandang berkaitan dengan ancaman digital, *proxy war*, dan lain-lain terhadap Negara. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan kontrol perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi ancaman *media warfare*.

Perkembangan industri media asing di Indonesia tentu tidak dapat untuk dihentikan. Walaupun memiliki potensi berhadapan dengan kepentingan nasional, keberadaan sumber informasi yang beragam sebenarnya meningkatkan kecerdasan masyarakat. Berdasarkan sudut pandang internal, kehadiran industri *new media* menimbulkan persaingan yang tidak berimbang dalam mendapatkan

iklan. Kebutuhan industri media nasional dari sisi bisnis tentu menyebabkan industri memiliki fokus terhadap profit. Keterkaitan pemilik media nasional dengan partai politik juga cenderung menurunkan kepercayaan atas kredibilitas media. Bahkan kendala dalam menjalin hubungan dengan konsumen menyebabkan keluhan dilakukan melalui media sosial sehingga sulit untuk dikontrol. Perkembangan teknologi seharusnya mampu mempermudah industri media dalam menjalin hubungan dengan konsumen. Industri media harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri atau menyebarkan kontennya melalui media sosial agar pengaruh industri media nasional dapat meningkat.

Kebijakan yang mengatur industri *new media* di Indonesia hingga saat ini cenderung masih terlambat. Lambatnya kebijakan tentu berdampak pada kesulitan negara dalam menunjukkan kedaulatan negara karena batas-batas kedaulatan pada ruang siber hanya dapat ditunjukkan melalui regulasi-regulasi yang mengatur. *New media* sebagai suatu industri tentu berupaya memanfaatkan celah-celah regulasi karena industri merupakan entitas yang memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Namun celah hukum ini menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak berimbang pada bisnis media sehingga berdampak pada meningkatnya potensi ancaman *media warfare*. *Stakeholder* eksternal harus mampu melindungi keberadaan industri media nasional karena industri media nasional memiliki peran dalam menjaga demokratisasi yang baik.

3.5. Pengaruh pada Social Systems Level

Menurut Agus, pada perkembangan informasi di dunia internet juga terdapat perbedaan yang kecil antara ruang pribadi dan ruang publik. Dalam hal ruang pribadi dan ruang publik menurut Helmi sebenarnya *new media* telah memiliki metode untuk membuat data identitas, konten informasi, dan lain-lain dari penggunaannya tidak dipublikasikan secara publik melalui fitur persetujuan penggunaannya. Fetra juga menyatakan bahwa konten informasi pada media sosial memang merupakan UGC sehingga pembuat konten adalah individu pengguna media sosial bukan industri.

Namun Ismail menyatakan pandangan bahwa perusahaan *new media* hanya membangun *platform* melalui algoritma, sistem, dan berbagai ilmu teknologi informasi perlu diubah karena *new media* juga berhubungan dengan proses penyebaran hingga penyimpanan informasi. Pernyataan Ismail ini senada dengan teori *new media* yang dipaparkan McQuail (2010) yang menjelaskan bahwa *new media* berfokus pada proses, pertukaran, dan penyimpanan pesan informasi. Begitu juga dengan teori industri media dari Doyle (2002) yang menjelaskan pendistribusian konten informasi termasuk dalam kegiatan industri media. Puspitasari menyatakan bahwa perusahaan *new media* harus memiliki tanggung jawab terhadap konten informasinya.

Agus memaparkan dampak negatif beruntun dari perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan informasi semakin tidak bisa dirahasiakan. Industri *new media* memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengolah data informasi yang besar sehingga menjadi data *behavioural* masyarakat. Data *behavioural* yang didapat melalui identitas konsumen seperti latar belakang, ideologi, agama, teman perkumpulan, penyakit, hobi, dan lain-lain memang ditujukan untuk menganalisa kecenderungan konsumtif produk untuk periklanan. Namun Tristan juga menambahkan bahwa terdapat juga ancaman bahwa data *behavioural* tersebut dapat diolah menjadi analisa kecenderungan kondisi ideologi, agama, politik, dan sosial di Indonesia. Kemampuan *new media* dalam mengumpulkan informasi bahkan dapat menyaingi kemampuan BIN yang merupakan badan intelijen.

Berdasarkan teori *information warfare* yang dipaparkan Libicki (1995), salah satu bentuk *information warfare* adalah PSYOPS. Macdonald (2007) bahkan memperkuat teori *information warfare* tersebut dengan memaparkan penggunaan ilmu komunikasi media sudah terjadi saat ini. Gun menyatakan potensi ancaman dari teknologi informasi ini berbahaya ketika digunakan dengan tujuan mengganggu kedaulatan dan kesatuan Indonesia. Pandangan Ismail menyatakan Informasi

yang ada pada *new media* juga membentuk opini publik seperti media massa dan begitu banyak informasi yang tidak valid, *hoax*, dan lain-lain. Pada kondisi *media warfare* ini menurut Tristan dan Ismail, Industri media nasional memiliki peran kontra dengan konten yang bermuatan kepentingan nasional.

Kehadiran *new media* kemudian ditambah adanya media *online* yang tidak punya kredibilitas saat ini justru menjadi ancaman terhadap demokratisasi. Puspitasari menyatakan permasalahan timbul pada media sosial karena adanya kepentingan yang beragam dan mengutip dari media *online* yang tidak kredibel atau orang yang memiliki kepentingan pribadi justru membuat sendiri media *online*. Indonesia sebagai negara demokrasi menurut Helmi harus menjaga kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers. Media tanpa badan hukum seperti media komunitas dan media humas memiliki hak menyebarkan informasi dengan kepentingan organisasinya, namun Yosep menyatakan bahwa kebebasan berpendapat ini tetap memiliki batasan kompetensi komunitas tersebut dan tidak mengandung kebencian SARA. Helmi juga menambahkan penyebaran konten kebencian SARA dapat dikenakan peringatan, pemblokiran, hingga pidana.

Namun Agus menyatakan bahwa ketika terjadi kejenuhan masyarakat akibat perdebatan panjang pada media sosial menyebabkan masyarakat ingin kembali menikmati media massa. Namun justru masyarakat cenderung menemukan bahwa kualitas media massa justru semakin memburuk. Seperti yang dijelaskan Ismail bahwa media massa berusaha memberikan konten yang disukai oleh suatu kelompok yang kemudian konten tersebut digunakan oleh suatu kelompok untuk menyerang kelompok yang lain, kondisi media sosial ini menyebabkan polarisasi pada masyarakat.

Pengaruh media yang dianggap memiliki kredibilitas yang dipaparkan oleh Aitken (2007), konten media mampu berpengaruh pada politik, agama, dan ideologi masyarakat. Menurut Lia dan Puspitasari, walaupun media massa memiliki pengaruh yang besar namun pengaruh media sosial yang kecil menjadi lebih besar dari pada media massa akibat jaringan yang dimiliki oleh KOL pengguna media sosial yang menyebarkan informasi. Pada kondisi saat ini memang media sosial terasa memiliki efek yang lebih besar dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Rizal dan Lia menyatakan hubungan antara *new media* dan media massa saling menguntungkan sekaligus saling bersaing. Menurut Puspitasari, industri *new media* memiliki efek yang lebih besar di Indonesia karena disebabkan kurangnya *reading habit* masyarakat Indonesia dan justru cenderung memiliki *conversation habit*.

Tristan dan Gun menyatakan industri media harus menyadari bahwa kehadiran *new media* tidak mampu menggantikan peran media massa pada kontrol demokrasi negara. Lia dan Rizal juga menyatakan teknologi *new media* sebagai pendukung penyebaran produk konten informasi. Pada kondisi ini, Lia dan Agus menyatakan industri media harus mampu beradaptasi dan berinovasi dan kembali meningkatkan kualitas konten informasi yang tidak didapatkan pada *new media*. Fetra menyatakan kesadaran kepentingan masyarakat Indonesia harus didukung media dengan upaya pemberitaan maupun kritik membangun yang positif.

Perkembangan teknologi menyebabkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Masyarakat mengharapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak yang harus dipenuhi, namun masyarakat harus menyadari bahwa kebebasan tentu memiliki dampak negatif kepada *social system*. Jika masyarakat memahami ancaman *media warfare*, maka sudut pandang kebebasan berekspresi tentu akan berubah menjadi kemerdekaan menyatakan pendapat dengan batasan-batasan yang harus diatur. Masyarakat harus menyadari bahwa pertahanan dan keamanan negara akan berdampak pada *social system* sehingga keberadaan regulasi dibutuhkan untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat.

4. PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi yang berdampak negatif dengan timbulnya ancaman *media warfare* sudah sangat nyata dirasakan di Indonesia. Kesimpulan penelitian bertujuan untuk menyelesaikan fokus permasalahan dengan menganalisis pengaruh industri media nasional dalam rangka menghadapi ancaman *media warfare*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sudut pandang serta pengaruh *stakeholder* eksternal maupun internal pada kondisi ancaman *media warfare*.

Keadaan lingkungan dari kesulitan validasi informasi, kehadiran industri *new media*, dan industri media asing berpotensi pada ancaman *media warfare*. Kesulitan pemerintah dalam penyusunan regulasi pada kondisi perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan berbagai kepentingan *stakeholder* sangat mempengaruhi industri media nasional. Kondisi internal industri media pada kualitas kompetensi individu jurnalis harus ditingkatkan dan terdaftar pada organisasi pers yang diakui oleh Dewan Pers sehingga dapat dikontrol. Selain kebutuhan profit pada rutinitas produksi, industri media juga harus menyadari perannya dalam menghadapi *media warfare*. Pengaruh organisasi internal dan pemilik media juga harus menyadari bahwa kondisi pertahanan dan keamanan negara akan berdampak pada keberlangsungan bisnis media.

Industri media nasional yang harus memiliki kepentingan menjaga demokrasi pada ruang informasi berhadapan dengan berbagai kepentingan internal maupun eksternal. Koordinasi antara *stakeholder* eksternal dengan *stakeholder* internal media dalam menghadapi ancaman *media warfare* dibutuhkan untuk penyusunan regulasi serta menjaga kemerdekaan pers pada batasan norma, hukum, dan etika sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan stabil dan meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia.

Ancaman akibat perkembangan teknologi informasi dapat dikurangi melalui regulasi yang memberikan lingkungan stabil. Pertahanan dan keamanan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis media. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah dibutuhkan untuk mendorong DPR mengevaluasi terkait keberadaan *new media*. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa industri media nasional harus menyadari dampak pertahanan dan keamanan pada bisnis media. Manajemen *sales and marketing* tidak boleh hanya berpandangan pada keuntungan, akan tetapi juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga independen. Sementara itu, pemimpin redaksi juga perlu menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga demokratisasi yang baik dan meningkatkan perannya dalam kondisi ancaman *media warfare*. Industri media disarankan mengadakan pelatihan jurnalistik dengan bermuatan bela negara untuk seluruh SDM khususnya jurnalis.

Perkembangan ancaman yang ada di Indonesia yang saat ini selain ancaman militer terdapat juga ancaman nonmiliter serta ancaman hibrida. Penelitian menunjukkan manfaat bahwa kajian industri media dapat berkontribusi pada sistem pertahanan negara. Namun, kajian industri pertahanan cenderung fokus kepada industri senjata yang bersifat militer sehingga diperlukan kajian industri pertahanan untuk menganalisis industri yang mampu berperan dalam setiap ancaman terhadap NKRI. Penelitian ini juga dibangun dengan menunjukkan manfaat penggunaan *framework hierarchy of influences* dengan menentukan sumber yang berkaitan industri media massa dengan ancaman *media warfare*. Namun pada penelitian ini hanya berfokus kepada sudut pandang pemerintah, institusi independen, industri media, dan masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu dikembangkan dengan memperhatikan sudut pandang Lembaga Keamanan Negara seperti BIN, BNPT, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga bisa menghadirkan sudut pandang DPR Komisi 1 yang memiliki wewenang pada pertahanan, informasi, hingga intelijen. Penelitian ini dibangun dengan menentukan sumber yang berkaitan dengan industri media nasional dan dapat memperlihatkan strategi yang dibutuhkan dalam mengelola ancaman *media warfare*. Namun ancaman *information warfare* tidak hanya *media warfare* dan dapat bersifat militer maupun

nirmiliter merupakan kajian strategis. Penelitian tentang analisa kondisi dan dampak peperangan informasi pada media sosial di Indonesia sangat dibutuhkan untuk dijadikan penelitian selanjutnya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT serta *sholawat* semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan peneliti mengungkapkan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi pada penyusunan penelitian ini, yaitu jajaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia, PT. MNC, Tbk, serta Ismail Fahmi dan Puspitasari. Pada akhirnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap *stakeholder* terkait maupun pengembangan ilmu pertahanan. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitken, R. (2007). *Can We Trust the BBC?* (reprint). Bloomsbury Academic.
- Alguliev, R. M., Aliguliyev, R. M., & Alekperova, I. Y. (2014). Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in wikimedia. *Automatic Control and Computer Sciences*, 48(2). <https://doi.org/10.3103/S0146411614020023>
- Croteau, D., & Hoynes, W. (2013). *Media/society: Industries, images, and audiences* (5th ed.). Sage Publications.
- Doyle, G. (2002). *Understanding Media Economics*. London: Sage Publications.
- Fahmi, I. (2017a). Drone Emprit: Studi Kasus dan Demo. Retrieved from <https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/drone-emprit-studi-kasus-dan-demo>
- Fahmi, I. (2017b, March 14). Peran Media dalam Pembuatan dan Klarifikasi Hoax “Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan.” Retrieved July 29, 2017, from <http://www.portal-islam.id/2017/03/peran-media-dalam-pembuatan-dan.html>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach. Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Gaspersz, V. (2011). *Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan Industri Cetakan ketujuh/Edisi Revisi dan Perluasan* (7th ed.). Jakarta: Vinchristo Publication.
- Green, D. (2017). *Framing Brexit: A Comparative Study on Agenda and Frame Building in Coverage of the United Kingdom's EU Referendum*. University of Tartu.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999)*. Makara, Sosial Humaniora (Vol. 8). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016). Perkembangan Terkini mengenai Pemblokiran Akses Aplikasi Telegram. Retrieved July 29, 2017, from https://kemenkominfo.go.id/content/detail/10115/siaran-pers-no-86hmKemenkominfo072017-tentang-perkembangan-terkini-mengenai-pemblokiran-akses-aplikasi-telegram/0/siaran_pers
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2017). *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Libicki, M. C. (1995). *What Is Information Warfare?* National Defense University.
- Lund, A. B. (2016). A stakeholders approach to media governance. In G. F. Lowe & C. Brown (Eds.), *Managing media firms and industries* (pp. 103–120). Springer International Publishing.
- Macdonald, S. (2007). *Propaganda and Information Warfare in the Twenty-First Century: Altered images and deception operations*. Routledge. London: Routledge.
- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory*. SAGE Publications (Vol. 6th). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446262467>
- Miniwatts Marketing Group. (2016). Internet users in the Top 20 countries as March 31, 2017. Retrieved July

- 29, 2017, from <http://www.internetworldstats.com/top20.htm>
- Miniwatts Marketing Group. (2017). Internet users in Asia estimated in March 31, 2017. Retrieved July 29, 2017, from <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>
- Praditya, Y. (2016). *Keamanan di Indoensia*. Depok: Nadi Pustaka.
- Puspitasari. (2016). *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Penerbit Libri.
- Reese, S. D., & Shoemaker, P. J. (2013). *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. Routledge.
- Shao, C., Ciampaglia, G. L., Flammini, A., & Menczer, F. (2016). Hoaxy: A platform for tracking online misinformation. In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web. *International World Wide Web Conferences Steering Committee*.
- Suryohadiprojo, S. (2005). *Si vis pacem para bellum: membangun pertahanan negara yang modern dan efektif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryokusumo, S. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Weimann, G. (2014). *New terrorism and new media*. Washington, DC. Retrieved from <http://commonslib.wilsoncenter.org>
- Yavuz, M. H., & Koç, R. (2016). The Turkish coup attempt: The Gülen movement vs. The state. *Middle East Policy*, 23(4), 136–148. <https://doi.org/10.1111/mepo.12239>
- Zingarelli, M. E. (2010). *The CNN effect and the Al Jazeera effect in global politics and society*. Georgetown University.

Priori Versus A Posteriori

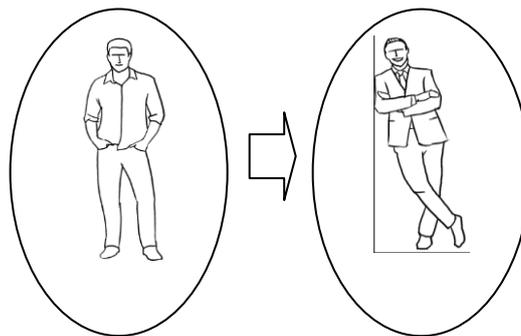
Dalam metode penelitian, pada dasarnya dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dua pendekatan ini sangat kontras prinsipnya dalam proses pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif berbasis pada prinsip *a priori* (*from the earlier*) dan pendekatan kualitatif berbasis pada prinsip *a posteriori* (*from the latter*). Guna memudahkan pemahaman terhadap kedua prinsip dimaksud, di bawah ini disajikan dua visualisasi yang sederhana. Visualisasi pertama yaitu *A PRIORI* menggambarkan jarak yang tegas antara peneliti dan yang diteliti. Keduanya berada dalam dua himpunan yang berbeda. Visualisasi kedua yaitu *A POSTERIORI* menggambarkan tiadanya jarak, atau alias menyatunya antara peneliti dan yang diteliti. Keduanya berada dalam satu himpunan yang sama.

Prinsip Pengumpulan Data

1) *A PRIORI*

PENELITI

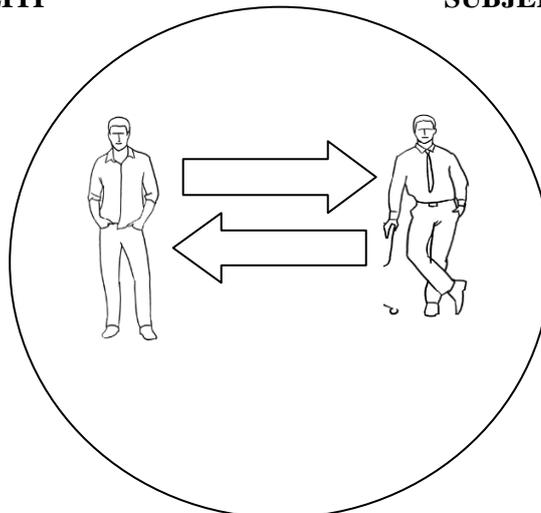
OBJEK PENELITIAN



2) *A POSTERIORI*

PENELITI

SUBJEK TELITIAN



**ANCAMAN PRIVASI DAN DATA MINING DI ERA DIGITAL:
ANALISIS META-SINTESIS PADA *SOCIAL NETWORKING SITES* (SNS)
*THREAT ON PRIVACY AND DATA MINING IN DIGITAL ERA:
A META-SYNTHESIS ANALYSIS ON SOCIAL NETWORKING SITES (SNS)***

Vannyora Okditazeini¹, Irwansyah²

¹Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Indonesia

²Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Indonesia

¹vannyora2013@gmail.com; ²irwansyah@ui.ac.id

Diterima tgl. 09/03/2018; Direvisi tgl. 04/10/2018; Disetujui tgl. 17/10/2018

ABSTRACT

This paper will elaborate how the threats to privacy and data mining on SNS (Social Networking Sites / Online Social Networking). By first exposing the concept of privacy and data mining itself in the big data industry nowadays, the authors offer a meta-synthesis analysis to conduct the research. Various references and literature studies were conducted to find data relevant to the issue of privacy threats and data mining on the SNS. The conceptual elaboration results found that the threat of privacy and data mining on SNS can be categorized into three things: threats of multimedia content, traditional threats, and social threats. Each category is clustered into several types of threats. The authors identify in addition to utilizing the privacy features that have been provided by the SNS site, the user must also as early as possible literated themselves to distinguish information and secrets. Users should be aware in selecting what content should be disseminated in the SNS and which are not.

Keywords: *Privacy, Data Mining, SNS, Big Data*

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana ancaman terhadap privasi dan *data mining* di SNS (*Social Networking Sites/Jejaring Sosial Online*). Dengan lebih dahulu memaparkan konsep atas privasi dan *data mining* itu sendiri dalam industri *big data* saat ini, penulis menawarkan analisis meta-sintesis. Berbagai referensi dan studi literatur dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan isu ancaman privasi dan *data mining* pada SNS. Hasil elaborasi konseptual peneliti menemukan bahwa ancaman privasi dan *data mining* pada SNS dapat dikategorikan dalam tiga hal: ancaman konten multimedia, ancaman tradisional, dan ancaman sosial. Setiap kategori diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe ancaman. Penulis mengidentifikasi selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah disediakan oleh situs SNS, pengguna sendiri juga harus sedini mungkin meliterasi dirinya untuk membedakan informasi dan rahasia. Pengguna harus sadar dalam menyeleksi konten apa yang harus disebar di SNS dan mana yang tidak.

Kata Kunci: *Privasi, Data Mining, SNS, Big Data*

1. PENDAHULUAN

Jejaring sosial online (*Social Networking Sites/SNS*) menjadi hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat saat ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang menginvasi corak dan pola interaksi masyarakat. Ditambah dengan teknologi baru yang semakin gencar mengembangkan inovasi-inovasi sehingga masyarakat secara tidak langsung harus mengikutinya. SNS menjadi sarana untuk mengatasi sebagian besar permasalahan di berbagai bidang, baik itu komunikasi, birokrasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan bawaan sifatnya yang cepat, mudah, dan dengan biaya yang murah, media sosial menjadi alternatif untuk tetap berhubungan dengan orang lain.

SNS ini menjadi populer karena memfasilitasi pengguna untuk tetap bisa terhubung (*log in*) secara terus menerus sehingga para pengguna tersebut tetap dapat menerima pesan dari kolega dan

kerabat setiap harinya. Para pengguna bisa berhubungan dengan komunitas-komunitas virtual lainnya, baik itu dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan bahkan dengan orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Menurut Henson et.al, dalam beberapa dekade terakhir SNS telah berevolusi dari dunia baru yang menghibur menjadi industri global bernilai miliaran dolar, dengan pengguna dari berbagai kalangan (Henson, Reysn, & Fisher, 2011, p. 253). Sehingga, hal ini memunculkan industri baru dalam SNS.

Penggunaan SNS mendorong seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadinya (misalnya usia, orientasi seksual atau politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lain-lain) (Milham & Atkin, 2018, p. 55). Tentunya pengungkapan informasi pribadi ini penuh dengan resiko. Seperti penelitian yang dilakukan Clemens et.al (2015) (dalam Milham & Atkin, 2018, p. 57), bahwa pengungkapan informasi ini dicurigai dapat mengakibatkan pencurian identitas ataupun sanksi di sekolah atau tempat kerja karena mengangkat suatu isu yang sensitif. Dalam penelitiannya, Henson et. al menunjukkan hasil bahwa sekitar 42% pengguna mahasiswa SNS mengalami beberapa bentuk ancaman privasi selama hidup mereka, ini menjadi masalah penting yang membutuhkan perhatian lebih lanjut (Henson, Reysn, & Fisher, 2011, p. 267).

Social Networking Sites (SNS) merupakan jenis jasa web untuk membangun jaringan virtual diantara orang yang memiliki kesamaan minat, latar belakang dan aktivitas (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 43). SNS dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena menghilangkan batas ekonomi dan geografi, dan juga dapat berguna dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan pencarian kerja, hiburan dan pendidikan. Namun, Rathore et.al (2017) mengidentifikasi kepopuleran SNS tersebut juga menciptakan resiko yang tinggi bagi penggunanya. Ketika sejumlah data pribadi dibagikan dalam SNS menjadikan pengguna target yang menggoda untuk diserang, seperti spam, malware, socialbots dan pencurian identitas. Bahkan penyerang dapat juga menemukan data signifikan lain, seperti informasi akun bank, yang kemudian digunakan untuk kejahatan seperti penipuan, kemudian identitas pribadi dan lokasi (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 44).

Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana ancaman terhadap privasi dan *data mining* di SNS. Dengan lebih dahulu memaparkan konsep atas privasi dan *data mining* itu sendiri dalam industri *big data* saat ini, penulis menawarkan paparan konseptual. Berbagai referensi dan studi literatur dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan isu ancaman privasi dan *data mining* pada SNS. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis membatasi permasalahan pada hal-hal berikut:

- 1) Bagaimana ancaman privasi dan *data mining* di jejaring sosial online (SNS); dan
- 2) Bagaimana konseptualisasi ancaman terhadap privasi dan *data mining* di industri digital?

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan tulisan konseptual yang mengadaptasi pedoman meta-sintesis dari Francis dan Baldesari dengan pendekatan meta-agregasi kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam meta-sintesis digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan "meta-sintesis". Secara definisi, meta-sintesis adalah teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkat pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002, p. 34).

Dalam melakukan meta-sintesis (sintesis data kualitatif) terdapat 2 (dua) pendekatan, yakni meta-agregasi (*meta-aggregation*) dan meta-etnografi (*meta-ethnography*) (Lewin, 2008, p. 189). Pada meta-agregasi, sintesis bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*review question*) dengan cara merangkum berbagai hasil penelitian (*summarizing*). Sementara, meta-etnografi,

sintesis bertujuan untuk mengembangkan teori baru (*new theory*) dalam rangka melengkapi teori yang sudah ada.

Pada meta-agregasi topik penelitian dielaborasi menjadi tema-tema tertentu untuk menghasilkan kerangka analisis (*conceptual framework*). Kemudian, dalam tema-tema tertentu tersebut dilakukan pencarian artikel hasil penelitian yang relevan dan dibandingkan dan dirangkum antar yang satu dengan yang lainnya. Pada pendekatan meta-agregasi, hasil sintesis merupakan “agregat” dari berbagai hasil penelitian sesuai dengan tema yang relevan.

Francis dan Baldesari mengidentifikasi langkah-langkah dalam melakukan meta-sintesis (Francis & Baldesari, 2006, p. 92):

1) Memformulasikan pertanyaan penelitian (*formulating the review question*)

Fokus dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ancaman privasi dan *data mining* pada *Social Networking Sites* (SNS). Untuk itu dirancang beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya dari hasil kajian literatur ini.

Pertanyaan 1 (Q1) : Di forum publikasi apa pembahasan mengenai privasi dan *data mining* diterbitkan?

Pertanyaan 2 (Q2) : Apa saja permasalahan/isu yang ditemukan dalam penelitian yang ada?

Pertanyaan 3 (Q3) : Bagaimana kontribusi masing-masing konsep pada pengintegrasian SNS?

2) Melakukan pencairan literatur (*conducting a systematic literature search*)

Pada kajian literatur ini sumber data yang akan digunakan adalah makalah yang tersedia pada halaman website SAGE (<https://www.journals.sagepub.com>). Semakin banyak sumber data yang digunakan maka kemungkinan untuk menemukan literatur yang sesuai juga semakin besar. Strategi dalam melakukan pencarian dibangun melalui penentuan kata kunci dan sinonim dari fokus kajian.

3) Melakukan *screening* dan seleksi artikel penelitian yang cocok (*screening and selecting appropriate research articles*)

Penerapan pencarian tersebut berkemungkinan menghasilkan jumlah makalah yang cukup banyak. Oleh karena itu, identifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh makalah yang dapat dijadikan studi primer. Identifikasi dapat dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Penerapan kriteria inklusi dan eksklusi ini akan menjamin bahwa makalah yang digunakan adalah makalah yang benar-benar sesuai dengan konteks kajian.

a) Kriteria Inklusi

- Makalah yang menjelaskan konsep, manfaat, teknik, metode, strategi, dan segala sesuatu dalam penerapan privasi dan *data mining* pada SNS secara bersamaan
- Makalah yang disajikan dalam Bahasa Inggris.

b) Kriteria Eksklusi

- Makalah yang hanya fokus pada pembahasan privasi di SNS saja
- Makalah yang hanya fokus pada pembahasan *data mining* di SNS saja
- Makalah yang fokus pada pembahasan privasi di SNS dengan disiplin konsep selain *data mining*
- Makalah yang fokus pada pembahasan *data mining* di SNS dengan disiplin konsep selain privasi

4) Melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif (*analyzing and synthesizing qualitative findings*)

Prosedur pemilihan makalah dilakukan dengan teknik membaca cepat seluruh kandidat studi primer. Membaca cepat yaitu membaca bagian abstraksi dari makalah yang tersedia. Selanjutnya berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat maka dapat ditentukan apakah makalah tersebut dapat dijadikan studi primer.

5) Memberlakukan kendali mutu (*maintaining quality control*)

Berdasarkan perencanaan review yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi rencana tersebut. Eksekusi pencarian pada halaman website yang dijadikan sumber data menghasilkan 151 makalah yang merupakan kandidat studi primer.

6) Menyusun laporan akhir (*presenting findings*)

Selanjutnya diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan cara membaca bagian abstraksi dari seluruh kandidat studi primer. Penerapan kriteria inklusi dan eksklusi menghasilkan sebanyak 13 makalah studi primer yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Eksekusi Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Tahun Publikasi	Jurnal
1997	Brennen, B., & Primeaux, D.
2008	Boyd, D
2011	Henson, B., Reyns, B., & Fisher, B.
2015	Chen, F., Deng, P., Wan, J., Zhang, D., Vasilakos, A., & Rong, X.
2016	Guo, L Kitchin, R., & McArchie, G.
2017	Baruh, L., & Popescu, M Kayes, I., & Iamnitchi, A. Rathore, S., Sharma, P., Loia, V., Jeong, Y.-S., & Park, J.-H. Liang, H., Shen, F., & Fu, K. Kennedy, H., Elgesem, D., & Miguel, C. Frith, J.
2018	Milham, M., & Atkin, D.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Konseptual

3.1.1 Definisi Operasional

a) Privasi

Sissela Bok mendefinisikan privasi sebagai ranah dimana masalah pribadi dan kebebasan tidak dirusak (Brennen & Primeaux, 1997, p. 23). Dari sudut pandang hukum, pengadilan telah memutuskan bahwa hak atas privasi adalah aspek mendasar dari budaya Barat. Di Amerika Serikat, Samuel Warren dan Louis D. Brandeis pertama-tama mengonsepsi privasi sebagai perumusan hukum dalam esainya tahun 1899: 'The Right to Privacy'. Dengan demikian, hukum privasi fokus pada 'pelarangan terhadap gangguan yang mendalam pada martabat manusia oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi atau pemerintahan' (Brennen & Primeaux, 1997, p. 24).

Wolak et al. (2008) meneliti hubungan antara interaksi online / kegiatan dan inisiasi yang merugikan privasi seseorang di Internet (Henson, Reyns, & Fisher, 2011, p. 255). Mereka menyimpulkan bahwa memposting informasi pribadi atau menggunakan SNS tidak dengan sendirinya berisiko perilaku, tetapi berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal dan memiliki orang yang tidak dikenal di daftar teman membuat remaja rentan terhadap ancaman privasi di SNS. Tampaknya dengan siapa pengguna berbagi informasi sensitif lebih penting dalam mencegah ancaman privasi online daripada mengatur profil seseorang ke akses pribadi, baik di kalangan pemuda dan mahasiswa.

Hasil penelitian yang dilakukan Milham dan Atkin (2018) mengkonfirmasi dan memperluas eksplorasi historis dari hubungan antara sikap privasi dan perilaku pengungkapan identitas pribadi, terutama di antara pengguna yang menempatkan perhatian lebih besar pada informasi pribadi mereka dan merasa protektif terhadapnya. Temuan Milham dan Atkin ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Child et.al (2011) (dalam Milham & Atkin, 2018, p. 65) tentang pengungkapan informasi pribadi ke publik. Hasil penelitian Child et.al mengkonfirmasi bahwa pengguna yang menitikberatkan perhatian lebih besar untuk masalah privasi, cenderung tidak

banyak yang menjadi korban penyalahgunaan pada SNS. Desain situs web yang sangat interaktif saat ini mendorong *oversharing* informasi pribadi yang tidak disadari, salah satu yang dikhawatirkan oleh pengguna SNS.

Privasi adalah fenomena spesifik budaya (Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1475). Ketika platform SNS menjadi global, pertanyaan mengenai praktik privasi dalam konteks lintas budaya menjadi semakin penting. Sebuah penelitian dari Liang et.al (2017) menguji variasi budaya pengaturan profil dalam privasi dan keterbukaan diri melalui fasilitas geolokasi di Twitter (Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1476). Liang et.al secara acak memilih 3,3 juta akun Twitter dari lebih dari 100 kelompok demografi masyarakat. Hasil penelitiannya mengungkapkan perbedaan budaya dan masyarakat yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku pengguna SNS dalam menggunakan pengaturan privasi di akunnya. Pengaturan privasi dalam masyarakat yang kolektif lebih efektif dalam mendorong keterbukaan diri, dan tampaknya kurang penting bagi pengguna dalam masyarakat yang coraknya individualistis. Penetrasi internet juga merupakan faktor signifikan dalam memprediksi baik adopsi pengaturan privasi dan geolokasi keterbukaan diri.

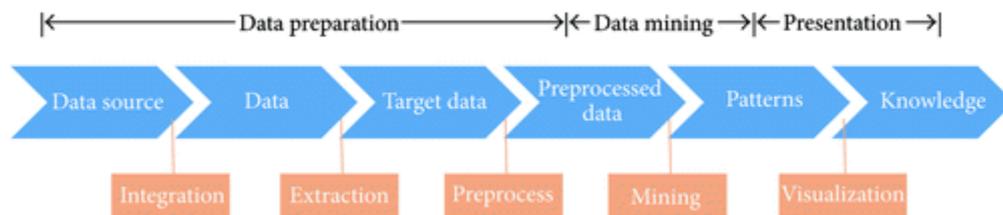
Dengan difusi teknologi internet, privasi online menjadi masalah utama yang dihadapi semua pengguna Internet. Kebocoran informasi pribadi yang tidak disengaja dapat menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif seperti penyalahgunaan akun, email yang tidak diminta atau panggilan telepon, atau bahkan kerugian finansial. Banyak pengguna SNS menyatakan keprihatinan serius tentang kebocoran informasi pribadi secara online. Namun, menurut Rainie dan Madden (2015) (dalam Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1477), hanya 30% dari semua orang dewasa AS telah mengambil langkah ini untuk melindungi privasi mereka secara online, seperti mengubah pengaturan privasi mereka di SNS.

Perbedaan sikap untuk mengubah peraturan privasi pada sejumlah pengguna terjadi karena cara bagaimana SNS digunakan saat ini; artinya, *cyberspace* didominasi oleh platform SNS (Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1478). Menurut Boyd (2008), praktik-praktik privasi di platform SNS sering paradoks. Di satu sisi, pengguna internet sering termotivasi untuk mengungkapkan informasi pribadi untuk menghadirkan identitas unik yang membedakan diri dari orang lain dan mengakumulasi modal sosial dalam SNS. Di sisi lain, perusahaan SNS mempertahankan sejumlah besar informasi pribadi yang dikumpulkan dari para penggunanya, dan informasi tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan (Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1479).

Untuk membantu mengatasi dilema ini, hampir semua platform SNS populer memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan privasinya. Pengguna dapat membuat aturan deterministik yang menetapkan bagian konten mana yang akan dibagikan, dan kepada siapa konten tersebut dapat diakses. Menurut Stutzman et.al (2011), ketika mengendalikan privasi mereka, individu cenderung mengungkapkan informasi lebih lanjut (Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1479). Telah banyak studi dilakukan untuk memahami perilaku perlindungan privasi pada platform media sosial (diantaranya Boyd dan Marwick, 2011; Madden et al., 2013; Stutzman et al., 2011; Stutzman dan Kramer-Duffield, 2010) (dalam Liang, Shen, & Fu, 2017, p. 1480).

b) *Data Mining*

Menurut Chen et.al, *data mining* adalah proses menemukan pengetahuan yang menarik dari sejumlah besar data yang disimpan baik dalam database, gudang data, atau repositori informasi lainnya (Chen, Deng, Wan, Zhang, Vasilakos, & Rong, 2015, p. 2). Berdasarkan definisi penambangan data dan definisi fungsi *data mining*, proses *data mining* yang umum meliputi langkah-langkah berikut:



Gambar 1: *Overview Data Mining*
(Chen, Deng, Wan, Zhang, Vasilakos, & Rong, 2015, p. 2)

Proses *data mining* berdasarkan *overview* dari Chen et.al dapat dijelaskan sebagai berikut (Chen, Deng, Wan, Zhang, Vasilakos, & Rong, 2015, p. 3):

1. Persiapan data: mempersiapkan data untuk *mining*. Hal ini mencakup 3 langkah mengintegrasikan data dalam berbagai sumber data dan membersihkan suara dari data. ekstrak beberapa bagian data ke dalam sistem *data mining*, pre-proses data untuk memfasilitasi *data mining*
2. *Data mining*: menerapkan algoritma ke data untuk menemukan pola dan mengevaluasi pola pengetahuan yang ditemukan
3. Presentasi data: memvisualisasikan data dan mewakili pengetahuan yang di-*mining* kepada pengguna

Kennedy et.al (2017) mengidentifikasi ketika penggunaan global SNS tumbuh, demikian juga dengan *data mining* di SNS (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 270). Data SNS dapat dipahami sebagai apa yang dikatakan dan dibagikan di SNS, yang mengatakan dan membagikannya, dimana mereka berada, kepada siapa mereka terhubung, seberapa berpengaruh dan aktifnya mereka dan seperti apa pola aktivitas mereka sebelumnya (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 271). *Data mining* ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis, mengatur, mengklasifikasikan dan memahami data tersebut, mulai dari menghitung *like* dan berbagi konten hingga mengukur jangkauan, sentimen dan pemberi pengaruh utama, menggunakan teknik seperti analisis jaringan sosial, analisis jaringan masalah dan pemrosesan bahasa alami, dan lain-lain (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 275).

Kennedy et.al juga mengkonfirmasi bahwa kenaikan *data mining* SNS telah didorong oleh sejumlah faktor: meningkatnya ketersediaan data pada pengguna dan perilaku online mereka, karena lebih banyak kegiatan sosial dilakukan secara online; penurunan biaya pengumpulan data, penyimpanan dan pemrosesan data; dan perluasan platform SNS dari mana banyak data ini diambil (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 275). Data SNS yang *mining* sering digabungkan dengan data dari sumber lain, seperti pengungkapan Edward Snowden tentang operasi *data mining* dari National Security Agency di Amerika Serikat dan Kantor Pusat Komunikasi Pemerintah di Inggris Raya. Dalam penelitiannya, Hill (2012) juga menemukan kasus atas *data mining*, misalnya, dalam iklan bertarget, seperti kasus yang tersebar luas dari wanita muda yang ayahnya menjadi sadar bahwa dia hamil ketika sebuah department store online menargetkan iklan untuk produk-produk terkait kehamilan kepadanya sebagai hasil dari pelacakan perilaku online-nya (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 276). Kejadian sehari-hari ini layak dipelajari sebagai bentuk *data mining* yang harus lebih diperhatikan.

Hasil penelitian Kennedy et.al (2017) memperlihatkan bahwa pengguna SNS tersebut banyak yang merasakan ketidakadilan atas data personal mereka yang diambil dari mereka. Menurutnya, ketidaknyamanan dari beberapa informan dengan apa yang platform SNS lakukan dengan informasi dan data mereka menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik platform dan harapan normatif pengguna (Kennedy, Elgesem, & Miguel, 2017, p. 279). Pertimbangan peserta tentang

bagaimana untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam kaitannya dengan praktik *data mining*, pada gilirannya, tampaknya menunjukkan minat di antara pengguna SNS dalam kemungkinan dunia SNS yang lebih adil.

c) *Big Data*

Istilah "big data" telah menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan beberapa dekade belakangan ini (Baruh & Popescu, 2017, p. 579). Menurut situs Wikibon (2014), perkiraan nilai pasar *big data* sebesar US \$ 50,1 miliar pada tahun 2015 (Baruh & Popescu, 2017, p. 580). Ekspansi yang cepat dari pasar *big data* memberikan efek khususnya pada munculnya model publikasi dengan pola yang baru beserta penggunaannya di berbagai bidang yang berbeda seperti *human digital* dan prediksi pemilihan pada suatu kampanye pemilihan pemimpin. Penerapan masalah big data yang sudah merambah ke berbagai area komersial menghasilkan perubahan besar dalam industri dengan dampak langsung atas kehidupan manusia, seperti asuransi, perawatan kesehatan, atau perbankan, dan lain-lain.

Big data adalah istilah luas yang digunakan untuk kumpulan data yang memiliki ukuran (misalnya, dimensi, volume, dan kecepatan) serta kompleksitas (misalnya keragaman, variabilitas) yang melebihi kemampuan alat yang digunakan secara tradisional untuk menangkap, memproses dan menganalisa data dalam kerangka waktu yang dapat ditolerir (Guo, 2016, p. 333). Dalam ilmu sosial, "*big data*" mengacu pada kumpulan data yang terlalu besar bagi manusia untuk mengkode sampel yang representatif dari keseluruhan dataset (Guo, 2016, p. 334)

Penelitian yang dilakukan oleh Kitchin dan McArdie (2016), mengidentifikasi 7 (tujuh) karakteristik *big data* (Kitchin & McArdie, 2016, p. 3):

1. Keluwesan (keseluruhan sistem data)
2. Berjaringan halus (mempunyai resolusi yang kecil) dan unik (antara satu data dan data lain berbeda, terutama ditandai dengan URL)
3. Relasionalitas (bisa digeneralisasikan dan memungkinkan untuk digabung dari dataset yang berbeda)
4. Ekstensionalitas (dapat menambah / mengubah bidang baru dengan mudah) dan skalabilitas (dapat meluas dalam ukuran dengan cepat)
5. Kebenaran (data bisa amburadul, *crowd* serta mengandung ketidakpastian dan kesalahan)
6. Nilai (banyak wawasan yang dapat diekstraksi dan data dialihkan)
7. Variabilitas (data yang artinya dapat secara konstan berubah dalam kaitannya dengan konteks di mana mereka dihasilkan)

Frith (2017) mengelaborasi penyebaran big data dalam melihat pertumbuhan kota pintar (*smart city*). Istilah kota pintar mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan data yang dapat meningkatkan efisiensi kota, kelayakan hidup warga, dan meningkatkan keselamatan warga (Frith, 2017, p. 169). Dalam artikel ini Frith menggunakan frasa kota pintar untuk merujuk ke proyek perkotaan berbasis data di kota-kota. Contoh dari penerapan big data pada kota pintar adalah penggunaan moda transportasi yang sudah canggih, teknologi untuk mendeteksi dan mitigasi bencana, penggunaan uang elektronik, dan lain-lain.

d) *Konseptualisasi Ancaman Privasi dan Data Mining*

Ancaman terhadap privasi dan *data mining* dikonseptualisasikan secara komprehensif oleh Shailendra Rathore, Pradip Kumar Sharma, Vincenzo Loia, Yong-Sik Jeong, dan Jong Hyung Park pada tahun 2017 dalam tulisan mereka *Social Network Security: Challenges, Threats, and Solutions*. Menurut Rathore et.al, dalam kaitannya dengan ancaman privasi dan *data mining*, terdapat beberapa kategori ancaman, diantaranya (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, pp. 53-54):

1. Ancaman Terhadap Konten Multimedia

Tipe ancaman yang terjadi dalam kategori ini adalah:

- Paparan konten multimedia.

- Kepemilikan bersama.
- Manipulasi konten.
- *Steganografi*. Adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui.
- Metadata.
- Link yang dibagi bersama.
- Transparansi data.
- *Tagging*.

2. Ancaman Tradisional

- *Phishing*, yaitu tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, Password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah email.
- *Malware (Malicious Software)*, yaitu suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware mencakup virus, *worm*, *trojan horse*, sebagian besar *rootkit*, *spyware*, *adware* yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC.
- Serangan *Sybil* dan profil palsu, yaitu kegiatan dengan menggunakan akun palsu untuk mengancam keamanan pengguna komputer.
- *Spamming*, yaitu kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki "smtp open relay" atau pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya dan hal ini sangat mengganggu bagi yang dikirim.
- Serangan de-anonimisasi, yaitu strategi pada *data mining* dimana data yang tidak dikenal (anonim) dirujuk dengan sumber data lain untuk mengidentifikasi sumber data anonim.
- Serangan kloning profil, yaitu istilah yang digunakan untuk pemalsuan suatu profil/identitas untuk mengecoh seseorang.

3. Ancaman Sosial

- *Cyber-bullying*, yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka melalui internet.
- *Cyber-stalking*, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang.

3.1. Analisis dan Diskusi

Berbagai penelitian tentang analisis *big data* mengidentifikasi sejumlah kasus yang berpotensi berbahaya bagi pengguna. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dixon dan Gellman (2014), ketersediaan basis data konsumen yang besar telah menghasilkan industri yang berkembang dari skor konsumen yang tidak diatur (Baruh & Popescu, 2017, p. 581). Pasquale (2015) mengidentifikasi bahwa logika penyebaran data pengguna ini berdasarkan pada logika algoritma yang bisa memprediksi segala data yang masuk dari basis data lintas-konteks yang semakin masif, menyortir individu ke dalam segmen di berbagai bidang yang beragam seperti pekerjaan, penyewaan, atau ritel (Baruh & Popescu, 2017, p. 582). Oleh karena itu, di luar aspek teknis pemrosesan data besar dan aplikasi praktisnya, menurut Andrejevic (2013), *big data* tampaknya menghasilkan organisasi sosial pengetahuan baru yang menormalkan iklim hilangnya privasi saat mereproduksi atau bahkan menonjolkan ketidaksetaraan yang ada (Baruh & Popescu, 2017, p. 583).

Gavinson (1980) memperkenalkan istilah otonomi individu, bahwa privasi seharusnya melindungi kekuatan individu atas bagaimana menentukan nasib sendiri dan, paling tidak,

kapasitas individu untuk definisi diri (Baruh & Popescu, 2017, p. 584). Dalam lingkungan pengumpulan data, diskusi privasi dipersulit oleh dugaan kesulitan mendefinisikan pelanggaran privasi pada individu. Menurut Solove (2013), berbagai upaya dalam beberapa tahun terakhir dilakukan untuk memperbaiki perlindungan privasi atas dugaan pengumpulan data digital, sambil mempertahankan strategi literasi yang mengasumsikan pengguna yang sadar akan privasi (Baruh & Popescu, 2017, p. 584).

Dengan berkembangnya SNS saat ini, isu terkait bagaimana menjaga privasi dan keamanan dari pengguna juga mulai mencuat terutama ketika pengguna mengunggah konten multimedia seperti foto, video dan audio. Henson et.al juga mengidentifikasi bahwa dengan banyaknya pengguna *online* saat ini juga menumbuhkan ancaman *online* di situs SNS (Henson, Reynolds, & Fisher, 2011, p. 254). Hal ini bisa diatasi individu dengan membuat 'perlindungan diri' dengan menggunakan fitur-fitur privasi dari SNS yang ada. Karena pada akhirnya, perlindungan tersebut untuk lapis pertama memang harus dilakukan oleh pengguna sendiri.

Menurut Harris (2014), keamanan jaringan adalah penyensoran terhadap jaringan/konten-konten yang dilarang di *online*, yang diproses secara terorganisir dan diimplementasikan melalui kontrol vertikal (Kayes & Iamnitchi, 2017, p. 5). SNS telah menjadi fenomena budaya *mainstream* bagi jutaan pengguna internet. Menggabungkan profil yang dibuat pengguna dengan mekanisme komunikasi yang memungkinkan pengguna menjadi berhubungan secara pseudo-permanen, SNS memanfaatkan hubungan sosial dunia nyata pengguna dan memadukan lebih banyak lagi kehidupan online dan offline pengguna. Pada 2017, Facebook memiliki 1,94 miliar pengguna aktif bulanan dan ini adalah situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di Internet (Kayes & Iamnitchi, 2017, p. 7). Twitter, *platform micro-blogging* sosial, mengklaim lebih dari 313 juta pengguna aktif bulanan, yang mengirim *Tweets* dalam lebih dari 40 bahasa

Karena pengguna di SNS biasanya terhubung dengan teman, keluarga, dan kenalan, persepsi umum yang kemudian muncul adalah bahwa SNS menyediakan lingkungan yang diperantarai Internet yang lebih aman, pribadi, dan terpercaya untuk interaksi online. Namun dalam kenyataannya, SNS telah meningkatkan taruhan untuk perlindungan privasi karena ketersediaan jumlah data pengguna pribadi yang di luar ekspektasi, baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Lebih penting lagi, SNS mengekspos informasi dari berbagai bidang sosial - misalnya, informasi pribadi di Facebook dan aktivitas profesional di LinkedIn - yang terkumpul dan mengarah ke profil yang lebih terperinci.

Pengungkapan informasi pengguna yang tidak diinginkan ini menyebabkan SNS jadi punya konsekuensi yang mengerikan. Media berita meliputi beberapa di antaranya, seperti kasus seorang guru yang dituntut karena memposting foto senapan, atau karyawan yang dipecat karena berkomentar tentang gajinya dibandingkan dengan bosnya (keduanya adalah kasus di Facebook). Lebih dari itu, SNS itu sendiri, baik secara sengaja (mis. Kontroversi Facebook Beacon) atau secara tidak sengaja (misalnya, mempublikasikan data sosial anonim yang digunakan untuk mendanonimisasi) berkontribusi terhadap pelanggaran privasi pengguna. Selain itu, tingginya volume data pribadi, baik yang diungkapkan oleh pengguna atau karena kegagalan SNS untuk menyediakan alat privasi yang canggih, telah menarik berbagai organisasi (misalnya, GNIP – GNIP Inc. adalah perusahaan agregasi API media sosial yang menyediakan data dari lusinan situs media sosial melalui satu API) untuk menggabungkan dan menjual jejaring sosial pengguna terhadap datanya. Selain itu, sifat hubungan SNS yang terpercaya telah menjadi mekanisme yang efektif untuk menyebarkan *spam*, *malware*, dan serangan *phishing*. Entitas jahat melancarkan berbagai serangan dengan membuat profil palsu, menggunakan kedok akun SNS yang dicuri yang dijual secara ilegal atau menyebarkan isu melalui *bot* (Kayes & Iamnitchi, 2017, p. 3)

Internet Security Threat Report (ISTR) menyebutkan bahwa peningkatan penggunaan SNS oleh peretas tidak bisa diabaikan (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 40). Di tahun 2015 layanan semacam itu berubah menjadi sumber *spam* dan *malware*, dan digunakan sebagai

cara untuk membuat uang ilegal di web. Dan di tahun 2016, SNS menjadi target utama dalam kejahatan pencurian identitas dan *spear phishing* (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 45).

Penelitian yang dilakukan oleh Rathore et.al (2017) mengonfirmasi beberapa solusi untuk mencegah ancaman tersebut. Diantaranya yaitu *watermarking*, *steganalysis* dan *digital oblivion* untuk melindungi pengguna SNS melawan ancaman terkait data multimedia. Selain itu juga ada solusi seperti *spam detection* dan *phishing detection* yang ditawarkan untuk mengatasi ancaman tradisional (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 46). Dan bahkan solusi keamanan *built-in* seperti mekanisme otentikasi dan pengaturan privasi, serta solusi komersial seperti minor monitor dan aplikasi perlindungan sosial juga digunakan untuk pengamanan dari kedua tipe ancaman dalam SNS.

Penelitian Gao, et al. mengkategorikan isu keamanan utama dalam SNS ke dalam empat kategori (1) isu privasi, (2) pemasaran viral, (3) struktur jaringan berdasarkan serangan dan (4) serangan *malware* (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 48). Jin et al. mempelajari perilaku pengguna SNS dari empat sudut pandang (1) perilaku *malicious*, (2) perilaku *mobile social*, (3) *traffic activity* dan (4) koneksi dan interaksi (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 48). Fire et al. membagi ancaman keamanan terkini menjadi empat kategori (a) ancaman klasik, (b) ancaman modern, (c) ancaman kombinasi dan (d) ancaman yang menargetkan anak-anak (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 48).

Dengan tingginya penggunaan SNS, reputasi pengguna online juga meningkat melalui web. Reputasi pengguna mempengaruhi status dan kredibilitas pengguna di kehidupan nyata. SNS dapat merusak reputasi bisnis dan organisasi besar, misalnya dengan adanya postingan negatif dari pegawainya dapat merusak reputasi organisasi dan pegawai.

SNS juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar untuk membentuk profil lengkap individu dengan tujuan untuk menjual produk dan merekam perilaku individu. Namun semuanya itu biasanya dilakukan tanpa izin individu yang bersangkutan. Selain itu berdasarkan penelitian Smith, 38% perusahaan menghabiskan lebih dari 20% anggaran iklan mereka pada SNS di tahun 2015, dengan facebook dan twitter paling banyak memajang iklan (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 49).

Rathore et.al kemudian mengkategorikan ancaman keamanan menjadi tiga kategori utama, yaitu (1) ancaman konten multimedia, data *sharing* menjadi fitur penting dalam SNS dimana mereka dapat membagikan foto, video, aktivitas, dan minat (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 50). Bahkan dengan kemajuan dalam teknik pengambilan multimedia, seperti estimasi lokasi, pengenalan wajah, pencarian web dan *geotagging*, meningkatkan adanya penyalahgunaan secara ilegal. Ancaman konten multimedia ini meliputi paparan konten multimedia, berbagi kepemilikan, manipulasi konten multimedia, steganografi, metadata (konten multimedia dalam SNS merupakan metadata karena mengandung begitu banyak data penting seperti identitas dan lokasi, contoh GPS), berbagi link konten multimedia, link statis, *outsourcing* dan transparansi data *center*, *video conference*, kemampuan *tagging link* dari data multimedia yang dibagikan, dan pengungkapan data secara ilegal. Kategori (2) ancaman tradisional, meliputi *phishing*, *malware*, serangan sybil dan profil palsu, *spamming*, *clickjacking*, serangan *deanonymization*, serangan *inference*, dan *profile cloning* (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 51). Kategori (3) ancaman sosial, meliputi *cyberbullying* dan *cybergrooming*, spionase perusahaan, dan *cyberstalking* (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 51).

Beberapa solusi yang ditawarkan oleh Rathore et.al (2017) dalam mengatasi masalah keamanan SNS diantaranya yaitu *watermarking*, *co-ownership*, *steganalysis*, *digital oblivion*, *storage encryption*, *metadata removal and analysis*, *malware detection*, *sybil defense* dan deteksi profil palsu, deteksi *phishing*, deteksi *spammer*, solusi komersial, solusi keamanan SNS *built-in* dan deteksi *profile cloning* (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 53).

Masalah keamanan dan privasi ini terus diproses untuk mencapai titik mapan dan dapat menanggulangi serangan –serangan keamanan dan privasi tersebut di dunia SNS. Diakui pula bahwa tanpa adanya dukungan legislatif, isu negatif ini hanya dapat diminimalisir dampaknya saja tanpa ada solusi menyeluruh. Henson et al. juga menawarkan alternatif untuk tidak hanya mengandalkan fitur keamanan yang dibangun di situs web jaringan, melainkan menggunakan fitur keamanan dan privasi bersama dengan kriteria pemindaian selektif dalam memutuskan siapa yang akan mengizinkan akses ke situs web mereka terutama dengan informasi yang sensitif (Henson, Reynolds, & Fisher, 2011, p. 268).

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg pernah menyatakan argumentasinya ketika privasi ramai dipertanyakan di SNS, yang dalam hal ini adalah Facebook yang dibuatnya. Mark Zuckerberg telah berulang kali menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membantu orang berbagi informasi dengan lebih efisien (Boyd, 2008, p. 18). Dengan mengumpulkan informasi sosial dan menyiarkannya, News Feeds mengambil apa yang dapat diakses oleh orang dan menempatkannya pada hal yang sangat menjadi perhatian mereka. Zuckerberg mengklaim bahwa tidak ada privasi yang dikompromikan dalam prosesnya (Boyd, 2008, p. 18). Namun, Boyd menekankan, privasi adalah tentang bagaimana orang mengalami hubungan mereka dengan orang lain dan dengan informasi. Privasi adalah rasa kontrol atas informasi, konteks dimana berbagi terjadi, dan audiens yang dapat memperoleh akses (Boyd, 2008, p. 19).

Untuk itu, jika melihat dari argumen Boyd, informasi tidak bersifat pribadi karena tidak ada yang tahu, karena individu lah yang membuat batas dan kontrol terhadap hal tersebut. Boyd juga menekankan bahwa ada area abu-abu yang sangat besar antara rahasia dan informasi yang dimaksudkan untuk disiarkan kepada publik. Pengguna tidak mungkin memposting rahasia, tetapi mereka sering memposting informasi yang hanya relevan dalam konteks tertentu (Boyd, 2008, p. 20). Asumsinya adalah jika mengunjungi halaman Facebook seseorang, kita dapat mengakses informasi dalam konteks. Dengan kata lain, pilar utama untuk membatasi ruang dan gerak privasi dalam konteks ancaman terhadap privasi dan *data mining* di SNS adalah *diri kita sendiri*.

Dalam akhir penelitiannya mengenai privasi di Facebook, Boyd juga mengargumentasikan bahwa privasi bukan hak mutlak - ia adalah hak istimewa yang harus dilindungi secara sosial dan struktural agar selalu menjadi perhatian utama (Boyd, 2008, p. 19). Hal yang kemudian dipertanyakan apakah privasi masih ada atau tidak adalah sesuatu yang konteksnya sangat tergantung pada masyarakat. Apakah masyarakat memilih untuk memperhatikan hal ini atau tidak.

Mengacu atas konseptualisasi ancaman privasi dan *data mining* yang sudah dipaparkan Rathore et.al, dalam Tabel 1 berikut disajikan beberapa rangkuman beserta dampak dan praktik yang dapat mengancam privasi dan *data mining* di era digital.

Tabel 1. Rangkuman Ancaman Privasi dan *Data Mining* di Era Digital

No	Kategori Ancaman	Tipe Ancaman	Praktik	Dampak
1	Ancaman terhadap Konten Multimedia	Paparan konten multimedia	Dalam hal ini, ancaman terhadap paparan konten berhubungan dengan informasi sensitif seseorang, seperti nomor telepon atau alamat rumah	pembebaran informasi, kehilangan reputasi, kebocoran lokasi, kekerasan <i>cyber</i> , kehilangan keamanan
		Kepemilikan bersama	Informasi yang dibagikan untuk dikonsumsi secara bersama cenderung berhubungan dengan beberapa orang saja, namun tidak semua orang mengatur apakah informasi tersebut akan dibagikan kepada orang lain juga atau hanya untuk dikonsumsi pribadi saja	kehilangan pemilik konten
		Manipulasi konten	Pengguna yang tidak	<i>blakmailing</i> , kehilangan

			bertanggungjawab banyak menggunakan informasi yang didapatkan dari SNS, semisal foto seseorang, untuk mengolok-olok ataupun mengancam orang tersebut dengan memanipulasi kontennya.	reputasi
		Steganografi	Penyebaran <i>memes</i> yang tidak benar di SNS merupakan praktik steganografi yang dapat mengancam privasi seseorang	pembeberan informasi
		Metadata	Kemampuan SNS untuk menyerap informasi dengan sangat banyak memungkinkan ancaman dalam penemuan lokasi sekarang ataupun ID seseorang.	kebocoran lokasi, <i>profiling</i>
		Link yang dibagi bersama	SNS mempunyai fitur untuk bisa berbagi link. Jika link tersebut dibagikan kepada orang lain secara simultan, hal ini bisa menimbulkan ancaman link tersebut bisa kehilangan sumber utamanya, sehingga sangat rentan untuk menyebarkan informasi yang dimanipulasi.	kehilangan pemilik informasi, <i>hoax</i>
		Transparansi data	Oleh karena data yang disebar di SNS tidak dienkripsi, maka praktik penyebaran informasi tanpa adanya otoritas yang jelas menjadi isu tersendiri dalam ancaman privasi dan <i>data mining</i> .	kebocoran informasi rahasia
		<i>Tagging</i>	Kegiatan yang menyebutkan data seseorang bisa mengancam privasi orang tersebut, terlebih jika orang tersebut tidak menginginkan apapun data dari dirinya diinformasikan ke publik.	kebocoran informasi, kehilangan reputasi
2	Ancaman Tradisional	<i>Phishing</i>	pengguna akan diarahkan pada sebuah alamat URL palsu dan akhirnya bisa tertipu dengan akun tersebut	kebocoran informasi rahasia
		<i>Malware</i>	pengguna diarahkan untuk mengakses suatu situs tertentu, yang ternyata merupakan situs yang dapat menyerap informasi rahasia pengguna	kebocoran informasi rahasia
		Serangan <i>sybil</i> dan profil palsu	pembuatan akun/identitas palsu	mencuri informasi rahasia pengguna
		<i>Spamming</i>	mengirimkan pesan yang dapat mengganggu pengguna	kehilangan reputasi
		Serangan de-anonimisasi	pengguna dapat diidentifikasi dengan informasi <i>cookies</i> -nya dan memetakan aktivitas seseorang	kebocoran identitas
		Serangan kloning profil	melakukan kloning atas identitas seseorang dengan tujuan tertentu	kehilangan reputasi
3	Ancaman sosial	<i>Cyber-bullying</i>	banyak anak-anak yang dipermalukan oleh temannya sendiri dan menyebarkannya di SNS	kekerasan <i>cyber</i>

<i>Cyber-talking</i>	mencari informasi seseorang secara intens dan berulang, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengancam ataupun melakukan teror	kekerasan <i>cyber</i> , <i>blackmailing</i>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Sumber: Olahan

4. PENUTUP

Social Network Sites (SNS) merupakan jenis jasa web untuk membangun jaringan virtual diantara orang yang memiliki kesamaan minat, latar belakang dan aktivitas (Rathore, Sharma, Loia, Jeong, & Park, 2017, p. 43). SNS dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena menghilangkan batas ekonomi dan geografi, dan juga dapat berguna dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan pencarian kerja, hiburan dan pendidikan. Penggunaan SNS mendorong seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadinya (misalnya usia, orientasi seksual atau politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lain-lain) (Milham & Atkin, 2018, p. 55).

Dengan berkembangnya SNS saat ini, isu terkait bagaimana menjaga privasi dan keamanan dari pengguna juga mulai mencuat terutama ketika pengguna mengunggah konten multimedia seperti foto, video dan audio. Henson et.al juga menawarkan alternatif untuk tidak hanya mengandalkan fitur keamanan yang dibangun di situs web jaringan, melainkan menggunakan fitur keamanan dan privasi bersama dengan kriteria pemindaian selektif dalam memutuskan siapa yang akan mengizinkan akses ke situs web mereka terutama dengan informasi yang sensitif (Henson, Reyns, & Fisher, 2011, p. 268).

Boyd mengatakan bahwa informasi tidak bersifat pribadi karena tidak ada yang tahu, karena individu lah yang membuat batas dan kontrol terhadap hal tersebut. Boyd juga menekankan bahwa ada area abu-abu yang sangat besar antara rahasia dan informasi yang dimaksudkan untuk disiarkan sebagai publik mungkin. Pengguna tidak mungkin memposting rahasia, tetapi mereka sering memposting informasi yang hanya relevan dalam konteks tertentu (Boyd, 2008, p. 20). Dengan kata lain, pilar utama untuk membatasi ruang dan gerak privasi dalam konteks ancaman terhadap privasi dan *data mining* di SNS adalah *diri kita sendiri*.

Maka dari itu, selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah ditawarkan oleh berbagai SNS, kita perlu menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Asumsinya adalah jika mengunjungi halaman Facebook seseorang, kita dapat mengakses informasi dalam konteks. Sehingga, untuk menghindari hal-hal semacam ini, perlu proteksi diri sendiri dan dalam hal ini adalah literasi untuk peka terhadap privasi di SNS.

Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian lebih lanjut mengenai ancaman privasi dan *data mining* di era digital yang lebih kompleks. Dengan pemaparan kategori-kategori, tipe, praktik, dan dampak ancaman privasi dan *data mining* sesuai dengan elaborasi konseptual yang dilakukan peneliti diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian komunikasi kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini membuka ruang baru untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini hanya memaparkan konseptual tentang bagaimana ancaman terhadap privasi dan *data mining* dalam SNS. Akan lebih kaya jika kedepannya mengangkat isu dalam konteks geolokal yang lebih spesifik. Isu ancaman ini juga sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan tidak sedikit kasus yang membuktikan hal ini harus diperhatikan lebih lanjut. Terlebih dalam meliterasi masyarakat untuk sadar akan bahaya dan ancaman privasi yang muncul jika tidak disadari lebih dini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, dan kepada Redaksi Jurnal Studi Komunikasi dan Media (JSKM) Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Jakarta yang telah berkenan memberikan koreksi dan menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baruh, L., & Popescu, M. (2017). *Big Data Analytics and the Limits of Privacy Self-Management*. Retrieved April 3, 2018, from *New Media & Society*, Vol. 19(4) 579-596: <http://www.doi.org/10.1177/1461444815614001>
- Boyd, D. (2008). *Facebook's Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence*. Retrieved April 3, 2018, from *The International Journal of Research into New Media Technologies*. Volume: 14 issue: 1, page(s): 13-20: <https://doi.org/10.1177/1354856507084416>
- Brennen, B., & Primeaux, D. (1997). *Public or Private? E-mail and the Ethics of Privacy*. Retrieved April 3, 2018, from *The International Journal of Research into New Media Technologies*. Volume: 3 issue: 3, page(s): 22-26: <https://doi.org/10.1177/135485659700300304>
- Chen, F., Deng, P., Wan, J., Zhang, D., Vasilakos, A., & Rong, X. (2015). *Data Mining for the Internet of Things: Literature Review and Challenges*. Retrieved April 3, 2018, from *International Journal of Distributed Sensor Network*, Volume: 11 issue: 8: <https://doi.org/10.1155/2015/431047>
- Francis, C., & Baldesari. (2006). *Systematic Reviews of Qualitative Literature*. Oxford: UK Cochrane Centre.
- Frith, J. (2017). *Big Data, Technical Communication, and The Smart City*. Retrieved April 3, 2018, from *Journal of Business and Technical Communication*, Vol. 3(2) 168-187: <http://www.doi.org/10.1177/1050651916682285>
- Guo, L. (2016). *Big Social Data Analytics in Journalism and Mass Communication: Comparing Dictionary Based-Text Analysis and Unsupervised Topic Modelling*. Retrieved April 3, 2018, from *Journalism & Mass Communication Quarterly*, Volume: 93 issue: 2, page(s): 332-359 : <https://doi.org/10.1177/1077699016639231>
- Henson, B., Reyns, B., & Fisher, B. (2011). *Security in the 21st Century: Examining the Link Between Online Social Network Activity, Privacy, and Interpersonal Victimization*. Retrieved April 2, 2018, from *Critical Justice Review*, Volume 36 (3), 253-268: <http://www.doi.org/10.1177/0734016811399421>
- Kayes, I., & Iamnitchi, A. (2017). *Privacy and Security in Online Social Network*. Retrieved April 3, 2018, from *Online Social Network and Media*, 3(4), 1-21: <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2017.09.001>
- Kennedy, H., Elgesem, D., & Miguel, C. (2017). *On Fairness: User Perspectives on Social Media Data Mining*. Retrieved April 3, 2018, from *The International Journal of Research into New Media Technologies*, Volume: 23 issue: 3, page(s): 270-288: <https://doi.org/10.1177/1354856515592507>
- Kitchin, R., & McArdie, G. (2016). *What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontological characteristics of 26 datasets*. Retrieved April 3, 2018, from *Big Data & Society*, Volume: 3 issue: 1: <https://doi.org/10.1177/2053951716631130>
- Lewin, S. (2008). *Methods to Synthesis Qualitative Evidence Alongside a Cochrane Intervention Review*. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine.
- Liang, H., Shen, F., & Fu, K.-w. (2017). *Privacy Protection and Self-Disclosure Across Societies: A Study of Global Twitter Users*. Retrieved April 2, 2018, from *New Media & Society*, Vol 19(9), 1476-1497: <http://www.doi.org/10.1177/1461444816642210>
- Milham, M., & Atkin, D. (2018). *Managing the Virtual Boundaries: Online Social Networks, Disclosure, and Privacy Behaviours*. Retrieved April 2, 2018, from *New Media & Society*, Volume 20(1), 50-67: <http://www.doi.org/10.1177/1461444816654465>
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic Review: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 32-35.
- Rathore, S., Sharma, P., Loia, V., Jeong, Y.-S., & Park, J.-H. (2017). *Social Network Security: Issues, Challenges, Threats, and Solutions*. Retrieved April 3, 2018, from *Information Sciences*, 421 (2017), 43-69: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.08.063>

**PERSEPSI APARAT PEMERINTAH KOTA JAMBI
TERHADAP KEGUNAAN DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN MEDIA
PENGADUAN BERBASIS APLIKASI**

***THE PERCEPTION OF STAFF MEMBERS OF LOCAL GOVERNMENT OF JAMBI
ON THE USE AND THE EASE OF APPLICATION-BASED COMPLAINT MEDIA***

Dede Mahmudah

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Jakarta
Jl. Pegangsaan Timur No.19B, Jakarta Pusat, Indonesia
dede002@kominform.go.id.

Diterima tgl. 10/10/2018; Direvisi tgl. 13/11/2018; Disetujui tgl. 21/11/2018

ABSTRACT

The research is about how the staff members of Local District government of Jambi perception on the usage and the ease of application-based complain media. Therefore, it is necessary to really observe the usage of this application from the staff's side because they receive inputs from the society. This research is to get the most accurate picture of the staff's perception on the usage and the ease of application-based complain media using Technology Acceptance Model (TAM) analysis. With quantitative approach and questionnaire instrument, the descriptive analysis in this research will present data in tables in averages. The respondents of this research are administration staff or users of SiKesal application in each work unit. The questionnaire completion is done in March 2018 and data verification is done until April 2018. From the statistic descriptive counting to 102 respondents, it is known that 100 respondents have used SiKesal application. The Mean value and the Deviation Standard for respondents' perception on the use of the application (perceived usefulness) are each 3,89 and 0,620. We can conclude that generally the respondents receive the SiKesal application and reap the benefits of using the application. The Mean value and the Deviation Standard for the users perception on the ease of using new information (perceived ease of use) are each 3,88 and 0,65. We can conclude that the respondents generally receive the application and have the perception that the application is easy to use.

Keywords: Application, Complain, TAM

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi. Sehingga penelitian ini difokuskan kepada pemanfaatan aplikasi SiKesal oleh aparat pemerintah yang bertugas untuk menerima berbagai aduan dari masyarakat melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi dengan analisis yang menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM). Melalui pendekatan kuantitatif dan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis deskriptif pada penelitian ini menyajikan data dalam tabel berupa hasil penentuan rata-rata. Responden merupakan admin/pelaksana dari aplikasi SiKesal di masing-masing unit kerja. Pengisian kuesioner dilakukan pada Maret 2018 dan verifikasi data hingga April 2018. Perhitungan secara statistik deskriptif terhadap 102 responden, diketahui 100 responden telah menggunakan aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk Konstruk persepsi responden terhadap kegunaan aplikasi SiKesal (*perceived usefulness*) sebesar 3,89 dan 0,620. Dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi dan merasakan kegunaan dari aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk Konstruk persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem informasi baru (*perceived ease of use*) sebesar 3,88 dan 0,65. Dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi SiKesal dan mempunyai persepsi bahwa aplikasi SiKesal mudah untuk digunakan.

Kata Kunci: Aplikasi, Pengaduan, TAM.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 yang lalu Kota Jambi terpilih menjadi salah satu kota yang lulus dari *assesment* dan mendapatkan bimbingan untuk mengimplementasikan *Smart City* dari para ahli yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2017 Kota Jambi menyusun Masterplan *Smart City* Kota Jambi, serta menetapkan SiKesal (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat *Online*) sebagai *Quick Win* pelaksanaan *Smart City* di Kota Jambi. SiKesal ini akan digunakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kotanya, dengan demikian saran dan aspirasi maupun keluhan masyarakat dapat disampaikan dengan mudah. Dengan kata lain media pengaduan masyarakat yang biasanya dilakukan secara konvensional, dikembangkan menjadi media pengaduan yang berbasis aplikasi. Aplikasi SiKesal juga menjadi media penerimaan pengaduan bagi aparat pemerintah Kota Jambi, sehingga pengaduan yang datang akan cepat ditindaklanjuti dan dapat dimonitor pelaksanaannya. Teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi SiKesal tersebut diperkirakan akan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai keluhan masyarakat.

Pada hakikatnya pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada pelayan publik merupakan respon dari pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dari pelayan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 2004 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparat pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun. Tersedianya ruang untuk menyampaikan aspirasi (*voice*) dalam bentuk pengaduan dan protes terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan sangat penting peranannya bagi upaya perbaikan kinerja tata pemerintahan secara keseluruhan (Sari & Dewi, 2017). Pelayanan publik berbasis e- Government di Indonesia belum banyak diterapkan, karena pelayanan ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga diperlukan kesiapan sumber daya manusia, aparat pemerintah, dan kesiapan dari masyarakat (Lestari, Bandiyah, & Wismayanti, 2015).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan aplikasi SiKesal adalah penerimaan pengguna terhadap aplikasi SiKesal tersebut. Kunci awal dari keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat dari adanya kemauan pengguna untuk menerima teknologi informasi tersebut. Kemauan tersebut didorong oleh adanya kegunaan dan kemudahan penggunaan aplikasi SiKesal yang dirasakan oleh pengguna, dalam hal ini aparat Pemerintah Kota Jambi yang memanfaatkan aplikasi SiKesal sebagai media penerimaan pengaduan dari masyarakat. Penelitian ini difokuskan kepada para aparat Pemerintah Kota Jambi dengan anggapan bahwa aplikasi SiKesal merupakan aplikasi yang baru diluncurkan ke masyarakat, dimana sebelumnya penerimaan pengaduan dan respon dilakukan secara konvensional, misalnya melalui komunikasi tatap muka maupun kotak saran. Sehingga perlu dicermati pemanfaatan aplikasi SiKesal dari sisi aparat Pemerintah Kota Jambi yang memiliki tugas untuk menerima berbagai aduan dari masyarakat melalui aplikasi tersebut. Karena meskipun teknologi memberikan keuntungan pada organisasi, terkadang kegagalan implementasi terjadi bukan karena kualitas dan kapasitas sistem tersebut, tetapi karena rendahnya tingkat penerimaan pengguna. Penerimaan teknologi merupakan suatu kesediaan pengguna untuk menggunakan teknologi guna mendukung pekerjaannya. Apabila pengguna sudah bersedia untuk menerima teknologi, pengguna akan sering untuk menggunakannya (Jonar, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai bagaimana persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi. Penelitian ini dilakukan melalui analisis yang menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai pedoman untuk melihat persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap aplikasi SiKesal yang dimanfaatkan sebagai media untuk menerima dan

merespon pengaduan dari masyarakat. Penerimaan tersebut dilihat dari persepsi para aparat Pemerintah Kota Jambi yang menjadi admin aplikasi SiKesal terhadap aplikasi tersebut, yakni persepsi kegunaan/manfaat yang diperoleh saat menggunakan aplikasi tersebut (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan saat aplikasi tersebut digunakan (*perceived ease of use*). Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemerintah Kota Jambi sama sekali belum pernah melakukan pengukuran secara kuantitatif mengenai pemanfaatan aplikasi SiKesal sejak Desember 2017 hingga Mei 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan media pengaduan berbasis aplikasi, sebagai media untuk menerima dan merespon pengaduan dari masyarakat. Gambaran hal tersebut merupakan hal yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi selama program pemanfaatan aplikasi SiKesal dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Kota Jambi. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kajian mengenai pemanfaatan aplikasi di bidang pemerintahan dengan menggunakan metode TAM. Secara teknis penerima manfaat dari penelitian ini adalah pemerintah Kota, karena melalui kajian ini akan diperoleh informasi yang akurat dan mendetail mengenai pelaksanaan program aplikasi SiKesal oleh aparat pemerintah di Kota Jambi, sehingga dapat menjadi masukan bagi langkah-langkah pembangunan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong kebangkitan Kota Jambi.

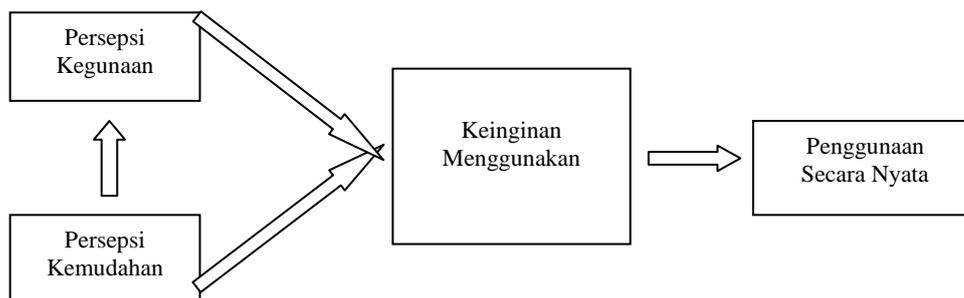
Berbagai kajian telah menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitiannya. Budi S. melakukan penelitian tentang persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi sistem informasi di STIE SBI Yogyakarta. Model penelitian menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan dua Konstruk utama yaitu *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Dari data 90 responden yang mengisi kuesioner, menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* sudah baik, dengan rata-rata nilai mean sebesar 4,04 yang dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi baru yang diterapkan dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh pengguna sistem. *Perceived Ease Of Use* juga sudah baik, dengan rata-rata nilai mean sebesar 3,86, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Baru mudah digunakan. Yudi dan Tambotuh juga menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang didukung oleh Pendekatan *Innovation and Diffusion Theory* (IDT) untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengumpulan data pendidikan yang berdampak pada sulitnya pendataan pendidikan berbasis teknologi informasi dan tingkat konsistensi pengumpulan data pendidikan yang tidak merata. Dari kajian ini disimpulkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif mampu mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap pemanfaatan sistem informasi pendataan pendidikan secara spesifik (Budi, 2016).

Kajian lainnya dilakukan oleh Handayani dan Harsono, yang menguji dan menganalisis pengaruh TAM pada komputerisasi kegiatan pertanahan. Penelitian ini akan dilakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang diaplikasikan pada layanan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Survei digunakan untuk mengumpulkan data 100 karyawan. *Path analysis* menunjukkan bahwa *computer self-efficacy* berpengaruh pada persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat teknologi, persepsi kemudahan penggunaan teknologi berpengaruh pada persepsi manfaat dan sikap untuk menggunakan teknologi, persepsi manfaat teknologi berpengaruh pada sikap dalam menggunakan teknologi, sikap untuk menggunakan teknologi berpengaruh pada niat untuk menggunakan teknologi (Handayani & Harso, 2016). Penelitian dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) juga dilakukan oleh Hera Maitilova Jonar yang berjudul Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung Penerapan *E-Government* pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan SIMPEG pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan mengintegrasikan faktor

organisasi dan teknologi yang ada pada HOT (*Human-Organizarion-Technology*) *Fit Model*. Penelitian ini melibatkan 37 responden dan analisis data menggunakan smartPLS. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara organisasi dengan persepsi manfaat, teknologi dengan persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dengan penerimaan SIMPEG dan persepsi kemudahan dengan penerimaan SIMPEG (Jonar, 2017).

Dari berbagai kajian tersebut menunjukkan pula bahwa TAM dapat memberikan gambaran tentang pemanfaatan dari suatu aplikasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan sebuah model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi (Davis dalam Yudi & Tambotoh, 2013). TAM bertujuan untuk menilai penerapan teknologi informasi dalam organisasi sebagai sumber daya yang mampu meningkatkan efektivitas kerja (Taylor & Todd dalam Yudi & Tambotoh, 2013). TAM merupakan sebuah alat teoretis yang baik, populer, dan menawarkan suatu penjelasan yang kuat serta sederhana untuk mempelajari penerimaan dan penggunaan teknologi dalam Handayani & Harso, 2016). TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan akan menentukan penerimaan teknologi informasi. Model ini secara lebih jelas menggambarkan bahwa penerimaan penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh kemanfaatan/kegunaan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) (Budi, 2016).

Perceived Usefulness (PU) atau persepsi kegunaan didefinisikan dengan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dari definisinya, diketahui PU merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan, maka dengan demikian jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi sistem informasi itu bermanfaat maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa teknologi sistem informasi kurang bermanfaat maka dia tidak akan menggunakannya (Jogiyanto dalam Budi, 2016). *Perceived Ease of Use* (PEOU) atau persepsi kemudahan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana pengguna percaya bahwa menggunakan sistem informasi bebas dari usaha, yang berarti mudah, bebas dari kesulitan atau tidak perlu usaha yang besar untuk memahami sistem informasi tersebut, artinya teknologi membawa suatu kemudahan bagi pengguna. Dari definisinya, diketahui bahwa PEOU ini juga merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan bahwa jika seseorang merasa percaya sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya (Jogiyanto dalam Budi, 2016).



Sumber : Olahan Dari Berbagai Sumber

Gambar 1 . *Technology Acceptance Model* (TAM)

Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam TAM, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tersebut akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi. Hal tersebut akan berdampak pada penggunaan teknologi dalam kondisi nyata. Pengukuran konstruk *usefulness* menurut antara lain *work more quickly, useful, increase*

productivity, enhance effectiveness, dan improve job performance. Davis.F.D juga memberikan beberapa indikator konstruk *ease of use* yaitu *easy to learn, controllable, clear and understandable, flexible, easy to become skillful, dan easy to use* (Wagiyem, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diharapkan dapat memperoleh data mengenai pemanfaatan yang dapat diukur berdasarkan konstruk yang ada dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*. Kuesioner tersebut diisi oleh aparat Pemerintah Kota Jambi yang mendapat tugas menjadi admin aplikasi SiKesal di masing-masing unit kerja. Kuesioner digunakan untuk mengungkap data konstruk *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* para pengguna aplikasi SiKesal tersebut, yang akan diolah dengan statistik deskriptif. Dimana data tersebut hanya ditampilkan apa adanya, tidak sampai kepada mencari hubungan atau pengaruh di antara variabel. Definisi operasional dari penelitian ini adalah definisi operasional persepsi kegunaan dan definisi operasional persepsi kemudahan penggunaan. Untuk definisi operasional persepsi kegunaan yakni : Bekerja lebih cepat (*work more quickly*); Meningkatkan kinerja (*improve job performance*); Meningkatkan produktivitas (*increase productivity*); Lebih efektif (*enhance effectiveness*); dan Bermanfaat dalam pekerjaan (*useful*). Untuk definisi operasional persepsi kemudahan penggunaan yakni : Mudah dipelajari (*easy of learn*); Dapat dikontrol (*controllable*); Jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*); Fleksibel (*flexible*); Mudah untuk menjadi terampil (*easy to become skillful*); dan Mudah digunakan (*easy to use*).

Instrumen kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala likert yakni sangat tidak setuju (STS) poin 1, tidak setuju (TS) poin 2, Netral (N) poin 3, setuju (S) poin 4, dan sangat setuju (SS) poin 5. Instrumen kuesioner tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya diolah dengan menggunakan statistik deskriptif. Pangestu Subagyo dalam Nasution (2017) menyatakan, statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal, disini data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Data yang disajikan berupa hasil analisis secara deskriptif terhadap hasil pernyataan responden pada masing-masing indikator yang mewakili konstruk-dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penghitungan tersebut peneliti menggunakan *software Statistic Product Service Solution (SPSS) Versi 18.0 for windows*. Analisis deskriptif pada penelitian ini akan menyajikan data dalam tabel berupa hasil penentuan rata-rata (mean). Menurut Umar (dalam Budi, 2016), analisis menggunakan nilai mean dilakukan dengan cara menentukan nilai besarnya kelas sebagai berikut :

Nilai maksimum = 5 ; Nilai Minimum = 1

Rentang Skor = $(5 - 1) / 5 = 0,8$

Kategori :

- 1,00 s.d 1,80 = sangat rendah/sangat buruk
- 1,81 s.d 2,60 = rendah/buruk
- 2,61 s.d 3,40 = sedang/cukup
- 3,41 s.d 4,20 = baik/tinggi
- 4,21 s.d 5,00 = sangat baik/sangat tinggi

Responden yang akan mengisi kuesioner tersebut dipilih dengan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hal ini disebabkan karena responden yang dituju hanya yang memiliki kriteria sebagai admin/pelaksana aplikasi SiKesal di unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi.

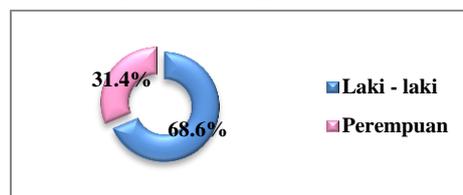
Penelitian ini menetapkan kriteria responden yang mengisi kuesioner adalah para admin/pelaksana dari aplikasi SiKesal di masing-masing unit kerja. Kuesioner terdiri dari bagian profil responden, pernyataan-pernyataan terkait persepsi kegunaan yang diperoleh saat menggunakan aplikasi tersebut (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan saat aplikasi tersebut digunakan (*perceived ease of use*), serta pertanyaan terbuka mengenai hambatan yang ditemui saat menggunakan aplikasi SiKesal yang dilengkapi dengan pertanyaan terbuka mengenai saran yang diberikan responden untuk pengembangan aplikasi SiKesal selanjutnya. Setelah berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Jambi didapatkan 102 responden, yang terdiri dari 40 responden admin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non-Kelurahan dan 62 responden perwakilan dari admin di kelurahan se-Kota Jambi. Pengisian kuesioner dilakukan pada bulan Maret 2018 dilanjutkan dengan verifikasi data hingga April 2018. Setelah verifikasi diketahui bahwa dari 102 responden, terdapat dua responden yang menyatakan belum pernah menggunakan aplikasi SiKesal. Hal itu disebabkan karena mereka belum pernah mengunduh aplikasi SiKesal, karena gawainya sudah penuh dengan foto-foto kegiatan warga sehingga kapasitas penyimpanannya tidak mencukupi untuk mengunduh aplikasi SiKesal. Oleh karena itu data yang diolah untuk mendeskripsikan hasil pernyataan konstruk kegunaan dan konstruk kemudahan guna menggambarkan pemanfaatan aplikasi SiKesal berasal dari 100 responden. Sebelum diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, instrumen kuesioner tersebut diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilisasi dari masing-masing konstruk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Karakteristik Responden Penelitian

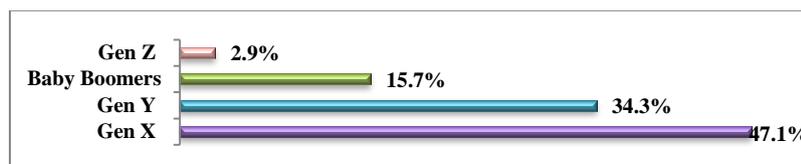
Berdasarkan data mengenai karakteristik responden yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner, berikut ini dipaparkan secara deskriptif informasi yang dianggap terkait dengan kompetensi dan kondisi riil SDM Pemerintah Kota Jambi di bidang TIK, yang merupakan admin/pelaksana aplikasi SiKesal sebanyak 102 responden.



Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Gambar 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar tersebut menunjukkan persentase jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dimana sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yakni 68,6% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31,4% dari total responden.



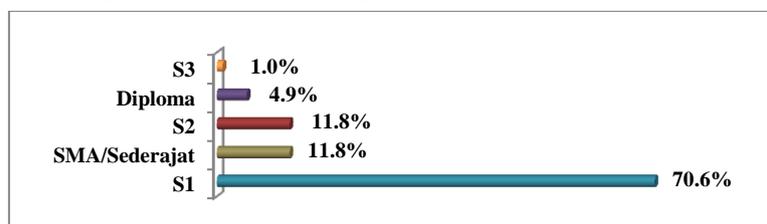
Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Gambar 3. Responden Berdasarkan Kategori Usia

Penelitian ini membagi kategori usia berdasarkan teori generasi yang mengelompokkan manusia pada lima kategori sejak berakhirnya perang dunia kedua yang berhubungan dengan kondisi di masa kini. Masing-masing ahli memiliki perbedaan dalam menentukan kisaran tahun masing-masing kategori, namun pada umumnya tidak jauh berbeda. Kategori tersebut adalah Baby Boomers yang lahir antara tahun 1946 – 1964, Generasi X (Gen X) yang lahir antara tahun 1965 – 1980, Generasi Y (Gen Y) disebut juga generasi millennial yang lahir antara tahun 1981 – 1984, Generasi Z (Gen Z) yang lahir antara tahun 1985 – 2010, serta Generasi Alpha yang lahir antara 2011 – 2025 (Yustisia, 2016).

Responden dalam penelitian ini paling banyak masuk dalam kategori Generasi X dengan kisaran usia 38 tahun sampai dengan usia 53 tahun sebanyak 47,1% dari total responden. Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC (*personal computer*), *video games*, televisi kabel, dan internet. Penyimpanan data masih menggunakan *floppy disk* atau disket (Yustisia, 2016). Dengan kata lain 47,1% dari responden termasuk dalam generasi yang pada umumnya sudah mengenal dan memanfaatkan TIK dalam kehidupannya. Selanjutnya sebanyak 34,3% dari keseluruhan responden penelitian ini termasuk dalam kategori Generasi Y (Gen Y) dan banyak ahli yang menyebutnya sebagai generasi Millennial. Gen Y yang saat ini berusia antara 24 tahun sampai dengan 37 tahun ini telah banyak menggunakan teknologi komunikasi seperti *email*, *SMS*, *instant messaging* dan media sosial serta gemar bermain *online games*. Gen Y juga dianggap memiliki pola komunikasi yang lebih terbuka bila dibanding generasi - generasi sebelumnya. Generasi ini juga merupakan pengguna media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi (Yustisia, 2016).

Dari total 102 responden terdapat 15,7 % responden yang masuk dalam kategori *Baby Boomers*. Generasi *Baby Boomers* pada saat ini berusia antara 54 tahun sampai dengan 72 tahun. Disebut dengan generasi *Baby Boomers* karena pada saat itu angka kelahiran meningkat drastis yang didorong meningkatnya kemakmuran saat itu sebab perang dunia kedua telah berakhir dan masyarakat mengalami optimisme pasca perang. Generasi *Baby Boomers* ini kerap dipandang sangat menghargai hubungan interpersonal, dapat disebabkan karena generasi ini tidak tumbuh bersama teknologi setiap harinya. Menulis surat dan berkomunikasi melalui telepon non-selular menjadi ciri khas pola komunikasi generasi ini (Kumparan.com, 2017). Kategori generasi yang paling sedikit menjadi responden dalam penelitian ini yakni sebanyak 2,9% dari total responden adalah Generasi Z, yang disebut juga *iGeneration*, generasi net atau generasi internet. Saat ini berusia antara 8 tahun sampai dengan 23 tahun dan memiliki kesamaan dengan Gen Y, tapi generasi ini mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti misalnya memainkan media sosial, sambil mencari informasi melalui mesin pencari, dan diiringi dengan mendengarkan musik. Apapun yang dilakukan oleh Gen Z seringkali berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gawai canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka (Yustisia, 2016).

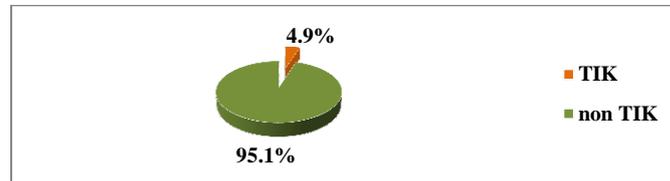


Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Gambar 4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir dari responden paling banyak adalah lulus di jenjang Strata 1 yakni sebanyak 70,6% dari total

seluruh responden. Responden yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA sederajat dan Strata 2 (Pasca Sarjana) memiliki jumlah yang sama yaitu 11,8% dari keseluruhan jumlah responden. Selain itu 4,9% dari seluruh responden yang tingkat pendidikan terakhirnya Diploma. Responden yang melanjutkan pendidikannya hingga jenjang Strata 3 hanya 1% dari total responden.



Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Gambar 5. Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan TIK

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat persepsi responden terhadap aplikasi SiKesar yang berbasis TIK, maka dari setiap jenjang pendidikan yang dilalui oleh masing-masing responden, mulai dari sekolah menengah hingga tingkat pendidikan terakhir, dikelompokkan dalam jurusan yang terkait dengan TIK dan non-TIK. Dalam gambar di atas menggambarkan hasil dari pengelompokkan tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 4,9% dari keseluruhan responden yang pernah mengenyam pendidikan terkait dengan TIK. Sedangkan sisanya sebanyak 95,1% mengenyam pendidikan yang tidak terkait dengan TIK.

3.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Kegunaan (*Perceived Usefulness*) Konstruk Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*)

Hasil uji validitas terhadap pernyataan dalam konstruk kegunaan (*perceived usefulness*) tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Uji Validitas Konstruk Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Pernyataan	Pearson Correlation	Status
Pernyataan 1	0,768**	Valid
Pernyataan 2	0,702**	Valid
Pernyataan 3	0,779**	Valid
Pernyataan 4	0,738**	Valid
Pernyataan 5	0,542**	Valid
Pernyataan 6	0,816**	Valid
Pernyataan 7	0,879**	Valid
Pernyataan 8	0,814**	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap konstruk *perceived usefulness* menunjukkan bahwa 8 pernyataan tersebut memiliki skor validitas di atas batas kritis (0,30) hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut valid. Hasil uji validitas yang juga dilakukan terhadap konstruk kemudahan (*perceived ease of use*) menunjukkan bahwa 7 pernyataan yang mewakili konstruk tersebut juga memiliki skor validitas di atas batas kritis (0,30) hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut valid. Hasil dari pengujian tersebut dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Uji Validitas Konstruk Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Pernyataan	Pearson Correlation	Status
Pernyataan 9	0,590**	Valid
Pernyataan 10	0,593**	Valid
Pernyataan 11	0,595**	Valid

Pernyataan 12	0,707**	Valid
Pernyataan 13	0,776**	Valid
Pernyataan 14	0,736**	Valid
Pernyataan 15	0,676**	Valid

** : Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Uji reliabilitas juga dilakukan untuk membuktikan bahwa pernyataan - pernyataan dalam kuesioner konsisten atau tidak. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka pernyataan - pernyataan dalam kuesioner tersebut konsisten atau reliabel. Dari uji reliabilitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, seluruh pernyataan mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner ini reliabel. Hasil perhitungan uji reliabilitas kedua konstruk tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Uji Reliabilitas Konstruk Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Konstruk Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Konstruk	Cronbach's Alpha	Status
Konstruk Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>)	0,894	Reliabel
Konstruk Kemudahan (<i>Perceived Ease of Use</i>)	0,788	Reliabel

Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

3.1.3. Analisis Deskriptif Persepsi Responden terhadap Konstruk Kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan Konstruk Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) dari Aplikasi SiKesal

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa untuk pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 8 untuk konstruk persepsi responden terhadap kegunaan aplikasi SiKesal (*perceived usefulness*) secara rata-rata keseluruhan mendapatkan nilai *Mean* dengan skor 3,89 dan *Standar Deviasi* dengan skor sebesar 0,620 dengan Jumlah *N Valid* sebesar 100 responden. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi responden terhadap kegunaan aplikasi SiKesal (*perceived usefulness*) dapat diartikan baik atau responden secara umum menerima aplikasi SiKesal, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden merasakan kegunaan setelah memanfaatkan aplikasi SiKesal.

Tabel 4. Analisis Deskriptif Persepsi Responden terhadap Kegunaan Aplikasi SiKesal

Pernyataan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pernyataan 1	100	1	5	3,86	0,603
Pernyataan 2	100	1	5	3,88	0,640
Pernyataan 3	100	1	5	3,85	0,702
Pernyataan 4	100	1	5	4,03	0,658
Pernyataan 5	100	3	5	3,89	0,469
Pernyataan 6	100	1	5	3,91	0,668
Pernyataan 7	100	1	5	3,82	0,626
Pernyataan 8	100	1	5	3,85	0,592
Rata - rata				3,89	0,620

Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Dalam tabel berikutnya dapat dilihat bahwa untuk pernyataan 9 sampai dengan pernyataan ke 15 untuk konstruk persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem informasi baru (*perceived ease of use*) secara rata-rata keseluruhan nilai *Mean* mendapatkan skor 3,88 dengan *standar Deviasi* sebesar 0,65 dengan Jumlah *N Valid* sebesar 100 responden. Hal ini terlihat bahwa secara keseluruhan persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan aplikasi SiKesal dapat diartikan baik atau responden secara umum menerima aplikasi SiKesal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi bahwa aplikasi SiKesal mudah untuk digunakan.

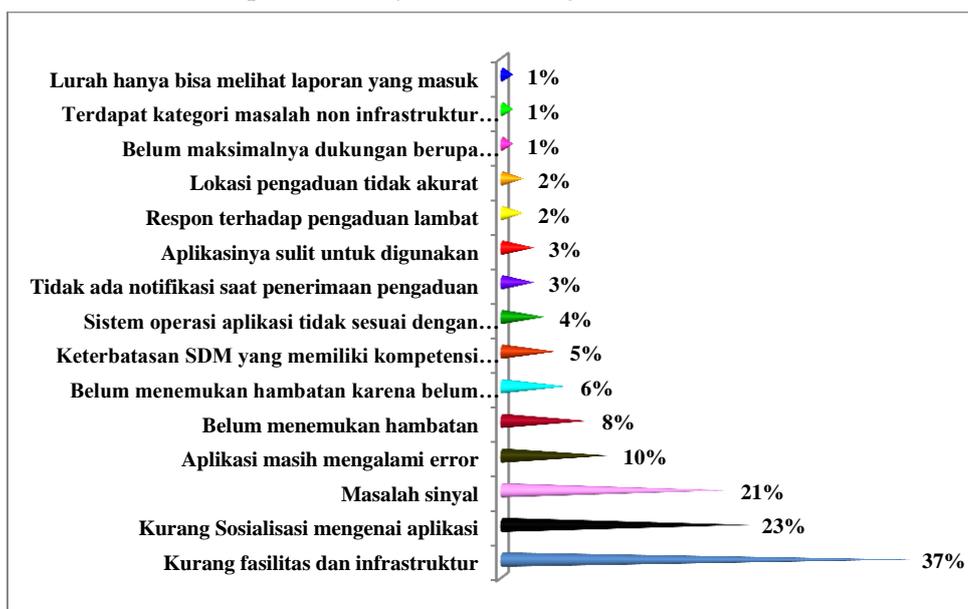
Tabel 5. Analisis Deskriptif Persepsi Responden terhadap Kemudahan Aplikasi SiKesal

Pernyataan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pernyataan 9	100	2	5	3,96	0,618
Pernyataan 10	100	1	5	3,92	0,580
Pernyataan 11	100	2	5	3,84	0,775
Pernyataan 12	100	1	5	3,86	0,725
Pernyataan 13	100	2	5	3,88	0,608
Pernyataan 14	100	2	5	3,89	0,618
Pernyataan 15	100	1	5	3,84	0,677
Rata - rata				3,88	0,657

Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

3.1.4. Hambatan-hambatan yang Dialami Responden

Penelitian ini juga mencari informasi terkait hambatan-hambatan yang dialami para responden saat menggunakan aplikasi SiKesal. Berbagai hambatan tersebut lalu kemudian dikelompokkan, hingga akhirnya menunjukkan terdapat 15 jenis informasi yang diperoleh terkait hambatan yang pernah ditemui oleh responden. Dari informasi tersebut hambatan yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah terkait kurangnya fasilitas dan infrastruktur yakni sebanyak 37% dari seluruh responden yang menginformasikan hal tersebut. Responden merasa bahwa apabila program ini dilaksanakan hendaknya disediakan pula jaringan internet serta gawainya. Hal lain yang dirasakan oleh 23% dari total responden adalah kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi SiKesal ini. Sehingga yang mengunduh dan menggunakan aplikasi SiKesal jumlahnya masih sangat minim, karena mereka menganggap tidak banyak yang mengetahui tentang aplikasi tersebut. Jaringan sinyal internet yang seringkali tidak lancar menjadi salah satu jenis hambatan yang dialami oleh 21% responden. Tidak semua jaringan internet bisa lancar dinikmati oleh para responden, terkadang hanya provider tertentu yang bisa berjalan lancar sinyal internetnya. Terkait dengan kompetensi TIK para responden, 5% diantara mereka merasa jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK sangat terbatas, bahkan 3% diantara admin/pelaksana aplikasi SiKesal yang menjadi responden penelitian ini menganggap aplikasi SiKesal ini sulit untuk digunakan. Hambatan tersebut secara terperinci ditunjukkan dalam gambar 6 berikut ini :



Sumber : Olahan Data Penelitian BPSDMP Kominfo Jakarta 2018

Gambar 6. Jenis Informasi yang Diperoleh Terkait Hambatan yang Pernah Ditemui oleh Responden

3.2. *Diskusi*

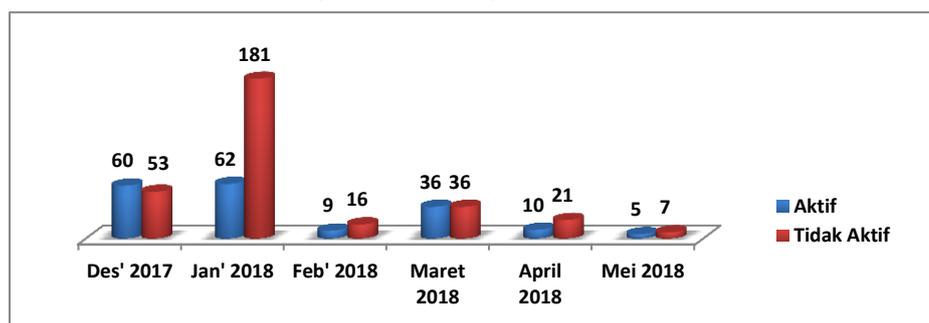
Aplikasi SiKesal yang menjadi *Quick Win* pelaksanaan *Smart City* di Kota Jambi, masuk dalam Strategi Pembangunan *Smart City* Kota Jambi pada Strategi *Smart Governance*. Dimana Pemerintah Kota Jambi membangun perencanaan untuk menyediakan infrastruktur dan membangun layanan administrasi publik secara digital serta meningkatkan penggunaan *e-governance* dalam pengelolaan pemerintahan (kebijakan dan penganggaran) serta sistem pelayanan publik yang ramah masyarakat. Dengan kata lain Pemerintah Kota Jambi telah memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan menerima pengaduan dari masyarakat. Instansi pemerintah lainnya juga telah memanfaatkan TIK dalam melakukan pelayanan pengaduan masyarakat melalui media elektronik seperti SMS *center*, portal web, ataupun melalui media sosial. Karena dengan bentuk pelayanan tersebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan keluhannya tentang masalah yang terjadi kepada pemerintah secara cepat dan *real-time*. Dampaknya adalah, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat akan dapat ditangani dan diselesaikan secepat mungkin (Damanik, 2018).

Aplikasi SiKesal dapat digunakan oleh masyarakat dengan mengunduhnya di *play store* yang terdapat di gawai berbasis sistem operasi Android. Untuk aparat Pemerintah Kota Jambi yang menjadi admin aplikasi SiKesal, dalam aplikasinya terdapat menu untuk mengecek laporan pengaduan yang masuk, serta menu untuk memberikan laporan bahwa pengaduan tersebut sedang dalam proses penyelesaian dan menu untuk memberikan laporan bahwa pengaduan tersebut telah selesai ditangani. Apabila pengaduan yang masuk tidak terselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka aplikasi SiKesal akan memberikan pemberitahuan ke akun aplikasi SiKesal milik Kepala Dinas yang terkait. Dimana Kepala Dinas tersebut akan memberikan arahan kepada stafnya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh warga tersebut. Apabila sampai batas waktu tertentu tidak dapat diselesaikan juga, maka aplikasi tersebut akan memberikan pemberitahuan ke akun aplikasi SiKesal milik Asisten Walikota, Sekda, dan Akun Walikota langsung. Sehingga Asisten Walikota, Sekda, dan Walikota dapat langsung mengarahkan Kepala Dinas beserta jajarannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut.

Dari hasil perhitungan skor persepsi aparat Pemerintah Kota Jambi yang menjadi responden terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan aplikasi SiKesal, menunjukkan bahwa secara umum mereka menerima aplikasi SiKesal dan merasakan kegunaan dari aplikasi SiKesal serta mempunyai persepsi bahwa aplikasi SiKesal mudah untuk digunakan. Meskipun di lain sisi masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami saat memanfaatkan aplikasi SiKesal. Temuan ini tentunya menjadi pendorong Pemerintah Kota Jambi untuk berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala hambatan yang dialami para responden sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan yang sesuai atau minimal mendekati harapan pengguna. Hasil dari penelitian ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Jambi untuk berusaha mengembangkan aplikasi SiKesal agar pengguna merasa lebih mudah untuk mengoperasikan, serta memberikan sosialisasi atau pelatihan yang intensif kepada sehingga dapat tersampaikan informasi tentang keunggulan aplikasi SiKesal.

Terkait dengan masyarakat yang mendaftar di aplikasi SiKesal ada yang tetap mengaktifkan akun di aplikasi SiKesal, namun ada juga pengguna yang setelah mendaftar tidak mengaktifkan kembali aplikasi tersebut. Pada Desember 2017 pengguna yang mendaftar sebanyak 113 pengguna, 60 diantaranya terdeteksi masih mengaktifkan akunnya. Di Januari 2018 total yang mendaftar berjumlah 243 pengguna, namun 181 pengguna tidak mengaktifkan akunnya di aplikasi SiKesal. Di bulan Februari 2018 yang mendaftar sejumlah 25 pengguna, hanya 9 pengguna yang mengaktifkan akun di aplikasi SiKesal. Di bulan Maret 2018 jumlah pengguna yang mendaftar sebanyak 72 akun, dimana akun yang aktif dan tidak aktif jumlahnya sama yakni 36 pengguna. Di April 2018 total pengguna yang mendaftar sebanyak 31 akun dan 21 pengguna tidak mengaktifkan akunnya.

Terakhir di bulan Mei total yang mendaftar hanya 12 pengguna dan hanya 5 pengguna yang mengaktifkan akunnya. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 7 berikut ini :



Sumber : Data dari Diskominfo Kota Jambi Diolah

Gambar 7. Jumlah Pengguna yang Mendaftar Aplikasi SiKesimal Sejak Desember 2017 Hingga Mei 2018

Penanganan pengaduan saat ini juga telah memiliki kebijakan perundangan yang jelas. Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Yohanitas, 2018). Namun terdapat studi yang mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama ini masyarakat lebih mengandalkan media surat kabar (koran) sebagai media yang dinilai masih paling efektif untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, yaitu sebesar (53.8%). Posisi ini diikuti oleh radio (33.91 %) dan pesan isi singkat (SMS) sebesar 30.65%. Bahkan langsung menyampaikan keluhan di media sosial yang pada akhirnya diviralkan oleh masyarakat lain melalui dunia maya (Sudrajat dalam Yohanitas, 2018). Temuan dari penelitian yang dilakukan Dini, dkk. menunjukkan bahwa pengenalan platform pengaduan dalam bentuk perancangan media sosial (*custom-made social media*) memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi warga dan wacana politik yakni dengan menghubungkan warga dan institusi pemerintah dan mendorong keterlibatan masyarakat interpersonal. Dalam pengertian ini, sistem memiliki dampak kepada cara pemerintah memberikan layanan publik dan cara warga berkontribusi untuk membentuk kebijakan (dalam Dini, Sæbo, & Wahid, 2018).

Dalam pelaksanaannya ada OPD-OPD tertentu yang mendapatkan keluhan, di lain sisi ada pula OPD-OPD yang tidak pernah mendapatkan keluhan melalui aplikasi SiKesimal ini. Target di awal pembuatan aplikasi sebenarnya adalah untuk memudahkan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mudah menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada pemerintah. Sekretaris Diskominfo Kota Jambi menambahkan sebenarnya dalam pelaksanaan program aplikasi SiKesimal ini tidak memiliki target jumlah aduan yang masuk. Dalam tabel 6 berikut ini disajikan data mengenai jumlah aduan yang masuk sampai dengan Mei 2018. Dari data tersebut diketahui hingga Mei 2018 terdapat 14 aduan yang diterima dan seluruhnya memiliki status telah diselesaikan oleh staf OPD yang terkait.

Tabel 6. Jumlah Aduan Melalui Aplikasi SiKesimal Sampai Dengan Mei 2018

No	Kantor Dinas	Kelompok Masalah	Kelurahan	Waktu Upload	Waktu Selesai	Status
1	PDAM Tirta Mayang	Kebocoran Pipa Air	Rawasari	2018-05-29 09:31:51	2018-05-30 12:07:52	staf selesai
2	Dinas Perhubungan	Median Bergeser	Jalan Simpang Sipin	2018-03-29 07:58:48	2018-03-29 08:26:50	staf selesai
3	Dinas Perhubungan	Median Bergeser	Jalan Simpang Sipin	2018-03-29 07:58:48	2018-03-29 08:26:59	staf selesai
4	PDAM Tirta Mayang	Air Tidak Mengalir	Talang Banjar	2018-03-24	2018-03-26	staf

				06:45:51	07:54:57	selesai
5	PDAM Tirta Mayang	Air Tidak Mengalir	Talang Banjar	2018-03-24 06:45:51	2018-03-26 07:56:01	staf selesai
6	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PBB	Pematang Sular	2018-03-20 11:59:44	2018-03-21 11:04:24	staf selesai
7	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PBB	Pematang Sular	2018-03-20 11:59:44	2018-03-21 11:05:23	staf selesai
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	Simpang III Sipin	2018-01-24 13:58:11	2018-01-25 13:10:44	staf selesai
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lampu Jalan	Simpang III Sipin	2018-01-24 13:55:00	2018-01-25 13:47:11	staf selesai
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sampah	Rajawali	2018-01-24 06:06:12	2018-01-25 13:07:24	staf selesai
11	Dinas Perhubungan	Traffic Light/ Lampu Merah	Lingkar Selatan	2018-01-23 08:33:30	2018-01-23 08:51:48	staf selesai
12	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan	Beringin	2018-01-16 19:39:00	2018-01-18 09:40:54	staf selesai
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan	Selamat	2018-01-15 18:19:10	2018-01-19 19:23:59	staf selesai
14	Dinas Perhubungan	Lalu Lintas	Lingkar Selatan	2018-01-15 13:48:14	2018-01-15 14:37:39	staf selesai

Sumber : Data Diskominfo Kota Jambi

Dari jumlah akun yang aktif terdaftar di aplikasi SiKesal serta jumlah aduan yang masuk tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SiKesal telah dimanfaatkan namun masyarakat belum aktif menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pengaduan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada para masyarakat yang menjadi sasaran pengguna aplikasi SiKesal tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chin, menunjukkan bahwa sikap merupakan hal yang paling banyak berperan penting dalam menentukan niat para responden penelitiannya untuk menggunakan keluhan secara *online*. Dari penelitian tersebut juga menemukan bahwa persepsi kemudahan saat digunakan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan/manfaat yang diperoleh saat menggunakan (*perceived usefulness*) berdampak positif terhadap sikap penggunaan formulir keluhan secara *online*. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk adanya penghormatan terhadap privasi dan terus memperhatikan keamanan pada saat pengguna mengajukan keluhan mereka. Selain itu saat pengguna menyampaikan keluhan secara *online*, hendaknya mendapatkan respon yang cepat serta dimodifikasi sehingga dapat digunakan dengan lebih mudah dan bermanfaat. Hal-hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penggunaan bentuk keluhan secara *online* yang kemudian meningkatkan sikap positif yang mendorong semakin besar niat untuk menyampaikan keluhan secara *online*.(Chin, 2016)

Pengelolaan pengaduan sangatlah penting bagi instansi pemerintah agar ketidakpuasan masyarakat bisa ditampung dan dicarikan solusinya. Lagi pula paradigma pengaduan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat, seharusnya digeser dari hanya kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan pengaduan menjadi kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya (Yohanitas, 2018). Kehadiran layanan media sosial mainstream, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, telah menyediakan akses yang mudah bagi warga untuk melakukan partisipasi secara *online*. Namun, dalam hal tingkat keterlibatan masyarakat, media sosial mainstream hanya menjadi bentuk dasar dari partisipasi publik secara *online* dimana aliran informasi berjalan satu arah dari pemerintah atau hanya melalui komentar dari warga. Oleh karena itu, platform media sosial yang dirancang khusus sangat diperlukan dalam melakukan inisiatif melalui partisipasi secara *online*. Komentar di Facebook atau Twitter dari warga ke pemerintah tidak secara otomatis memiliki kekuatan untuk membujuk lembaga pemerintah untuk membalas keluhan melalui platform tersebut. Agar dapat membuat media sosial mainstream yang dapat benar-benar mendukung partisipasi publik secara *online* memerlukan komitmen dari lembaga-lembaga publik (dalam Dini et al., 2018).

Terciptanya pelayanan publik yang baik bisa dilihat melalui masyarakat yang aktif memberikan masukan kepada penyelenggara pelayanan publik mengenai ketimpangan yang dialaminya. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengadukan pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan pelayanan publik oleh penyelenggara. Banyaknya pengaduan terhadap penyelenggara bukan berarti pelayanan publik yang diselenggarakan dinilai buruk. Pengaduan masyarakat yang banyak disampaikan kepada penyelenggara merupakan cerminan dari semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan. Namun disatu sisi masyarakat masih kurang tahu kemana mereka harus mengadu agar apa yang dikeluhkan tepat sasaran. Faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah yaitu tidak tepatnya sasaran pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan, takutnya masyarakat untuk mengadukan suatu permasalahan, kurang berkembangnya sarana pengaduan, sumber daya yang kurang dalam penerimaan pengaduan, fasilitas dan sarana yang kurang memadai, kurangnya respon yang tanggap dari pemerintah dalam sarana pengaduan sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (YS., Yasintha, & Winaya, 2018).

4. PENUTUP

Setelah dilakukan perhitungan secara statistik deskriptif terhadap 102 Aparat Pemerintah Kota Jambi yang menjadi admin/pelaksana aplikasi SiKesal, diketahui bahwa terdapat 100 responden yang telah menggunakan aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk konstruk persepsi responden terhadap kegunaan aplikasi SiKesal (*perceived usefulness*) masing-masing sebesar 3,89 dan 0,620. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi SiKesal dan merasakan kegunaan setelah memanfaatkan aplikasi SiKesal. Nilai *Mean* dan *Standar Deviasi* untuk konstruk persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem informasi baru (*perceived ease of use*) masing-masing sebesar 3,88 dan 0,65. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa responden secara umum menerima aplikasi SiKesal dan mempunyai persepsi bahwa aplikasi SiKesal mudah untuk digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini hampir sebagian responden (47,1%) terbanyak masuk dalam kategori Generasi X dengan kisaran usia 38 tahun sampai dengan usia 53 tahun dimana generasi ini pada umumnya sudah mengenal dan memanfaatkan TIK dalam kehidupannya. Dari sisi tingkat pendidikan terakhir dari 70,6% responden lulus di jenjang Strata 1, namun hanya 4,9% dari keseluruhan responden yang pernah mengenyam pendidikan terkait dengan TIK. Diantara responden ada yang merasa bahwa jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK sangat terbatas, bahkan masih terdapat admin/pelaksana aplikasi SiKesal yang menganggap aplikasi SiKesal ini sulit untuk digunakan.

Perlu adanya kajian berupa basis data misalnya data pengguna *smartphone*, pengguna aplikasi, dan lain sebagainya, serta kajian mengenai pemanfaatan aplikasi SiKesal di masyarakat. Sehingga dapat mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi tersebut di masyarakat serta memperoleh berbagai masukan bagi pengembangan aplikasi langsung dari para penggunanya. Aplikasi SiKesal saat ini untuk admin/pelaksana di tingkat kelurahan hanya dapat melihat pengaduan yang masuk, dalam artian masih bersifat pasif. Sehingga perlu dikembangkan agar lurah juga dapat melakukan pengecekan langsung ke lokasi pengaduan serta melakukan koordinasi langsung kepada OPD terkait dengan penanganan. Aparat pemerintah mulai dari RT, RW, Lurah, hingga OPD-OPD lain bisa langsung bersinergi menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan efektif dan efisien. Sehingga perubahan cara berpikir dan pola kerja para aparat pemerintah dengan memanfaatkan aplikasi dalam melakukan kinerja dapat terwujud. Jumlah admin di masing-masing OPD yang memiliki kompetensi di Bidang TIK juga masih terbatas. Di OPD-OPD yang mendapatkan banyak

pengaduannya tentunya perlu diperhitungkan untuk menambah jumlah admin di OPD tersebut, sehingga respon atas pengaduan yang masuk dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Para aparat pemerintah yang masuk dalam kategori Generasi Y dan Generasi Z perlu dipetakan kemampuan dan posisinya, sehingga di masing-masing OPD terdapat admin yang menjadi operator sekaligus menularkan ilmunya tentang penggunaan berbagai aplikasi di unit kerjanya masing-masing. Pelatihan atau bimbingan teknis baik secara langsung maupun secara *online* juga dapat dilakukan secara berkesinambungan. Sebab SDM yang *smart*, kompetensinya sesuai dengan kebutuhan, didukung dengan anggaran dan komitmen dari pimpinan akan menjadi pendorong terlaksananya penerapan aplikasi. Terkait dengan sosialisasi yang dirasakan masih belum merata, para aparat pemerintah yang sudah mengetahui tentang aplikasi SiKesal, dapat mensosialisasikannya ke aparat Pemerintah Kota Jambi lain yang belum memahami juga menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat. baik secara lisan maupun melalui media sosial yang mereka miliki. Diiringi dengan pendampingan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan. Sosialisasi aplikasi SiKesal yang merupakan teknologi media baru hendaknya diarahkan secara maksimal kepada para Generasi Z (Gen Z) yang saat ini berusia antara 8 tahun sampai dengan 23 tahun, sebab sejak kecil generasi ini sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gawai canggih. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai aplikasi SiKesal ke sekolah, kampus, komunitas, serta pusat-pusat perkumpulan pemuda lainnya di Kota Jambi. Diharapkan setelah mereka mendapatkan informasi mengenai aplikasi SiKesal tersebut mereka akan memanfaatkannya dan menggetoktulkannya ke orang lain di sekitar mereka.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian yakni jajaran BPSDMP Kominfo Jakarta serta Dinas Kominfo Pemerintah Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. S. (2016). Persepsi Pengguna terhadap Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Baru (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Ilmu SBI Yogyakarta). *Jbma*, 3(1), 1–18.
- Chin, Y.-C. (2016). Consumer Acceptance of Online Complaint Forms: An Integration of TPB, TAM and Values Perspective. *Business and Economic Research*, 6(2), 265. <https://doi.org/10.5296/ber.v6i2.10099>
- Damanik, M. P. (2018). E-participation : partisipasi publik secara elektronik. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 14(1), 11–20.
- Dini, A. A., Sæbo, Ø., & Wahid, F. (2018). Affordances and effects of introducing social media within eParticipation—Findings from government-initiated Indonesian project. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(4), 1–14. <https://doi.org/10.1002/isd2.12035>
- Handayani, W. P. P., & Harso, M. (2016). Aplikasi Technology Acceptance Model (Tam) Pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. *Jurnal Economia*, 12(1), 13–22.
- Jonar, H. M. (2017). Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung Penerapan E-Government pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 19(2), 121–132.
- Kumaran.com. (2017). Beda Gaya Tiap Generasi: Baby Boomers, Milenial, Linkster. Retrieved May 1, 2018, from <https://kumaran.com/@kumaranstyle/dari-baby-boomers-hingga-linkster>
- Lestari, N. L. Y., Bandiyah, & Wismayanti, K. W. D. (2015). Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Citizen Charter*, 1(2), 1–12.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49–55.
- Sari, Y. N. K., & Dewi, U. (2017). Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Diskominfo, Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 239–249.

- Wagiyem. (2016). *Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Management Pegawai (SIMPEG) Sekretariat Daerah Pekanbaru Menggunakan Pendekatan TAM (Tecnology Acceptance Model)*.
- Yohanitas, W. A. (2018). Strategi Penanganan Pengaduan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 115(1), 103–115.
- YS., M. D. P. Y., Yasintha, P. N., & Winaya, I. K. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR !) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Kantor Staf Presiden Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Citizen Charter*, 2(2).
- Yudi, S. E., & Tambotoh, J. J. C. (2013). Analisis pemanfaatan teknologi informasi menggunakan pendekatan innovation and diffusion theory (IDT) dan technology acceptance model (TAM). *Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi*, E-117.
- Yustisia, N. (2016). Teori Generasi. Retrieved May 1, 2018, from <https://dosen.perbanas.id/teori-generasi/>

**KOMODIFIKASI “POPULARITAS SELEBRITIS” UNTUK MENDULANG
SUARA PEMILU LEGISLATIF 2019**

***“SELEBRITY POPULARITY” COMMODIFICATION TO COLLECT 2019
LEGISLATIVE ELECTION VOICE***

Rieka Mustika¹, S. Arifianto²

^{1,2}Puslitbang APTIKA dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gd. Belakang Lt.5 Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta, Indonesia
¹riek001@kominfo.go.id; ²arief2008@gmail.com

Diterima tgl. 25/10/2018; Direvisi tgl. 07/11/2018; Disetujui tgl. 21/11/2018

ABSTRACT

This article highlights the recruitment model of celebrity professions, becoming legislative candidates in the Legislative Election, 2019. Where the emphasis is not on the professionalism of the militant political ideology, but on the choice of the celebrity's popularity. Secondary data is taken from literature study, media, and other related documents. The discussion uses the concept of commodification of media. The results of the discussion and analysis show that when the transformation of celebrity popularity is exchanged with political values it does not run linearly. The phenomenon of the entry of celebrity professions into politics indicates that, in addition to the weak regeneration process in every political organization, the commodification of the value of celebrity fame into practical political values has taken place theoretically, but substantially it had not a positive impact on the constituent communities it represents.

Keywords: *Celebrity Popularity, Political Commodification, Impact on Constituents*

ABSTRAK

Artikel ini menyoroti model perekrutan profesi selebritis, menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif, 2019. Dimana titik tekannya bukan pada profesionalitas bidang ideologi politik militansinya, tetapi bertumpu pada pilihan popularitas selebritis. Data sekunder diambil dari studi pustaka, media, dan dokumen lainnya yang terkait. Pembahasan menggunakan konsep komodifikasi media. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa ketika transformasi popularitas selebritis dipertukarkan dengan nilai politik tidak berjalan secara linier. Fenomena masuknya profesi selebritis ke dunia politik mengindikasikan bahwa, disamping lemahnya proses kaderisasi di setiap organisasi politik, komodifikasi nilai ketenaran selebritis ke nilai politik praktis secara teoritis telah terjadi, tetapi secara substansial tidak berdampak positif bagi masyarakat konstituen yang diwakilinya.

Kata Kunci: Popularitas Selebritis, Komodifikasi Politik, Dampak Terhadap Konstituen

1. PENDAHULUAN

Sebuah fenomena menarik dalam budaya politik di Indonesia saat ini adalah model rekrutmen profesi selebritis sebagai calon legislatif untuk mendulang suara pemilih bagi organisasi partai politik setiap menjelang Pemilu legislatif. Model ini menjadi trend baru di Indonesia. Untuk kasus Indonesia, seperti Deddy Mizwar, Zumi Zola, Rano Karno, Anang Hermansyah, Dessy Ratna Sari, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, yang terpilih menjadi anggota parlemen, sejak 2014 hingga sekarang ini. Berdasarkan SK. KPU No: 416/Kpts/KPU/ 2014/ tentang penetapan perolehan kursi parpol dan calon anggota DPR dan DPD terpilih terdapat 18 orang berprofesi selebritis terpilih sebagai anggota Legislatif. Keberadaan mereka tersebar di berbagai komisi dan diasumsikan mampu menjadi politisi andal, karena figur kepopuleritasannya di masyarakat. Selebritis menjadi modal politik bagi organisasi politik yang merekrutnya. Faktanya masyarakat lebih bersimpati pada figur selebritis dibanding tokoh elite politik reguler. Fenomena bakal calon legislatif (bacaleg) selebritis membuktikan untuk kesekian kalinya bahwa pola rekrutmen bacaleg nisbi tidak banyak mengalami perubahan. Parpol pada umumnya masih mengedepankan aspek persona dan

popularitas alih-alih kemampuan intelektualitas, rekam jejak, serta integritas dalam menentukan bacaleg. Secara statistik, jumlah anggota legislatif dari kalangan selebritis cenderung mengalami fluktuasi di setiap periode pemilu. Pada Pemilu 2004, 13 dari 48 parpol peserta pemilu tercatat mengajukan caleg dari kalangan selebritis. Pada Pemilu 2009, dari 38 parpol peserta pemilu, 11 di antaranya melibatkan selebritis sebagai calon legislatif. Sementara, pada Pemilu 2014 lalu, sebanyak 10 partai dari total 12 parpol mengajukan caleg dari kalangan selebritis (Detik.com, 2016).

Selebritis menjadi pusat perhatian masyarakat karena kepribadian, reputasi, dan gaya hidupnya (Alberoni, 1972). Meski demikian motif dibalik peminatan selebritis masuk ke dunia politik ini masih bersifat diskursif. Pertanyaannya apakah mereka murni ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur politik, atau hanya ingin menambah popularitas ketika nanti kembali ke habitatnya? Apakah partai politik memilih mereka secara selektif atau hanya sekedar sebagai *vote getter* saja. Terdapat asumsi bahwa pemanfaatan selebritis hanya untuk mendongkrak perolehan suara di parlemen. Penggunaan selebritis di dunia politik, dalam jangka pendek masih bisa diterima, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi bumerang bagi eksistensi partai politik. Masyarakat menganggap selama ini Organisasi Politik tidak mampu melakukan kaderisasi untuk proses alih regenerasi berdasarkan ideologinya. Implikasinya sebagian di antara parpol lebih suka memilih model instan dengan merekrut selebritis terkenal untuk mendongkrak eksistensinya dalam setiap pemilu legislatif.

Potret budaya politik selebritis ini dianalogikan bahwa ideologi yang dibawa ke parlemen, hanyalah teknik untuk memperoleh nilai ekonomi dan kekuasaan, bukan untuk mengawal aspirasi konstituen yang diwakilinya. Meski pilihan selebritis yang beralih profesi ke dunia politik, itu adalah bagian dari hak mereka. Dalam konteks ini masyarakat seharusnya lebih selektif mendalami track *record* para selebritis yang beralih profesi ke dunia politik ini. Ada di antara mereka yang mengaku ketika diwawancarai media ingin mengabdikan dirinya di masyarakat melalui jalur politik. Bahkan mereka mengklaim mempunyai modal kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan selebritis di panggung hiburan dengan masyarakat tentu tidak sama kedekatan dengan rakyat dalam konteks untuk menjadi wakilnya di parlemen.

Kedekatannya dengan masyarakat dalam ranah politik tidak bisa hanya disimbolkan seringnya berjabat tangan dengan masyarakat (penonton) dari atas pentas panggung hiburan, dan lainnya. Hanya bermodalkan itikad baik saja tentu tidak cukup untuk menjadi wakil rakyat di Parlemen. Secara konseptual mereka “harus punya modal ekonomi dan politik” yang kuat saat ingin bertarung di dunia politik. Sebagai elite politik akan tidak elok jika hanya mengandalkan tampang dan gaya hidup ketika berkampanye di depan publik. Pada sistem multi partai menurut Firmansyah (Firmansyah, 2007) memberikan peluang bagi siapa saja boleh mendirikan parpol, implikasinya persaingan semakin kompetitif. Pemilu merupakan momentum sejarah parpol untuk menentukan kekuasaan (Nursal, 2004). Artinya setiap tokoh politik yang akan bertarung sudah harus didukung kapabilitas dan profesionalitas di hadapan konstituennya. Memang tidak dilarang selebritis mencalonkan diri sebagai legislator. Namun dari pengalaman masa lalu popularitas mereka tidak selalu linier dengan kapabilitas politik yang mereka miliki. Kalau parpol ingin memenangkan pemilu, seharusnya menunjukkan prestasi politik dan hasil kerjanya, bukan memamerkan ketenaran profesi selebritis yang tidak ada sangkut pautnya dengan keterwakilannya. Hal ini bukan merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk kasus Indonesia, elemen pendidikan politik inilah yang masih dirasa kurang oleh sebagian kalangan, khususnya pemerhati dan aktivis pro-demokrasi. Menurut mereka, kampanye partai politik di Indonesia, khususnya yang melalui media televisi, hanya terfokus pada tujuan pencitraan semata dan bukan memberikan pendidikan politik yang berkualitas (Putri, 2013).

Misalnya saja ketika Partai Demokrat di tahun 2009 mengusung Angelina Sondakh mempromosikan kampanye anti korupsi. Malahan dia sendiri yang tersandung kasus korupsi. Dari

kasus ini kemudian membuat sebagian masyarakat meragukan kapabilitas selebritis yang terjun ke dunia politik. Ada sebuah fenomenologi yang bersifat pragmatis di dunia politik bahwa, siapapun yang masuk ke dunia politik harus bisa menyembunyikan motif sebenarnya. Apakah motif buruk atau baik, realitas atau tidak realitas, dan lainnya, yang penting rakyat tahunya baik. Meski perlu dicatat, menjelang pemilu 2019 nanti masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih calon wakilnya. Sebagai konstituen dalam pemilu seharusnya bukan hanya pasrah dan menerima apa adanya yang disuguhkan parpol tertentu dengan memasang selebritis sebagai *icon* politiknya. Dari 12 kali pemilu sejak 1955, sudah banyak bukti yang kita lihat politisi yang memberi janji palsu saat rakyat memberi ekspektasi lebih pada pemilu sebelumnya.

Jika melihat fakta ini wajarlah sebagian masyarakat kita bersikap skeptis terhadap orasi para politisi ketika berkampanye di depan publik. Analoginya, untuk menentukan masa depan sebuah Negara, tidaklah sama dengan konsep “memilih kucing dalam karung” pada tataran berpolitik. Maka wajarlah jika masyarakat pemilih semakin berpengalaman dan cerdas. Masyarakat yang cerdas perlu memiliki kemampuan analisis untuk membedakan mana politisi yang bakal memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mana yang hanya beretorika, apakah yang mereka janjikan saat berkampanye sesuai atau tidak dengan tindakannya (Pawito, 2009). Boleh saja konstituen menentukan pilihannya pada politisi selebritis namun perlu mengetahui rekam jejak dan latar belakangnya. Era keterbukaan sekarang ini bukan jamannya lagi memilih calon populer, asal vokal dan kontroversial dalam berucap (nyinyir), tetapi tidak memiliki kapabilitas dan rekam jejak politik yang jelas di masyarakat.

Pada tataran ini konstituen perlu paham dengan kesibukan kinerja selebritis. Apakah mereka nanti tidak bekerja ganda seperti tahun (2014-2019) ketika terpilih menjadi anggota parlemen atau paling tidak meninggalkan dunia selebritisnya untuk sementara. Negeri ini bukanlah panggung sandiwara seperti dalam film dan sinetron yang pernah mereka bintang. Negeri ini masih menyisakan berbagai permasalahan multidimensi, dan penyakit kronis di berbagai aspek kelembagaan dan kehidupan masyarakat yang segera harus dicari solusinya. Artikel ini didukung data sekunder, studi literatur, dokumen terkait, dan pengalaman penulis selama menjadi profesi peneliti. Pembahasannya terfokus pada pergeseran profesi selebritis ke dunia politik, dilihat dari konsep komodifikasi (Mosco, 2009). Apakah dengan menempatkan para selebritis di parlemen sebagai wakil rakyat (2019) lantas bisa mengatasi dan menjadi solusi setiap permasalahan masyarakat di wilayah konstituennya. Hal ini yang perlu dipahami setiap parpol dalam konteks kaderisasi pengembangan SDM termasuk budaya rekrutmen parpol untuk mencari calon politisi militan yang andal, bukan hanya populer. Sedangkan analisisnya bertumpu pada konstruksi dan pemahaman terhadap makna dibalik realitas (Cresswell, 2009).

1.1. Konsep Komodifikasi

Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kebebasan dirinya kemudian diganti oleh adanya aktivitas pertukaran nilai uang yang secara objektif menimbulkan keterasingan hidup. Proses ini disebut komodifikasi. Dalam konteks ekonomi politik media, proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar dikenal dengan istilah komodifikasi. Praktik komodifikasi semakin tampak tidak membutuhkan pertimbangan konteks sosial, selain terus-menerus menunjukkan performanya di pasar bebas. Dengan kata lain, komodifikasi adalah manfaat bisnis (Sugiyanto, 2015).

Konsep komodifikasi yang dipopulerkan Vincent Mosco dalam “*The Political Economy of Communication*” (Mosco, 2009), ialah pemanfaatan konten media yang dilihat dari kegunaannya sebagai komoditi yang dapat dipasarkan. Adapun bentuk-bentuk komodifikasi dalam ekonomi politik media Menurut Vincent Mosco (1996), antara lain adalah:

1. *The Commodification of Content* (Komodifikasi Isi) merupakan proses perubahan pesan dari kumpulan informasi ke dalam sistem makna dalam wujud produk yang dapat dipasarkan.

Dalam penjelasan lainnya disebut sebagai proses mengubah pesan dalam sekumpulan data ke dalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bisa dipasarkan.

2. *Commodification of Audience* (Komodifikasi Khalayak) merupakan proses modifikasi peran pembaca/khalayak oleh perusahaan media dan pengiklan, dari fungsi awal sebagai konsumen media menjadi konsumen khalayak selain media. Pada proses ini, perusahaan media memproduksi khalayak melalui sesuatu program/tayangan untuk selanjutnya dijual kepada pengiklan. Terjadi proses kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan media dan pengiklan, dimana perusahaan media digunakan sebagai sarana untuk menarik khalayak, yang selanjutnya di jual kepada pengiklan. Komodifikasi khalayak terbagi menjadi dua (2) yaitu :
 - a. Komodifikasi Instrinsik: Upaya untuk mengetahui karakteristik khalayak, dan keinginan spesifik dari masing-masing khalayak. Komodifikasi ini membutuhkan prosedur dan ukuran untuk menentukan secara akurat disemua tahapan produksi, pertukaran dan konsumsi.
 - b. Komodifikasi Ekstrinsik: Proses komodifikasi yang terjadi dan mengalami perluasan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, budaya, telekomunikasi dsb. Komodifikasi ini memasukkan transformasi dari ruang umum menjadi kepemilikan privat.
3. *Commodification of Labor* atau komodifikasi pekerja atau buruh merupakan transformasi proses kerja dalam kapitalisme, dimana keahlian dan jam kerja para pekerja dijadikan komoditas dan dihargai dengan gaji. Buruh merupakan kesatuan konsep dari pembuahan, atau kekuatan invasi, imagine dan pekerjaan desain dan pelaksanaan, atau kekuatan untuk melaksanakannya.

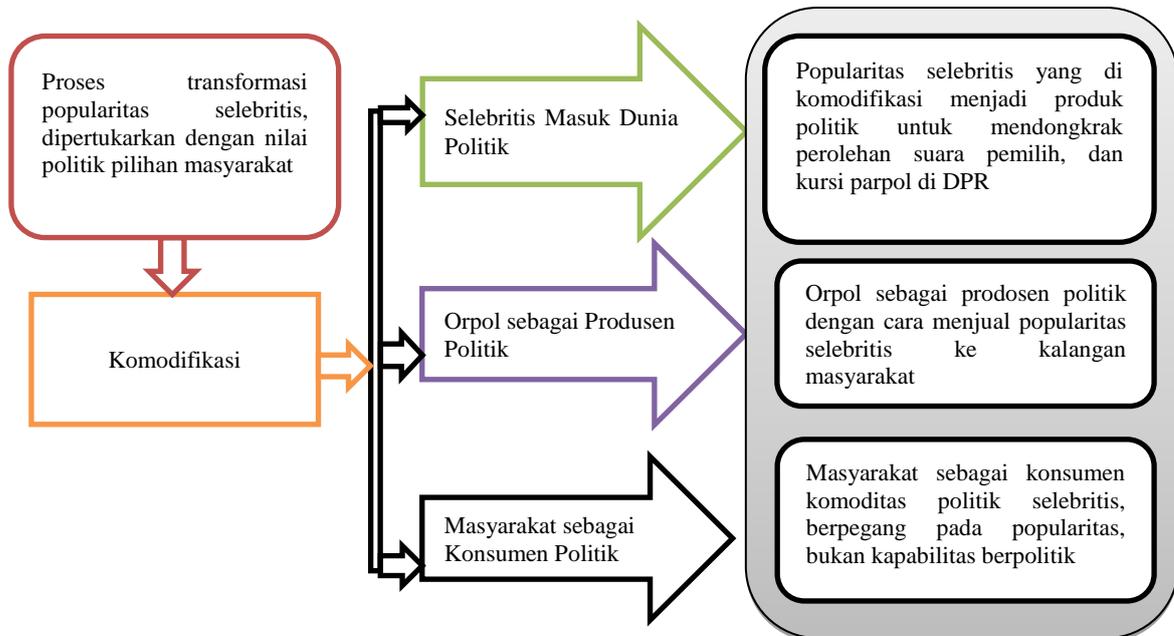
Dalam konteks ini Mosco melihat bahwa komunikasi menjadi arena potensial tempat terjadinya komodifikasi. Komunikasi merupakan komoditas yang dianggap paling berpengaruh, disamping untuk mendapatkan *surplus value*, karena pesan yang disampaikan mengandung simbol dan citra yang bermanfaat bagi penerima pesan itu sendiri.

Menurut (Adorno & Horkheimer, 2002), dalam *The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception*, terdapat perbedaan pandangan, bahwa munculnya komodifikasi karena perkembangan industri budaya, di mana komodifikasi diartikan sebagai produksi benda budaya (musik, film, busana, seni dan tradisi), yang diproduksi secara massal oleh industri budaya, dan menghasilkan produk budaya yang tidak otentik atau palsu, manipulatif, dan terstandarisasi.

Ada dua dimensi utama yang menjadikan komodifikasi penting dalam kajian komunikasi, yakni (a) proses komunikasi dan teknologi memberikan sumbangan penting pada proses komodifikasi secara umum dalam bidang ekonomi secara keseluruhan; (b) proses komodifikasi bekerja di masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan penetrasi pada proses komunikasi dan institusi sehingga kemajuan dan kontradiksi proses komodifikasi kemasyarakatan berpengaruh pada komunikasi sebagai praktik sosial. Komoditas sendiri dalam konteks kapitalisme merupakan penciptaan ilusi dan manipulasi sebagai cara untuk mendominasi selera masyarakat dengan penggunaan ketampanan dan sensualitas fitur-fitur selebritis. Dalam artikel ini peran selebritis sangat dominan bahkan dapat menjadi faktor daya tarik dalam dunia politik. Misalnya sebuah iklan komersial sudah tidak bisa lagi didesain secara normatif. Artinya, perlu ada sentuhan-sentuhan komodifikasi seperti yang dipaparkan Vincent Mosco (Mosco, 2009). Di dunia politik praktis, figur selebritis digunakan sebagai daya pikat bagi calon pemilih di setiap pemilu legislatif.

Sesungguhnya gagasan komodifikasi adalah perluasan lebih lanjut dari logika Marxis. Tetapi, gagasan tersebut patut mendapatkan pengujian yang terpisah berdasarkan pengembangan kritisnya selama beberapa tahun. Dari perspektif tersebut komodifikasi dilihat sebagai alat kapitalis untuk meraih keuntungan dengan cara menghisap nilai-nilai surplusnya. Ia bisa menghasilkan materi atau sesuatu yang mengandung nilai guna dan nilai tukar sekaligus yang disebut “komoditas”. Dasar

pemikiran Marx tentang struktur sosial, tentang komodifikasi ini diinspirasi oleh banyaknya karya seni (*art*), termasuk sinematografi yang diproduksi berhubungan dengan produk-produk kinerja yang dipertukarkan dengan kultur masyarakat kapitalis. Di sini masyarakat (*konstituen*) telah dikonstruksi oleh para elite politik di berbagai organisasi politik, yang seolah-olah membutuhkan kehadiran produk budaya berupa politikus dari selebritis yang dianggap lebih populer dibanding para tokoh politik reguler, sehingga mempunyai nilai daya tarik lebih di mata masyarakat calon pemilihnya. Sebagai ilustrasi dapat terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Gambar diolah penulis

Gambar 1. Skema Ilustrasi Komodifikasi Selebritis Masuk Dunia Politik

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Denzin (Denzin & Lincoln, 2009) bahwa penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti. Studi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi literatur kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah, dan internet.

Dalam pembahasan dan analisis data, artikel ini menggunakan teori komodifikasi. Komodifikasi profesi selebritis ke dunia politik dijelaskan menjadi 3 (tiga) kategorisasi, yakni pada layer pertama dipetakan ke dalam perpindahan profesi selebritis masuk ke dunia politik, pada layer ke dua ketika organisasi politik bertindak sebagai produsen, dan pada layer ke tiga adalah ketika masyarakat berperan sebagai konsumen politik selebritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transformasi Selebritis ke Dunia Politik Praktis

Komodifikasi profesi selebritis ke dunia politik dijelaskan menjadi 3 (tiga) kategorisasi. Di mana masing-masing layer secara teoritis akan dijelaskan sebagai berikut:

a) *Selebritis Masuk "Dunia Politik"*

Belakangan ini muncul fenomena tentang masuknya sejumlah selebritis ternama ke dunia politik menjelang pilihan umum legislatif 2019. Gejala ini seolah menjadi tren baru pergeseran ideologi budaya pragmatis di kalangan selebritis di Indonesia. Hal ini terjadi yang menurut Douglas (Kellner, 2010) organisasi politik lebih suka memanfaatkan selebritis, dibanding mencetak kader politik sendiri yang militan sesuai ideologi partainya. Selebritis ini biasanya terkenal dari *infotainment*. *Infotainment* dijadikan sebagai jelmaan panggung catwalk bagi para artis yang sedang menanjak bahkan menjaga stabilitas popularitasnya (Wenerda, 2015).

Motif di balik strategi perekrutan selebritis sebagai calon anggota legislatif ini masih menjadi diskursus. Para pakar komunikasi politik melihat hal ini hanya dilandasi ketakutan organisasi politik untuk mencapai target perolehan dukungan suara di Pemilu legislatif, 2019 mendatang. Kemudian peluang tersebut dimanfaatkan organisasi untuk mendongkrak elektabilitas dukungan dari masyarakat calon pemilihnya. Keberadaan selebritis yang hanya menjadi pemanis organisasi politik ini bisa memicu persepsi negatif yang kurang demokratis di masyarakat (Ibrahim, 2011). Di mana parpol di persepsi masyarakat sudah tidak mampu lagi mempertahankan ideologi politiknya sendiri. Organisasi politik tampak lebih nyaman menggandeng profesi selebritis untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat konstituennya. Fenomena semacam ini mengindikasikan jika parpol tidak lagi memperjuangkan ideologi politiknya tetapi ia tetap berusaha bagaimana caranya memperoleh kekuasaan parlemen (Ihsan, 2009). Pada pembahasan artikel ini selebritis bukan dalam konteks dilarang memasuki dunia politik, hanya saja dalam kompetisi politik, menjelang pemilu legislatif 2019, masih banyak organisasi politik yang berpikir instan. Pada saat yang sama masyarakat sebagai konstituen juga menilai bagaimana track *record* calon politisi dari selebritis ini. Meski di antara selebritis ada yang mengklaim dirinya lebih dekat dengan rakyat dan mampu menjadi wakil rakyat. Namun kedekatan selebritis dengan rakyat ini masih bersifat semu, bukan berarti selebritis dekat dengan rakyat dalam konteks mampu menjadi wakil rakyat.

Selebritis perlu punya modal politik dan ekonomi saat terjun ke dunia politik. Jika masih ada politisi yang hanya menjual tampang, gaya hidup, popularitas tetapi kinerjanya tidak baik akan bermasalah nantinya. Kalau parpol ingin memenangkan pemilu legislatif, idealnya menunjukkan prestasi politik dan hasil kinerja nyatanya. Mengusung selebritis yang belum diketahui kompetensi berpolitikanya, hanya akan merugikan konstituen. Ibaratnya masyarakat disuruh membeli kucing dalam karung, yang belum tahu isinya kucing seperti apa. Kita masih ingat tahun 2009 lalu ketika Partai Demokrat mengusung Angelina Sondakh untuk berkampanye anti korupsi. Realitasnya justru selebritis yang bersangkutan kesandung kasus korupsi, bersama rekan-rekannya. Fenomena ini membuat publik kurang percaya terhadap kapabilitas selebritis ketika ia masuk dunia politik. Sementara itu partai politik (parpol) mengalami kesulitan ketika tidak mengusung calon anggota legislatif dari kalangan selebritis. Partai politik tidak memiliki kader militan yang bisa diandalkan sebagai program regenerasi di organisasi parpolnya. Kalangan politisi senior umumnya tidak mau digantikan oleh politisi muda yang lebih berprestasi, karena masalah nilai ekonomi. Sedangkan para politisi muda yang berprestasi tidak diberikan kedudukan strategis yang memberikan peluang alih regenerasi. Poinnya disini bahwa nilai guna ekonomi profesi selebritis yang menjadikan ia populis, dipertukarkan dengan nilai politik untuk mempertahankan elektabilitas, dan sekaligus perolehan suara dalam pemilu legislatif, 2019 mendatang.

b) *Organisasi Politik, Sebagai Produsen*

Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan langsung calon legislatif membuat selebritis jadi incaran organisasi politik. Pada sistem ini parpol tidak bisa lagi menentukan pilihan berdasarkan urutan senioritas kadernya. Konsekuensinya parpol harus menghadirkan figur calon alternatif yang mampu bersaing diantaranya profesi selebritis terkenal. Pada sistem ini parpol boleh

saja memiliki politisi militan, dan elektabilitas tinggi, tetapi jika tidak didukung figur yang kuat, seperti selebritis bisa gagal memperoleh dukungan suara masyarakat di pemilu legislatif. Dalam konteks ini ada pertarungan antar tokoh militan partai politik dan figur populer yang akan direkrut menjadi caleg, sehingga parpol dituntut berpikir realistis. Artinya jika parpol ingin mendapatkan banyak kursi di parlemen, maka figur yang diusung harus diperkuat dan berkualitas. Mereka harus memiliki akseptabilitas publik dan kapasitas individu yang mumpuni. Akseptabilitas adalah tingkat popularitas dan kesukaan publik agar dikenal oleh konstituen kemudian mau mempertimbangkan untuk memilihnya. Hal itulah yang menjadi konsekuensi logis dari sistem tersebut. Menggunakan model pragmatisme seperti itu, kualitas parlemen tentu akan menjadi taruhan. Maka idealnya setiap organisasi parpol harus mendidik kadernya agar bisa bekerja maksimal di parlemen. Realitasnya partai politik lebih mengutamakan profesi selebritis, dibanding politisi reguler karena substansi demokrasi di Indonesia masih mengedepankan kuantitas dibanding kualitas.

Organisasi parpol maupun aktor politik menjadi pemain kunci di pusaran media. Meskipun aktor-aktor tersebut dianggap sebagai lingkungan (*other reference*) di luar media, masing-masing aktor tersebut membawa kepentingan dan menjadikan media sebagai alat perpanjangan aktor-aktor ini. Jadi, aktor-aktor ini menganggap media sebagai alat ideologi dan kepentingan semata. Dalam sistem media seperti ini, media menjadi bagian dari corong elit untuk kepentingan pribadi atau golongannya (Wahid, 2014).

Demokrasi di Indonesia cenderung ke arah liberal, dan berimplikasi pada sistem politik yang berorientasi kekuasaan. Padahal seharusnya organisasi politik mampu mewujudkan keberpihakan kepada rakyat secara total atau masyarakat sipil (*civil society*). Sedangkan kekuasaan hanyalah sebagai alat, bukan tujuan utamanya. Dalam konteks ini kalangan selebritis dianggap dapat mewakili profesi yang berlatar belakang seni dan budaya, meski realitasnya secara historis tidak demikian.

Sedangkan rekrutmen caleg selebritis disetiap organisasi politik umumnya tidak banyak yang mendasarkan pada tingkat kompetensi, integritas, dan elektabilitas, seperti yang dikonsepsikan reformasi (1998). Reformasi itu telah gagal mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, karena yang semakin kuat hanya kelompok elite tertentu. Reformasi dianggap menjungkirbalikkan nilai-nilai dan realitas pendidikan politik kepada masyarakat. Dunia politik sudah tidak lagi identik dengan perjuangan ideologi yang mempertaruhkan integritas, komitmen, kapabilitas dan dedikasi, melainkan sekedar aktivitas pada umumnya yang menyerupai lapangan kerja. Hingga kini para politisi kita tidak banyak yang memiliki rekam jejak yang jelas dan fokus dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya di-masyarakat.

Mereka di parlemen layak sebagai selebritis politik oportunistis. Ketika menjelang pemilu legislatif mereka banyak yang merekrut kalangan selebritis hanya untuk mendongkrak perolehan suara dan mempertahankan eksistensinya. Di era demokrasi liberal ini, memang memungkinkan siapapun bisa menjadi pelaku politik asal memenuhi syarat yakni “bermodal ekonomi”, dan popularitas, tetapi jarang sepopuler seperti profesi selebritis. Tekanan pada aspek nilai ekonomi inilah yang menjadikan para politisi di parlemen jauh dari intelektual pejuang, karena umumnya mereka memiliki modal untuk membeli dukungan politik, seperti profesi selebritis yang kita bahas ini. Melihat fenomena tersebut maka wajar jika dunia politik di Indonesia sepi dari gagasan visioner yang memiliki potensi menciptakan perubahan mendasar bagi bangsa dan negara ini.

Hiruk pikuk dunia politik kita tak ubahnya seperti pasar yang sedang bertransaksional. Artinya siapapun bisa masuk dan dibeli ketika mereka mampu mendongkrak perolehan suara dalam setiap rutinitas pemilu legislatif 5 tahunan. Dalam konteks artikel ini setidaknya, para profesi selebritis sudah menyiapkan modal dasar yang dibutuhkan organisasi politik, baik berupa popularitas, dan mahar untuk membiayai kampanyenya. Artinya secara konseptual, partai politik yang memiliki nilai guna untuk memperjuangkan masyarakat berdasarkan ideologi dan misi partai, telah mengkomodifikasi dengan cara menjual popularitas selebritis untuk meraup dukungan politik dari

konstituennya. Meski demikian kisah sukses selebritis yang masuk ke dunia politik sampai sekarang ini hampir tidak terdengar. Fungsi mereka tidak lebih sebagai pendongkrak perolehan suara partai politik, atau sebagai pemanis ketika menjelang pemilu legislatif, kemudian lenyap bak ditelan bumi ketika masuk di parlemen. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para selebritis yang masuk ke dunia politik, maupun parpol pengusungnya baik sekarang maupun di masa mendatang.

c) *Masyarakat Sebagai Konsumen Politik*

Dari data KPU (2016) pada Pemilu legislatif tahun 2014, dari 74 selebritis yang mendaftarkan caleg hanya 19 orang (sekitar 26%) yang terpilih. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas dalam memilih calon wakil rakyat, yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi, dan empati terhadap konstituen yang diwakilinya. Persaingan dari 16 partai politik yang terdaftar di KPU (2018) dengan sistem pemilu langsung dan terbuka sekarang ini, mengharuskan parpol menyediakan kader-kader partai yang militan dan handal. Pemilu serentak pada, 17 April 2019 nanti akan membawa konsekuensi bagi parpol untuk mengkampanyekan pasangan calon presiden (capres) yang akan diusungnya nanti, sekaligus partai koalisi pengusungnya.

Literasi pemilih menjadi penting seiring dengan agenda konsolidasi demokrasi menuju pelebagaan pemilu, dengan tujuan menjadikan para pemilih terliterasi saat dihadapkan dengan keputusan memilih kepada kandidat atau partai politik. Dalam menjustifikasi pilihannya tak hanya berdasarkan popularitas calon atau faktor kedekatan secara emosional belaka. Tetapi mampu mengetahui dan memahami rekam jejak, program dan visi misinya. Karena apapun pilihannya, akan kembali kepada para pemilih juga (Bakti, 2017).

Untuk kepentingan kampanye tersebut, peran selebritis akan menjadi pemikat pada masyarakat di wilayah konstituennya. Meski demikian dominasi caleg selebritis bisa dimaknai sebagai kegagalan organisasi politik melakukan kaderisasi. Sementara bagi partai politik yang baru berdiri tidak memiliki banyak waktu untuk merekrut kader yang berpotensi handal. Implikasinya mereka akan memilih bekerja secara instan dan pragmatis dalam pengkaderan parpol pendukungnya. Hal tersebut bisa jadi membuat partai politik mengabaikan prinsip-prinsip kualitas dan integritas dalam mengusung calegnya di parlemen nanti. Maka tidak heran jika kalangan selebritis yang lolos ke-parlemen hampir semuanya tidak bersinar gemilang, sebagaimana ketika status selebritis masih menjadi pilihannya. Bahkan, ketika mereka bekerja sebagai politisi tampak canggung dan ada sebagian diantara mereka yang tidak mau meninggalkan profesi selebritasnya, ketika ia aktif di parlemen. Sebenarnya pemilu langsung dengan sistem proporsional terbuka bukan menjadi pembenaran parpol harus bekerja secara instan untuk merekrut bakal calegnya.

Seharusnya, sistem baru ini memberikan peluang kepada parpol untuk melakukan kaderisasi menyiapkan calon pemimpin politik militannya. Fenomena ini akan berulang terus, karena semua parpol menargetkan kursi sebanyak mungkin di parlemen, sementara proses kaderisasi tidak berjalan. Akhirnya, yang dicari adalah profesi selebritis yang populer, bukan hasil kaderisasi parpolnya. Partai politik terkesan hanya memikirkan strategi kemenangan, tanpa mempertimbangkan kualitas para calegnya. Konsep strategis parpol, bagaimana menang dengan cara mudah dan cepat. Sementara masyarakat juga masih dipengaruhi oleh budaya popularitas selebritis semacam itu. Popularitas selebritis yang dianggap representasi dan identik dengan parpol menjadi variabel untuk menentukan elektabilitas partai parpol pengusungnya. Artinya, parpol yang mempunyai tokoh nasional populer, seperti selebritis terkenal, dianggap memiliki amunisi yang kuat untuk berkompetisi di pemilu legislatif nanti. Sejujurnya citra dan kinerja partai politik secara kolektif juga bisa berpengaruh terhadap elektabilitas, sehingga calon legislatif dari profesi selebritis hanya sebagai faktor alternatif. Munculnya caleg selebritis menandakan adanya persaingan antar partai politik yang semakin kompetitif pada pemilu 2019 nanti. Ada tiga alasan yang membuat persaingan ketat tersebut. Pertama, ada perubahan *parliamentary threshold* dari 3,5% menjadi 4%.

Kenaikan ambang batas syarat partai politik bisa duduk di parlemen itu tidak hanya berdampak pada partai baru, tetapi juga partai lama kelas menengah ke bawah. Kedua, penambahan jumlah partai peserta pemilu dari 12 menjadi 16 partai (KPU, 2018). Partai-partai baru hadir dengan kekuatan finansial, tokoh, dan semangat yang bisa membuat masyarakat beralih dukungan. Ketiga, Pemilu 2019 akan menjadi pemilu serentak antara pileg dan pilpres. Maka, para selebritis bisa jadi bakal ditempatkan oleh parpol pengusungnya pada dapil baru, di mana sebelumnya parpol tersebut tidak mendapatkan suara, tujuannya agar partai politik mendapatkan kursi sesuai target dari dapilnya. Pada akhirnya dalam konteks ini, masyarakat sebagai konstituen telah dikomodifikasi dari nilai guna pilihan afiliasi politik, menjadi pilihan popularitas yang dikonstruksi oleh para selebritis politik.

d) Interpretasi Masuknya Profesi Selebritis ke Dunia Politik

Konsep hukum pasar berlaku dalam sistem pencalonan anggota legislatif di setiap partai politik menjelang pemilu legislatif 2019 nanti. Pada konsep ini parpol lebih mengedepankan bagaimana calegnya laku dijual ke pasar publik dengan kemasan citra popularitas. Untuk memenuhi permintaan pasar publik ini, parpol umumnya tidak memiliki stok kader politik militan yang mumpuni. Parpol juga kurang memperhatikan integritas dan kapabilitas sebagian caleg yang diusungnya. Konsep ini bisa berpengaruh bahkan merusak mental kader parpol yang sudah berjuang lama dari bawah, tetapi kurang diapresiasi dan kalah bersaing dengan pendaftar baru yang lebih populer, seperti para profesi selebritis, yang dalam jargon politik mereka disebut menunggu di tikungan, artinya tanpa mengeluarkan berkeringat langsung menjadi calon utama. Bisa saja dalam jangka waktu pendek parpol yang didukung selebritis elektabilitasnya meningkat melebihi targetnya.

Namun jika parlemen isinya hanya didominasi oleh para selebritis karena popularitasnya, dan minim integritas dan kapabilitas dalam berpolitik, bukan tidak mungkin kualitas parlemen di Indonesia akan semakin terpuruk tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Partai politik sengaja merekrut calegnya dari profesi selebritis karena sudah dikenal oleh masyarakat luas. Model instan seperti ini dilakukan parpol untuk perolehan kursi sebanyak mungkin di Parlemen, 2019 nanti. Dalam konteks ini ada ketidakpercayaan diri parpol atas kemampuannya untuk melakukan kaderisasi politik sesuai dengan ideologi militansi partainya. Selama ini pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan organisasi politik memang kurang mendapat perhatian. Mereka lebih sibuk mengatur strategi bagaimana memperoleh kekuasaan di parlemen yang bernilai ekonomi, bukan lagi memperjuangkan nasib dan permasalahan yang dialami masyarakat konstituennya.

Mereka menyapa konstituennya hanya ketika mendekati pemilu legislatif, atau masa reses yang seolah-olah berempati kepadanya. Pada tataran ini masyarakat di wilayah konstituennya jarang mengenal, siapa tokoh politik yang menjadi wakilnya di parlemen, dan harus kemana jika ada permasalahan mengadunya. Pada hal seharusnya masyarakat bisa mendapatkan edukasi politik agar nantinya bisa memilih kembali calegnya berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan hanya bersandarkan pada popularitasnya. Jika yang dicari hanya popularitas, maka kinerja mereka di parlemen sulit untuk bisa diandalkan kualitasnya.

Maka seharusnya dalam pemilihan calon legislatif semacam ini perlu ada seleksi yang lebih ketat, baik calon legislatif dari politik reguler, maupun yang sebelumnya berprofesi selebritis. Idealnya orang yang direkrut menjadi caleg adalah mereka yang kapasitas intelektualitasnya mumpuni, memiliki kapabilitas dan integritas berpolitik, bukan sekedar tersohor menjadi komunitas publik. Hal ini karena mereka nantinya di parlemen harus memiliki kemampuan intelektualitas untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan yang baik sebagaimana fungsinya. Realitas di permukaan sekarang ini orientasi menjadi caleg di parlemen hanya untuk memperjuangkan eksistensi parpol pengusungnya. Misalnya, kita saksikan sebuah dramaturgi

bagaimana ribet dan ributnya ketika posisi jabatan para anggota legislatif di DPR terusik, digeser atau digantikan oleh yang lebih kompeten. Bandingkan dengan bagaimana reaksi pembelaan mereka di parlemen ketika masyarakat konstituennya ada permasalahan krusial yang harus ditangani segera. Fenomena ini mengindikasikan bahwa seorang menjadi anggota legislatif, nilai dasar kepentingan ekonomi masih mendominasi orientasi mereka, dari pada perjuangan membela kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Bahkan ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tusunya, di parlemen kasus jual beli pasal, jatah proyek, kemudahan perizinan perusahaan yang menjadi naungannya masih tampak jelas menjadi prioritas, dibanding pembelaannya kepada rakyat yang diwakilinya. Ratusan anggota DPR/DPRD, yang melakukan penyimpangan dan berurusan hukum dengan KPK semuanya berorientasi pada nilai ekonomi dan kekuasaan. Rekrutmen caleg dari profesi selebritis diharapkan bukan hanya pamer maskulin dan feminin, menarik, dan bergaya hidup mewah, tetapi perlu memiliki moralitas yang tetap terjaga, disamping integritas dan kapabilitas, agar tidak terjerumus ke permasalahan yang tidak terpuji, mengikuti para seniornya terdahulu. Artinya membeli selebritis untuk dijual ke masyarakat dalam konteks politik harus juga mendapatkan barang yang berkualitas tinggi, dan nantinya berproduktivitas tinggi pula ketika bekerja di parlemen menjalankan tugasnya. Persoalan ini bukan hanya bertautan dengan apakah mereka berasal dari selebritis, atau politisi murni, tetapi mereka yang berkualitas dan bermoral dalam menjalankan tugas fungsinya di parlemen. Faktor budaya politik yang koruptif menjadi kendala bagi para calon legislatif untuk tidak hanyut terbawa arus seperti itu. Sebagaimana di birokrasi, mereka yang memiliki idealisme, jujur, produktif justru ditempatkan pada komisi-komisi yang tidak strategis. Sedangkan komisi-komisi yang dianggap strategis diisi oleh kelompok-kelompok yang berorientasi kekuasaan dan nilai ekonomi. Fenomena ini dapat kita saksikan sebuah dramaturgi setiap 5 tahunan dalam keanggotaan parlemen di negeri ini.

4. PENUTUP

Popularitas seorang selebritis menjadi potensi *inheren* atas profesi keartisannya. Mereka bisa populer karena disukai masyarakat penggemarnya atas tampilan karya seni kreativitas, gaya hidup yang dipublikasikan melalui media (Driessens, 2013). Artinya popularitas selebritis karena dibesarkan media, sedangkan popularitas politisi militan dibesarkan oleh dirinya sendiri. Popularitas selebritis ketika dibawa masuk ranah dunia politik tampak menimbulkan *image* baru di masyarakat. *Image* baru itu menandai keseriusan mereka untuk menampilkan potensinya ketika berpolitik, sehingga menjadi opini di kalangan pemerhati politik dan masyarakat. Bersamaan dengan popularitasnya, belakangan selebritis tidak hanya menjadi pemikat bagi pelaku seni dan budaya secara umum sesuai talentanya, tetapi juga organisasi politik untuk merekrutnya menjadi calon anggota legislatif dari organisasi politik pengusungnya. Dari pembahasan tulisan ini cukup menjadi bukti yang faktual, bahwa masuknya profesi selebritis ke dunia politik karena didorong oleh popularitasnya sebagai *public figure*, bukan sebagai profesionalis politik yang seharusnya sebagai persyaratan utama yang harus mereka miliki ketika masuk ke dunia politik. Secara substansial alasan profesi selebritis masuk ke dunia politik masih belum terungkap secara jelas, apakah berlatar belakang ekonomi, kekuasaan, atau hanya untuk mendukung profesinya di *infotainment*.

Namun, di antara ungkapan yang sering dipublikasikan media adalah persepsi mereka sendiri terhadap pemerintah yang kurang optimal perhatiannya pada bidang seni, dan budaya (Kompas.com, 24/7/18). Mereka beranalogi bahwa, melalui dunia politik akan mampu berbuat lebih banyak untuk mendorong memajukan “seni dan budaya” di masyarakat. Selebihnya faktor kepaiawaian berpolitik, merupakan hal yang sering menjadi permasalahan utama, ketika mereka masuk di dunia politik.

Kebanyakan organisasi politik yang merekrut selebritis menghadapi pemilihan legislatif 5 tahunan ini cenderung kurang mempertimbangkan permasalahan kualitas, kapabilitas dan integritas mereka, dan hanya fokus pada aspek popularitasnya. Atas dasar pengalaman dan popularitasnya di dunia hiburan, seni dan budaya (keartisan), para profesi selebritis percaya diri kiprahnya di dunia politik tidak akan tersaingi oleh para politisi reguler yang sudah lama menggeluti politik praktis di organisasi politik. Meski berdasarkan data (2014-2019) profesi selebritis hampir tidak ada yang menonjol prestasi politiknya, bahkan tidak ada yang memberikan penetrasi politik sesuai pembedangannya terhadap konstituen di wilayahnya. Mereka umumnya dikenali masyarakat bukan karena profesi politiknya, tetapi profesi keartisannya. Artinya secara substansial perekrutan “profesi selebritis ke dunia politik” mengalami kegagalan, dan masyarakat di wilayah konstituennya dirugikan karena mereka hanya mendapatkan semacam pepesan kosong saja.

Komodifikasi profesi selebritis ke dunia politik, masih belum bisa dimaknai sebagai pertukaran nilai guna yang bersifat permanen. Faktanya sebagian di antara para selebritis di satu sisi memang menjadi politisi, tetapi di sisi lain masih belum juga meninggalkan profesi selebritisnya ketika resmi menjadi anggota legislatif. Jabatan yang bersifat ambivalen inilah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena tidak bisa memberikan pelayanan terfokus untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Faktor yang ikut mendorong selebritis masuk dunia politik selain popularitas adalah faktor ekonomi. Bukan rahasia umum untuk menjadi politisi di parlemen era sekarang ini lebih mendasarkan pada konsep politik transaksional, dan kalangan selebritis memiliki modal itu. Bisa jadi alasan bermodalkan ekonomi tersebut sekaligus untuk menepis opini yang berkembang bahwa masuknya selebritis ke dunia politik bukan sekedar untuk mengejar kekayaan materi sebagaimana politisi reguler pada umumnya.

Sebagai identitas terkait dengan profesi keartisannya, selebritis yang masuk dunia politik menganggap memiliki sensitivitas, dan estetika yang kuat sehingga mampu merespon aspirasi dan berbagai permasalahan “seni dan budaya” di masyarakat, karena pengalamannya semasa menjadi selebritis hiburan. Analogi yang sering diungkapkan oleh profesi selebritis ketika masuk dunia politik tersebut belum terbukti. Realitasnya ketika mereka menjadi anggota parlemen, tidak ditempatkan pada keahliannya untuk mengawal pembangunan dunia seni dan budaya, tetapi di bidang lain. Implikasinya mereka harus belajar dari awal di luar bidangnya, dan banyak yang gagal, bahkan ikut terseret arus budaya politik yang sudah hegemoni, berakar, dan beranak pinak di parlemen. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa, komodifikasi nilai keartisan ke nilai politik praktis profesi selebritis, secara teoritis memang telah terjadi, tetapi secara substansial tidak membawa dampak yang positif bagi kepentingan masyarakat di wilayah konstituennya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih diucapkan atas bantuan, baik kritik maupun apresiasi terhadap artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adorno, T., & Horkheimer, M. (2002). *The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception dalam Theorizing Communication: Reading Across Traditions*. Stanford: Stanford University Press.
- Alberoni, F. (1972). *Sociology of Mass Communication*. Suffolk: Richard Clay: The Chaucer Press, Ltd.
- Bakti, A. F. (2017). *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu* (1st ed.). Jakarta: FIKOM UP Press.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design* (Third Edit). London: Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detik.com. (2016). Caleg pesohor dan pragmatisme parpol. Diakses pada June 13, 2018, dari <https://news.detik.com/kolom/4136595/caleg-pesohor-dan-pragmatisme-parpol>

- Driessens, O. (2013). Celebrity Capital: Redefining Celebrity Using Field Theory. *Journal Theory and Society*, 42(5 pp), 543–560.
- Firmansyah. (2007). *Marketing Politik, Antara: Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Penerbit, Obor.
- Ibrahim, I. S. (2011). *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media dan Gaya Hidup, dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Ihsan, A. B. (2009). *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik, Kekuasaan dan Demokratis*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Kellner, D. (2010). *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan Post Modern*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*. London: Sage, Publication.
- Nursal, A. (2004). *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Putri, D. A. L. . K. A. S. (2013). *Dari Konstituen ke Konsumen: Strategi Komunikasi Partai Politik di Layar Kaca*. Jakarta.
- Sugiyanto, D. R. (2015). Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi Pada Program ‘Polemik‘ Di Radio Sindo Trijaya 104.6 Fm Jakarta). *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No, 57–69.
- Wahid, A. (2014). Menakar Kualitas Public Sphere di Tengah Benang Kusut Sistem Media Indonesia. *Jurnal Literasi Ilmu Komunikasi Dan Multimedia*, 1(1), 1–19.
- Wenerda, I. (2015). Ekonomi Politik Vincent Moscow oleh Media Online Entertainment kapanlagi.comTM. *Channel Diterbitkan Oleh Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*, Vol. 3 No1, 1–14.

**POLA KOMUNIKASI SISWA TUNARUNGU
DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BAGIAN B KOTA JAYAPURA**

***COMMUNICATION PATTERNS FOR DEAF STUDENTS
IN THE STATE EXTRA SCHOOL PART B, JAYAPURA CITY***

Bambang Mudjiyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aptika dan IKP Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110
bamb037@kominform.go.id

Diterima tgl. 27/09/2018; Direvisi tgl. 22/11/2018; Disetujui tgl. 07/12/2018

ABSTRACT

The student's deafness, namely the inability of students to capture verbal communication or other sounds are adjusted to certain frequency and intensity. These individuals are classified according to the category of deafness. This research uses qualitative methods with descriptive types. Key informants were chosen by snowball sampling. Data were collected from 30 July 2018 to 3 August 2018, at the State Special School Part B Jayapura City, Jayapura City, Papua Province. The communication process of deaf students requires special services and education. The pattern of both total communication and symbolic interaction supports the effectiveness of communication between the deaf, the teacher and the environment. The use of cellphones or computers connected to the internet makes interaction and communication easier. The quality learning empowerment for the deaf calls for specific facilities and infrastructures for each student B, such as spaces for communication construction and perceptions of rhythm sounds, spaces for sound perception and skills of talk. Besides, he also needs hard skills empowerment such as mastery of communication and information technology, technical skills in accordance with interests and talents related to the field of knowledge, and communication skills with others and himself.

Keywords: *Communication Patterns, Deafness*

ABSTRAK

Ketunalarungan siswa berkenaan kondisi pendengaran individu, yaitu ketidakmampuan siswa dalam menangkap komunikasi verbal atau suara lainnya yang disesuaikan dengan frekuensi dan intensitas tertentu. Individu-individu tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori ketuliannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan sebagai prosedur untuk mengemukakan pemecahan masalah dengan menyetengahkan keadaan obyek yang diteliti. Subyek penelitian individu, dengan key informan kemudian informan berikut ditarik melalui snowball sampling. Pengumpulan data lapangan berlangsung dari tanggal 30 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018, di Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura, Provinsi Papua. Proses komunikasi siswa tunarungu memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus. Pola komunikasi total dan interaksi simbolik yang dikombinasikan yang terjadi mendukung efektivitas komunikasi antara tunarungu, guru dan lingkungannya. Penggunaan ponsel atau komputer yang terhubung internet mempermudah interaksi dan komunikasi. Pemberdayaan kualitas pembelajaran siswa tunarungu diperlukannya sarana dan prasarana yang khusus bagi masing-masing siswa B, seperti ruang bina komunikasi dan persepsi bunyi irama, ruang bina persepsi bunyi dan bicara ruang keterampilan. Pembekalan hard skill seperti penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, kemampuan teknis sesuai dengan minat dan bakat berhubungan dengan bidang ilmunya serta soft skill keterampilan berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan dirinya sendiri.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Tunarungu

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Raymond Ross (dalam Sambas, 2015, p. 49) komunikasi adalah suatu

proses menyortir, memilih, dan mengirim simbol-simbol yang sedemikian rupa sehingga dapat membantu pendengar dalam membangkitkan daya respon atau pemaknaan dari sebuah pemikiran yang selaras dengan yang dimaksud komunikator. Komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan penerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan penyampai pesan untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak (komunikator dan komunikan). Apabila tidak dapat dilakukan dengan bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, dimungkinkan komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti itu disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.

Komunikasi dilakukan secara sadar, disengaja serta sesuai dengan tujuan, adanya partisipasi, menggunakan lambang-lambang berlangsung antara orang normal biasanya secara fisik dan mental atau pun bahkan yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu. Informasi dapat diterima oleh manusia melalui lima indera, indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera penciuman, dan indera pengecap. Seseorang dapat menggunakan kelima indera tersebut dalam menerima, mencerna, atau untuk menghasilkan sebuah informasi baru. Namun, hal ini akan berbeda bagi seseorang yang memiliki kekurangan secara fisik. Mereka hanya dapat menerima informasi melalui inderanya yang masih dapat berfungsi secara baik.

Ada banyak cara untuk dapat membangun komunikasi dengan orang tunarungu. Cara yang paling umum adalah dengan membaca gerak bibir dan menggunakan bahasa isyarat. Dapat juga berkomunikasi menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan kertas bagi mereka yang berpendidikan, ataupun perangkat CART (Communication Access Realtime Translation). Apa pun caranya, komunikator harus sopan dan memperhatikan penuh penyandang tunarungu.

Tunarungu adalah kondisi terganggunya fungsi pendengaran seseorang yang bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Penderita tunarungu tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Tunarungu ada yang bersifat bawaan (sudah ada sejak lahir) dan adventif (terjadi setelah dilahirkan). Tunarungu adventif lebih banyak disebabkan oleh kebisingan atau karena penyebab-penyebab lain, seperti dampak suatu penyakit atau cedera fisik. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuannya untuk mendengar, mulai dari tindakan yang ringan sampai berat. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran yang diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Tunarungu Ringan (Mild Hearing Loss). Siswa yang tergolong tunarungu ringan mengalami kehilangan pendengaran antara 27-40 dB. Ia sulit mendengar suara yang jauh membutuhkan tempat duduk yang letaknya strategis; (2) Tunarungu Sedang (Moderate Hearing Loss). Siswa yang tergolong tunarungu sedang mengalami kehilangan pendengaran antara 41 – 55 dB. Ia dapat mengerti percakapan dari jarak 3 – 5 feet secara berhadapan (face to face), tetapi tidak dapat mengikuti diskusi kelas. Ia membutuhkan alat bantu dengar serta terapi bicara; (3) Tunarungu Agak Berat (Moderately Severe Hearing Loss). Siswa yang tergolong tunarungu agak berat mengalami pendengaran antara 56 – 70 dB. Ia hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat, sehingga ia perlu menggunakan Hearing Aid. Kepada anak tersebut perlu diberikan latihan pendengaran serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya; (4). Tunarungu Berat (Severe Hearing Loss). Siswa yang tergolong tunarungu berat mengalami kehilangan pendengaran antara 71 – 90 dB. Sehingga ia hanya dapat mendengar suara-suara yang keras dari jarak dekat. Siswa tersebut membutuhkan pendidikan khusus secara intensif, alat bantu dengar, serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya; (5) Tunarungu Berat Sekali (Prof Ound Hearing Loss). Siswa yang tergolong tunarungu berat sekali mengalami

kehilangan pendengaran lebih dari 90 dB. Mungkin ia masih mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih menyadari suara melalui getarannya (Vibratios) dari pada melalui pola suara. Ia juga lebih mengandalkan penglihatannya dari pada pendengarannya dalam berkomunikasi, yaitu melalui penggunaan bahasa isyarat dan membaca ujaran (Wardani, dkk. 2013,p. 5-6).

Anak tunarungu akan memiliki hambatan dalam komunikasi verbal, baik secara ekspresif (berbicara) maupun reseptif (memahami pembicaraan orang lain) sehingga anak tuna rungu lebih memfungsikan dan mengutamakan indera penglihatannya untuk menerima pesan dan mengolah pesan dari luar dibandingkan indera pendengarannya. Keunikan SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Bagian B Kota Jayapura ini adalah proses program pembelajaran yang diterapkan di SLB agak berbeda dengan sekolah reguler, karena menggunakan metode pendekatan dalam kelas, sehingga guru harus betul-betul memahami karakteristik siswa. Untuk mata pelajaran memang sama dengan sekolah reguler, tapi di SLB ini ada pembelajaran khusus seperti tunarungu bicara, tuna bicara, bina diri, dan bina gerak, bina pribadi dan bina sosial. Permasalahannya akan difokuskan pada pola komunikasi keterkaitan antara sesama siswa tunarungu, guru dan murid tunarungu. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian: 1) Bagaimana pola komunikasi antara sesama murid penyandang tunarungu di lingkungan SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Bagian B Kota Jayapura?; 2) Bagaimana pola komunikasi antara murid penyandang tunarungu dengan guru di lingkungan SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura?

1.2 Signifikansi

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan Pola Komunikasi Tunarungu di lingkungan SLB. Secara praktikal diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses memahami persoalan komunikasi di lingkungan SLB.

1.3 Tinjauan Pustaka

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa telaahan menyangkut keterkaitan pola komunikasi tunarungu SLB masih belum banyak dilakukan oleh sarjana ilmu komunikasi. Namun pihak yang berupaya menelaah persoalan tersebut secara implisit masih belum memasukkan komunikasi tunarungu menggunakan TIK (komunikasi melalui gawai yang terhubung internet).

Dalam kaitan itu, diantaranya dilakukan oleh Anggi Saputri; Yohanes Bahari; dan Imran (2016) melalui penelitian di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Judul penelitiannya sendiri, yaitu : “Analisis Pola Komunikasi pada Siswa Tunarungu di SMALB Dharma Asih Kota Pontianak”. Penelitian mereka bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang terjadi pada siswa berkebutuhan khusus tunarungu, baik dengan guru maupun sesama temannya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasilnya memperlihatkan bahwa 1) Proses pelaksanaan dan penerapan komunikasi yang dilakukan antara siswa dengan siswa, maupun oleh guru dengan siswa pada kenyataannya ada siswa tunarungu yang tidak bisa berkomunikasi secara verbal dalam aspek komunikasi secara lisan dikarenakan keterbatasan dan tingkat ketunarunguan yang dimilikinya; 2). Proses komunikasi secara nonverbal pada siswa tunarungu merupakan suatu bentuk komunikasi yang sangat menunjang dalam proses komunikasi yang akan memberikan kemudahan dari segi menerima dan menyampaikan informasi dari anak tunarungu kepada lawan bicaranya ataupun sebaliknya. Proses komunikasi total yang terdiri dari 3 metode, yaitu metode manual, metode oral, dan metode aural. Ketiga metode tersebut merupakan suatu proses penggabungan dari proses komunikasi secara verbal dan komunikasi nonverbal.

Penelitian yang dilakukan Formanika KS (2014) dengan judul “Komunikasi Total sebagai Model Komunikasi pada Anak Tunarungu” (Studi Kasus Pada Siswa SMULB Negeri Bontang) menunjukkan bahwa pengajaran bahasa isyarat dalam kerangka komunikasi total ternyata tidak merugikan kemampuan berbahasa.

Penelitian yang dilakukan Sulastri (2013) dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi melalui Metode Komunikasi Total bagi Anak Tunarungu Kelas II Di SLB Kartini Batam” mengemukakan kegiatan komunikasi di luar jam belajar, mereka bertanya jawab dengan teman-teman di sekolah bukan hanya menggunakan bahasa isyarat seperti selama ini, tetapi juga mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa oral dan diperjelas dengan bahasa isyarat dengan kalimat sederhana walaupun dengan susunan kalimat yang belum memenuhi kaidah susunan kalimat yang benar, misal: “Siapa kamu nama” (Siapa nama kamu?), “Nama Meira aku” (Namaku Meira), “Kamu apa?” (Kamu sedang apa?) dan sebagainya. Hal yang sama juga terlihat ketika peneliti atau guru mengajak mereka berkomunikasi, mereka berusaha menjawab pertanyaan dengan bahasa oral, isyarat dan tulisan atau gambar untuk memperjelas makna kata yang mereka sampaikan.

Dari temuan penelitian terdahulu secara implisit tampak bahwa hanya menyinggung komunikasi nonverbal berdasarkan tingkat ketunarunguan yang disandang siswa dan proses komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi pada siswa tunarungu maupun siswa tunarungu dengan guru melalui komunikasi total, yaitu metode manual, metode oral, dan metode aural. Jadi jelas belum secara spesifik mempelajari persoalan keterkaitan pola komunikasi penggunaan TIK antara siswa tunarungu dan guru dengan siswa tuna rungu.

1.4 Konsep-Konsep Teoritik

1.4.1 Komunikasi

Manusia merupakan makhluk sosial dalam aktivitas kesehariannya berkomunikasi untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, supaya tercipta sebuah pemahaman satu sama lainnya, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hubungan antara manusia. Ada berbagai konsep mengenai komunikasi yang pada intinya memberikan pemahaman adanya proses penyampaian pesan, pembentukan makna dan lainnya. Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan, atau informasi, yang dapat dinyatakan dalam percakapan secara verbal, visual, sinyal, tulisan, bahkan tindakan tertentu. De Valenzuela, 1992 (dalam Liliweri, 2015, p. 77) mengatakan, “komunikasi merupakan setiap tindakan dalam seseorang mengalami memberikan (kepada) atau menerima (dari) orang lain informasi tentang keinginan, kebutuhan, persepsi, pengetahuan, atau perasaan tertentu. Tindakan itu mungkin disengaja atau tidak disengaja, mungkin melibatkan sinyal konvensional atau tidak konvensional, dalam bentuk linguistik atau nonlinguistik, tindakan itu dapat terjadi melalui mode pengucapan atau cara-cara lainnya”.

Dari makna pendapat tersebut tersirat komunikasi simbolik yang dikirimkan kepada pendengar sehingga pendengar dapat merespon simbol-simbol itu untuk kembali diartikan untuk timbal balik komunikasi agar proses komunikasi berjalan lancar. Komunikasi memang sesuatu yang menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga terciptanya sebuah maksud yang dapat dipahami seseorang untuk mengetahui dan merespon maksud dari pesan tersebut.

Kesulitan berkomunikasi yang dialami anak tunarungu, mengakibatkan mereka memiliki kosa kata yang terbatas, sulit mengerti ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, serta kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Dengan demikian, pelajaran bahasa harus diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, karena

pelajaran bahasa ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi mereka yang akan berpengaruh pula dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya.

Ada dua tipe komunikasi, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yang gunakan satu kata atau lebih bahkan merupakan bahasa yang dapat didefinisikan sebagai komunikasi verbal yang dapat direspon komunikan dengan cukup mudah. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi di luar kata-kata yang terucap atau tertulis, menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, bahasa tubuh ataupun tanda-tanda yang dianggap merepresentasikan isi pesan yang hendak disampaikan. Inilah yang dialami tunarungu. Dengan ketidakmampuannya untuk mendengar, hal inilah yang kemudian mengakibatkan minimnya bahasa mereka dan menggunakan simbol sebagai pendorong komunikasi mereka. Menurut Rogers dan Kincaid (dalam Winangsih, 2009, p. 79) komunikasi nonverbal adalah salah satu dari bentuk komunikasi berdasarkan penyampaiannya, biasanya komunikasi nonverbal mengutamakan pemahaman terhadap gerak-gerik dari penyaji atau penyampai informasi untuk membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain, yang pada gilirannya akan mencapai kesepakatan dan kesalingpengertian. Komunikasi nonverbal dapat berupa membaca gerak tubuh (*body language*), membaca mimik muka, anggukan kepala dan lain sebagainya. Komunikasi mempunyai simbol-simbol yang dapat dipahami komunikan. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain terutama melalui simbol-simbol. Maka dari itu simbol dapat mewakili komunikasi.

Komunikasi yang sukses membutuhkan upaya dari semua orang yang terlibat dalam percakapan. Dalam hal ini, indera manusia memainkan peran yang penting untuk proses pertukaran informasi. Indera manusia diciptakan untuk membantu manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam proses komunikasi, indera mulut untuk berbicara serta telinga sebagai alat pendengaran adalah faktor kunci dalam berkomunikasi. Dengan berbicara seseorang menyampaikan keinginannya kepada orang lain, dan dengan mendengar seseorang mengerti feedback dari pesan yang disampaikan. Kemampuan seperti ini tidak dimiliki orang-orang dengan keterbatasan dalam berbicara dan mendengar atau tunarungu-wicara. Menurut data terakhir yang diungkapkan oleh Departemen Sosial (Depsos) Indonesia pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat masih tinggi, salah satunya, orang jumlah penyandang tuna wicara/rungu berjumlah 637.541 jiwa (Kemos, 2015).

Proses komunikasi yang mereka lakukan tidak seperti manusia normal. Dalam menerima pesan, para tunarungu-wicara tetap menggunakan indera penglihatan dan pendengaran layaknya manusia pada umumnya. Akan tetapi saat berada di posisi komunikator atau memberi feedback, mereka memberi porsi lebih pada pesan nonverbal seperti mimik, intonasi, atau gesture dan ini sesuai dengan pandangan Knapp dan Hall yang merujuk komunikasi nonverbal pada proses komunikasi lain selain penggunaan kata, dengan asumsi kata-kata adalah elemen verbal (Knapp & Hall, 2010, p.5). Hal ini memungkinkan para tunarungu-wicara menyampaikan maksudnya dengan baik. Hal ini yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Para penyandang tunarungu-wicara pada umumnya kesulitan mendengar dan mengucapkan kata-kata dengan baik sehingga pengucapannya menjadi tidak lengkap dan jelas. Tapi untuk sebagian besar penyandang tunarungu/wicara, hal ini bukanlah masalah yang besar. Mereka berusaha mengembangkan kemampuan indera lainnya untuk menutupi kekurangan fisiknya. Ini adalah bentuk adaptasi mereka karena pada akhirnya, semua orang butuh berkomunikasi, entah bagaimana caranya. Pengakuan orang lain akan diri mereka menjadi penting, di samping tentang kekuarangan yang mereka miliki. Di zaman ini, penyandang disabilitas sudah tidak di indention

dengan seseorang yang lemah. Namun banyak dari mereka yang justru berusaha untuk mencari pekerjaan dan bergabung dalam masyarakat luas (Wijaya, 2017).

1.4.2 Komunikasi Total

Komunikasi total merupakan suatu falsafah yang mencakup cara berkomunikasi dengan menggunakan kombinasi antara aural, manual, dan oral sehingga terjadi komunikasi yang efektif diantara kaum tunarungu dengan masyarakat luas, agar terjadi saling mengerti diantara penerima dan pengirim pesan sehingga tidak terjadi salah paham dan ketegangan (Somad, 2009, p. 21). Menurut Sebald dan Luckner (dalam Frieda, 2014, p. 103) komunikasi total adalah sistem komunikasi yang mencoba untuk memperhatikan hak-hak anak tunarungu dan lawan bicaranya serta suatu sistem komunikasi gabungan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada sistem komunikasi oral maupun manual (verbal dan nonverbal) pada anak tunarungu.

Komunikasi dinilai efektif, bila rangsangan yang disampaikan dan dimaksud oleh pengirimnya ataupun sumber pesan, sejalan dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima pesan. (Tubbs & Moss, 2010, p. 24) mengemukakan lima faktor yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan komunikasi berjalan dengan efektif adalah (1) pemahaman terhadap pesan oleh penerima pesan; (2) memberikan kesenangan kepada pihak-pihak yang berkomunikasi seperti halnya dalam mempertahankan hubungan; (3) mampu mempengaruhi sikap orang lain; (4) memperbaiki hubungan; dan (5) memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dalam bentuk tindakan dari penerima pesan.

Para pendidik di Amerika Serikat setuju bahwa belajar, membaca dan menulis bagi anak tunarungu sangat menguntungkan. Walaupun begitu mereka mempunyai pendidikan yang kuat tentang perbedaan pengajaran bahasa dan metode komunikasi yang seharusnya dipakai.

Kelompok tertentu menekankan komunikasi melalui bicara dan membaca ujaran, metode ini dinamai dengan metode oral. Kelompok lain menekankan kepada penggunaan isyarat, dinamakan metode manual. Dalam komunikasi secara manual, anak tunarungu umumnya menggunakan dua cara bersama-sama, yaitu dengan menyatakan berapa kata melalui bahasa isyarat dan ejaan jari.

Dari metode utama yaitu metode oral dan manual, berkembang beberapa variasi, yaitu metode lisan pendengaran (oral aural), metode auditori, metode Rochester, dan metode simultan (Komunikasi total).

- 1.) Metode oral aural. Dalam metode ini, anak tunarungu menerima input dengan menggunakan sisa pendengaran melalui bunyi yang diperkeras, membaca ujaran, dan mengekspresikannya melalui bicara. Dalam program ini dilarang menggunakan isyarat atau ejaan jari, karena dianggap akan menghambat bahasa dan keterampilan lisan si anak dalam penyesuaiannya dengan orang yang pendengarannya normal. Salah satu keterampilan yang penting dalam metode ini adalah membaca ujaran, yaitu suatu interpretasi visual komunikasi lisan. Hal ini dimaksudkan agar anak tunarungu dapat menerima komunikasi dari mereka yang dapat mendengar, karena sedikit sekali orang mendengar mau mempelajari sistem komunikasi manual yang sulit. Oleh karena itu, anak tunarungu yang ingin berhubungan dengan orang mendengar harus belajar membaca ujaran.
- 2.) Metode Auditori. Pendekatan ini berpusat pada pengembangan kemampuan anak dalam mendengar. Metode ini meliputi latihan pendengaran, mengajarkan anak tunarungu untuk mendengar bunyi dan membedakan antara bunyi-bunyi yang berlainan. Walaupun metode ini dikembangkan untuk anak dengan kehilangan pendengaran taraf sedang, namun beberapa upaya dari metode ini dapat digunakan untuk anak tuna rungu dengan taraf berat.
- 3.) Metode Rochester. Metode ini dikembangkan di sekolah Rochester di Rochester New York pada tahun 1978. Metode ini merupakan kombinasi dari metode oral dan abjad jari. Anak

menerima informasi melalui membaca ujaran, pengerasan suara, dan abjad jari, kemudian anak mengekspresikannya melalui bicara dan abjad jari. Guru yang baik dapat mengeja setiap kata seperti yang diucapkannya dengan kecepatan kira-kira 100 kata per menit. Metode ini mendorong siswa untuk membaca dan menulis abjad dan kata-kata.

- 4.) Metode Simultan. Metode ini disebut juga metode komunikasi total yang merupakan gabungan dari metode oral, isyarat, dan abjad jari. Anak menerima input melalui, membaca ujaran, pengerasan suara, isyarat dan abjad/ejaan jari, kemudian mengekspresikannya melalui bicara, isyarat dan abjad jari. Isyarat berbeda dengan abjad jari, dengan isyarat memungkinkan mereka menggambarkan ide/kata-kata secara lengkap dari pada menggunakan abjad jari. Istilah komunikasi total mulai populer dan digunakan pada tahun tujuh puluhan. Konfrensi Eksekutif Sekolah-Sekolah Amerika untuk Anak Tunarungu (1976) mendefinisikan komunikasi total sebagai, “suatu falsafah yang membutuhkan pemaduan dari pendengar normal, dan cara komunikasi lisan supaya menjamin adanya komunikasi efektif antara orang-orang yang berkelainan pendengaran”. Metode oral sangat dominan di Amerika Serikat sampai sekitar tahun 1970, setelah itu komunikasi total mulai diakui. Pada saat itu pula para pendidik mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan metode simultan/komunikasi total, mengingat kebutuhan individu anak. Dalam waktu singkat terjadi perubahan dalam pendidikan anak tunarungu dimana pengajaran yang semula bertumpu pada penggunaan metode oral bergeser kepada suatu nilai dimana mayoritas program menggunakan metode gabungan oral dan manual (Moores, 2001).

Komunikasi total adalah suatu pendekatan dalam pendidikan bagi kaum tunarungu yang menganjurkan penggunaan berbagai bentuk media komunikasi yaitu aural, manual, dan oral untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Komunikasi total merupakan konsep yang bertujuan mencapai komunikasi yang efektif antara sesama tunarungu ataupun tunarungu dengan masyarakat luas dengan menggunakan media berbicara, membaca bibir, mendengar, dan berisyarat secara terpadu (Depdiknas, 2008, p. xii).

Komunikasi total merupakan sebutan terhadap suatu filosofi komunikasi yang memberikan keleluasaan untuk memilih atau menggunakan berbagai media komunikasi seperti aural, manual, dan oral sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dengan diterapkannya komunikasi total maka kemampuan anak tunarungu dalam memahami bacaan dapat meningkat.

1.4.3 Tunarungu

Tunarungu merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Secara umum tunarungu dikategorikan kurang dengar dan tuli, sebagaimana yang diungkap (Hallahan dan Kauffman, 1991, p. 26) bahwa tuna rungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar yang meliputi keseluruhan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan kedalam tuli dan kurang dengar.

Orang tuli adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai maupun tidak memakai alat bantu mendengar, sedangkan seseorang yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu mendengar, sisa pendengarannya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran.

Pengertian mengenai tunarungu juga sangat beragam, yang semuanya mengacu pada keadaan atau kondisi pendengaran anak tunarungu. (Somad dan Hernawati, 1996, p. 27) menyatakan bahwa: “ Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan terutama melalui pendengaran”.

Penyebab ketunarunguan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pada saat sebelum dilahirkan (pranatal), saat kelahiran (natal), pada saat setelah kelahiran (post natal).

Adapun pengertian dari masing-masing faktor sebagai berikut: a) pada saat sebelum dilahirkan (pranatal). 1) Faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominat genes, recesive gen, dan lain-lain; 2) Karena penyakit, sewaktu Ibu mengandung terserang oleh suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tiga bulan pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu adalah rubella, toximinia, dan lain-lain. Sehingga anak yang dilahirkan menderita tunarungu, selain itu juga mengakibatkan kerusakan pada cochlea sehingga terjadi tunarungu syaraf (perseptif). Penyakit rubella pada masa kehamilan tiga bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin dan merupakan penyebab yang paling umum dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Adapun rubella german measles disini merupakan nama latin dari penyakit cacar atau campak, sedangkan cochlea merupakan struktur yang berbentuk pipa yang dipenuhi oleh cairan yang melengkung seperti rumah siput. Kemudian Ibu yang mengandung menderita keracunan darah atau toximinia, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran anak maka anak akan lahir dalam keadaan tunarungu; b) Pada saat kelahiran (natal). 1) Sewaktu melahirkan Ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). 2) Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya; c) Pada saat setelah kelahiran (post natal). 1) Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya anak terserang Herves Implex, jika infeksi ini menyerang alat kelamin Ibu, dapat menular pada anak saat dilahirkan. Demikian juga dengan penyakit kelamin yang lain, dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh Ibu kepada anaknya yang dilahirkan, dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran sehingga menimbulkan ketunarunguan. 2) Meningitis (radang selaput otak). Radang selaput otak atau infeksi pada otak juga dapat menimbulkan ketunarunguan pada anak. 3) Otitis Media. Otitis media adalah radang pada telinga bagian tengah, sehingga menimbulkan nanah yang menggumpal dan mengganggu hantaran banyi. Jika kondisi tersebut sudah kronis dan tidak segera diobati, dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan atau sedang. Otitis Media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada masa anak-anak sebelum usia mencapai 6 tahun. Penyakit ini biasanya terjadi karena penyakit pernafasan yang berat sehingga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran. Otitis Media juga dapat ditimbulkan karena infeksi pernafasan dari pilek. 4) Pemakaian obat-obatan otoksi pada anak-anak. 5) Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian tengah dan dalam, misalnya jatuh (Somatri, 2004, p. 90).

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi. Ketunarunguan berdasarkan tempat terjadinya kerusakan, dapat dibedakan atas: (1) Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk kedalam telinga disebut telinga konduktif; dan (2) Kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otak yang menyebabkan tuli sensoris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2001), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh

mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sependapat dengan definisi tersebut, Kirk & Miller (1986), mengemukakan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Ciri penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan, karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang rangkaian kegiatan (proses) menjaring informasi dari kondisi apa adanya (sewajarnya) dalam suatu obyek, didasarkan sudut pandang teoritis maupun praktis untuk menjawab suatu permasalahan.

Tipe penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai prosedur untuk mengemukakan pemecahan masalah penelitian dengan mengetengahkan keadaan obyek yang diteliti, berdasarkan data dari fakta yang aktual pada saat penelitian lapangan berlangsung, menganalisis dan menginterpretasi, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Tipe penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar apa, bagaimana dan mengapa. Penelitian lapangan berlangsung dari tanggal 30 Juli 2018 s/d 3 Agustus 2018, di Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura, Jl. Raya Abepura, Kelurahan Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Alasan dijadikan lokasi penelitian dikarenakan 50 persen siswa yang kini sudah menjadi alumni di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B Kota Jayapura sudah terserap di dunia kerja. Jumlah tersebut paling banyak sebagai pekerja swasta sesuai keahlian bidangnya masing-masing. SLB tersebut mendapat dukungan penuh dari pengusaha, BUMN, BUMD untuk menerima siswa berkebutuhan khusus bekerja, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang disebutkan agar satu dari 100 orang dapat diterima sebagai tenaga kerja. Siswa berkebutuhan khusus bisa bersaing dengan orang normal. Meski memiliki keterbatasan seperti tunarungu wicara tetapi memiliki fisik yang kuat. Siswa tersebut juga bisa bersaing dan menghasilkan karya seperti menjahit, tata boga, tata busana, IT, bahkan ikut lomba tingkat nasional.

Subyek Penelitian adalah individu, dengan *Key informan* (informan kunci) yaitu Bapak Kepala Sekolah yakni Bapak Kamino, kemudian informan berikut ditarik melalui *snowball sampling* (bola salju), yaitu *this is an approach for locating information-rich key informants or critical cases. By asking a number of people who else to talk with, the snowball gets bigger and bigger as you accumulate new information-rich cases* (Patton, Michael Quinn, 2001, p. 237). Cara pengambilan informan dengan teknik ini dilakukan secara berantai, makin lama informan menjadi semakin besar seperti halnya bola salju yang menuruni lereng gunung/bukit. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa populasinya sangat spesifik sehingga sulit sekali mengumpulkan informannya. Pada

Tabel 1. Data *Key Informan* Dan Informan SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura

No	Nama	Jabatan
1.	Kamino	Kepala Sekolah
2.	Zainuddin	Guru
3.	Sutyaty	Guru
4.	Indra Januari Septiawan Ohex	Komunitas Tuna Rungu
5.	Petronela Giyai	Siswa Kelas M.3B
6.	Mercy Christin Fingkreu	Siswa Kelas M. 2B
7.	Lidya Gloria Aling	Siswi Kelas L. 1B
8.	Ilham Jaap Sutrisno	Siswa Kelas M. 3B

Sumber: Proses Pengumpulan Data dari Tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2018

tingkatan operasionalnya, suatu grup/seorang *key informan* yang relevan diinterview, dan selanjutnya diminta untuk menyebutkan informan lainnya dengan spesialisasi yang sama, yang biasanya saling mengenal karena mereka satu spesialisasi (Durianto, dkk, 2001, p. 34). Dari nara sumber pertama yang berhasil diwawancarai kemudian diminta untuk menyebutkan sumber (informan) kedua dan seterusnya sehingga data kualitatif yang diperoleh semakin kaya untuk kepentingan analisisnya. Wawancara dihentikan manakala dianggap cukup menjawab permasalahan penelitian dan diakhiri ketika informan terakhir memberi jawaban yang sama dan tidak menyimpang dari informan dan *key informan* sebelumnya.

Dalam metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berpartisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Marshall & Roosman (dalam Sugiono, 2017, p. 309) menyatakan bahwa “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”. Melalui observasi, peneliti mempelajari tentang perilaku komunikasi tunarungu, dan makna dari perilaku tersebut.

Analisis data menurut Patton (1980), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, Lexy 2001, p. 103). Pekerjaan analisis data dalam penelitian ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.

Penulisan laporan penelitian melalui dua tahap. Pertama, pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Kedua, penulisan draft, revisi dan editing. Tahap editing dilakukan berulang kali untuk menghindari kesalahan baik bersifat substansi (*isi*) maupun kalimat (*redaksional*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Komunikasi antara Sesama Murid Penyandang Tunarungu di Lingkungan SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura

Berdasarkan hasil riset melalui wawancara mendalam dengan pihak pengelola pendidikan SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura dan komunitas Tunarungu Provinsi Papua, menurut Kepala Sekolah, Bapak Kamino didapat informasi bahwa komunikasi yang berlangsung sesama siswa berkebutuhan khusus tunarungu, bukan hanya komunikasi yang bersifat nonverbal (*isyarat*) saja, namun ada juga sebagian anak tunarungu menggunakan bahasa tulisan melalui alat teknologi informasi gawai seperti *WhatsApp, Line, Facebook, twitter, SMS*. Anak yang diklasifikasikan tingkatan tunarungu ringan sebagian besar dapat berbicara dengan lawan bicaranya menggunakan komunikasi total yaitu berbicara yang disertai dengan gerakan badan atau isyarat, sekalipun dijumpai juga siswa berkomunikasi secara verbal ataupun lisan. Interaksi sosial yang terjadi sesama teman melalui komunikasi total yaitu secara nonverbal, verbal dengan lisan dan tulisan baik melalui alat tulis maupun alat teknologi informasi melalui gawai yang ada di tangannya.

Wawancara mendalam dengan Ibu Guru Sutyaty, komunikasi yang terjadi sesama siswa tunarungu lebih banyak dilakukan komunikasi bertatap muka (*face to face*), karena sejak awal hingga berakhirnya proses komunikasi mengutamakan indra penglihatan untuk dapat saling beradaptasi memberi dan menerima informasi. Apabila indra penglihatan tidak berfungsi dengan baik atau mereka tidak fokus apa yang dikomunikasikan atau apa yang diterima pesan itu, dapat

menimbulkan ketidaksesuaian dalam berkomunikasi. Dengan menggunakan indra penglihatannya yang baik kepada lawan bicara, siswa dapat melihat ekspresi dan gerak-gerik dari teman bicaranya sehingga anak penyandang tunarungu dapat menyimpulkan apa saja yang sedang berlangsung dalam pembicaraan. Anak didik tunarungu di SLB ini banyak memakai alat komunikasi untuk berhubungan dengan keluarganya, mencari informasi terkait pendidikan atau sebagai alat komunikasi sesama temannya baik lewat *WhatsApp*, *Line*, SMS.

Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Guru Zainuddin, pengajar tunarungu, berpendapat proses komunikasi diantara kawan tunarungu di lingkungan sekolah berlangsung dominan dijumpai proses komunikasi nonverbal, hal ini dikarenakan proses komunikasi menggunakan bahasa isyarat lebih mengandalkan penglihatan, sebab keterbatasan dalam pendengaran, sehingga mereka lebih mengharapkan indra penglihatan untuk merespon komunikasi lawan bicaranya. Komunikasi nonverbal sangat berperan penting dalam proses penyampaian informasi di antara mereka, siswa dengan guru, anak tunarungu dengan lingkungan masyarakat ataupun dengan keluarga di rumah. Komunikasi nonverbal memberikan sumbangan yang paling dominan dalam komunikasi yang berlangsung pada siswa tunarungu. Komunikasi nonverbal biasanya dalam bentuk bahasa tubuh (*kinesthetic*) dan sentuhan-sentuhan anggota tubuh. Bahasa tubuh dalam berkomunikasi dengan tunarungu, tujuannya untuk memperjelas makna saat berkomunikasi. Sedangkan sentuhan-sentuhan pada anggota tubuh sama halnya dengan pengertian penggunaan bahasa isyarat yaitu sebagai suatu penjelasan makna pesan komunikasi. Sentuhan-sentuhan yang digunakan antara satu dengan yang lain tidak sama hal ini nampak dalam ekspresi dirinya pada lawan bicaranya. Didapat juga siswa tunarungu berkomunikasi dengan keluarganya melalui alat komunikasi seperti HP, yang juga digunakan untuk diskusi melalui group *WatsApp*, *Line*, SMS, *Ficebook*, *Twitter*. Mereka juga mencari informasi-informasi yang berhubungan pelajaran di sekolah, pengetahuan, hiburan, olah raga, kesenian.

Selanjutnya wawancara dengan siswa kelas M.2B tuna rungu bernama Mercy Christin Fingkreu yang didampingi oleh guru, didapat sebagai berikut: bawa proses komunikasi nonverbal yang berlangsung sesama teman tanpa memandang tingkatan ketunarunguannya (ringan, sedang, dan berat). Menurutnya, komunikasi nonverbal ini, merupakan komunikasi yang memberikan rasa nyaman untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Disamping itu mereka menyebutkan juga komunikasi total (komponen manual, komponen oral, dan komponen aural) yang merupakan penggabungan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi siswa tunarungu berkomunikasi dengan lawan bicaranya.

Sementara menurut Siswa kelas M. 3B tunarungu bernama Petronela Giyai waktu wawancara didampingi guru menuturkan bagi tunarungu ringan lebih menyukai komunikasi verbal, sekalipun terkadang menggunakan komunikasi nonverbal tergantung berkomunikasi dengan siapa lawan bicara. Sedangkan bagi tunarungu sedang dan berat menggunakan komunikasi nonverbal atau komunikasi total lebih mudah menangkap arti dari informasi itu.

Menurut Siswa kelas L. 1B tunarungu bernama Lidya Gloria Aling, komunikasi lawan bicara bergantung dari karakter penyandang tunarungu, di situ terjadi penyesuaian-penyesuaian lawan bicara. Kalau tunarungu ringan dengan ringan tentu akan berusaha menggunakan komunikasi verbal atau lisan, kalau tunarungu ringan dengan sedang atau berat tentu untuk berlangsungnya komunikasi melalui komunikasi nonverbal atau jika perlu komunikasi total. Komunikasi itu terjadi manakala ada ketertarikan pesan atau informasi, jika tidak adanya perhatian yang sama biasanya anak tunarungu itu malas dan cepat bosan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya.

Menurut siswa kelas M. 3B tunarungu bernama Ilham Jaap Sutrisno, proses komunikasi yang seringkali digunakan untuk tunarungu ringan, sedang ataupun berat jika berkumpul dalam satu

percakapan menggunakan komunikasi total karena semua yang ada di situ dapat menangkap semua informasi yang sedang dibicarakan bersama.

3.2 Pola Komunikasi antara Murid Penyandang Tunarungu dengan Guru di Lingkungan SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura

Berdasarkan hasil riset melalui wawancara mendalam dengan Bapak Guru Zainuddin, saat mengajar dalam kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, proses komunikasi secara verbal dalam komunikasi lisan, bentuk komunikasi yang digunakan guru dalam kelas bagi kelompok tunarungu ringan. Sedangkan untuk siswa yang diklasifikasikan kedalam tingkatan tunarungu sedang dan berat tidak dapat berkomunikasi secara lisan sehingga menggunakan komunikasi nonverbal ataupun komunikasi total. Sekalipun demikian baik siswa klasifikasi ringan sampai yang berat masih bisa saling berkomunikasi satu dengan lainnya melalui komunikasi tatap muka (*face to face*) dengan komunikasi nonverbal dapat berupa membaca gerak tubuh (*body language*), membaca mimik muka, anggukan kepala dan lain sebagainya atau mereka menggunakan bantuan gawai yang terhubung internet. Proses komunikasi secara verbal khususnya secara lisan yang dilakukan oleh siswa tunarungu pada saat proses belajar mengajar di kelas maupun pada saat sedang melakukan praktek di kelas jarang dilakukan oleh siswa, hal ini menurutnya adanya hambatan keterbatasan dan tingkatan ketunarunguan pada siswa, oleh karena itu seringkali proses komunikasi yang terjadi secara nonverbal ataupun komunikasi total, komunikasi verbal tak begitu di sukai oleh siswa tunarungu sedang maupun berat.

Menurut Bapak Kepala SLB, Kamino, proses komunikasi yang berlangsung di lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Kota Jayapura saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bukan hanya berupa bentuk komunikasi total saja yang diterapkan, tapi komunikasi secara verbal, dan nonverbal juga diterapkan, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan proses interaksi komunikasi sesama siswa tanpa memandang tingkatan, siswa dengan guru atau siswa dengan lingkungan luar sekolah atau masyarakat luas termasuk dengan lingkungan keluarga.

Menurut Ibu Guru Sutyaty, komunikasi verbal yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi yang hanya membantu proses komunikasi dengan siswa tunarungu dan tidak semua siswa dapat berkomunikasi secara verbal hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal pengucapan dan kosa kata dalam penyampaian komunikasi secara verbal dalam lisan. Dengan demikian komunikasi nonverbal yang kerap digunakan oleh siswa untuk berkomunikasi dengan sesama temannya, lingkungan luar sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan guru.

Kalangan komunitas tunarungu Provinsi Papua, berstatus Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Jayapura, Provinsi Papua, bernama Indra Januari Septiawan Ohex yang juga menyandang tunarungu ringan menyebutkan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dari bahasa isyarat yang paling sangat dibutuhkan oleh siswa tunarungu berkebutuhan khusus, bukan hanya bagi siswa tunarungu ringan saja, karena komunikasi nonverbal akan menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Perpaduan antara komunikasi verbal dan nonverbal inilah terbentuk komunikasi total akan lebih memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan siswa tunarungu dan siswa berkebutuhan khusus lainnya yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi diantaranya baik sesama siswa, siswa dengan guru, siswa dengan keluarga di rumah ataupun dengan masyarakat luas.

Ketika mewawancarai siswa tunarungu yang bernama Ilham Jaap Sutirino kelas M. 3B dengan didampingi guru, menjelaskan penggunaan komunikasi verbal dalam aspek lisan baik di ruang kelas, lingkungan sekolah, ataupun keluarga, dan masyarakat luas kurang begitu nyaman, anak tunarungu lebih nyaman jika berkomunikasi secara nonverbal karena tidak perlu bersusah payah

untuk mengeluarkan suaranya, ia menyebutkan juga menyukai topik pembicaraan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, topik umum yang lagi aktual dikalangan remaja dan menghargai lawan bicaranya. Siswa tunarungu juga, rata-rata telah memiliki media gawai sebagai alat komunikasi dengan keluarga, teman ataupun guru, dan juga sebagai media mencari informasi, hiburan, dan pendidikan, dan juga sebagai sarana diskusi diantara teman-teman sekelasnya atau tanya melalui gawai kepada gurunya.

Melakukan wawancara mendalam dengan siswa kelas L 1B bernama Lidya Gloria Aling, tuna rungu yang didampingi guru, menjelaskan proses pembelajaran di ruang kelas dan praktik yang terjadi ada guru yang menerapkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) menerapkan komunikasi verbal khususnya secara lisan namun ini ditujukan bagi siswa penyandang tunarungu ringan mereka dapat memahami secara jelas maksud yang disampaikan oleh guru tersebut. Mengenai kepemilikan alat komunikasi seperti HP yang terhubung dengan internet juga mereka rata-rata memiliki, sebagai alat komunikasi dengan keluarga, guru, teman, sekalipun pemakaiannya hanya sebatas *WatsApp*, *Line*, *SMS*, *Facebook*, *Twitter*.

Wawancara mendalam dengan siswa kelas M. 3B bernama Petronela Giyai, menuturkan proses komunikasi lisan hanya bisa efektif apabila diterapkan pada siswa yang diklasifikasikan pada tuna rungu ringan, sedangkan untuk siswa tingkatan tuna rungu sedang dan berat sangat sulit menangkapnya karena keterbatasan dalam penguasaan kosa kata dan pengucapannya.

Wawancara mendalam dengan siswa kelas M. 2B bernama Mercy Christin Fingkreu, berpendapat komunikasi verbal dalam bentuk lisan dan tulisan bisa guru terapkan pada siswa tuna rungu klasifikasi ringan, ini dapat dijadikan media bagi siswa dan guru dalam menyampaikan materi pelajaran ataupun informasi pengumuman lainnya. Kalau guru menyampaikan materi pelajaran dan ekstrakurikuler seni dan olah raga dengan menggunakan alat bantu komunikasi elektronik seperti video atau mungkin power point. Karena ini mengutamakan indra penglihatan, dapat juga diikuti oleh tuna rungu klasifikasi sedang atau berat.

3.3 Diskusi

Dari data wawancara mendalam terhadap *key informan* dan informan mengenai topik yang dibahas pola komunikasi siswa tunarungu di SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura, Provinsi Papua menunjukkan proses komunikasi yang berlangsung merupakan proses komunikasi total yang selama ini dipraktekkan baik sesama siswa didik tuna rungu tanpa memperdulikan tingkatan penyandang tunarungu ringan, sedang dan berat. Siswa tunarungu dalam berkomunikasi juga menggunakan alat komunikasi sebagaimana orang normal, hanya saja penggunaannya sebatas *WatsApp*, *Line*, *SMS*, *Ficebook*, *Twitter*, untuk mencari informasi pendidikan terkait dengan pelajaran dan pekerjaan rumah (PR), tugas sekolah, hiburan, seni, olah raga, sebagai alat komunikasi keluarga. Jika media sosial menempatkan informasi berkualitas sebagai rujukan dalam penggunaan, maka diharapkan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh informasi yang berasal dari media sosial. Namun permasalahannya, media sosial yang fleksibel dalam penggunaannya, justru rawan diselewengkan untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta (Susanto, 2018, p. 53).

Begitu juga terjadi proses komunikasi total antara guru dengan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), kegiatan ekstrakurikuler, praktek di kelas. Proses komunikasi total merupakan bentuk proses komunikasi akhir dari keseluruhan penerapan proses komunikasi yang terjadi pada penyandang siswa tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri Bagian B Kota Jayapura. Adanya ketidaktertarikan siswa tunarungu dalam berkomunikasi pada saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) hal ini terjadi dimungkinkan guru kurang dapat menyajikan topik pelajaran yang dapat membuat mereka tertarik perhatian siswa tunarungu agar dapat berkomunikasi secara efektif pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Untuk ketertarikan siswa

tunarungu dalam menerima komunikasi pembelajaran di kelas, ekstrakurikuler, dan kegiatan praktik, guru saat mengajar seharusnya lebih memahami karakteristik peserta didik (siswa) tunarungu yang dapat mendorong siswa tunarungu menjadi lebih efektif untuk bergaul, tampil, percaya diri dalam berkomunikasi dengan guru saat proses memberikan pembelajaran yang bervariasi kepada siswa.

Di samping itu juga siswa tunarungu diberikan kesempatan untuk menggunakan alat komunikasi yang terhubung internet seperti gawai untuk diskusi lebih lanjut mengenai pelajaran yang diberikan, dan penggunaan proyektor, power point, atau video juga diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Media sosial memang mempermudah para penggunanya untuk berbagi dan menciptakan pesan melalui jejaring sosial, media online, forum dunia maya dan virtual words (Mayfield, 2008, p. 6), sehingga dalam penggunaannya seringkali tidak menghiraukan peraturan yang berlaku dan dipakai untuk hal yang kurang bermanfaat.

Pada intinya komunikasi total merupakan bentuk komunikasi penggabungan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi total terdiri dari metode manual, metode oral hingga metode aural, yang merupakan komponen-komponen pada komunikasi verbal dan nonverbal. Metode manual dalam prakteknya menyangkut isyarat baku, ejaan jari, mimik wajah, ekspresi badan, dan isyarat alami. Metode oral merupakan cara berkomunikasi dengan berbicara dan membaca ujaran. Metode oral lebih merujuk bentuk komunikasi secara verbal namun tidak semuanya disuguhkan kedalam bentuk verbal, hanya saja berbicara merupakan perwujudan dari komunikasi verbal. Metode aural merupakan metode komunikasi dengan memanfaatkan sisa pendengaran yang ada pada siswa tunarungu tersebut. Penerapan metode aural yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan memberikan rangsangan kepada siswa tunarungu melalui cara lain misalnya menambahkan alat bantu dengar jika memungkinkan kepada siswa.

4. PENUTUP

Pola komunikasi siswa tunarungu dengan siswa tunarungu lainnya tidak memandang klasifikasi tingkatan dalam lingkup satu sekolah SLB Bagian B Kota Jayapura, Provinsi Papua berlangsung komunikasi total secara baik dan efektif. Meskipun pada kenyataannya ada siswa tunarungu yang tidak bisa berkomunikasi secara verbal dalam aspek komunikasi secara lisan dikarenakan keterbatasan dan tingkat ketunarunguan yang dimilikinya. Proses komunikasi secara nonverbal pada siswa tunarungu merupakan suatu bentuk komunikasi yang sangat menunjang dalam proses komunikasi yang akan memberikan kemudahan dari segi menerima dan menyampaikan informasi dari siswa tunarungu kepada lawan bicaranya atau sebaliknya. Hadirnya teknologi komunikasi dan informasi seperti gawai yang terhubung dengan internet memudahkan komunikasi sesama teman tunarungu yang mengandalkan panca indera penglihatan ataupun dengan guru, dan keluarga. Komunikasi dengan menggunakan gawai membicarakan mata pelajaran bidang studi, informasi ekstrakurikuler, hiburan, seni, dan olahraga.

Proses komunikasi total terdiri atas tiga metode, yaitu oral, manual dan aural. Ketiga metode tersebut merupakan proses komunikasi secara verbal dan nonverbal. Keterbatasan pendengaran, jangan sampai dipandang sebagai orang yang tidak bisa apa-apa atau menjadi beban dan harus dikasihani. Karena itu, kesetaraan sebuah keharusan. Sehingga perlu bagi penyandang tunarungu itu diberi aksesibilitas yang sama dengan warga normal agar bisa mandiri dan sukses. Diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan payung hukum tersebut, Pemkot Jayapura bersama DPRD seharusnya menerbitkan Perda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berisikan bantuan sosial saja berupa makanan tetapi dilihat juga kemampuan dan talenta yang dipunyai, sehingga penyandang disabilitas kedepan tidak merasa dimarjinalkan. Pemerintah Kota Jayapura masih belum serius

memberikan perlindungan secara hukum dalam bentuk peraturan daerah. Memberikan bantuan alat bantu dengar, penyediaan berbagai pelatihan bagi penyandang tunarungu, antara lain teknisi ponsel, komputer, tata boga, tata busana, dan keterampilan lainnya sesuai minat dan penyediaan taman inklusi agar penyandang tunarungu bisa berkegiatan dan bermain merupakan suatu keharusan. Konsep pendampingan dan pemberdayaan disabilitas, perlu dibangun dalam satu wadah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan kepada perkembangan kajian ilmu komunikasi dan praktik komunikasi penyandang disabilitas tunarungu. Sejalan hal itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim pengumpul data lapangan “Efektivitas Pelaksanaan Jambore TIK untuk Kemandirian Penyandang Disabilitas dalam Memasuki Dunia Kerja” yang telah membantu sehingga paper ini selesai sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan pada Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Badan Litbang SDM, Kemkominfo, khususnya Bapak dan Ibu pengelola jurnal yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis. Semoga jasa baik, Bapak dan Ibu menjadi amal kebaikan yang akan diganjar oleh Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2008). *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa PUMK Pengembangan Sistem dan Pengelolaan PK dan PLK.
- Durianto, dkk. (2001). *Strategi Menaklukan Pasar, Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia.
- Formanika KS. (2014). Komunikasi Total sebagai Model Komunikasi pada Anak Tunarungu (Studi Kasus pada Siswa Smulb Negeri Bontang). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2 (2), 213-222
- Frieda, Mangunsong. (2014). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid 1*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Hallahan dan Kauffman. (1991). *Exceptional Children (Introduction to Special Education)*, Fifth Edition. University of Virginia: Prentice-Hall International, Inc.
- Kementrian Sosial RI. (2015). *Sinkronisasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra, Rungu Wicara di Masyarakat*.
- Kirk & Miller. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research, Vo. 1*, Beverly Hills: Sage Publication.
- Knapp, Mark L., J. A. Hall. (2010). *Nonverbal communication in human communication*. New York: Rinehart & Winston.
- Liliweri, Alo. (2015). *Komunikasi Antarpersonal*. Jakarta: Kencana.
- Mayfield, Antony. (2008). *What is Social Media?*.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moore, Donald F. (2001). *Educating The Deaf: Psychology, Principles and Practices*. Boston: Hough Mifflin Company.
- Patton, Michael Quinn. (2001). *Qualitative Research & Evaluation Methods*.
- Sambas, Syukardi. (2015). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputri, A. (2017). Analisis Pola Komunikasi pada Siswa Tunarungu di Smalb Dharma Asih Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(6).

- Somad. (2009). *Pengembangan Keterampilan Oral/Aural, Manual dan Komtal*. Bandung: BPG SLB Provinsi Jawa Barat.
- Somad dan Hernawati. 1996). *Ortodidaktik Tunarungu*. Jakarta: Depdikbud.
- Somatri, T Sutjihadi. (2004). *Identifikasi Anak Luar Biasa*. Jakarta: Dikdasmen.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Sulastrri. (2013) Meningkatkan Kemampuan Komunikasi melalui Metode Komunikasi Total bagi Anak Tunarungu Kelas II Di SLB Kartini Batam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 2 (2), 210-219
- Susanto Harry, Eko. (2018). *Komunikasi Manusia: Teori dan Praktek dalam Penyampaian Gagasan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tubbs and Moss. (2010). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi, Buku I, terjemahan Deddy Mulyana dan Gembirasari*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Wardani, dkk. (2013). *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wijaya, Immanuel Khomala. (2017). Proses Komunikasi Interpersonal Bawahan Tunarungu-Wicara dengan Atasannya (Supervisor) di Gunawangsa Hotel Manyar Surabaya. *Jurnal e-Komunikasi*, 5(1), 1-12
- Winangsih, Syam Nina. (2009). *Sosiologi sebagai Akar Komunikasi*. Semarang: Simbiosis Rektama Media.

TINJAUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS MEDIA DAN PROFESIONALISME

THE REVIEW OF JOURNALIST COMPETENCY STANDARDS IN ORDER TO INCREASE MEDIA CAPACITY AND PROFESSIONALISM

Djoko Waluyo

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, Indonesia
djok016@kominfo.go.id

Diterima tgl. 04/10/2018; Direvisi tgl. 22/11/2018; Disetujui tgl. 04/12/2018

ABSTRACT

This article examines the review of journalist competency standards for increasing media capacity and journalist professionalism. Journalists who are in journalism activities are required to constantly improve their knowledge, skills and quality of work. The Press Council has compiled journalist certification levels that are useful to improve media capacity and the quality of journalist journalism. All journalists are expected to be able to undergo a journalist certification process in stages, thus obtaining certification of young journalists, middle journalists and key journalists. The benefits gained, the quality of journalists guarantees more credibility, media capacity and media reputation. Qualitative research approach with case study methods, data collection with interviews, observation, and documentation sources. The analysis technique is carried out qualitatively-descriptive. In conclusion, the certification process through journalist competency standards is still stagnant, with the dominant factor there is still no commitment of media managers to require journalists to take a journalist certification test. Another factor, the standard salary of journalists is still low and different for media companies, making journalistic work not optimal, and still must be driven in the fulfillment of media capacity and achieve journalist professionalism.

Keywords: *Journalism, Journalist Professionalism, Press Council.*

ABSTRAK

Artikel ini merupakan penelitian tentang tinjauan standar kompetensi wartawan untuk peningkatan kapasitas media dan profesionalisme wartawan. Wartawan yang dalam kegiatan jurnalisme dituntut senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hasil kerjanya. Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas media dan kualitas jurnalisme wartawan. Seluruh wartawan diharapkan dapat menjalani proses sertifikasi wartawan dengan berjenjang, sehingga memperoleh sertifikasi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Manfaat yang diperoleh, kualitas wartawan makin menjamin terhadap kredibilitas, kapasitas media, dan reputasi media. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan sumber dokumentasi. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Kesimpulannya, proses dominan masih belum ada komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawan menempuh uji sertifikasi wartawan. Faktor lainnya, kesadaran menjadi jurnalis belum sepenuhnya hingga sulit mencapai profesionalisme, dan standar gaji wartawan yang masih rendah dan berbeda-beda pada perusahaan media, menjadikan karya jurnalistik belum optimal dan masih harus dipacu dalam pemenuhan kapasitas media serta mencapai profesionalisme wartawan.

Kata Kunci: Dewan Pers, Jurnalisme, Profesionalisme Wartawan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Semenjak bergulirnya Reformasi di Tanah Air 1998, telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan sosial politik termasuk kehidupan pers. Diantaranya dengan makin banyak orang mendirikan media, yang menurut catatan Dewan Pers mencapai beberapa kali lipat dari jumlah penerbitan media masa sebelum Reformasi. *Intervensi* pemerintah makin berkurang dengan

dicabutnya Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 1 Tahun 1984 yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kemudian dilakukan oleh DPR RI hasil Reformasi perubahan undang-undang tentang pers yang lama dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang baru, menjadikan terbuka lebar masyarakat untuk mendirikan media. Dan dalam era Reformasi telah memungkinkan setiap orang atau kelompok dapat dengan bebas mendirikan atau menerbitkan media. Kondisi obyektif sosial politik ini membuka sekaligus membawa perubahan kehidupan ke arah demokratisasi dan transparansi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Dapat dikatakan, era Reformasi yang mulai bergulir menjadikan *ruang publik* juga semakin terbuka (Judhita, 2014).

Data Direktorat Pembinaan Pers, Departemen Penerangan, tertanggal 23 September 1999 mencatat sebelum Reformasi 1998 jumlah penerbitan 289 terdiri dari surat kabar harian, tabloid, majalah dan bulletin, sedangkan setelah Reformasi Mei 1998 tercatat 1398. Situasi ini mengkhawatirkan sebagaimana terbaca dalam lontaran khalayak tentang kebebasan pers yang kebablasan (Syah, 2011). Namun yang patut dicatat, perkembangan pers masa Reformasi menunjukkan pers dapat bernafas lega dalam alam kebebasan dengan menjalankan peran pers yang bebas (Waluyo, 2014).

Peluang dalam era Reformasi untuk bebas mendirikan media, juga telah membuka pada setiap orang untuk mau menjadi pekerja media atau wartawan, padahal persyaratan dan kriteria pekerjaan wartawan menuntut pendidikan yang memadai dan mampu memahami kode etik jurnalistik dengan baik. Dan yang jelas, publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang baik dan benar, dan beragam (Karman, 2014).

Dampaknya masih terasa hingga kini, setelah Reformasi berjalan 20 tahun, media masih leluasa menyiarkan berita yang kurang akurat, kurang mengindahkan kode etik jurnalistik serta kualitas wartawan yang kurang kompetensinya. Kondisi wartawan yang demikian, berakibat pada masih kurangnya profesionalisme dikalangan wartawan. Ungkapan kecemasan juga pernah dilontarkan Dr. Charles Himawan, Guru Besar ilmu hukum pada Universitas Indonesia/Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam wawancara yang dimuat harian The Jakarta Post (20/12/1999), dengan semangat euforia Reformasi antusiasme untuk mengembangkan kebebasan berekspresi telah melahirkan kebebasan dari tanggung jawab. Dengan demikian, media memahami kebebasan pers sebagai suatu kondisi yang terkekang dalam masa pemerintahan Soeharto dan terjadi keruntuhan Orde Baru, maka media dan jurnalis boleh bebas untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Media dalam masa awal Reformasi dengan peranannya yang besar, maka masyarakat mulai mengenai ada media yang sudah "*kebablasan*" kebebasannya. Kondisi tidak akan menunjang bagi perkembangan demokrasi dan kehidupan pers yang sehat.

Kondisi kebebasan pers yang "*kebablasan*" dengan sumber daya wartawan yang masih kurang berkualitas dan kurang profesional tentunya berakibat kerugian bagi masyarakat. Publik tidak disajikan liputan berita yang baik dan mendorong kemajuan. Kemungkinan media hanya dijadikan sarana untuk propaganda politik dan kepentingan politik pemilik media.

Belum lagi bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang telah maju dengan pesat. Kehadiran Internet dalam kehidupan sosial telah menjadikan sebagai suatu bentuk kehidupan sosial yang lebih mudah dengan melimpah informasi yang disebarluaskan melalui Internet. Faktor kemajuan TIK juga menjadi tantangan yang lebih luas bagi wartawan sekarang ini, bila tidak dipersiapkan sumber daya manusia bidang media dengan suatu standar kompetensi wartawan yang dirancang dengan basis TIK dan pengetahuan jurnalisisme dalam era digital. Bahkan kini media sosial telah mengintervensi konsep mengenai berita dan peristiwa yang dianut dalam jurnalistik media pers (Haryanto, 2014), tentunya, diantaranya hal ini menjadi persoalan yang perlu ditanggapi dengan bijaksana oleh media dan wartawan.

Semua itu akarnya bersumber dari kualitas sumberdaya manusia, termasuk para wartawan yang memproduksi berita. Dalam proses kegiatan rutin suatu media, wartawan yang mencari,

mengolah, dan menyajikan informasi atau berita dalam media. Dengan demikian wartawan atau *jurnalis* adalah seorang yang melakukan tugas-tugas atau aktivitas jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur mencari, mengolah dan menuliskan berita atau liputan maupun laporannya berupa tulisan yang dikirimkan atau dimuat di media massa. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporannya dan wartawan diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan adalah sebuah profesi yang hasil karyanya bersinggungan langsung dengan kepentingan khalayak ramai. Dikatakan demikian karena jika tak memerhatikan kaidah-kaidah kewartawanan atau jurnalistik maka karya seorang wartawan tak saja bisa menyebabkan kerugian objek berita namun pula keresahan sosial. Pada prinsipnya komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam berbagai aktivitas di semua tempat, mulai dari rumah, tempat bekerja di dalam masyarakat, dan di manapun manusia berada, komunikasi sangat penting (Perbawasari, 2013:2)

Aktivitas jurnalisme sebagai suatu profesi akan menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi, dengan demikian menjadi wartawan selain dibutuhkan intelektualitas yang tinggi, kecakapan menulis dan kemampuan menguasai bahasa asing yang baik, namun juga mampu bersosialisasi yang handal, tahan terhadap tekanan kerja yang diwujudkan dalam bentuk *deadline* sampai kepada kewajiban untuk menjaga marwah wartawan agar profesi ini selalu dapat dipertahankan sebagai pilar keempat demokrasi.

Jurnalisme sebagai teknik pelaporan berita tidak dapat dipisahkan pembahasannya dengan perspektif politik atau kebijaksanaan redaksi dari perusahaan media tersebut. Bila dikatakan pers sebagai pilar keempat dari suatu negara demokrasi, maka pada hakikatnya telah memandang media sebagai suatu institusi politik, dimana media mempunyai peran yang penting pula dalam suatu sistem sosial-politik dalam suatu negara. Peran media dikaitkan dengan fungsinya menyampaikan berita, dan informasi, edukasi, hiburan dan *social control* terhadap kekuasaan negara. Dalam konsep teori strukturasi Anthony Giddens (dalam Rusadi, 2009:141) dijelaskan bahwa praktik sosial direproduksi berulang-ulang oleh saling pengaruh (*interplay*) antara kekuatan struktur dengan kekuatan *human agency*. Praktik media sebagai praktik sosial keberlangsungannya dipengaruhi oleh hubungan struktur media, yaitu aturan-aturan dan sumber daya manusia dengan semua *human agency* yang menggerakkan organisasi media. Wartawan sebagai *human agency* yang menggerakkan, diantaranya ideologi media atau dapat dikatakan yang membentuk paradigma media tertentu. Dengan demikian wartawan mempunyai peran penting dalam kekuatan *human agency*.

Fenomena media bila dilihat dari teori negara yang dikemukakan Althusser (dalam Rusadi, 2009) bahwa negara melakukan praktik penguasaan melalui aparat negara ideologis (*ideological state of apparatus – ISA*) dan aparat negara represif (*repressive state of apparatus –RSA*). Yang termasuk dalam ISA adalah lembaga agama, pendidikan, keluarga, hukum, politik, serikat buruh, komunikasi dan budaya. Sedangkan aparat represif (RSA), antara lain, pemerintah, polisi, dan tentara. Dari penggolongan dua *apparatus* maka terlihat media merupakan *aparatus* negara ideologis. Peran wartawan banyak melakukan fungsi-fungsi komunikasi dengan menggerakkan pemberitaan sebagai ideologi tertentu yang diperjuangkan oleh media tersebut.

Bila peran wartawan dilihat dari perspektif manajemen media, maka kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang diperhitungkan dengan terlibatnya wartawan dalam proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*). Semua fungsi manajemen media tersebut ditujukan untuk menghasilkan isi pesan media yang sesuai rencana. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi perubahan-perubahan dan modifikasi sebagai akibat dari berbagai kekuatan yang melingkupi media.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan sebagai suatu profesi menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran yang tinggi dari pribadi-pribadi wartawan sendiri. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2006:1) dalam buku *Jurnalistik Teori dan Praktik*, pribadi wartawan harus mempunyai *self-perception* dalam dunia jurnalistik. Persepsi diri para wartawan. Maksudnya bahwa kesadaran tinggi ini hanya dapat dicapai apabila ia memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya, baik yang diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan khusus maupun hasil dari bacaannya.

Untuk mendorong kemajuan pers sebagai sarana demokrasi dan menata kehidupan pers yang sehat maka Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menetapkan lima peraturan yang penting. Yaitu yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan pers, organisasi wartawan, dan kompetensi wartawan. Penataan ini dianggap penting agar dapat memberikan jaminan kualitas yang dapat mencapai profesionalisme yang dibutuhkan sebagai kemampuan media yang bersaing dalam dunia global dan nasional. Dalam fokus penelitian ini dibahas berupa tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan agar dapat menjadi jurnalis yang dapat meningkatkan kapasitas media dan profesional.

Sejak memasuki era Reformasi telah membuka alam kebebasan dalam kerangka demokrasi, maka media dapat memanfaatkan dan menikmati kebebasan yang penuh. Kondisi ini makin banyak media yang terbit dan memerlukan sumberdaya manusia berupa tenaga wartawan yang berkualifikasi baik. *Supply* terhadap tenaga wartawan masih menjadi masalah yang cukup serius, ketika media menuntut penyajian informasi yang akurat, seimbang dan independen dalam pemberitaannya. Kualifikasi wartawan yang mempunyai kompetensi dan bersertifikasi masih menjadi proses yang panjang dan belum selesai semua orang yang berstatus wartawan telah menempuh sertifikasi yang dipersyaratkan dan belum tuntas dikerjakan oleh pihak Dewan Pers. Untuk mengetahui dan mengenali persoalan proses sertifikasi dan kompetensi wartawan, maka perlu dilakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan, bagaimanakah tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan (SKW) yang diberlakukan oleh Dewan Pers yang difokuskan pada kategori kompetensi kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*)? Dan mengapa wartawan melalui SKW perlu untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalismenya?

1.2. Signifikansi

Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi terolah bagi pemangku kepentingan agar semakin memahami makna peningkatan profesi wartawan yang makin berkembang dunia jurnalisme dalam persaingan media yang makin ketat. Serta manfaatnya memberikan pedoman praktis bagi wartawan untuk meniti karir sebagai suatu profesi yang berkualitas dengan menempuh jenjang kompetensi.

Adapun penelitian yang dilakukan orang lain yang berkaitan dengan sertifikasi profesi banyak dikaji, namun ada dua hasil penelitian yang sejenis sebagai bahan komparasi, seperti tergambar pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Review Penelitian Sejenis

No.	Hal-Hal yang Terkait dengan Penelitian	Peneliti 1	Peneliti 2
		Udi Rusadi/2012	Johny Herfan /2015
1.	Judul penelitian	Kompetensi Jurnalis sebagai aktor dalam Produksi Berita Media <i>Multiplatform</i> .	Peliputan Investigasi, Profesionalisme Wartawan Investigasi dan <i>Interplay</i> antara struktur dan <i>agency</i> (Studi Kasus dalam praktiknya di Majalah Tempo).
2.	Masalah penelitian	(1) Apakah para jurnalis telah difasilitasi dan mendapat kekangan oleh system produksi berita multi-platform untuk mengembangkan	1) Bagaimana praktik peliputan investigasi di Majalah Tempo? 2) Bagaimana profesionalisme wartawan investigasi dalam

		dirinya. (2) Bagaimana kompetensi jurnalis dalam menghadapi sistem teknologi multi-platform tersebut?	perspektif Standar Kompetensi Wartawan (SKW) di Majalah Tempo? 3) Bagaimana <i>interplay</i> antara struktur dan <i>agency</i> dalam praktik peliputan investigasi di Majalah Tempo ?
3.	Kerangka pemikiran/Variable/konsep	Teori strukturasi, studi ini bertujuan mengungkapkan keterkaitan antara struktur dan agensi dari para jurnalis sebagai aktor.	Teori strukturasi. Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan mengkaji praktik peliputan investigasi dalam teori strukturasi SKW di Majalah Tempo. Memprediksi fenomena tertentu pada SKW berdasarkan perspektif tingkat wartawan madya dan wartawan utama. Menelaah profesionalisme wartawan investigasi dalam praktik peliputan dengan perspektif Standar Kompetensi Wartawan.
4.	Metodologi	Studi kasus di perusahaan media Banjarmasin <i>Post</i> di Kalimantan Selatan.	Pendekatan kualitatif. Paradigma <i>postpositivistik</i> . Metode studi kasus model Robert K Yin.
5.	Temuan penelitian	Dualitas struktur terjadi, dimana struktur selalu memberikan pemungkin (<i>enable</i>) dan batasan-batasan yang jelas yang menyebabkan sistem produksi berita berbasis teknologi dijalankan. Sejalan dengan peranan struktur tersebut, para jurnalis sebagai <i>human actor</i> menyesuaikan kompetensinya dengan sistem manajemen multiplatform yaitu menjalankan struktur dengan mengembangkan kompetensi dasar meliputi kesadaran diskursif, praktis dan motivasi kognitif dan mengembangkan kompetensi lunak media online yaitu sikap kerja cepat, multitasking dan memiliki orientasi kerja berjejaring sosial.	Wartawan berkompeten dalam SKW melakukan peliputan investigasi berdasarkan pengalaman yang mumpuni. Didalam penerapan SKW, rincian teknik proses kerja investigasi tidak dapat dilakukan oleh wartawan berkompeten sesuai dengan urutan langkah kerja. Kenyataan di lapangan menunjukkan tim peliputan investigasi Tempo lebih dini mengantisipasi situasi. Dalam proses organisasi liputan investigasi, peranan struktur dan agensi saling memberi keleluasaan bagi wartawan. Aturan yang dimiliki tim investigasi Tempo memberi <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> , sesuai dengan <i>rule</i> dan <i>resources</i> . Akan tetapi tim liputan investigasi Tempo memiliki tolok ukur tersendiri. Dalam kasus peliputan investigasi tertentu bahkan tim investigasi Tempo menerapkan SKW yang lebih tinggi materi peliputannya daripada SKD Dewan Pers. Terkait teori strukturasi antara struktur dan <i>agency</i> ternyata struktur pada investigasi Tempo tidak terlalu membebani kinerja tim. Struktur tidak memegang peranan yang menentukan. <i>Interplay</i> tidak tergantung dari tujuan struktur. Para peneliti lain perlu melakukan penelitian observasi di media yang mengikuyti uji kompetensi wartawan dari lembaga lain.

Penelitian ini meninjau standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan yang mendeskripsikan bagaimana dan apa standar kompetensi wartawan dapat memberikan kisi-kisi sehingga wartawan dapat menerapkannya menuju pada peningkatan kapasitas media dan profesionalismenya.

1.3. Kerangka Konseptual

Dewan Pers, dalam Peraturan Nomor 1/Peraturan –DP/II/2010, mendefinisikan kompetensi wartawan sebagai kemampuan wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan

pengetahuan, dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalismenya yang dipersyaratkan. Standar kompetensi wartawan bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, (2) Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, (3) Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, (4) Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, (5) Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, (6) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. Pengertian Dewan Pers meskipun dari perspektif wartawan, wawasan dan profesionalisme, namun sekarang ini pengertian pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan teknologi media (Surbakti,2015).

Mengenai Standar Kompetensi Wartawan, Dewan Pers menyusun kompetensi wartawan ini menggunakan model dan kategori kompetensi yaitu:

1. Kesadaran (*awarness*) mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan hobi.
2. Pengetahuan (*knowledge*) mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus,
3. Keterampilan (*skills*) mencakup kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Kemudian, Standar Kompetensi Wartawan mensyaratkan kemampuan untuk menguasai Kompetensi kunci bagi wartawan untuk mencapai kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas wartawan. Kompetensi kunci terdiri atas 11 kategori kemampuan, yaitu: (1) Memahami dan mentaati etika jurnalistik; (2) Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; (3) Membangun dan memelihara jejaring dan lobi; (4) menguasai bahasa; (5) Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; (6) Menyajikan berita; (7) Menyunting berita; (8) Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan; (9) Manajemen redaksi; (10) Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; (11) Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Dalam Ujian kompetensi, perlu ditelaah beberapa bagian yang terkait dalam fokus penelitian ini, antara lain, peserta yang menjalani uji kompetensi adalah wartawan; bila tidak lulus dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya; dalam jenjang wartawan muda sekurang-kurangnya 3 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya; kemudian wartawan madya sekurang-kurangnya 2 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama; wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama 2 tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir; hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten; wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penelitian 10-100.

Dalam peraturan Dewan Pers juga ditetapkan, pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan memberikan pengaruh terhadap tingkat profesionalitas pers. Pemimpin redaksi harus berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 tahun. Demikian pula dengan penanggung jawab, yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

Kapasitas media dapat diartikan sebagai upaya, (1) kemampuan pengelola media dalam menjalankan fungsi dan perannya; (2) juga kemampuan media untuk memenuhi kebutuhan audiensnya terhadap informasi. Informasi yang dimaksud adalah karya jurnalistik (Lukas Luwarso, 2006). Upaya wartawan yang kompeten dengan meningkatkan kapasitas media, dapat dikatakan menjadi bagian penting dari memelihara kebebasan pers yang bermartabat, yang juga sangat

penting peranannya dalam menciptakan iklim demokrasi dan keterbukaan yang sehat. Intinya adalah melahirkan produk media yang memiliki kredibilitas untuk menjadi sarana kontrol sosial.

Upaya membangun kapasitas media, secara umum berarti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para wartawan (dalam hal reportase, penulisan, dan pelaporan). Meningkatkan kapasitas media juga berarti menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara profesional, memperkuat peran masyarakat madani (*civil society*) melalui media. Informasi berkualitas diolah sesuai dengan kaidah jurnalistik, mudah dipahami dan memberi wawasan yang lebih luas terhadap audiens dan pembaca media. Semua itu hanya dapat disajikan jika media dikelola sesuai kaidah jurnalisme profesional serta perusahaan media terus berupaya meningkatkan kapasitasnya. Kasus dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar harian Surya, Malang, sesuai pedoman undang-undang pers yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi informasi atau berita yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (Gabrel Gawi, 2017).

Pengertian profesi, menurut Indrawadi Tamin dalam artikelnya berjudul Kebebasan Pers dan Profesionalisme di Indonesia (Tamin, 2011), paling tidak ada tiga hal yang perlu dicermati bila melihat suatu profesi, yaitu: keahlian tertentu; adanya Kode Etik; dan keahlian itu untuk kepentingan umum. Profesi apapun yang digeluti, tiga hal ini tidak bisa dikesampingkan manakala kita membicarakan peningkatan profesionalisme. Dengan demikian wartawan merupakan suatu pekerjaan yang berprofesi dengan landasan kode etik jurnalistik dan memiliki suatu keahlian atau kompetensi dalam bidangnya jurnalistik, yang dengan keahliannya dalam media. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan sendiri (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2006:1). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers (Dewan Pers, 2010). Kemudian dalam perspektif filsafat profesionalisme, apakah standar profesionalisme pekerja jurnalisme hanya bergerak dalam aspek teknis (*technicalities*) yang berguna dalam lingkup manajemen yang diorientasikan kepada pasar (*marketing oriented*), ataukah menempatkan operasi tugasnya dalam dataran kultural sehingga menjadi suatu kerja intelektual (Siregar, 2000).

Penerapan standar kompetensi wartawan di Indonesia ditempuh melalui uji kompetensi wartawan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut hingga Februari 2016 baru sekitar 5.000 wartawan yang sudah melewati uji kompetensi wartawan (UKW) dari sekitar 15.000 wartawan di Indonesia (www.teropongsenayan.com). UKW yang dilaksanakan menghasilkan level wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama, untuk semua model ujian, baik uji tertulis, praktik, uji jejaring, dokumentasi hasil kerja, studi kasus dan metode lain yang terkait. Hasil uji kompetensi dibuktikan dengan diterbitkan sertifikasi bagi wartawan yang bersangkutan sesuai levelnya, wartawan muda, wartawan madya atau wartawan utama.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian secara kualitatif, dengan metode yang digunakan studi kasus. Robert K. Yin (2003) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan di mana, multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus difokuskan pada masih belum banyak wartawan yang menempuh sertifikasi melalui uji kompetensi, juga perusahaan media yang masih enggan mensyaratkan wartawannya mempunyai sertifikasi. Serta faktor-faktor lain, yang masih lambatnya wartawan mau menempuh uji kompetensi, serta perusahaan media yang masih kurang memahami pentingnya sertifikasi wartawan untuk jenjang karier suatu profesi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan terpilih untuk menggali data primer. Ditambah studi literatur-dokumen dan observasi langsung. Selanjutnya dilakukan pengolaan data kualitatif

yang terkumpul melalui koding data, klasifikasi data sesuai dengan karakteristik data, dan indikatornya untuk di intergrasikan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang dikembangkan Habermas (Idrus, 2011). Pertama, melakukan reduksi data kualitatif hasil observasi dan wawancara. Kedua, melakukan penyajian/ekspos data. Data yang disajikan merupakan hasil reduksi data, yang sudah divalidasi berdasarkan klasifikasi, dan taksonomi dari kriteria yang ditentukan. Ketiga, menarik kesimpulan dari sajian data. Simpulan merupakan inti dari semua rangkaian proses penelitian. Kemudian, rekomendasi atau saran mengacu pada hasil penelitian.

Lokasi penelitian di Jakarta. Subyek penelitian adalah wartawan yang dijadikan informan memahami fokus penelitian ini serta mempunyai kompetensi dan mempunyai pandangan sertifikasi bagi peningkatan kompetensi jurnalis. Yaitu wartawan majalah berita mingguan Tempo, dosen Universitas Nasional Fakultas Sastra dan Budaya bidang kajian media/ wartawan utama, wartawan surat kabar Warta Kota, wartawan media TransTV, anggota Dewan Pers dan wartawan majalah Misteri, Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah dirumuskan pertanyaan, bagaimanakah tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan (SKW) yang diberlakukan oleh Dewan Pers?. Yang akan ditinjau dari kategori kompetensi meliputi kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*). Dan mengapa wartawan melalui SKW perlu untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalismenya

3.1. Kesadaran Memasuki Dunia Wartawan

Perspektif kesadaran (*awareness*) sebagai salah satu komponen untuk menelusuri, mencapai kompetensi sebagai wartawan dapat diamati dari niat ataupun dorongan internal dari manusia itu. Untuk mengungkap, wartawan mempunyai tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi sehingga perlu digali motivasi seseorang ketika memutuskan untuk menjadi seorang wartawan. Selain itu, diungkap juga latar belakang orang tersebut ketika mulai mengenal dunia kewartawanan, meskipun ada kemungkinan kesadaran tersebut masih belum terbentuk. Faktor untuk mengetahui motivasi ini menjadi penting yang kelak dilihat dalam menapaki karirnya sebagai seorang wartawan,

Informan 1 yang kini memiliki sertifikat Wartawan Utama menuturkan:

"Pada awalnya adalah untuk menyalurkan hobi menulis. Mengingat latar belakang pendidikan formal (S1) adalah sarjana sastra indonesia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dulu kampusnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dan juga dorongan dari ayah saya, seorang wartawan (yang telah almarhum). Ayah saya menjadi anggota PWI sejak 1950."

Dalam perjalanan karirnya Informan 1 cukup berhasil sebagai seorang wartawan. Tercatat dalam proses wawancara dan catatan karir yang rekam jejaknya telah cukup lama menapaki profesi sebagai wartawan, sejak masa mahasiswa dan lulus sarjana sekitar tahun 1983 hingga kini pada masa Reformasi tahun 2019. Tercatat sebagai Wartawawan utama dan anggota komunitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jakarta.

Menurut Informan 2,

"Saya sejak mahasiswa memang minat jadi wartawan. Di bangku SMA saya mengelola majalah dinding. Kemudian ketika kuliah di kampus FISIP Unair saya mengelola majalah dinding. Orangtua saya (bapak) menyandang gelar Profesor. Jadi hal ini juga yang memperkuat minat saya jadi wartawan. Dan wartawan sudah menjadi cita-cita saya"

Kesadaran yang mulai terbentuk sejak pendidikan lanjutan dan diteruskan dalam jenjang pendidikan tinggi, kiranya telah menjadikan seseorang dapat meniti cita-citanya sebagai wartawan. Elemen kesadaran dari dalam dirinya tampaknya menjadi faktor penting agar dapat menjadi wartawan yang dapat berkualitas. Informan 2 ini bergabung dalam komunitas wartawan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di Jakarta.

Meskipun dorongan untuk menjadi seorang wartawan yang profesional mengalami banyak rintangan terutama terhadap persoalan gaji atau penghasilan yang bagi banyak wartawan dirasakan kurang atau gaji kecil. Dan wartawan yang bekerja secara profesional, tentunya wajar bila mengharapkan gaji atau pendapatan atas jerih payahnya. Salah satu persoalan krusial yang dialami awak media adalah soal rendahnya gaji atau upah yang diterima. Rendahnya gaji wartawan juga disebabkan banyak perusahaan pers yang belum layak memenuhi standar perusahaan pers yang ideal atau sehat, yaitu sebuah perusahaan pers yang mampu memberikan gaji yang memadai kepada wartawannya, memiliki struktur karir yang jelas bagi wartawannya serta jaminan kesejahteraan lainnya.

Rendahnya gaji jurnalis ditengarai memicu jurnalis membuat berita yang tidak berkualitas. Lebih jauh menyebabkan mereka tergoda menerima amplop yang melanggar kode etik jurnalistik, seperti bukan rahasia umum lagi jika masih banyak jurnalis yang menerima amplop juga sengaja mencari amplop demi memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagi informan 2, pendapatan yang diterima, setelah menekuni sebagai wartawan selama 10 tahun, gaji dirasakan cukup. Ia kini bekerja di suatu perusahaan media yang mainstream, dengan perusahaan besar yang tentunya persoalan gaji juga menjadi perhatian bagi perusahaan itu.

Persoalan lain yang hingga kini masih mengemuka adalah masih banyak jurnalis yang bekerja tanpa kontrak yang jelas dan jaminan sosial seiring berkembangnya media online saat ini di mana media membutuhkan banyak responden maupun stringer. Untuk mengatasi pemutusan kerja tanpa kontrak, maka menjadi penting adalah para buruh media berserikat dengan membentuk serikat pekerja.

Persoalan gaji atau upah yang layak bagi wartawan memang masih menjadi hal serius. Untuk perusahaan media yang telah mapan, maka masalah gaji wartawan sudah cukup baik. Tidak demikian untuk perusahaan media yang masih berkembang, dan gaji yang tidak layak masih banyak diterima oleh wartawan.

Dalam perspektif manajemen media, tentunya persoalan gaji juga menjadi pembahasan penting sebab berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang outputnya berupa penyajian berita dan informasi yang berkualitas bagi publik. Untuk mencapai suatu taraf penghasilan yang layak, maka Dewan Pers telah menetapkan norma yang merupakan standar untuk meningkatkan kualitasnya dalam standar kompetensi wartawan yang keluarannya berupa sertifikasi bagi wartawan.

3.2. Pengetahuan (Knowledge)

Rekrutmen sebagai tenaga wartawan masih banyak yang dilakukan secara sederhana. Banyak perusahaan media yang menerima sebagai calon tenaga wartawan dengan melihat segi pendidikan, terutama sarjana, jarang yang memenuhi kualifikasi sarjana ilmu komunikasi. Terutama tenaga wartawan di daerah, masih banyak yang berpendidikan SLTA dan hanya dibekali kartu-pers

sudah dapat diterima sebagai wartawan. Kondisi ini sangat memungkinkan produk media yang dihasilkan belum memenuhi kapasitas media dari segi jurnalistik dan jauh dari profesional.

Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia (SDM) bidang pers, terutama penyediaan tenaga jurnalis yang kompeten, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2006 menginisiasi gagasan perlunya standar kompetensi wartawan yang memberikan sertifikasi bagi wartawan. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari pelbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi wartawan dan kalangan akademisi. Dewan Pers juga meresponnya dengan mempersiapkan ketentuan mengenai standar kompetensi wartawan, yang akan berlaku bagi semua wartawan di pusat maupun daerah. Namun dalam proses sosialisasi dan minat wartawan yang mau melakukan uji kompetensi masih sangat kurang.

Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik yang menjadi landasan wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik juga masih dirasakan kurang memahaminya. Bahkan laporan Dewan Pers pernah mengungkapkan, Antara lain, masih ada wartawan yang belum pernah membaca materi kode etik jurnalistik. Maka dapat diprediksi bagaimana kualitas media yang wartawannya masih ada yang tidak memahami kode etik jurnalistik. Padahal butir-butir materi kode etik jurnalistik mengatur norma-norma etika dalam menulis berita harus berdasarkan fakta bukan opini, sumber berita harus dapat dirahasiakan sepanjang berita mempunyai dampak dalam masyarakat, berita harus berimbang dan tidak beritikad buruk, wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Serta norma etika jurnalistik lainnya yang pada hakikatnya tugas-tugas wartawan untuk kepentingan publik.

Dalam perspektif praktis, pandangan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalisme berorientasi pada kode etik jurnalistik dan norma-norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Dewasa ini pandangan jurnalisme dapat juga menelaah pada sumber orientasi wartawan yang diambil dari sembilan elemen jurnalisme yang mengandung nilai-nilai idealisme dalam praktik kewartawanan. Norma jurnalistik baru ini bersumber dari re-orientasi dari kilas balik terhadap tugas-tugas jurnalistik yang harus dibenahi untuk era sekarang ini, yang makin praktis dan tuntutan kemajuan sosial masyarakat. Yaitu berupa Sembilan elemen jurnalisme (Kovach, 2006) terdiri dari: (1) Kewajiban pertama Jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Elemen selanjutnya yang ke (3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ke (4) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Sedangkan elemen jurnalisme selanjutnya yang ke (6) bahwa jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Elemen yang ke (7) bahwa jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Dan elemen jurnalisme ke (9) bahwa praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovanck, 2006). Namun yang paling pokok dari amanat jurnalisme, bahwa jurnalisme harus mengutamakan kepentingan publik (Ignatius Haryanto, 2014:100). Dengan demikian, tugas jurnalistik bagi wartawan tidak lain untuk mengutamakan kepentingan publik sebaik-baiknya. Disinilah wartawan yang profesional selalu menjaga kualitas berita untuk kepentingan publik dan meningkatkan kinerja medianya.

3.3. *Perlunya Standar Kompetensi Wartawan*

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemberitaan pers, tentunya diperlukan alat ukur untuk wartawan yang bertugas dalam proses jurnalistik. Mata rantai yang penting dalam proses jurnalistik tidak lain adalah wartawan. Dan standar kompetensi wartawan merupakan alat ukur yang dapat menentukan pada level mana wartawan tadi mempunyai kemampuan dan kompetensinya. Hasil leveling tadi berupa output sertifikasi bagi wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama.

Pandangan kalangan wartawan terhadap perlunya dilakukan standar kompetensi wartawan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Ternyata semua wartawan menginginkan perlu ada standar kompetensi wartawan agar dapat diketahui posisi wartawan, dan mengetahui tugas dan fungsinya serta berbagai peraturan dan pedoman yang harus dipahami bagi dunia kewartawanan, seperti kode etik jurnalistik dan fungsi dari Dewan Pers dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah mengatur tugas dan peran pers secara nasional.

Tabel 2. Perlunya Sertifikasi bagi Wartawan

Identitas Informan	Sertifikasi bagi Wartawan	Komunitas Wartawan
Informan 1	Kayaknya perlu bagi wartawan	PWI
Informan 2	Harus punya sertifikasi	AJI
Informan 3	Perlu	PWI
Informan 4	Sertifikasi perlu dan wajar untuk semua profesi	AJI
Informan 5	Sertifikasi sangat baik, dengan demikian ada sandar keterampilan.	PWI
Informan 6	wajib bagi wartawan	PWI

Sumber: Data Penelitian 2018.

Dalam Tabel 2, ternyata perlunya sertifikasi makin dirasakan oleh wartawan. Bahkan dapat dikatakan sebagai suatu keharusan bila seseorang menekuni suatu profesi wartawan dalam karirnya.

Untuk menjaga kualitas berita dan integritas wartawan, dalam pelaksanaan dari elemen-elemen jurnalistik, maka diperlukan suatu bentuk pengakuan formal terhadap profesi wartawan. Dengan demikian dirumuskan sertifikasi wartawan yang bentuknya standar kompetensi wartawan maka diharapkan akan meningkatkan perhatian dunia usaha dan pemerintah terhadap nasib para wartawan. Sebab dengan adanya standar ini maka wartawan akan menjadi profesional dan diharapkan akan mendapatkan reward yang cukup memadai. Dan media dapat menjaga kepercayaan publik.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka tercatat jumlah wartawan yang ada di Indonesia tumbuh pesat. Saat ini ada sekitar 100.000 orang wartawan di seluruh Indonesia. Sebanyak 70.000 diantaranya belum bisa dikatakan profesional. Data Dewan Pers (2018) tercatat 8.300 wartawan telah tersertifikasi dengan kategori wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama.

Banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan, antara lain, wartawan tidak paham kode etik jurnalistik. Selain itu, banyak wartawan yang memanfaatkan profesinya untuk hal-hal yang menyimpang dari kode etik atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diakui atau tidak, potret jurnalis atau wartawan di Indonesia memang cukup beragam. Mereka yang memiliki kemampuan jurnalistik yang baik dan memiliki standar kompetensi wartawan, seringkali menjadi andalan perusahaan pers bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi "*pembajakan*" terhadap wartawan yang bermutu. Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia di bidang pers maka Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2006 melontarkan gagasan tentang perlunya sertifikasi bagi wartawan. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari pelbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi wartawan lain dan kalangan akademisi. Bahkan Dewan Pers juga meresponnya dengan menggodok persiapan pemberlakuan sertifikasi wartawan melalui pelatihan kode etika jurnalistik bagi seluruh wartawan di Indonesia yang sarannya untuk membangun kapasitas media kearah profesionalitas.

Secara yuridis formal, penyelenggara sertifikasi profesi sebenarnya sudah jelas aturannya. Itu bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang lahir sebagai respon atas tuntutan keunggulan daya saing SDM di era globalisasi. Melalui sertifikasi profesi, diharapkan tenaga kerja di Indonesia tidak saja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat global.

Sertifikasi wartawan tidaklah diperuntukkan membedakan wartawan sungguhan dan wartawan “*bodrek*” atau wartawan “*abal-abal*”. Ia juga bukan semata-mata untuk menunjukkan telah lolosnya si wartawan dari pelatihan atau pendidikan tertentu namun lebih difokuskan pada tingkat kemampuan wartawan dalam menjalankan profesi sebagai wartawan yang baik yang mampu melakukan tugas-tugas jurnalistik. Dalam pengertian Dewan Pers, uji kompetensi wartawan diberi label “*kompeten*” atau “*belum kompeten*”.

Sertifikasi profesi adalah tanda kompetensi yang dimiliki seseorang atas profesi yang dijalannya. Wartawan yang bersertifikasi adalah wartawan yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang diperlukan bagi profesi wartawan. Dengan demikian, wartawan yang telah memiliki sertifikasi berhak menyandang status sebagai wartawan yang professional.

Standar kompetensi ini meliputi pelbagai elemen atau unit kompetensi, baik menyangkut etika, pengetahuan, maupun keterampilan yang memungkinkannya dapat melakukan liputan dan penulisan berita serta aktivitas kewartawanan lainnya. Sertifikasi tak akan diberikan sebelum wartawan benar-benar lulus 100 persen atas materi yang diujikan, tanpa kecuali. Menyimak tuntutan 100 persen lulus kompetensi, tidaklah sembarang orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Pemegang sertifikasi profesi adalah orang yang istimewa di bidang profesinya. Itu sebabnya, pemilik sertifikasi profesi harus diperlakukan secara khusus dengan reward khusus pula. Selain ia memiliki daya tawar yang tinggi untuk profesi yang dikuasainya, lembaga yang mempekerjakannya pun perlu memberikan gaji dan fasilitas-fasilitas yang istimewa.

Sertifikasi wartawan yang berdasar pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010, sampai kini belum sepenuhnya dipahami praktisi media. Padahal aturan di atas mensyaratkan semua media dan organisasi wartawan yang lulus verifikasi oleh Dewan Pers menentukan jenjang kompetensi wartawannya.

Fakta menunjukkan masih rendahnya jumlah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Banyak hal yang mempengaruhi sedikitnya jumlah wartawan yang memiliki sertifikasi diantaranya belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan media untuk mempekerjakan wartawan yang bersertifikat serta cukup tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat sertifikasi wartawan dimana sebagian besar wartawan yang mengikuti sertifikasi, biasanya dibiayai oleh kantornya. Dengan adanya kondisi demikian maka sertifikasi wartawan nampaknya belum menjadi sesuatu yang wajib bagi para wartawan. Namun kemungkinan ada pula wartawan yang tidak mengikuti uji kompetensi karena mungkin takut tidak lulus (Wawancara dengan informan 5).

Secara yuridis formal, penyelenggara sertifikasi profesi sebenarnya sudah jelas aturannya. Itu bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang lahir sebagai respon atas tuntutan keunggulan daya saing sumber daya manusia di era globalisasi. Melalui sertifikasi profesi, diharapkan tenaga kerja di Indonesia tidak saja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat global.

Sementara itu, untuk mewujudkan keinginan menciptakan wartawan-wartawan yang berkompoten maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, selain itu standar ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah

diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi ini dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Standar kompetensi wartawan ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan maupun keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Tujuan dibuatnya standar kompetensi ini adalah untuk; meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Dalam rumusan standar kompetensi ini terdapat 3 aspek dasar utama yang harus dipahami, dimiliki dan dikuasai seorang wartawan, yaitu kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skills*). Dalam aspek kesadaran mencakup kesadaran wartawan akan etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, dan pentingnya jejaring dan lobi. Dalam aspek pengetahuan mencakup pengetahuan umum, pengetahuan khusus, serta teori dan prinsip jurnalistik. Sedangkan pada aspek keterampilan mencakup kegiatan 6M (Mencari, Memilah, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan informasi), melakukan riset atau investigasi, kemampuan analisis/prediksi arah pemberitaan, serta penggunaan alat dan teknologi informasi.

Dalam standar kompetensi wartawan ini terdapat 3 jenjang kualifikasi yaitu, wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Setiap jenjang memiliki kompetensi kunci yang berbeda-beda, maka hal yang diujikannyapun berbeda disesuaikan dengan peruntukan dan posisi jenjang karier wartawan di perusahaan pers.

Wartawan muda memiliki kompetensi kunci dalam melakukan kegiatan kewartawanan, dalam hal ini yang bertugas adalah jurnalis atau reporter. Hal-hal yang diujikan juga berkonsentrasi pada kerja wartawan dilapangan, mulai dari perencanaan pemberitaan, mencari bahan liputan, wawancara tatap muka, wawancara *door stop*, menulis berita, menyunting berita sendiri, menyiapkan isi rubrik, rapat redaksi, dan membangun jejaring.

Setelah menjalani kegiatan jurnalistik sebagai wartawan muda selama sekurang-kurangnya tiga tahun, wartawan dapat mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi wartawan madya. Wartawan madya berkompentensi kunci pada pengelolaan kegiatan kewartawanan. Hal-hal yang diujikan antara lain; mengidentifikasi/koordinasi liputan/pemberitaan, analisis bahan liputan acara terjadwal, merencanakan liputan investigasi, menulis berita/feature, menyunting sejumlah berita, merancang isi rubrik, rapat redaksi-analisis pemberitaan, mengevaluasi hasil liputan/pemberitaan, dan juga membangun dan memelihara jejaring serta lobi.

Untuk bisa mengikuti uji kompetensi wartawan utama, wartawan sudah sekurang-kurangnya dua tahun menjalani jenjang wartawan madya. Wartawan utama berfokus pada mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan kewartawanan. Hal-hal yang diujikan antara lain; mengevaluasi rencana liputan, menentukan bahan liputan layak siar, mengarahkan liputan investigasi, menulis opini, menentukan bahan liputan layak siar, kebijakan rubrikasi, memimpin rapat redaksi, dan memfasilitasi jejaring.

Bagi wartawan yang ingin mengikuti dan mendapatkan sertifikasi profesi kewartawanan dapat memilih di beberapa lembaga yang telah ditunjuk atau diverifikasi oleh Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi.

Ada 4 jenis lembaga atau organisasi yang biasa menjadi lembaga uji kompetensi wartawan atau lembaga sertifikasi wartawan, yaitu perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pelatihan jurnalis. Kemudian Dewan Pers juga telah mengeluarkan 4 Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi oleh lembaga atau organisasi itu untuk dapat menggelar uji kompetensi wartawan.

Saat ini ada beberapa perusahaan pers yang dapat dijadikan tempat uji kompetensi seperti, Jawa Pos Group dan LKBN ANTARA. Selain perusahaan pers dapat juga mengikuti uji kompetensi melalui lembaga atau organisasi kewartawanan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dapat pula di perguruan tinggi yang kini telah dapat menyelenggarakan uji kompetensi seperti Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Serta lembaga pelatihan jurnalistik yaitu lembaga pers Dr. Soetomo (LPDS) yang dibawah Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro ditetapkan sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan.

Hasil dari uji kompetensi ini ialah *kompeten* atau belum *kompeten*. Wartawan dinilai kompeten apabila memperoleh minimal nilai 70 dari skala penilaian 10-100. Sertifikat kompetensi ini berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistiknya. Bagi wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak melakukan kegiatan jurnalistik selama dua tahun berturut-turut, dan ingin kembali menjalankan tugas jurnalistiknya, maka diakui berada di jenjang kompetensi terakhir. Lembaga tempat dimana melakukan uji kompetensi akan menentukan kelulusan wartawan, dan Dewan Pers akan mengesahkan kelulusan uji kompetensi tersebut.

3.4. Keterampilan (Skills)

Kategori keterampilan (skills) dalam standar kompetensi wartawan mempunyai fungsi yang penting. Sebab keterampilan disini sebagai seorang wartawan mencakup kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Bagi wartawan keterampilan ini merupakan dasar untuk dapat menjalankan kegiatan jurnalistik, dan merupakan “alat” yang harus dikuasai dengan baik.

Bila dikaitkan dengan usaha media untuk meningkatkan kemampuan keterampilan wartawannya, dalam kapasitas media, maka banyak fakta, menjelaskan bahwa sebagian pengelola pers di Indonesia belum atau tidak memiliki kapasitas media. Bukan saja tidak memiliki kapasitas dasar untuk mengelola media, melainkan juga banyak pengelola media yang tidak memiliki pemahaman untuk mengelola pers yang profesional. Pada sebagian kalangan pengelola media, terutama di kalangan media baru, membuat usaha di bidang media semata-mata hanya untuk sarana meraih keuntungan finansial secara mudah, terutama dari pemuatan iklan. Pengelola media semacam itu telah secara sadar menyalahgunakan dan menodai kemerdekaan pers. Memang masih cukup sulit untuk mengajak pengelola media bersikap profesional, khususnya di kalangan perusahaan media yang berdiri dengan sumberdaya seadanya, yang sesungguhnya memang tidak layak untuk disebut sebagai perusahaan pers.

Alat ukur untuk menilai kemampuan dan keterampilan wartawan dalam jurnalistik dengan semua persyaratan yang mendukungnya perlu dilakukan melalui uji kompetensi wartawan dalam standar kompetensi wartawan yang sejak tahun 2010 telah diberlakukan oleh Dewan Pers. Kondisi mikro ini diukur Dewan Pers tahun 2008 dengan melakukan penelitian atas dokumen-dokumen pengaduan dari masyarakat yang diterima sejak tahun 1999- 2007. Ada 253 pengaduan yang menjadi sampel. Hasil penelitian, antara lain, menemukan bahwa pelanggaran oleh pers yang paling banyak diadukan menyangkut ketidakakuratan (26,48%), ketidakberimbangan (17,39 %), dan tidak konfirmasi (16,99%).

Dari temuan penelitian tersebut terlihat bahwa keluhan masyarakat terhadap pers umumnya terkait hal paling mendasar dalam etika jurnalistik, yaitu akurasi, keberimbangan, dan konfirmasi atau verifikasi dalam penulisan berita. Tentunya wartawan yang lalai memenuhi ketiga etika itu sangat mungkin merugikan pihak yang diberitakan dan tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berkualitas. Wartawan seperti itu jauh dari kategori profesional.

Bagaimanakah ciri-ciri wartawan yang profesional tersebut? Istilah *professional* merupakan perkembangan dari kata profesi. Suatu profesi tentunya berbeda dari hanya sekedar suatu pekerjaan. Adapun ciri-ciri atau karakteristik satu profesi memiliki 6 kriteria. Terence J. Johnson dalam bukunya *Profesi dan Kekuasaan- Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat*, 1991, mengatakan sebagai berikut: (1) profesi didasarkan pada keterampilan yang berbasis pengetahuan teoritis, (2) mengikuti pelatihan dan pendidikan; (3) pengujian kemampuan anggota profesi; (4) tergabung dalam suatu organisasi wartawan; (5) taat pada kepatuhan suatu aturan profesional, dan (6) melakukan pekerjaan sebagai jasa pelayanan yang sifatnya altruistic, yaitu melakukan pekerjaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain melalui tugas dan fungsi jurnalisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu profesi atau orang yang profesional adalah melakukan suatu pekerjaan yang berbasis pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada masyarakat umum, diwadahi dalam organisasi profesi wartawan yang dapat mengatur atau mematuhi kode etik jurnalistik sebagai kode etik profesinya.

Ada beberapa alasan mengapa uji kompetensi belum semua dilakukan wartawan. Padahal pandangan wartawan terhadap berlakunya sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan dalam bekerja sangat diperlukan. Wartawan telah merasakan perlunya menempuh uji kompetensi, maka perusahaan media perlu menyediakan biaya untuk para awak media mengikuti uji sertifikasi. Namun ada juga media yang mau mengirimkan awak media untuk mengikuti uji kompetensi. Menurut Informan 5, sebenarnya ada peraturan Dewan Pers yang mewajibkan perusahaan media, seperti juga organisasi wartawan, untuk mensertifikatkan wartawannya, tetapi hanya media "*besar*" yang mampu melakukan secara teratur atau mau melakukannya atau mengirimkan wartawannya mengikuti uji kompetensi. Hal ini semua tertulis dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010. Sementara Informan 4 dari komunitas wartawan AJI, "perusahaan pers yang sudah mapan secara bertahap akan meminta wartawannya ikut uji kompetensi, karena mereka sudah sadar arti pentingnya wartawan memiliki sertifikasi". Kalau untuk wartawan anggota AJI digratiskan untuk mengikuti uji kompetensi. Sementara yang diadakan PWI tiap wartawan harus membayar.

Untuk mengingatkan agar perusahaan pers dan organisasi wartawan mau mengirimkan wartawannya untuk mengikuti uji kompetensi, maka diperlukan sosialisasi yang intensif dari pihak Dewan Pers. Kemudian juga dapat dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, bahwa untuk menjabat sebagai redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, harus mempunyai sertifikat kompetensi yang ditandatangani Dewan Pers. Boleh saja pejabat atau narasumber menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum punya sertifikat kompetensi. Media sebagai perusahaan pers memberikan subsidi dana untuk wartawannya yang mau ikut uji kompetensi.

Persoalan membekali wartawan dengan sertifikasi merupakan suatu perjalanan panjang yang banyak rintangan, mulai dari kesadaran wartawan terhadap makna profesinya, regulasi yang telah mengatur perlunya wartawan memiliki sertifikasi, hingga pihak organisasi wartawan atau komunitas wartawan dan perusahaan media yang masih belum menyadari sepenuhnya makna profesionalisme bagi wartawannya untuk menempuh uji kompetensi. Pandangan wartawan terhadap perlu uji kompetensi bagi peningkatan profesinya saja tidaklah cukup, namun perlu didukung oleh organisasi pers dan perusahaan medianya.

3.5. *Diskusi*

Perkembangan sosial politik yang makin demokratis sejak memasuki era Reformasi, yang dibarengi dengan makin banyak orang mendirikan media pers, maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang mengelola media, diantaranya yang penting adalah ketersediaan tenaga jurnalis yang berkualitas. Dalam awal era Reformasi, masyarakat menilai bahwa Pers dengan regulasi yang baru berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah menilai bahwa pelaksanaan kebebasan pers telah melampaui batas, sehingga terlontar "*kebebasan pers yang keablasan*".

Namun kini setelah berjalan selama 20 tahun, makin dirasakan bagi pers untuk dapat menyajikan penampilan media atau pers yang berkualitas dan memenuhi tuntutan publik dengan memenuhi kepentingan publik yaitu informasi publik lebih diutamakan. Tuntutan publik tentunya tidak hanya kepada wartawannya yang melaksanakan tugas jurnalistik, namun juga terhadap perusahaan media yang perlu memverifikasi sebagai suatu perusahaan pers yang sehat dan dapat meningkatkan kapasitas media sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini.

Perkembangan Internet dengan jaringan global telah menjadi pesaing yang kuat terhadap media konvensional, terutama *intervensi* dari *media sosial* yang dengan cepat dapat menyebarkan informasi. Perusahaan media cetak juga terus bertransformasi dengan mendirikan media online berita/ *media siber* yang diverifikasi Dewan Pers sehingga berita-beritanya dapat dipercaya. Kehadiran Internet telah menjadi suatu persoalan yang lain yang perlu disikapi dengan bijaksana dikalangan wartawan dewasa ini. Perspektif kesadaran, pengetahuan dan keterampilan menjadi taruhan yang tidak ringan untuk menjadi wartawan yang profesional dewasa ini.

Bila standar kompetensi wartawan masih belum mencapai sasaran untuk seluruh wartawan di pusat dan daerah maka, seperti kasus jabatan pemimpin umum yang setara kemampuannya dengan pemimpin redaksi masih belum dapat dipenuhi. Artinya pemimpin umum media, banyak ditempati oleh pemilik media atau orang yang ditunjuk oleh pemilik media dan bukan seorang wartawan, tetapi mungkin pengusaha. Sedangkan pemimpin redaksi sebaiknya ditempati oleh wartawan yang telah menempuh karirnya mulai dari level wartawan muda terus meningkat menjadi wartawan utama. Sebab pemimpin redaksi harus telah mempunyai pengalaman dan pemahaman terhadap tugas-tugas jurnalistik yang paling dasar hingga tugas yang sulit, seperti melakukan pelaporan *jurnalisme investigasi*. Kemudian juga bila pemimpin umum yang kurang menguasai perspektif jurnalisme, ada kemungkinan politik pemberitaan hanya menguntungkan bagi pemilik modal yang mempunyai banyak kepentingan politik dan kepentingan perusahaan dengan cara akan mencari untung finansial atau ekonomi. Wartawan sebagai tenaga kerja ditempatkan dalam posisi yang serba sulit. Pemilik modal yang direpresentasikan oleh pemimpin umum akan menguasai ruang-redaksi. Kondisi ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebebasan pers, dalam kegiatan mikro berupa penulisan berita yang kurang seimbang, mungkin jauh dari obyektif.

Bila situasi pelaksanaan kebebasan pers kurang terjamin, maka memungkinkan wartawan juga terpengaruh terhadap tindakan yang dapat merugikan khalayak dalam penyajian berita dan informasinya. Diantaranya, rekrutmen wartawan perlu dibenahi sesuai dengan standar kompetensi wartawan yang ditetapkan Dewan Pers, dengan demikian tercapai peningkatan kapasitas media dan sikap profesional wartawannya. Belum lagi berbicara mengenai standar gaji wartawan yang berbeda-beda antara perusahaan media yang satu dengan lainnya. Kondisi ini juga dapat mengurangi usaha peningkatan profesionalisme wartawan.

Terhadap pengetahuan wartawan yang masih kurang, perlu dilakukan semacam peningkatan dan penambahan pengetahuan secara internal di lingkungan media sendiri. Terutama pengetahuan teknik jurnalistik dan penguasaan keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah maju dengan pesat. Alat-alat TIK semakin canggih. Untuk memperoleh recruitment wartawan yang berkualitas, maka diperlukan alat ukur berupa standar kompetensi wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian, akan diperoleh tenaga wartawan yang dapat dikategorikan sebagai wartawan mudah, atau wartawan madya, yang kemudian setelah berkarir selama 5-10 tahun dapat meningkat pada level wartawan utama.

Standar kompetensi wartawan ini dilakukan secara obyektif dengan melihat kemampuan terhadap kesadaran, pengetahuan dan keterampilan seseorang sebagai wartawan. Dan juga dapat mengurangi pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kerja jurnalistik wartawan. Kasus produk media yang dihasilkan sebagai karya jurnalistik, perlu dijaga penyusunannya antara fakta dan opini pembuat berita. Pembaca sangat menghargai hasil kerja jurnalistik yang obyektif dan tidak

memihak pada kepentingan politik atau pemilik media, tetapi untuk kepentingan publik pembacanya.

4. PENUTUP

Wartawan yang menyadari akan arti kegiatan jurnalisme sebagai suatu profesi, tentunya dituntut untuk terus mengembangkan diri kearah peningkatan kualitas jurnalisme yang akan berpengaruh terhadap kredibilitas media di mana wartawan itu bekerja. Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan yang dapat mendorong kearah peningkatan kualitas profesional wartawan melalui penjenjangan yang terukur, dan sertifikasi wartawan menjadi suatu proses yang dapat mendewasakan, makin menyadari arti profesionalisme bagi wartawan yang bersangkutan dan juga dapat meningkatkan reputasi mediana dan organisasi profesi wartawan. Dengan demikian, peraturan Dewan Pers yang mengharuskan semua wartawan menjalani proses sertifikasi wartawan adalah suatu titik tolak kearah peningkatan profesionalisme wartawan yang terukur dan teruji. Tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan melalui pandangan wartawan terhadap perlunya memiliki sertifikasi tampaknya masih belum direspon oleh pihak organisasi media dan perusahaan pers. Kemungkinannya terhambat pada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menempuh uji kompetensi bagi wartawan yang harus mengeluarkan biaya atau ada alasan lain yang tidak tertulis. Faktanya, faktor dominan adalah masih lemahnya komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawannya menempuh uji sertifikasi wartawan.

Rekomendasi dari penelitian ini: 1) mendesak kepada perusahaan media untuk dapat melakukan uji kompetensi kepada semua wartwan yang ada di media tersebut, secara periodik mulai dari wartawan yang telah bekerja dua tahun. 2) secara periodik tim redaksi media perlu melakukan peningkatan kualitas jurnalisme dan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi wartawannya sehingga mampu memperlancar tugas-tugas jurnalisme dalam era digital. 3) meningkatkan komitmen media terhadap kemampuan wartawan dalam arti luas menuju pada profesionalisme wartawan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kesempatan yang diberikan penulis menyelesaikan naskah ini. Kepada Redaksi Jurnal SKM dan Mitra Bestari yang telah mengarahkan penulis dalam proses perampungan naskah ini. Juga kepada Rengga Satrio Wibisono, S.Sos sebagai teman diskusi dalam proses penelitiannya, diucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Gawi, G., Aminulloh, A., Yasak, E. M. (2017) "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat kabar Harian *Surya Malang*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 (1). ISSN 2442-6962. p.19-27.
- Haryanto, I. (2014). *Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 21*. Edisi I. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Herfan, J. (2015). "Peliputan Investigasi, Profesionalisme Wartawan Investigasi dan Interplay antara Struktur dan Agency – Studi Kasus dalam praktiknya di Majalah Tempo. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 19 (1), p.15-45.
- Idrus, M. (2011), *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga.
- Johnson, Terence, J (1991). *Profesi dan Kekuasaan-Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Judhita, Christiany (2014) "Opini Publik Terhadap Kasus 'KPK Lawan Polisi' dalam Media Sosial Twitter. Jurnal Pekommas, 17 (2), p.61-70.

- Karman (2014) "*Monopoli Kepemilikan Media dan Lenyapnya Hak Publik*". Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 5 (1), Juni 2014. p. 69-84.
- Kovach, B., Rosenstiel, T. (2006) *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kusumaningrat, H., Kusumaningrat, P. (2006) *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Luwarsa, Lukas (2006). *Membangun Kapasitas Media*. Jakarta: Dewan Pers.
- Perbawasari, S., Setianti, Y. (2013). "*Komunikasi dalam Transformasi Budaya Perusahaan*". Jurnal Penelitian Komunikasi, 16 (1) p. 13-20.
- Siregar, Ashadi (2000). "*Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni*". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2). ISSN 1410-4946. p. 171-196.
- Surbakti, Dahlan (2015). "*Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*". Jurnal Hukum Prioritas, 5 (1). p. 77-86.
- Syah, Sirikit (2011). *Rambu-rambu Jurnalistik: Dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Edisi I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusadi, Udi (2009). "*Ideologi Media dan Ideologi dalam Media Tinjauan Teoritis, Konseptual dan Metodologis*", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. 56
- Rusadi, Udi (2012). "*Kompetensi Jurnalis sebagai Aktor dalam Produksi Berita Media Multiplatform*", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 16 (2), p. 111-122.
- Tamin, Indrawadi (2011), "*Kebebasan Pers dan Profesionalisme di Indonesia*", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, 2 (3).
- Waluyo, Djoko dan Syamsiah Amali (2014) "*Catatan Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 18 (1), p. 1-22..
- Yin, R. K. (2003). *Studi Kasus- Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**KESIAPAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH MENUJU
PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* (STUDI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA)**

***E-GOVERNMENT READINESS ON LOCAL GOVERNMENT TOWARDS
DEVELOPMENT OF SMART PROVINCE (STUDY ON MANDAILING NATAL
REGENCY, NORTH SUMATERA)***

Marudur Pandapotan Damanik¹, Erisva Hakiki Purwaningsih²

¹Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Pegangsaan Timur 19B Jakarta Pusat, Indonesia

²Pusat Penelitian SDP3I Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, Indonesia

¹marudur.p.d@kominform.go.id ²eris001@kominform.go.id

Diterima tgl. 24/11/2018; Direvisi tgl. 04/12/2018; Disetujui tgl. 10/12/2018

ABSTRACT

This study aims to describe the readiness of Local Government of Mandailing Natal District in implementing e-government to support the North Sumatra Smart province initiative. The research method was carried out quantitatively and qualitatively. Quantitative data was carried out by conducting a survey to 30 employees in the Mandailing Natal Government, while qualitative data was carried out by open interviews with informants who came from the Office for Communication and Informatics Services. The results found that the Mandailing Natal Government had used ICTs in the work process but had not been fully implemented. On the infrastructure aspect, internet networks in most Regional Work Unit still use telephone cables with fairly slow access speeds. On the human resource aspect, the most respondents have had the operational capabilities of ICT devices but do not understand technical matters. Whereas in the aspect of governance, the Mandailing Natal District Government does not yet have a legal framework as an operational basis and future ICT development planning. The study also presents a number of obstacles to the implementation of e-government and propose several recommendations as a step towards improvement.

Keywords: Smart city, Smart province, E-government, ICT readiness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan Pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan e-government untuk mendukung inisiatif *Smart province* Sumatera Utara. Metode penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan metode survei kepada 30 orang pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Mandailing Natal, sedangkan data kualitatif dilakukan dengan wawancara terbuka kepada informan yang berasal dari dinas komunikasi dan informatika. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah memanfaatkan TIK dalam proses kerja di pemerintahan namun belum maksimal. Pada sisi infrastruktur, jaringan internet di sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah masih menggunakan kabel telepon dengan kecepatan akses yang cukup lambat. Pada sisi SDM, para responden umum memiliki kemampuan operasional perangkat TIK namun tidak memahami tentang hal-hal teknis. Sedangkan pada aspek tata kelola, pemkab Mandailing Natal belum memiliki kerangka hukum sebagai landasan operasional dan perencanaan pengembangan TIK kedepan. Studi ini juga mengemukakan sejumlah hambatan pelaksanaan e-government dan merumuskan beberapa rekomendasi sebagai langkah perbaikan.

Kata Kunci: Kota cerdas, Provinsi cerdas, E-government, Kesiapan TIK

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, tingkat kebutuhan masyarakat akan informasi, dan semakin berkembangnya teknologi menjadikan *Smart city* sebagai sebuah jalan keluar bagi banyaknya problematika yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dimulai dari

permasalahan ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, informasi layanan publik dan berbagai permasalahan masyarakat lainnya. Mengapa dikatakan *smart city* sebagai salah satu hal yang perlu diterapkan oleh dalam menangani berbagai permasalahan dalam konteks pemerintahan dan masyarakat? Hal tersebut dikarenakan, melalui *smart city* terjadi integrasi teknologi yang dapat menciptakan keteraturan, mengurangi potensi *human error*, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam berbagai hal, terutama layanan publik. Pelayanan publik yang biasanya membutuhkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit bisa dipangkas jika telah menerapkan *smart city*. Integrasi teknologi dapat menciptakan alur kerja dan prosedur yang lebih cepat dan efisien. Kinerja pemerintahan pun dapat diketahui publik secara terbuka, hal ini tentu dapat berdampak positif bagi pemerintahan yang ingin menjalankan pemerintahan secara transparan. Masyarakat akan menjadi *controller* bagi setiap kebijakan pemerintah kota/kabupaten. Melalui penerapan *smart city* diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas kinerja dari pemerintahan, optimalisasi layanan publik, efisiensi birokrasi, tersedianya akses terhadap keseluruhan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih modern, tertata dan sejahtera.

Untuk dapat menjadikan sebuah kota/kabupaten menjadi *smart city* dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Nam & Pardo (2011) mengatakan bahwa penerapan *smart city* terdiri atas beberapa unsur utama yaitu: teknologi (infrastruktur hardware dan software), sumber daya manusia (kreatifitas, diversity, dan pendidikan), dan institusi (tata kelola dan kebijakan). Infrastruktur teknologi diperlukan untuk menghubungkan berbagai sektor layanan. Sumber daya manusia yang kompeten dibutuhkan untuk penanganan dan pengembangan fasilitas seperti jaringan, *software* dan berbagai infrastruktur teknologi lainnya. Sedangkan tata kelola dan kebijakan diperlukan sebagai panduan, dasar pelaksanaan, dan payung hukum implementasi *smart city*.

Beberapa kota yang berhasil menerapkan *smart city* diantaranya Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah DKI Jakarta karena telah mendapat berbagai penghargaan terkait implementasi *smart city*. Pada tingkat Pemerintah Provinsi, Sumatera Utara telah mulai bergerak ke arah *Smart province* dengan memulai mengandalkan website pemerintah (<http://smartprovince.sumutprov.go.id/>) yang mampu menampilkan rencana kerja, pengelolaan dan pengelompokan OPD, Layanan Publik dan integrasi aplikasi kabupaten/Kota di Provinsi Sumut.

Untuk mewujudkan keberhasilan *smart province* secara menyeluruh, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan lembaga pemerintahan kabupaten/kota yang berada di bawahnya. Disamping itu dibutuhkan juga kesiapan TIK pada level kabupaten/kota untuk mendukung *smart province*. Salah satu wilayah Kabupaten yang berada dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Mandailing Natal. Mengingat secara geografis Kabupaten Mandailing Natal berjarak 460 km dari ibukota Provinsi Sumatera Utara dan terletak berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat, maka wilayah ini dirasa penting untuk diteliti agar informasi kesiapan e-government yang diperoleh dapat mewakili wilayah kabupaten terluar di Sumatera Utara.

1.1. Konsep Kesiapan Implementasi TIK

Kesiapan implementasi TIK atau *ICT readiness* diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk membangun dan mengadopsi TIK. Dalam konteks e-government, kesiapan pelaksanaan e-government mengindikasikan kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan TIK untuk merubah layanan publik yang sifatnya konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi (Joseph, 2014). Makna kesiapan (*readiness*) ini tidak hanya sebatas pada lingkup kelembagaan, namun termasuk juga kesiapan pada tata kelola, sumber daya manusia, hubungan antar institusi, infrastruktur, pendidikan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan e-government (Al-Omari & Al-Omari, 2006). Keberhasilan inisiatif e-government bergantung pada sejauhmana institusi pemerintah mempersiapkan lembaganya untuk menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada (Nento,

Nugroho, & Selo, 2017). Oleh karena itu mengukur kesiapan organisasi pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan sebelum ataupun saat menerapkan e-government sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah.

Berbagai model kesiapan implementasi TIK telah banyak diutarakan dalam berbagai literatur. Demikian pula penelitian terkait kesiapan e-government telah banyak dilakukan. Putri & Darmawan, (2018) melakukan pengukuran kesiapan TIK terkait program *Smart province* di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengukur faktor teknologi, faktor manusia, dan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepri *Smart province* masih memiliki kelemahan di semua faktor pengukuran. Pada faktor teknologi, kelemahan terletak pada minimnya sarana dan prasarana. Pada faktor manusia, kelemahan terlihat pada lemahnya kompetensi aparatur yang menjalankan e-government Sedangkan pada faktor institusional kelemahan terletak pada belum adanya regulasi daerah sebagai penguatan koordinasi antar satuan kerja daerah untuk mengintegrasikan data.

Waheduzzaman & Miah (2015) melakukan asesmen kesiapan e-government di Bangladesh. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif melalui wawancara dan FGD kepada berbagai stakeholder termasuk aparatur pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat. Penelitian ini mengukur aspek-aspek e-government pada 4 (empat) kategori yaitu aspek informatif, transaksional, operasional, dan kolaboratif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi e-government di Bangladesh tidak berjalan mulus akibat sikap aparatur pemerintah Bangladesh yang birokratis dan tidak menginginkan partisipasi publik dalam kinerja pemerintahan. Peneliti ini menyimpulkan bahwa aspek kolaboratif dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk mewujudkan keberhasilan e-government.

1.2. *Smart-City dan E-Government*

Riset terkait implementasi TIK di pemerintahan telah cukup banyak dilakukan. Secara umum e-government didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola administrasi pemerintahan serta menyediakan layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Melalui TIK yang berperan sebagai *enabler* dalam menjalankan proses bisnis organisasi, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

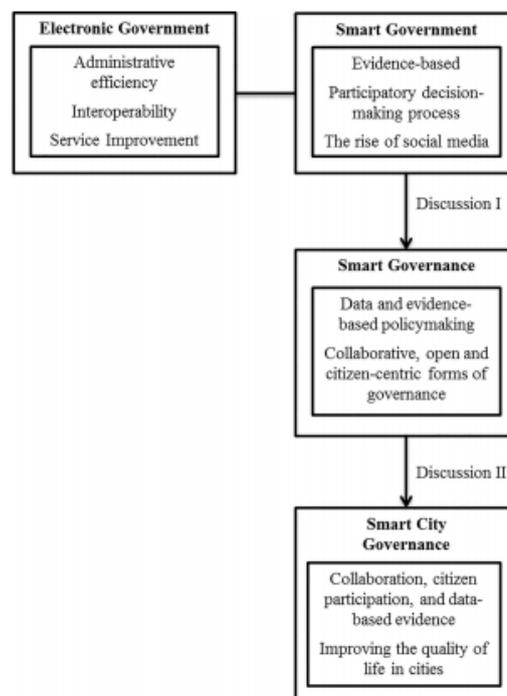
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan beragamnya jenis layanan yang mampu diberikan pemerintah, implementasi e-government sering dikaitkan dengan perkembangan masyarakat urban untuk mewujudkan kota yang berbasis teknologi yang kemudian dikenal dengan konsep kota cerdas atau *smart city* (Meijer & Bolívar, 2016). *Smart city* atau kota cerdas didefinisikan beragam oleh para peneliti. Secara umum *smart city* adalah konsep pengelolaan kota menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (Caragliu, Bo, & Nijkamp, 2009) yang melakukan studi tentang *smart city* di Eropa mengemukakan bahwa *Smart city* adalah konsep kota yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur TIK yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, kualitas hidup, dan manajemen sumber daya alam melalui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipatif. Konsep *smart city* (kota cerdas) diartikan tidak hanya kemampuan otomatisasi dalam aktivitas-aktivitas rutin seperti dalam pelayanan publik ataupun sistem lalu lintas, namun juga kemampuan untuk memonitor, memahami, menganalisis, hingga merancang sistem pengelolaan kota untuk meningkatkan efisiensi, kesetaraan sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara *real time* (Batty et al., 2012). Untuk mencapai hal tersebut, *smart city* menerapkan dan memanfaatkan TIK yang diaplikasikan ke berbagai sektor dalam perkotaan seperti transportasi, energi, pelayanan kesehatan, perairan, pengelolaan sampah/limbah, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik *Smart city* yang membedakannya dengan kota-kota konvensional antara lain (Caragliu et al., 2009):

1. Pemanfaatan infrastruktur teknologi dan jaringan komputer

2. Pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
4. Meningkatkan peran industri teknologi dan industri kreatif dalam pembangunan
5. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

E-government dan *Smart city* adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan yang paling terlihat terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya, dimana e-government berada pada lingkup organisasi pemerintah, sedangkan lingkup *smart city* adalah perkotaan. Namun kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK yang bertujuan untuk memberikan nilai lebih (*value added*) kepada warga masyarakat (Gil-garcia, 2012). Baik e-government maupun *smart city* adalah suatu konsep multidisiplin yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, namun juga dipengaruhi oleh hubungan antar pemangku kepentingan, manfaat, serta berbagai faktor sosial dan politik.

E-government memiliki kaitan erat dengan *smart city*. Tingkat penerapan e-government di instansi pemerintah menjadi salah satu indikator penerapan *smart city*. Menurut Pereira, Parycek, Falco, & Kleinhans (2018), e-government menjadi pondasi yang penting untuk berevolusi menuju *smart city governance* sebagai salah satu dimensi *smart city*, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Di fase awal, e-government menjadi prasyarat untuk menjadi *smart government*. Dalam konteks ini *smart government* tidak hanya sebatas pemanfaatan TIK sebagai pendukung dalam proses kerja pemerintahan. Unsur *smart* dalam *smart government* menandakan bahwa TIK sudah menyentuh di semua proses kerja pemerintah dan mampu menciptakan kinerja berbasis data, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Web 2.0 dan sosial media secara optimal. Ketika kriteria *smart government* telah terpenuhi, proses pemerintahan kemudian dapat menjadi lebih kolaboratif dengan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam proses kerja pemerintah. Dalam proses ini, *smart government* bertransformasi menuju *smart governance* atau tata kelola pemerintahan cerdas yang dicirikan dengan adanya



Sumber: Pereira, Parycek, Falco, & Kleinhans (2018)

Gambar 1. Evolusi e-government menuju *smart city governance*

interaksi dengan masyarakat, pelaku ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga pemerintah lainnya dalam membentuk kebijakan pemerintah. Ketika seluruh proses tersebut telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka fase tersebut dapat dikatakan fase *smart city governance* telah terpenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang bertujuan menggambarkan kesiapan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam implementasi e-government menuju *Smart province* di Provinsi Sumatera Utara. Variabel operasional yang digunakan dalam mengukur konsep kesiapan pemerintah adalah: 1) Kondisi infrastruktur TIK dan aplikasi; 2) Kesiapan tata kelola terkait TIK; 3) Kompetensi SDM aparatur. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan proses pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Responden yang dilibatkan sebanyak 30 orang PNS dan non-PNS yang ditentukan secara *purposive* dengan kriteria sebagai pengguna internet yang aktif. Metode survei bertujuan untuk memperoleh data tentang kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menggunakan TIK, dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi e-government. Kuesioner disusun dengan skala likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban. Data kemudian diolah dengan menghitung nilai rerata (*mean*) dari tiap pertanyaan, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Adapun pengumpulan data kualitatif dilaksanakan melalui observasi dan wawancara terbuka kepada aparatur pemerintah dengan informan kunci yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. Observasi dan wawancara difokuskan untuk menggali informasi tentang kesiapan infrastruktur dan aplikasi TIK yang ada di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta kesiapan tata kelola yang digunakan dalam implementasi e-government. Hasil dari pengumpulan data kualitatif ini kemudian dianalisis dengan model Miles & Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Smart province Sumatera Utara*

Program *Smart province* merupakan program pengembangan *Smart city* yang digagas oleh Gubernur Sumatera Utara Tgk. Erry Nuradi. Program ini dicanangkan pada tahun 2016 bekerjasama dengan salah satu perusahaan jasa telekomunikasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dari situs resmi Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa program *Smart province* di Sumatera Utara difokuskan untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi. Melalui pendekatan teknologi diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan dikelola secara modern, partisipatif dan berkelanjutan. Implementasi *smart province* juga direncanakan untuk dapat mewujudkan integrasi layanan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi, maupun kabupaten kota.

Pada tahun 2017 pelaksanaan Program *Smart province* dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Smart province* Sumatera Utara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa *Smart province* merupakan konsep pengelolaan provinsi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi yang mendukung.

Implementasi *smart province* dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dan aplikasi yang harus memenuhi standar interoperabilitas dan keamanan informasi. Penyediaan infrastruktur dalam

hal ini berupa pusat data (*data center*), pusat kendali (*command center*), *contact center*, dan fasilitas pendukung lainnya.

Penggunaan aplikasi dalam *smart province* bertujuan untuk:

1. Pusat penyediaan data, yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi secara berkala, terintegrasi, dan mudah yang diakses dari kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
2. Proses kinerja aparatur pemerintah daerah, yang meliputi program dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
3. Penyediaan layanan publik, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat (perorangan maupun kelompok) baik atas pengaduan maupun permintaan masyarakat maupun informasi secara umum.

Saat ini aplikasi *smart province* Sumatera Utara dapat diakses melalui website smartprovince.sumutprov.go.id. Selain itu aplikasinya juga tersedia di platform android.



Gambar 2. Tampilan website *Smart province* Sumatera Utara

3.2. Menilai Kesiapan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam penerapan *Smart province* Sumatera Utara diukur melalui beberapa indikator, yaitu kondisi infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi, ketersediaan landasan hukum, kebijakan dan tata kelola dalam penerapan e-government di pemerintahan, serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam menggunakan TIK.

3.3. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

Hasil studi menemukan bahwa infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal. Jaringan komputer yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terkoneksi secara tersentralisasi. Setiap OPD memiliki jaringan internetnya sendiri serta mengelola jaringan komputer dengan anggarannya masing-masing. Untuk jaringan lokal (*local area network*), pada umumnya OPD sudah menggunakan *wireless access point* (Wi-Fi), namun pada saat pengumpulan data ditemukan masih ada OPD yang tidak terkoneksi internet. OPD yang tidak memiliki koneksi internet, menurut hasil wawancara, dikarenakan anggaran untuk pembayaran jasa internet yang terbatas. Proses pembuatan surat menyurat ataupun penyimpanan data-data memang sudah menggunakan komputer, namun untuk keperluan pengiriman data masih dilakukan secara manual dengan menyimpan file ke dalam *flashdisk* dan diantar ke instansi yang dituju.

Adapun koneksi internet yang terpasang di sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menggunakan jaringan kabel telepon. Kondisi ini mengakibatkan kecepatan akses internet dirasa cukup lambat terutama ketika jam kerja dimana internet digunakan secara bersamaan. Penggunaan kabel telepon sebagai medium internet di sejumlah OPD dikarenakan di Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki banyak pilihan untuk penyedia layanan internet (*provider*). *Provider* yang tersedia hanya perusahaan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan cakupan jaringan fiber optik yang dimiliki belum cukup luas. Menurut informan, kondisi ini sepertinya dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat dimana internet belum menjadi kebutuhan sehingga segmen pasar pengguna internet masih tergolong rendah. Pada saat pengumpulan data, penggunaan fiber optik sebagai medium koneksi internet hanya dimiliki oleh Sekretariat Daerah (Setda). Lokasi Sekretariat Daerah yang terletak satu gedung dengan Kantor Bupati menjadikan Setda memiliki infrastruktur yang jaringan yang lebih baik dari SKPD lainnya.

3.4. Kesiapan Tata Kelola

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Mandailing Natal adalah belum adanya landasan hukum penerapan TIK dan e-government baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Demikian juga pada aspek perencanaan, Pemerintah kabupaten Mandailing Natal juga belum memiliki perencanaan pengembangan TIK yang resmi dalam bentuk *roadmap*, *blueprint* TIK yang biasanya tertuang dalam rencana strategis. Perencanaan TIK lingkungan pemerintah daerah masih terkotak-kotak dan diserahkan ke masing-masing OPD. Rincian perencanaannya dituangkan dalam rencana kerja anggaran dan kegiatannya ditujukan untuk belanja barang dan pemeliharaan perangkat pengolah data, misalnya komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Landasan hukum sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan e-government organisasi pemerintahan selain sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah. Dalam sejumlah studi dikemukakan bahwa penyiapan landasan hukum menjadi salah satu tantangan dan indikator keberhasilan dalam penerapan e-government (Luna-Reyes, Gil-Garcia, & Romero, 2012; Müller & Skau, 2015). Selain menjadi dasar pelaksanaan, keberadaan aturan hukum juga dibutuhkan agar dapat memastikan keamanan dan perlindungan data pengguna dalam hal ini masyarakat publik yang menggunakan layanan e-government.

3.5. Kesiapan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan layanan publik berbasis elektronik dalam kerangka e-government membutuhkan aparatur yang terlatih dan memiliki literasi TIK yang baik. Memiliki SDM aparatur yang kompeten menjadi salah satu faktor utama keberhasilan implementasi e-government (Anthopoulos, Reddick, Giannakidou, & Mavridis, 2016). Inpres Nomor 3 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Strategi Nasional Pengembangan E-government adalah salah satunya dengan mengembangkan kapasitas SDM. Hal ini menunjukkan pentingnya SDM aparatur pemerintah yang memahami TIK karena bertindak sebagai pengguna sekaligus pemelihara berbagai aplikasi yang digunakan. Tanpa adanya SDM aparatur yang kompeten, kebutuhan akan keterampilan TIK akan beralih kepada pihak ketiga yang tentunya membutuhkan biaya belanja jasa, sehingga bisa dipastikan operasional aplikasi maupun infrastruktur TIK tidak akan bertahan lama. Kompetensi di bidang TIK mencakup kompetensi di bidang managerial dan kompetensi bidang teknis. Kompetensi managerial dibutuhkan sebagai pimpinan organisasi dan pengambil kebijakan, sedangkan kompetensi bidang teknis dibutuhkan sebagai pengguna aplikasi. Namun pada penelitian ini, kompetensi aparatur yang diukur dibatasi hanya pada kompetensi teknis.

Pengukuran pada aspek kemampuan TIK aparatur dinilai dari bagaimana mereka memahami tentang penggunaan komputer, penggunaan perangkat mobile, pengetahuan tentang keamanan informasi, kemampuan mengatasi permasalahan teknis (*troubleshooting*), kemampuan mengkonfigurasi perangkat keras (*hardware*), kemampuan mengkonfigurasi perangkat lunak (*software*), dan kemampuan berbagi pengetahuan dengan orang lain (*knowledge sharing*). Dari survei yang dilakukan diketahui bahwa kemampuan yang paling dikuasai oleh responden adalah menggunakan perangkat mobile, mengoperasikan komputer, dan pemahaman pada aspek keamanan informasi.

Penggunaan perangkat mobile sudah cukup merata di kalangan masyarakat termasuk aparatur pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Temuan ini sejalan dengan data penggunaan TIK di Masyarakat oleh Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa 66% atau lebih dari setengah penduduk Indonesia telah menggunakan perangkat *smartphone*. Dalam data tersebut lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan *smartphone* sangat dominan di kalangan aparatur pemerintah (Kominfo, 2017). Penggunaan perangkat *mobile* termasuk *smartphone* di kalangan pekerja dimanfaatkan untuk menunjang kinerja sehari-hari, misalnya sebagai alat komunikasi, menjadi media untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan dukungan internet, membantu membuat penjadwalan, maupun tempat untuk menyimpan data. Kelebihan perangkat mobile yang relatif kompak dan ringan membuat perangkat ini banyak masyarakat termasuk para karyawan dan pegawai.

Demikian juga penggunaan komputer dan laptop sudah cukup familiar di kalangan pekerja dan aparatur pemerintah. Perangkat ini digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti pengolahan data-data perkantoran, membuat dan mencetak laporan, dan sebagai media komunikasi dengan dukungan jaringan internet. Adapun terkait pemahaman pada aspek keamanan informasi, responden mengakui cukup memahami tindakan untuk mencegah kehilangan atau kebocoran data, misalnya dengan memasang dan melakukan *update* aplikasi antivirus, berhati-hati dalam melakukan *copy-paste* berkas (*file*) menggunakan *flash drive*, serta bagaimana melindungi data-data otentikasi untuk masuk ke dalam aplikasi seperti *username* dan *password*. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah menyadari bahwa perangkat TIK juga rentan terhadap masalah keamanan data-data pribadi ataupun terkena gangguan virus komputer.

Sedangkan kemampuan yang paling lemah menurut responden adalah *troubleshooting*, mengkonfigurasi *software* dan *hardware*. Kondisi ini dikarenakan sebagian besar responden bukan berlatar belakang pendidikan komputer, atau pernah mengenyam pelatihan yang berhubungan dengan komputer. Pada umumnya responden maupun aparatur pada umumnya hanya bertindak sebagai *user* atau pengguna aplikasi, dimana teknis penggunaan beberapa aplikasi perkantoran diperoleh dari bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan singkat yang diselenggarakan oleh instansi

Tabel 1. Kemampuan responden pada terkait TIK

No.	Kemampuan	Rerata (1-5)
1	Mengoperasikan komputer	3.83
2	Menggunakan perangkat <i>mobile</i>	4.00
3	Pengetahuan pada aspek keamanan informasi	3.43
4	Kemampuan <i>troubleshooting</i>	2.87
5	Kemampuan dalam mengkonfigurasi <i>hardware</i>	3.13
6	Kemampuan dalam mengkonfigurasi <i>software</i>	2.90
7	Kemampuan dalam <i>knowledge sharing</i>	3.20

Rentang nilai: 1: Tidak Menguasai ... 5: Sangat Menguasai

lain. Untuk mendapatkan pengetahuan teknis lainnya, beberapa responden mengaku belajar secara otodidak atau mendapatkan pengetahuan dari internet. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan dengan aplikasi maupun perangkat komputer, pada umumnya instansi menggunakan jasa pihak ketiga. Hasil penilaian pada aspek kemampuan SDM responden selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

3.6. Hambatan Pelaksanaan E-Government

Dari hasil survei yang dilaksanakan, beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Mandailing Natal disajikan dalam Tabel 2. Dari sejumlah indikator yang diajukan, tiga hambatan terbesar yang dirasakan oleh responden dalam penerapan e-government adalah kecepatan akses internet yang lambat, anggaran belanja TIK, dan kemampuan TIK masyarakat.

Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data dalam jaringan internet yang melewati medium tertentu. Ukuran kecepatan ini dinotasikan dalam satuan atau *bits per second* (bps). Untuk ukuran bps yang lebih besar, satuan kecepatan ini sering dinotasikan dalam *kilobits per second* (kbps) atau *megabits per second* (Mbps). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kecepatan akses internet yang lambat dirasakan oleh responden dikarenakan koneksi internet yang tersedia di OPD sebagian besar melalui kabel telepon. Internet dengan kabel telepon yang disediakan oleh provider adalah berbasis *Assymetric Digital Subscriber Line* (ADSL) dengan kecepatan 384 kbps hingga maksimum 3 Mbps. Namun kualitas dan kecepatan akses internet dapat menurun dengan drastis apabila internet digunakan secara bersamaan oleh banyak perangkat ataupun ketika pengaruh cuaca.

Hambatan e-government lainnya adalah anggaran belanja TIK yang belum memadai dan kemampuan TIK masyarakat yang masih rendah sebagai pengguna layanan e-government. Terkait persoalan anggaran, sebenarnya hal ini adalah masalah klasik yang sering ditemui dalam implementasi TIK di pemerintahan. Dalam Inpres Nomor 3 tahun 2003 juga telah disebutkan bahwa salah satu kelemahan yang menonjol dalam pemanfaatan TIK di pemerintahan adalah alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pengembangan e-government di masing-masing instansi. Kunci dari masalah anggaran adalah terletak pada kekuatan pimpinan daerah yang harus memperjuangkan inisiatif TIK di daerah. Kepemimpinan dalam konteks pengembangan TIK atau

Tabel 2. Faktor penghambat implementasi e-government menurut responden

No.	Faktor hambatan e-Government	Rerata (1 – 5)
1.	Kurangnya SDM handal	3.63
2.	Kurang sosialisasi	3.77
3.	Aturan yang belum jelas	3.60
4.	Pembangunan TIK belum diprioritaskan	3.67
5.	Kurangnya pengetahuan TIK pimpinan	3.30
6.	Pengelolaan TIK belum terintegrasi	3.59
7.	Kemampuan TIK masyarakat masih rendah	3.87
8.	Anggaran tidak memadai	3.97
9.	Pandangan negatif pelayanan publik	3.23
10.	Kecepatan akses internet lambat	4.23
11.	Pengelolaan TIK oleh pihak ketiga	3.17

Rentang nilai: 1: Sangat Tidak Setuju... 5: Sangat Setuju

e-leadership seringkali menjadi penyebab kegagalan e-government. Telah banyak bukti bahwa keberhasilan e-government di pemerintah daerah sangat ditentukan oleh komitmen Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut. Kasus-kasus berhasilnya penerapan e-government di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Kabupaten Sragen dan Kebumen, atau Kota Surabaya menguatkan bukti bagaimana pentingnya faktor *e-leadership* dalam menentukan keberhasilan e-government (Kumorotomo, 2009).

Responden menilai hambatan lainnya adalah kemampuan TIK masyarakat yang rendah, yang mana hal tersebut mengurangi tingkat akses kepada layanan-layanan e-government yang disediakan. Menurut informan, geliat masyarakat dalam menggunakan TIK di kabupaten Mandailing Natal belum seperti di perkotaan. Pengetahuan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan internet masih tergolong rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi, antara lain infrastruktur jaringan telekomunikasi milik provider yang belum mendukung akses *broadband*, disamping literasi TIK masyarakat yang masih rendah.

3.7. Diskusi

Seperti yang telah diuraikan oleh Pereira et al. (2018) bahwa e-government merupakan landasan yang esensial untuk berevolusi menuju *smart government*, *smart governance*, dan *smart city*. Untuk mewujudkan keberhasilan inisiatif *smart province* yaitu *smart city* pada level provinsi, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan. Di antara beberapa faktor keberhasilan tersebut adalah kesiapan e-government pada aspek infrastruktur, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga hal pokok ini menjadi penting karena merupakan elemen dasar dalam penerapan e-government.

Melihat kondisi kesiapan pemerintah kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan e-government dari ketiga aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa kesiapan pemerintah kabupaten Mandailing Natal dinilai masih lemah, dan belum dapat mendukung program Smart Province Sumatera Utara. *Smart province* membutuhkan integrasi data antara lembaga pemerintah daerah pada level provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dibutuhkan penerapan e-government yang baik pada tingkat pemerintahan di bawahnya.

Melalui penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Rekomendasi pada sisi infrastruktur TIK antara lain:

- Pemerintah Kabupaten perlu memiliki kualitas sambungan ke ISP dengan *bandwidth* yang tinggi.
- Memiliki infrastruktur jaringan *backbone* milik pemda ataupun menyewa kepada provider agar mampu meningkatkan kecepatan transfer data antar OPD.
- Membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah
- Menggunakan teknologi dan aplikasi *mobile* untuk mendukung *smart city*

Pada sisi tata kelola penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

- Menyusun kerangka hukum berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses kinerja pemerintah maupun pelayanan publik.
- Menyusun rencana strategis atau masterplan pembangunan TIK dan e-government untuk perencanaan jangka panjang.
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk elemen publik tentang bagaimana penyusunan aturan hukum dan pelaksanaan sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan

- Merubah dan menyederhanakan proses bisnis organisasi melalui penetapan kebijakan dan regulasi

Adapun pada aspek kapasitas SDM penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

- Menambah jumlah SDM yang menangani TIK melalui perekrutan PNS baru ataupun dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang TIK kepada PNS yang sudah ada.
- Menyertakan program pelatihan SDM dalam rencana strategis pembangunan TIK dan e-government
- Menyediakan tenaga ahli yang siap mendampingi dalam proses e-government

4. PENUTUP

Penerapan *smart province* salah satu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai OPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara dalam rangka memudahkan pimpinan untuk mengambil kebijakan yang tepat dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Penerapan inisiatif *smart province* ini membutuhkan kesiapan e-government dari tingkat kabupaten/kota yang berada di bawahnya, sebab tanpa kesiapan pengelolaan TIK yang baik akan sangat sulit untuk merealisasikan tujuan dari *smart province* itu sendiri.

Dari hasil pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan e-government belum maksimal. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari beberapa aspek kesiapan yang diukur masih belum terpenuhi. Pada aspek tata kelola diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum memiliki landasan hukum dan kebijakan dalam pengembangan TIK maupun perencanaan kedepan dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis. Kemudian dari aspek infrastruktur, koneksi internet ke provider sebagian besar masih menggunakan sambungan kabel telepon. Hanya sekretariat daerah yang telah menggunakan fiber optik sebagai media jaringannya. Kondisi membuat akses internet yang dirasakan responden cukup lambat terlebih ketika pada waktu sibuk dimana internet digunakan secara bersamaan oleh para pegawai. Adapun pada aspek kesiapan SDM aparatur ditemukan bahwa responden sudah cukup familiar dengan penggunaan perangkat-perangkat TIK dan pada aspek keamanan informasi. Titik lemah responden adalah pada hal-hal teknis seperti mengatasi permasalahan (*troubleshooting*) dan melakukan konfigurasi pada hardware dan software. Hal ini menunjukkan bahwa pada sisi SDM telah siap dalam penggunaan perangkat namun masih lemah terkait hal-hal teknis.

Melihat kelemahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk membenahi penerapan e-government. Melalui penelitian ini juga telah dirumuskan beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai bahan perbaikan e-government kedepannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BBPSDMP Kominfo Medan yang telah membiayai penelitian ini, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu pelaksanaan pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Omari, A., & Al-Omari, H. (2006). E-government readiness assessment model. *Journal of Computer Science*, 2(11), 841–845.
- Anthopoulos, L., Reddick, C. G., Giannakidou, I., & Mavridis, N. (2016). Why e-government projects fail?

- An analysis of the Healthcare.gov website. *Government Information Quarterly*, 33(1), 161–173. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.003>
- Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *European Physical Journal: Special Topics*, 214(1), 481–518. <https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3>
- Caragliu, A., Bo, C. Del, & Nijkamp, P. (2009). Smart Cities in Europe Smart Cities in Europe. *Proceedings of the 3rd Central European Conference in Regional Science*, 0732(November), 45–59. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164. <https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210202>
- Gil-garcia, J. R. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, (June 2015). <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>
- Joseph, S. (2014). *Development and validation of a framework for e-government readiness measurement*. Durban University of Technology, Durban.
- Kumorotomo, W. (2009). Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet. Diakses pada November 24, 2018, dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf>
- Luna-Reyes, L. F., Gil-Garcia, J. R., & Romero, G. (2012). Towards a multidimensional model for evaluating electronic government: Proposing a more comprehensive and integrative perspective. *Government Information Quarterly*, 29(3), 324–334. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.001>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mkude, C. G., & Wimmer, M. A. (2013). Strategic framework for designing e-government in developing countries. In *International Conference on Electronic Government* (pp. 148–162).
- Müller, S. D., & Skau, S. A. (2015). Success factors influencing implementation of e-government at different stages of maturity: a literature review. *International Journal of Electronic Governance*, 7(2), 136. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2015.069495>
- Nam, T., & Pardo, T. (2011). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. *Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 185–194. <https://doi.org/10.1145/2072069.2072100>
- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENIATI)*, B27.1-6.
- Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. *Information Polity*, 23(2), 143–162. <https://doi.org/10.3233/IP-170067>
- Putri, N. A. D., & Darmawan, E. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart province). *KEMUDI*, 3(1), 173–192.
- Waheduzzaman, W., & Miah, S. J. (2015). Readiness assessment of e-government: a developing country perspective. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(4), 498–516. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2014-0018>

INDEKS REFERENSI

A

Aaker, 16
Abu-Rumman, 15, 17, 19, 26, 27
Ade, 30, 31, 44
Adim, 51, 64
Adorno, 140
Agus, 98, 99, 100, 102, 103, 104
Aitken, 93, 104, 106
Alberoni, 140, 149
Alekperova, 94, 98, 106
Alguliev, 94, 98, 106
Alhadid, 15, 17, 19, 26, 27
Aliguliyev, 94, 98, 106
Andrejevic, 116
Andrews, 6, 11
Anggi Saputri, 153
Anthopoulos, 191, 195
Ardial, 69, 72, 73
Ardianto, 84, 85, 87
Ardinato, 79
Arif, 31, 43
Atkin, 110, 112, 121, 122
Azizah Dewi, 43
Azwar, 27

B

Bakti, 146, 150
Baldesari, 110, 111, 122
Bamini KPD Balakrishnan, 18
Bandiyah, 124, 137
Baruh, 112, 115, 116, 117, 122
Batty, 187, 195
Berlian Primadani, 19
Bintoro, 46, 53, 63
Bo, 187, 195
Bolívar, 187, 196
Boyd, 112, 113, 119, 121, 122
Bradley, 45
Brandeis, 112
Brennen, 112, 122
Brug, 45
Budi, 125, 126, 127, 137
Bulan, 31, 43
Bungin, 81, 87

C

Caragliu, 187, 195
Carlson, 39, 40
Chen, 112, 113, 114, 122
Chin, 135, 137
Choon Ling, 19
Ciampaglia, 90, 107
Cresswell, 141, 150
Creswell, 95, 98
Croteau, 93, 99, 106

D

D. Edmons, 76
Dai, 76, 87

Damanik, 133, 137, 187, 196
Daniel Iman, 20
Darmawan, 187, 196
Davis, 126, 127
Dayana, 49, 50, 53, 63
Deng, 112, 113, 114, 122
Denzin, 143, 150
Dewi, 29, 31, 124, 137
Dini, 134, 136, 137
Disney Adelia, 18
Doyle, 93, 99, 100, 103, 106
Driessens, 148, 150
Durianto, 159, 165

E

Effendy, 51, 63
Elgesem, 112, 114, 122
Ericson, 4, 5, 11
Erida, 30, 31, 44
Erry Nuradi, 189

F

Fachrezzi, 51, 64
Fadhillah, 60, 61
Fahmi, 91, 92, 106
Falco, 188, 196
Faules, 80, 86, 87
Ferrinadewi, 16, 27
Fetra, 97, 98, 103, 104
Firmansyah, 140, 150
Fisher, 110, 112, 117, 119, 121, 122
Flammini, 90, 107
Formanika, 154, 165
Foss, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87
Francis, 110, 111, 122
Freeman, 93, 106
Frieda, 156, 165
Frith, 112, 115, 122
Fu, 112, 113, 122

G

Gaspersz, 93, 100, 106
Gawi, 173, 184
Gerungan, 4, 11
Giannakidou, 191, 195
Gil-garcia, 188, 191, 196
Given, 67, 68, 73, 74
Graber, 3, 11
Green, 95, 98, 106
Gunawan, 15, 17, 27
Gunelius, 16, 27
Guo, 112, 115, 122

H

Hadati, 52, 64
Hadikusuma, 27
Hall, 74, 155, 165
Hallahan, 157, 165
Hamad, 91, 106

Hamida, 45, 64
Hammond, 110, 122
Handayani, 125, 126, 137
Harahap, 80, 86, 87
Hardi, 31, 43, 44
Harris, 117, 140
Harry Soesanto, 18
Harsono, 125
Haryanto, 168, 176, 184
Hasan, 76, 87
Helmi, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104
Henson, 110, 112, 117, 119, 121, 122
Hernawati, 157, 165
Hillary, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Horkheimer, 142
Hoynes, 93, 99, 106
Huberman, 55, 64, 189, 196
Hussain, 19, 27

I

Iamnitshi, 112, 117, 122
Ibrahim, 144, 150
Idrus, 74, 174, 184
Ihsan, 144, 150
Imran, 153
Iradela, 140
Ismail, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106

J

Jeong, 110, 112, 115, 117, 118, 121, 122
Jonar, 124, 125, 137
Joseph, 186, 196
Judhita, 168, 184
Jupp, 68, 70, 74

K

K, Zainul Arifin, 20
KALELİ, 81, 87
Kanwar, 16, 26, 27
Karman, 168, 184
Kasich's, 6
Kauffman, 157, 165
Kayes, 112, 117, 122
Kellner, 144, 150
Kennedy, 2, 112, 114, 122
Khaliq, 81, 87
Kirk, 158, 165
Kitchin, 112, 115, 122
Kleinhans, 188, 196
Knapp, 155, 165
Koç, 91, 107
Kottler, 140
Kovach, 176, 184
Kristanti, 6, 11
Kumorotomo, 193, 196
Kusumaningrat, 170, 173, 184

L

Laski, 2, 12
Lestari, 124, 137
Lewin, 110, 122

Lexy, 12, 160, 165
Li, 76, 87
Lia, 97, 99, 100, 101, 104
Liang, 112, 113, 122
Libicki, 92, 103, 106
Liliweri, 154, 165
Lincoln, 143, 150
Linda, 52, 64
Littlejohn, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87
Loch, 140
Loia, 110, 112, 115, 117, 118, 121, 122
Long, 3, 12
Luna-Reyes, 191, 196
Lund, 93, 95, 106
Luwarso, 173, 184

M

M. Kholid Mawardi, 20
Macdonald, 92, 103, 106
Malhotra, 71, 74
Marshall, 15
Martono, 69, 74
Masudin, 52, 64
Mau, 76, 87
Mavridis, 191, 195
Mayfield, 16, 27, 163, 165
McArdie, 112, 115, 122
Mcgrath, 71
McLuhan, 15, 22
McQuail, 93, 103, 106
Meijer, 187, 196
Melodie, 77, 87
Menczer, 90, 107
Miah, 187, 196
Miguel, 112, 114, 122
Miles, 55, 56, 64, 189, 196
Milham, 110, 112, 121, 122
Miller, 158, 165
Mochtar, 12, 30
Moenir, 31, 44
Mohd Irwan Dahnil, 18
Moleong, 5, 12, 54, 56, 64, 158, 160, 165
Moores, 157, 165
Mosco, 139, 141, 142, 150
Moss, 156, 165
Mote, 39, 40, 44
Muchardie, 15, 17, 27
Mulyana, 50, 51, 53, 64, 75, 87

N

Najib Razak, 90
Nam, 186, 196
Nasermoadeli, 19
Nasution, 127, 137
Nauman, 69
Neuman, 66, 74
Nida Fadhila, 18
Nijkamp, 187, 195
Novita, Azwar, 18
Nugroho, 186, 196
Nursal, 140, 150

O

O'Leary, 140
Omari, 186, 195

P

Pace, 80, 86, 87
Pangestu Subagyo, 127
Papacharissi, 73, 74
Paranita, 52, 64
Pardo, 186, 196
Park, 110, 112, 115, 117, 118, 121, 122
Parycek, 188, 196
Patton, 56, 70, 72, 74, 159, 160, 165
Pawito, 141, 150
Perbawasari, 169, 184
Pereira, 188, 194, 196
Perry, 110, 122
Peterson, 3, 12
Popescu, 112, 115, 116, 117, 122
Praditya, 92, 102, 106
Prasetyanto, 51, 64
Primeaux, 112, 122
Purwaningsih, 187, 196
Puspitasari, 89, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107
Putri, 19, 27, 141, 150, 187, 196

Q

Quinn, 74, 159, 165

R

Rahim, 30, 44
Rahmayanty, 31, 44
Rathore, 110, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 122
Rauf, 19, 27
Reddick, 191, 195
Reese, 93, 94, 95, 98, 107
Reyns, 110, 112, 117, 119, 121, 122
Rihandoyo, 31, 44
Ritchie, 3, 12
Riza Hadikusuma, 18
Rizal, 27, 97, 99, 100, 101, 102, 104
Rogers, 50, 51
Romero, 191, 196
Rong, 112, 113, 114, 122
Rubbin, 73
Rusadi, 169, 170, 184

S

Sadat, 16, 27
Sæbo, 134, 137
Sahlin, 16, 28
Sambas, 152, 165
Sari, 124, 137
Satria Putri, 19
Schwartz, 39, 40
Selltiz, 71
Selo, 186, 196
Setiana, 52, 64
Severi, 19, 27

Severin, 77, 78, 87
Shabbir, 19, 27
Shaleh, 46, 64
Shama, 140
Shao, 90, 107
Sharma, 110, 112, 115, 117, 118, 121, 122
Shen, 112, 113, 122
Shoemaker, 93, 94, 95, 98, 107
Siebert, 3, 12
Singh, 66, 74
Siregar, 173, 184
Solove, 117
Somad, 156, 157, 165
Sonessa, 81, 86, 87
Sri, 31, 43
Sterne, 16, 27
Stigall, 81, 87
Sugiono, 95, 160
Sugiyanto, 141, 150
Suharyat, 52, 64
Sulastri, 154, 165
Sulisyawati, 51, 64
Surbakti, 172, 184
Suryohadiprojo, 92, 102, 107
Suryokusumo, 92, 107
Susanto, 161, 163
Syafira Putri Kinanti, 19
Syah, 166, 182
Syukril, 31, 44

T

Taankard, 77, 78
Tambotoh, 125, 126, 138
Taprial, 16, 26, 27
Taylor, 158, 160
Tobrani, 140
Trimo, 51, 64
Tristan, 96, 99, 101, 102, 103, 104
Tristan Soemardjono, 96
Tubbs, 156, 165

U

Ulber, 72, 74
Umar, 71, 74

V

Vasilakos, 112, 113, 114, 122
Veby Zilfania Rizal, 18
Vredembregt, 66, 72, 74

W

Waheduzzaman, 187, 196
Wahid, 134, 137, 145, 150
Waluyanto, 51, 64
Waluyo, 167, 168, 184
Wan, 112, 113, 114, 122
Wardani, 153, 165
Wardhani, 76, 87
Warren, 112
Warsono, 31, 43, 44
Wasesa, 76, 87

Wattenberg, 5, 12
Weimann, 90, 107
Wenerda, 144, 150
Wering, 140
West, 28
Widhiastuti, 76, 87
Wijaya, 156, 165
Wilson, 6, 11, 77
Winangsih, 155, 166
Winaya, 136, 138
Wiryanto, 51, 64
Wismayanti, 124, 137
Wolak, 112
Wong Jiunn Yi, 18

Y

Yasinta, 136, 138
Yatanoor, 1, 12
Yavuz, 91, 107
Yenny, 30, 31, 44
Yohanes Bahari, 153
Yohanitas, 134, 135, 137
Yosep, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104
Yudi, 125, 126, 138
Yudiana, 15, 17, 27
Yustisia, 129, 138

Z

Zhang, 112, 113, 114, 122
Zimmerman, 16, 28
Zingarelli, 95, 98, 107
Zuckerberg, 119
Zulfida, 30, 44
Zulqurnain, 19

INDEKS KONSEP

A

Adventif, 152
Afektif, 45, 52, 62, 78
Akseptabilitas, 145
Antipati, 1, 2, 4, 10
Apriori, 73, 76
Asosiatif Kausalitas, 20
Assymetric Digital Subscriber Line, 193

B

Baby Boomers, 129, 137
Bandwidth, 194
Big Data, 100, 109, 110, 115, 116
Brand Association, 16, 18, 19, 23, 25, 26
Brand Awareness, 16, 18, 19, 25, 26
Brand Equity, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26
Brand Loyalty, 15, 16, 17, 18, 19, 25
Brand Recall, 16, 25
Brand Recognition, 16, 25
Broadband, 194

C

Collocation, 34, 39
Command Center, 190
Communication Access Realtime Translation, 152
Computer Self-Efficacy, 125
Contact Center, 190
Crowdsourcing, 13, 14, 25, 26
Cyber-Bullying, 116, 120
Cyber-Stalking, 116

D

Data Center, 102, 118
Data Mining, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121
Demokrasi, 1, 2, 4, 9, 10, 99, 100, 101, 104, 105, 140, 145, 146, 168, 169, 170, 173
Digital Oblivion, 118
Disabilitas, 155, 164
Diskriminasi, 8

E

E-Government, 30, 125, 137, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196
Ekologi Media, 13, 15, 16, 22, 24, 25
Eksklusi, 111, 112
Eksplanatif Asosiatif, 20
Ekuitas, 13, 16
E-Leadership, 193

F

Feasibility Study, 72
Federal, 1, 6, 8

G

Generasi Alpha, 129
Generasi X, 129, 136
Generasi Y, 129, 137
Generasi Z, 129, 137
Global War On Terror, 90
Good Governance, 187

H

Herves Implex, 158
Human Agency, 169

I

Information Warfare, 89, 92, 103, 105, 106
Inklusi, 111, 112
Innovation And Diffusion Theory, 125
Interdepedensi, 9
Intervensi, 7, 49, 182

K

Kaderisasi, 139, 140, 141, 146, 147
Keamanan Pangan, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Kinesthetic, 161
Kognitif, 44, 47, 52, 54, 62, 65, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 171, 176
Komodifikasi, 139, 141, 143, 144, 149, 150
Komodifikasi Media, 139
Komodifikasi Pekerja, 142
Komodifikasi.Ekstrinsik, 142
Komodifikasi.Intrinsik, 142
Komodifikasi.Isi, 142
Komodifikasi.Khalayak, 142
Komunikasi Interpersonal, 45, 59, 62, 63
Komunikasi Nonverbal, 154, 155, 161, 162, 163
Komunikasi Verbal, 76, 151, 153, 154, 155, 161, 162, 163
Konatif, 45, 62, 63
Konsistensi, 32, 35, 42, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 125

L

Local Area Network, 190

M

Media Warfare, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105
Meningitis, 158
Meta-Agregasi, 110, 111
Metadata, 116, 120
Meta-Etnografi, 110
Meta-Sintesis, 109, 110, 111
Metode Auditori, 156
Metode Oral Aural, 156
Metode Rochester, 156
Metode Simultan, 157

Multiplatform, 170, 184

W

O

Otitis Media, 158
Oversharing, 113

Watermarking, 118
Wireless Access Point, 190

P

Paradigma *Postpositivistik*, 171
Parliamentary Threshold, 147
Perceived Ease Of Use, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 136
Perceived Usefulness, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 136
Phishing, 116, 120
Pragmatis, 68, 141, 144, 146
Prematuritas, 158
Provider, 15, 17, 27, 132, 191, 193, 194, 195

Q

Quick Win, 124, 133

R

Reformasi, 145, 167, 168, 170, 174, 181
Represif, 169
Research Design, 70, 71
Reseptif, 153
Rubella German Measles, 158

S

Sinematografi, 143
Smart City, 122, 124, 133, 186
Smart Governance, 133, 188, 194
Smart Province, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 195
Sosio-Kultural, 1
Sosio-Politik, 11
Spamming, 116, 120
Spear Phishing, 118
Steganalysis, 118
Steganografi, 116, 120
Stimulus-Organism-Response, 51
Strukturasi, 169, 171
Supremasi, 91

T

Technology Acceptance Model, 123, 124, 125, 126, 127, 137
Teknik Triangulasi, 56
Teori Akuisisi Keterampilan, 78
Teori Keterampilan Komunikasi, 78
Teori Kompetensi Komunikasi, 77
Teori *New Media*, 103
Teori Konsistensi Kognitif, 78
Toximinia, 158
Tunarungu, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Vote Getter, 140

Panduan Penulisan Naskah Jurnal Studi Komunikasi dan Media

Template naskah dapat diunduh di
https://k-cloud.kominfo.go.id/s/JSKM_template/download

Jurnal Studi Komunikasi dan Media (JSKM) adalah media ilmiah yang berisi artikel hasil penelitian dan kajian pada **bidang komunikasi, media, dan informatika**. JSKM diterbitkan oleh Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Jakarta, Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Proses pengajuan naskah hanya dilakukan melalui portal e-jurnal JSKM yang dapat diakses melalui halaman web <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/>. Berikut adalah ketentuan penulisan naskah artikel dalam JSKM.

1. Format Naskah

Jurnal Studi Komunikasi dan Media (JSKM) menerima naskah artikel dalam **Bahasa Indonesia** atau **Bahasa Inggris**. Jumlah halaman naskah yang diperbolehkan berkisar antara **10 – 20 halaman**. Naskah ditulis dalam format Microsoft Word (.doc / .docx) atau Open Document Text (.odt) dalam **ukuran kertas A4**. Layout naskah menggunakan satu kolom, font yang digunakan pada bagian utama naskah adalah **Times New Roman, ukuran 11 Pts**, dengan pengaturan jarak spasi antar baris sebesar 1,15.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah dalam JSKM adalah sebagai berikut:

1. Judul
2. Penulis & Afiliasi
3. Abstrak
4. Kata kunci
5. PENDAHULUAN
6. METODE PENELITIAN
7. HASIL DAN PEMBAHASAN
8. PENUTUP
9. Ucapan Terima kasih
10. Daftar Pustaka

3. Judul

Judul ditulis dalam dua bahasa: **Indonesia dan Inggris**. Panjang judul tidak lebih dari tiga baris. Tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, ditulis menggunakan bahasa yang tegas, informatif, dan harus mencerminkan inti tulisan. Diperbolehkan menambahkan sub judul dan ditulis di dalam tanda kurung.

4. Penulis dan Afiliasi

Nama penulis dituliskan tanpa gelar. Apabila terdapat lebih dari satu penulis, setiap nama penulis dibubuhkan urutan angka dalam format *superscript*. Penulisan afiliasi (institusi asal) terdiri atas **nama organisasi, alamat organisasi, dan negara**, serta diupayakan maksimum 2 (dua) baris. Penulisan alamat email dituliskan di bawah afiliasi, dan disarankan menggunakan alamat email organisasi.

Contoh:

Naskah dengan satu orang penulis:

Dedek Sudibyo

Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo DKI Jakarta – Balitbang SDM Kemkominfo
Jl. Pegangsaan Timur 19B Jakarta Pusat, Indonesia
dedek.sudibyo@kominfo.go.id

Naskah dengan lebih dari satu orang penulis:

Dedek Sudibyo¹, Mark Anthoni², Helen Simatupang³

¹ Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo DKI Jakarta – Balitbang SDM Kemkominfo
Jl. Pegangsaan Timur 19B Jakarta Pusat, Indonesia

^{2,3} Pusat Penelitian Aptika & IKP - Balitbang SDM Kemkominfo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, Indonesia

¹dedek.sudibyo@kominfo.go.id; ²mark.anthoni@kominfo.go.id; ³helen.simatupang@kominfo.go.id

5. Abstrak

Abstrak disajikan dalam dua bahasa: **Inggris dan Indonesia**. Abstrak terdiri dari **100 - 200 kata** dan ditulis tanpa paragraf. Abstrak harus menguraikan latar belakang permasalahan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak sebaiknya diakhiri dengan uraian mengenai implikasi penelitian dan kesimpulan ringkas.

6. Kata kunci

Kata kunci disajikan dalam dua bahasa: **Inggris dan Indonesia**. Kata kunci terdiri atas **3 – 5 kata/frase**, dan bukan kata-kata yang bersifat umum.

7. PENDAHULUAN

PENDAHULUAN berisi latar belakang permasalahan dan isu-isu terkait masalah penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Uraian dalam PENDAHULUAN dapat diperkuat dengan menambahkan subbab yang berisi tentang landasan teoretis/konsep yang mendukung maupun penelitian-penelitian terdahulu untuk menggambarkan *state-of-the-art* dari artikel.

8. METODE PENELITIAN

Bagian METODE PENELITIAN menjelaskan cara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Metode yang digunakan harus berupa metode ilmiah baik melalui studi literatur, observasi, survei, wawancara, focus group discussion (FGD), pengujian sistem, simulasi ataupun teknik lainnya yang lazim digunakan dalam dunia penelitian. Di dalam METODE PENELITIAN juga perlu menjelaskan mengenai lokasi penelitian, jumlah sampel, populasi, metode sampling, teknik pengolahan data, metode analisis, serta *tools* dan aplikasi yang digunakan dalam melakukan simulasi, pengolahan data dan analisis.

9. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian HASIL DAN PEMBAHASAN memaparkan **data-data hasil/temuan penelitian** yang dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel, gambar/grafik, atau diagram. Pemaparan data harus diikuti dengan uraian **pembahasan/diskusi**, yang berisi analisis, telaah, atau interpretasi terhadap data-data hasil penelitian. Bagian pembahasan/diskusi setidaknya memuat **40% dari keseluruhan naskah**.

10. PENUTUP

Bagian PENUTUP berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi dan ditulis tanpa menggunakan penomoran. Pemaparan kesimpulan dan saran/rekomendasi cukup dipisahkan oleh paragraf, tidak dalam bentuk subbagian.

11. Ucapan terima kasih

Penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian.

12. Daftar Pustaka dan teknik sitasi (pengutipan)

Pustaka yang dicantumkan setidaknya memuat **80% sumber primer** (artikel jurnal, prosiding, atau hasil penelitian) dalam **5 (lima) tahun terakhir**. Penulisan daftar pustaka dan sitasi menggunakan **APA Style** dan disarankan menggunakan **aplikasi Mendeley sebagai reference manager**. Pengutipan yang bersumber dari situs web harus dapat dipercaya kebenarannya, dan tidak diperkenankan menggunakan sumber dari Wikipedia atau blog pribadi.

Contoh penulisan daftar pustaka:

Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. *International Journal of Information Management*, 37(2), 92–97. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.11.006>

[Contoh bersumber dari Jurnal]

Bicking, M., & Wimmer, M. A. (2010). Tools and Technologies in eParticipation: Insights from Project Evaluation. In F. De Cindio, A. Macintosh, & C. Peraboni (Eds.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Online Deliberation* (pp. 75–86). Leeds, UK.

[Contoh bersumber dari Prosiding]

Moleong, L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

[Contoh bersumber dari Buku]

Wahid, F., & Sæbø, Ø. (2014). Understanding eParticipation Services in Indonesian Local Government. In *Second IFIP TC5/8 International Conference* (pp. 328–337). Springer.

[Contoh bersumber dari bunga rampai]

Ikhwan, M. (2013). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Studi kasus: Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar)* (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

[Contoh bersumber dari Laporan/Thesis/Disertasi]

Rustandy, T. (2006). Tekan Korupsi Bangun Bangsa. Retrieved January 14, 2007, from <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyd=1291>

[Contoh bersumber dari Website]

13. Struktur Heading

Penulisan struktur *Heading* naskah adalah sebagai berikut:

1. Heading 1

1.1. Heading 2

a) Heading 3

14. Tabel dan Gambar

Seluruh elemen gambar (gambar, judul, dan sumber) disajikan dengan rata tengah (*center justification*). Judul gambar dituliskan di bawah gambar dengan font TNR 9pts. Gambar/grafik yang dikutip dari sumber lain harus mencantumkan sumbernya setelah pencantuman gambar.

Contoh:



Sumber: Kemkominfo (2013) (TNR, 8pts)

Gambar 1. Distribution of BTS Development (2010-2012) (TNR, 9 pts, Spacing-Before: 6pts)

Dalam penyajian tabel, seluruh elemen tabel (tabel, judul tabel, dan sumber) disajikan dengan rata tengah (*center justification*), dan dibuat tanpa garis vertikal. Judul tabel dituliskan di atas tabel menggunakan font TNR 9pts, sedangkan isi tabel ditulis dengan font TNR dengan ukuran 8 – 10 pts sesuai dengan kebutuhan. Penulisan sumber diletakkan di bawah tabel.

Contoh:

Tabel 1. Contoh penyajian tabel (TNR, 9 pts, Spacing-After: 6pts)

College	Total Students		Change
	New students	Graduating students	
	<i>Undergraduate</i>		
Pine College	134	121	+13
Oak Institute	202	210	-8
Total	998	908	90

Sumber: Fictitious data, for illustration purposes only (TNR, 8pts)

15. Penggunaan kata-kata asing

Penulisan setiap kata-kata asing menggunakan *italic*. Apabila memungkinkan, penggunaan kata-kata asing agar dialihartikan ke dalam bahasa Indonesia.

Contoh: *online* → daring;

correlation → korelasi.

Redaksi Jurnal Studi Komunikasi dan Media mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan mutu Jurnal Studi Komunikasi dan Media ini. Para Mitra Bestari dimaksud yaitu :

1. Dr. Udi Rusadi, M.S. (IISIP Jakarta)
2. Dr. R.M. Agung Harimurti, M.Kom (Badan Litbang SDM Kemkominfo)
3. Dr. Halomoan Harahap, M.Si (Universitas Esa Unggul Jakarta)
4. Eko Nugroho, S.Sos, M.Si (Universitas Negeri Jakarta)

Kelanjutan kesediaan para Mitra Bestari untuk tetap berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas Jurnal Studi Komunikasi dan Media melalui edisi-edisi berikutnya, tentu menjadi pengharapan besar Dewan Redaksi Jurnal Studi Komunikasi dan Media.

Nomor ID : 1417747767

Tanggal permohonan : Jumat, 5 Desember 2014

Nama terbitan : Jurnal Studi Komunikasi dan Media (e-Journal)

Sinopsis : Jurnal Studi Komunikasi dan Media adalah Jurnal yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap, Komunikasi dan Media pada Bidang Ilmu Jurnalistik, perpustakaan dan Kurator.

Pengelola : Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi
» <http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm>

Kontak : Drs. Hasyim Ali Imran, M.Si.
Jalan Pegangsaan Timur 19 B, Menteng Jakarta Pusat. 10230
» Tel / fax : (021) 31922337 / (021) 31922337

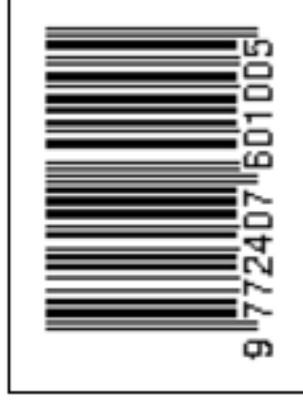
Penerbit : Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
» <http://jurnal.kominfo.go.id/jskm>

Frekwensi terbitan : 6 bulanan

Nomor ISSN : 2407-6015 (media online)

Keterangan : » Kategori umum

» SK no. 0005.092/JI.3.2/SK.ISSN/2014.12 - 9 Desember 2014 (mulai edisi Vol. 18, No. 2, Des. 2014)



» Sampul depan [203.322 bita]